



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan. Laporan keuangan SKPD tersebut kemudian dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

Laporan keuangan disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP memberikan dua pilihan basis akuntansi, yakni (1) Basis Akrua, atau (2) Basis Kas Menuju Akrua. Basis Kas Menuju Akrua boleh diterapkan paling lambat sampai dengan tahun anggaran 2014 sedangkan Basis Akrua wajib diterapkan mulai tahun anggaran 2015. Pada tahun anggaran 2015, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mulai menerapkan SAP Berbasis Akrua.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2020 pada hakikatnya merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan antara lain:

1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam



pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan tingkat ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

4. Keseimbangan antar generasi

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2020 yang disusun berdasarkan SAP Berbasis AkruaI terdiri atas:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode laporan.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Neraca, yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu
4. Laporan Operasional (LO), yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
5. Laporan Arus Kas (LAK), yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan dan aktivitas transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pada periode tertentu
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang berisi penjelasan naratif atas informasi kuantitatif yang bersifat moneter yang disajikan pada LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. LKPD terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Melalui LKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, para pengguna laporan diharapkan dapat memperoleh informasi untuk menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. LKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan memuat informasi mengenai:



1. informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
2. informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
3. informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. informasi mengenai informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

### **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851).
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
- c. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
- d. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022).
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027).



- g. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028).
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693).
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5).
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2020.
- n. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Persetujuan Penyempurnaan dan Penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Perubahan APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2020, berdasarkan atas Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0648/KUM/2020.
- o. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 91 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- p. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 0176 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- q. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



- r. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Masa Manfaat dan Penyusunan Barang Milik Daerah.
- s. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 50 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan TA 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I**           Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- Bab II**           Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD, menjelaskan tentang Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan.
- Bab III**          Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- Bab IV**          Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.
- Bab V**           Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos laporan keuangan mengenai komponen LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas.
- Bab VI**          Penjelasan atas Informasi Non Keuangan, menjelaskan informasi mengenai kinerja perusahaan daerah, pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari non APBD, dan kewajiban kontinjensi.
- Bab VII**         Penutup.



## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

#### **2.1 Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

##### **2.1.1 Dasar Hukum Pembentukan Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan salah satu Kabupaten yang ada di dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai daerah otonom secara nyata terbentuk pada tanggal 2 Desember 1950 yakni saat dilantiknya Pejabat Bupati Kepala Daerah Pertama dan dibentuknya DPRDS, maka pada tanggal 2 Desember 1950 inilah menjadi pancangan tonggak sejarah berdiri Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang kemudian dikukuhkan dengan ketetapan DPRD Tingkat II Hulu Sungai Selatan pada tanggal 26 Maret 1987 Nomor 06/KPTS/DPRD-HSS/1987 tentang Persetujuan Ketetapan Hari Jadi Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

##### **2.1.2 Letak Geografis dan Topografi**

Kabupaten Hulu Sungai Selatan terletak antara 114°51'19" BT – 115°36'19" BT dan antara 02°29'58" LS – 02°56'10" LS. Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah salah satu Kabupaten dari 13 (tiga belas) kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak ke arah Utara ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan dengan jarak tempuh 135 Km. Wilayahnya berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Hulu Sungai Tengah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapin.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banjar, Tanah Bumbu dan Kota Baru.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin.

Kabupaten yang beribukota di Kandangan ini memiliki 11 (sebelas) Kecamatan yaitu: Kecamatan Padang Batung, Loksado, Telaga Langsat, Angkinang, Kandangan, Sungai Raya, Simpung, Kalumpang, Daha Selatan, Daha Utara dan Daha Barat.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki luas wilayah 1.804,92 km<sup>2</sup> atau 180.494 hektar. Lebih dari separuh wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berada di kelas ketinggian 0-7 meter dan di kemiringan 0-2 persen. Menurut kelas ketinggian dari permukaan laut 58,3 persen wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berada pada ketinggian 0-7 meter dan hanya 0,9 persen berada pada ketinggian di atas 1.000 meter. Berdasarkan kemiringannya 70,95 persen wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berada pada kelas kemiringan 0-2 persen. Sedangkan 6,99 persen wilayah



berada pada kemiringan lebih dari 40 persen. Pemerintah Kabupaten HSS didirikan pada 4 Juli 1959 berdasarkan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang – undang dengan ibukota Kandangan.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai dengan tahun 2020, jumlah penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebanyak 235.392 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 120.824 jiwa dan perempuan 119.723 jiwa. Daerah ini merupakan daerah rawa, sebagian besar penduduk bermata-pencaharian sebagai petani dan nelayan.

### **2.1.3 Visi dan Misi**

Visi Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023 adalah “Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat” dengan Misi:

1. Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar.
2. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal (daya saing).
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan sosial yang menunjang sektor perekonomian (kesenjangan).
4. Mengoptimalkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan (pemberdayaan).
5. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis (kelembagaan, keagamaan)

### **2.1.4 Organisasi dan Personalia**

Organisasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditetapkan dengan beberapa Peraturan Daerah :

1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten HSS.
2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten HSS Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten HSS;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



4. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kecamatan dan Kelurahan.

Pembentukan dan susunan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 terbagi menjadi 3 fungsi yaitu:

1. Fungsi pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan sebagai berikut:
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Sekretariat DPRD;
  - c. Inspektorat.
2. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah dengan susunan sebagai berikut:
  - a. Dinas Pendidikan.
  - b. Dinas Kesehatan.
  - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
  - d. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
  - e. Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik.
  - f. Satuan Polisi Pamong Praja.
  - g. Dinas Sosial.
  - h. Dinas Ketahanan Pangan.
  - i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
  - j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
  - k. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
  - l. Dinas Perhubungan.
  - m. Dinas Komunikasi, Informatika.
  - n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  - o. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
  - p. Dinas Perikanan.



- q. Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata.
  - r. Dinas Pertanian.
  - s. Dinas Perdagangan.
  - t. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian.
3. Fungsi penunjang pemerintahan daerah dengan susunan sebagai berikut:
- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - b. Badan Keuangan Daerah; dan
  - c. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan.

Pembentukan perangkat daerah yang bersifat kewilayahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2016 terdiri atas 11 Kecamatan sebagai berikut:

- a. Kecamatan Kandangan;
- b. Kecamatan Sungai Raya;
- c. Kecamatan Simpur;
- d. Kecamatan Kalumpang;
- e. Kecamatan Angkinang;
- f. Kecamatan Telaga Langsat;
- g. Kecamatan Padang Batung;
- h. Kecamatan Loksado;
- i. Kecamatan Daha Utara;
- j. Kecamatan Daha Selatan; dan
- k. Kecamatan Daha Barat.

Kecamatan Kandangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2016 terdiri atas 4 kelurahan sebagai berikut:

- a. Kelurahan Kandangan Kota;
- b. Kelurahan Kandangan Utara;
- c. Kelurahan Kandangan Barat;
- d. Kelurahan Jambu Hilir.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati periode 2019-2023 dijabat oleh Drs. H. Achmad Fikry, M. AP dan Wakil Bupati Syamsuri Arsyad, S.AP.



### **2.1.5 Ekonomi Makro**

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2020 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang meliputi:

- a. Tingkat Kemiskinan Kab.HSS tahun 2020 sebesar 5,17%
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. HSS tahun 2020 sebesar 2,24%
- c. Gini Ratio Kab.HSS Tahun 2019 sebesar 0,29 (tahun 2020 belum publish).
- d. Indeks Pembangunan Manusia Kab. HSS tahun 2020 sebesar 68,85.
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab. HSS Tahun 2020 sebesar -1,19%.
- f. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 sebesar 6.565.197,44.

#### **2.1.5.1 Tingkat Kemiskinan**

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Penduduk miskin Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 12,39 ribu orang atau sekitar 5,17 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibandingkan tahun 2019 sebesar 12,64 ribu orang atau 5,33 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ini kondisi pencacahan pada maret 2020 yang pada saat itu penyebaran covid 19 masih belum banyak berdampak pada sektor perekonomian pada bulan maret 2020 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Berkurangnya penduduk miskin



di Kabupaten Hulu Sungai Selatan di dukung dengan banyaknya realisasi program-program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan di antaranya Program Rumah Sejahtera (Bedah Rumah), Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Program Subsidi Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin/Ranstra), dan program-program pendukung penanggulangan Kemiskinan lainnya.

**Grafik 2.1 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016-2020 (%)**



Sumber: BPS Kab. HSS

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Pada tahun 2020, indeks kedalaman kemiskinan sebesar 0,51. Perubahan angka indeks ini cukup fluktuatif. Jika dibandingkan tahun 2019 angka ini mengalami penurunan. Nilai P1 yang semakin rendah menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin dekat. Diharapkan dengan nilai P1 yang semakin kecil, penduduk miskin yang mendekati garis kemiskinan dapat terangkat dari kondisi miskin.

**Grafik 2.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016-2020**



Sumber : BPS Kab. HSS



Indeks keparahan kemiskinan (P2) menggambarkan sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami penurunan pada tahun 2020 (0,09) dibandingkan tahun 2019 (0,15). Hal ini menggambarkan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin pada tahun 2020 dibanding tahun 2019 berkurang walaupun masih ada ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

**Grafik 2.3 Indeks Keparahkan Kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016-2020**

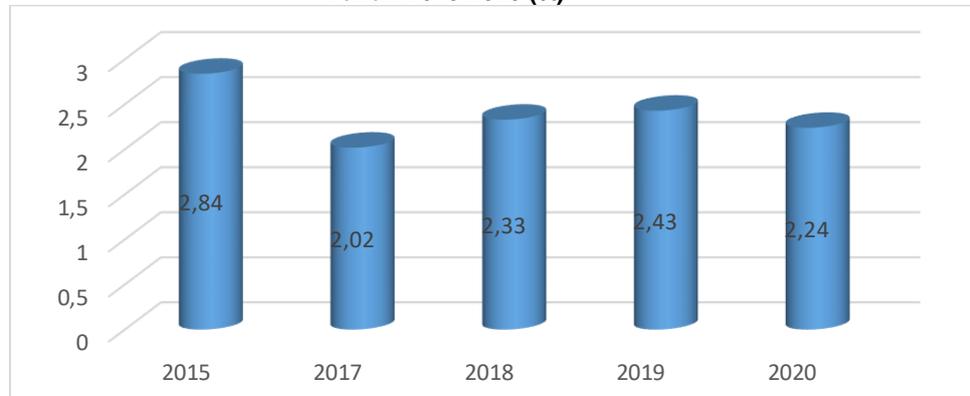


Sumber : BPS Kab. HSS

#### 2.1.5.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

**Grafik 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015-2020 (%)**



Sumber : BPS Kab. HSS



**Tabel.2.1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Hulu Sungai Selatan  
Tahun 2019-2020**

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/Turun (%)
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%) HSS	2,43	2,24	(0,19)
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%) Kalsel	4,74	4,18	(0,56)
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	7,07	5,23	(1,84)

Sumber Dokumen: BPS Kab. HSS

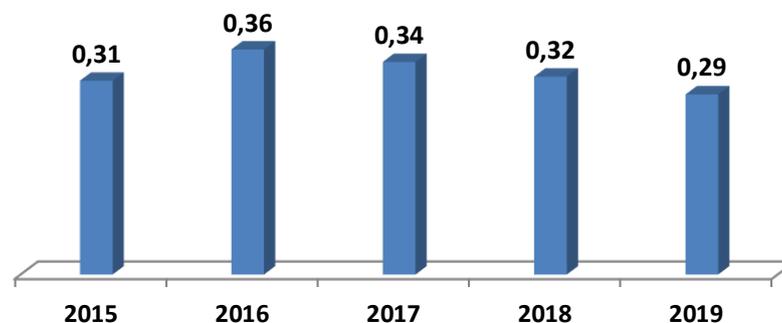
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 2,24%, sedangkan TPT pada Tahun 2019 adalah sebesar 2,43% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2019. Namun demikian TPT Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi Kalimantan Selatan dan TPT Nasional yang sebesar 4,18% dan sebesar 5,23%.

### 2.1.5.3 Indeks Gini (Gini Ratio)

Indek Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana :

- Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama.
- Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

**Grafik 2.5 Gini Ratio Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015-2019**



Sumber : Diolah dari Susenas 2015-2019, BPS Kab. HSS



Nilai dari indeks Gini berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin rendah, sebaliknya mendekati 1 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin tinggi. Jika rasio lebih dari 0,5, maka terjadi ketimpangan yang cukup tajam dan serius, dan jika rasio berkisar 0,30 – 0,49 maka distribusi pendapatan relatif merata. Olah data Susenas menunjukkan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2019 gini rasionya sebesar 0,29. Hal ini berarti bahwa distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan relatif merata. Besaran Indeks Gini Ratio relatif mengalami penurunan pada tahun 2019 (0,29) dibandingkan tahun 2018 (0,32) dan dalam 5 tahun terakhir gini ratio Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2019 merupakan gini ratio terendah. Hal ini menggambarkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan makin menurun dalam 4 tahun terakhir.

#### 2.1.5.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu :

- Rendah ( $< 60$ )
- Sedang ( $60 \leq \text{IPM} < 70$ )
- Tinggi ( $70 \leq \text{IPM} < 80$ )
- Sangat Tinggi ( $> 80$ )

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 adalah sebesar 68,80 poin dengan kategori sangat sedang sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel.2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia**

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2019	Tahun 2020	Naik/turun (%)
1	Kabupaten/Kota HSS	68,80	68,85	0,05
2	Provinsi Kal-Sel	70,91	70,72	(0,19)
3	Indonesia/Nasional	71,94	71,92	(0,02)

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 adalah sebesar 68,85 poin, dibandingkan Tahun 2019 sebesar 68,80 poin mengalami kenaikan sebesar 0,05 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Umur harapan hidup bayi yang lahir tahun 2020



diharapkan mencapai 65,97 tahun pada Tahun 2020, lebih lama 0,15 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 7,75 tahun dengan harapan lama sekolah 12,17 tahun. Sementara, Standar Hidup, Pengeluaran per kapita yang disesuaikan per tahun sebesar Rp12.835.000,00 atau menurun Rp163.000,00 dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini merupakan salah satu dampak covid 19 yang memukul sektor ekonomi dan pengeluaran masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

#### 2.1.5.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

**Tabel 2.1.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

No	Uraian	Kabupaten/Kota HSS ( juta rupiah)			Provinsi (juta rupiah)	Nasional (Milyar Rupiah)
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2020	Tahun 2020
1	PDRB (harga konstan 2010)	4.470.253,88	4.707.048,23	4.651.199,33	133.317.865,77	10.722.442,70
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) HSS	6,14	5,30	-1,19	4,08	-2,07

Sumber: BPS Kab. HSS

Selama kurun waktu Tahun 2018-2019 perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami peningkatan/ rata-rata sebesar 6,14%. Pada Tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar 5,30% mengalami perlambatan pertumbuhan dibanding tahun 2018 (6,14%). Akan tetapi pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar -1,19%. Pada tahun 2020 pandemi covid 19 telah berlangsung dan memukul kegiatan perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Indonesia. Tahun 2020 dalam skala Provinsi laju pertumbuhan Kabupaten Hulu Sungai Selatan menempati urutan 4 kota atau kabupaten lain tertinggi dalam wilayah Provinsi Kalsel.

#### 2.1.5.6 Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat.



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*). Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Menurut data dari BPS, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak ada mengeluarkan angka tingkat inflasi.

#### 2.1.5.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Struktur perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.1.4 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Dalam Jutaan Rupiah)**

Kategori	Lapangan Usaha	2020	2019	2018	2017	2016
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.632.989,08	1.618.361,54	1.547.520,82	1.449.492,52	1.401.374,54
B	Pertambangan dan Penggalian	636.529,76	678.420,45	664.395,50	559.926,06	451.991,14
C	Industri Pengolahan	512.712,13	525.265,72	499.534,57	474.451,03	426.751,92
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5.683,44	5.295,12	4.945,92	4.368,11	3.722,67
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	24.745,40	22.717,86	21.105,21	19.355,75	18.244,02
F	Konstruksi	512.702,36	528.065,45	487.544,94	447.639,84	415.316,60
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	614.055,78	618.142,24	570.031,61	520.951,97	474.471,75
H	Transportasi dan Pergudangan	339.911,81	342.715,65	317.520,73	293.358,10	266.735,83
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	251.488,56	250.451,37	225.072,19	203.871,27	185.947,53
J	Informasi dan Komunikasi	322.177,52	297.247,91	268.646,65	246.347,89	222.272,02
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	131.014,15	130.111,73	122.934,29	114.305,99	105.833,55
L	Real Estat	169.776,43	158.101,33	145.592,08	135.761,24	126.923,99
M,N	Jasa Perusahaan	8.307,20	8.214,87	7.576,41	6.991,26	6.333,70
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	611.110,30	612.712,07	571.515,96	530.464,66	504.509,60
P	Jasa Pendidikan	508.588,99	501.234,44	462.703,86	428.798,53	392.334,15
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	161.827,18	145.881,55	133.236,00	120.835,52	108.295,28



Kategori	Lapangan Usaha	2020	2019	2018	2017	2016
R,S,T,U	Jasa lainnya	121.576,76	120.464,48	108.369,94	98.414,58	87.494,22
	<b>PDRB</b>	<b>6.565.197,44</b>	<b>6.563.403,79</b>	<b>6.158.256,68</b>	<b>5.655.334,31</b>	<b>5.198.552,51</b>

Sumber: BPS Kab. HSS

## 2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Daerah mengacu pada dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang merupakan kesepakatan bersama antara Bupati Hulu Sungai Selatan dengan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kebijakan keuangan mencakup kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Berikut uraian kebijakan keuangan tersebut.

### 2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut:

#### 1. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berpedoman pada undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dilarang menganggarkan pajak daerah dan retribusi daerah yang peraturan daerahnya bertentangan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan/atau telah dibatalkan.
- Kebijakan penganggaran tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
- Rasionalitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya, dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal (investasi daerah).
- Pendapatan yang diperoleh dari bagian laba bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang layanannya belum mencapai 80% dari jumlah penduduk yang menjadi cakupan pelayanan PDAM dianggarkan sebagai hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, selanjutnya diinvestasikan kembali untuk penambahan, peningkatan, perluasan sarana prasarana dan sarana penyediaan air minum, baik fisik maupun non fisik serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan tersebut dianggarkan untuk tambahan penyertaan modal kepada PDAM sesuai peraturan perundang-undangan.



## **2. Kebijakan Dana Perimbangan**

- a. Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2019.
- b. Perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) mempertimbangkan besaran alokasi DBH yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Tahun Anggaran 2020, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga hasil produksi minyak/gas/pertambangan lainnya tahun 2020 dan/atau tidak tercapainya hasil produksi minyak/gas/pertambangan lainnya tahun 2020, serta memperhatikan realisasi DBH Tahun Anggaran 2019.

## **3. Kebijakan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**

- a. Target pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari bagi hasil yang diterima dari pemerintah provinsi, didasarkan pada alokasi bagi hasil Tahun Anggaran 2019, sedangkan bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2019, ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
- b. Penetapan target penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya atau sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD pada kelompok Pendapatan Lain-Lain Daerah Yang Sah, setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud.

### **2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah**

Kebijakan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari:

#### **1. Belanja Tidak Langsung**

- a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai diprediksikan untuk Tahun Anggaran 2020 mengalami kenaikan, hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, mutasi dan penambahan PNSD yang telah disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai.

- b. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Belanja hibah dan bantuan sosial dilakukan secara lebih selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan dibatasi dan diperjelas format pertanggungjawabannya, pemberian hibah dan bantuan sosial ini diberikan untuk pendukung fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah seperti TMMD dan KPUD, semi pemerintah seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI dan PKK dan masyarakat serta organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.



c. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil diprediksikan untuk Tahun Anggaran 2020 tetap memperhatikan pada realisasi target Tahun Anggaran 2019 dengan penyesuaian rencana pendapatan Tahun Anggaran 2019.

**2. Belanja Langsung**

- a. Menghindari pemborosan dengan melaksanakan kegiatan berdasarkan prioritas program kegiatan yang telah ditentukan dan berdasarkan analisa beban kerja serta kewajaran biaya yang dikaitkan dengan outputnya.
- b. Proporsi belanja modal lebih besar dari pada belanja pegawai dan belanja barang dan jasa dan dilakukan secara selektif serta proporsional.
- c. Penganggaran honorarium bagi PNSD dan non PNSD dibatasi sesuai tingkat kewajaran dan beban tugas.
- d. Segala bentuk biaya pelatihan dan perjalanan dinas dilakukan untuk kegiatan yang benar-benar penting dan dilakukan secara selektif.

**2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Kebijakan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri atas:

**1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan**

Struktur anggaran setelah pendapatan dan belanja daerah adalah pembiayaan daerah. Pembiayaan terjadi karena adanya surplus dan defisit anggaran daerah. Pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan dialokasikan jika terjadi defisit anggaran yang berfungsi untuk menutup selisih kurang anggaran. Adapun sumber penerimaan pembiayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun anggaran 2019 bersumber dari:

- a. Penggunaan sisa lebih anggaran tahun lalu (SiLPA);
- b. Penerimaan kembali pinjaman daerah.

**2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan dialokasikan jika terjadi surplus anggaran untuk memanfaatkan sisa lebih anggaran. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak mengalokasikan anggaran untuk pengeluaran pembiayaan selama Tahun 2020.



### BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

#### 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

##### 3.1.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020

Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran (TA) 2020 secara ringkas disajikan pada Tabel 3.1.1 berikut ini.

**Tabel 3.1.1 Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2020**

	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Surplus Penerimaan / Sisa Pengeluaran (Rp)
<b>I</b>	<b>Pendapatan dan Belanja</b>			
	Pendapatan	1.275.504.067.026,00	1.353.819.885.219,86	78.315.818.193,86
	Belanja dan Trasfer	1.550.764.980.271,00	1.326.747.578.187,02	(224.017.402.083,98)
	<b>Surplus (defisit)</b>	<b>(275.260.913.245,00)</b>	<b>27.072.307.032,84</b>	<b>302.333.220.277,84</b>
<b>II</b>	<b>Pembiayaan</b>			
	Penerimaan Pembiayaan	275.260.913.245,00	275.280.367.245,44	19.454.000,44
	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>275.260.913.245,00</b>	<b>275.280.367.245,44</b>	<b>19.454.000,44</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran</b>	<b>0,00</b>	<b>302.352.674.278,28</b>	<b>302.352.674.278,28</b>

Berdasarkan tabel 3.1.1 di atas, dapat dijelaskan bahwa:

1. Realisasi Pendapatan TA 2020 sebesar Rp1.353.819.885.219,86 lebih besar Rp78.315.818.193,86 atau 6,14% dibandingkan anggaran sebesar Rp1.275.504.067.026,00.
2. Realisasi Belanja dan Transfer TA 2020 sebesar Rp1.326.747.578.187,02 lebih rendah Rp224.017.402.083,98 atau 14,45% dibandingkan anggaran sebesar Rp1.550.764.980.271,00.
3. Pada realisasi APBD TA 2020 terdapat surplus sebesar Rp27.072.307.032,84. Sedangkan pada pembiayaan terdapat Pembiayaan Netto sebesar Rp275.280.367.245,44 sehingga terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp302.352.674.278,28.

SiLPA TA 2020 berasal dari pelampauan target pendapatan sebesar Rp78.315.818.193,86 atau 6,14%; efisiensi anggaran Belanja dan Transfer sebesar Rp224.017.402.083,98 atau 14,45% dan over target Pembiayaan Netto sebesar Rp19.454.000,44 atau 0,01%.

##### 3.1.2 Perbandingan Realisasi TA 2020 dan 2019

Perbandingan realisasi TA 2020 dengan TA 2019 disajikan pada Tabel 3.1.2. Berdasarkan Tabel 3.1.2 tersebut, nampak bahwa:

1. Pendapatan TA 2020 turun sebesar Rp140.397.537.818,95 atau 9,40%.



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

2. Belanja dan Transfer TA 2020 turun sebesar Rp79.530.660.539,73 atau 5,66%.
3. Pembiayaan Neto naik sebesar Rp87.958.638.312,06 atau 46,96% sedangkan SiLPA naik sebesar Rp27.091.761.032,84 atau 9,84%.

**Tabel 3.1.2 Perbandingan Realisasi TA 2020 dan TA 2019**

		Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	TA.2020 - TA.2019 (Rp)	%
<b>I</b>	<b>Pendapatan dan Belanja</b>				
	Pendapatan	1.353.819.885.219,86	1.494.217.423.038,81	(140.397.537.818,95)	(9,40)
	Belanja dan Transfer	1.326.747.578.187,02	1.406.278.238.726,75	(79.530.660.539,73)	(5,66)
	<b>Surplus (defisit)</b>	<b>27.072.307.032,84</b>	<b>87.939.184.312,06</b>	<b>(60.866.877.279,22)</b>	<b>(69,21)</b>
<b>II</b>	<b>Pembiayaan</b>				
	Penerimaan Pembiayaan	275.280.367.245,44	187.321.728.933,38	87.958.638.312,06	46,96
	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>275.280.367.245,44</b>	<b>187.321.728.933,38</b>	<b>87.958.638.312,06</b>	<b>46,96</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran</b>	<b>302.352.674.278,28</b>	<b>275.260.913.245,44</b>	<b>27.091.761.032,84</b>	<b>9,84</b>

**3.1.3 Ikhtisar Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan TA 2020**

Realisasi Belanja dan Transfer TA 2020 sebesar Rp1.326.747.578.187,02 terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp716.495.353.696,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp610.252.224.491,02. Belanja Tidak Langsung digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan serta belanja tidak terduga.

Realisasi Belanja Langsung dilaksanakan melalui 33 fungsi, 205 program, dan 640 kegiatan pada 49 SKPD. Ikhtisar realisasi Belanja Langsung untuk pelaksanaan fungsi, program, dan kegiatan disajikan pada Tabel 3.1.3.

**Tabel 3.1.3 Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA 2020 berdasarkan Fungsi, Program, Kegiatan, dan Belanja**

No	Fungsi	Jumlah Program		Jumlah Kegiatan		Belanja (Rp)		
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	%
1	Pendidikan	10	10	61	54	61.645.414.237,00	59.096.932.147,00	95,87
2	Kesehatan	15	14	58	47	311.096.131.638,00	288.178.813.158,75	92,63
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	12	40	32	116.780.721.798,00	111.731.293.275,00	95,68
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	7	7	22	20	28.489.559.450,00	27.348.789.721,00	96,00
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	11	10	29	26	10.198.840.000,00	9.457.329.186,35	92,73
6	Sosial	8	8	25	23	10.811.626.800,00	9.249.851.217,00	85,55
7	Tenaga Kerja	2	2	7	3	106.049.000,00	101.009.000,00	95,25
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4	4	4	4	157.232.400,00	117.438.650,00	74,69
9	Pangan	6	6	19	16	1.501.895.725,00	1.441.507.705,00	95,98
10	Lingkungan Hidup	2	2	11	8	6.527.165.200,00	5.146.204.541,00	78,84



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

No	Fungsi	Jumlah Program		Jumlah Kegiatan		Belanja (Rp)		
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	%
11	Administrasi Kependudukan dan Capil	6	6	17	16	1.138.141.775,00	1.048.130.933,00	92,09
12	Pemberdayaan Masyarakat Desa	7	6	20	15	1.015.148.150,00	743.666.378,00	73,26
13	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6	6	25	24	5.079.709.230,00	3.905.256.072,00	76,88
14	Perhubungan	6	5	19	15	2.373.914.300,00	2.153.897.877,00	90,73
15	Komunikasi dan Informatika	6	6	17	16	5.524.050.457,00	5.196.870.227,00	94,08
16	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6	6	19	17	728.663.682,00	692.086.279,00	94,98
17	Penanaman Modal	6	6	16	15	1.675.692.650,00	1.482.050.351,00	88,44
18	Kepemudaan dan Olah Raga	7	6	19	15	2.381.851.750,00	2.117.519.936,00	88,90
19	Persandian	1	1	1	1	53.063.500,00	47.413.500,00	89,35
20	Kebudayaan	1	1	11	10	1.456.564.000,00	1.211.349.183,00	83,16
21	Perpustakaan	4	4	16	14	4.684.540.725,00	4.580.592.867,00	97,78
22	Kearsipan	1	1	3	2	126.264.400,00	122.514.400,00	97,03
23	Kelautan dan Perikanan	8	6	19	16	2.710.184.890,00	2.571.475.493,00	94,88
24	Pariwisata	2	2	9	8	4.756.706.400,00	4.597.538.249,00	96,65
25	Pertanian	10	10	37	32	4.998.645.420,00	4.398.059.809,00	87,99
26	Perdagangan	7	7	23	21	6.403.580.925,00	5.728.190.699,00	89,45
27	Perindustrian	2	2	5	5	2.382.181.500,00	2.113.223.100,00	88,71
28	Administrasi Pemerintahan	20	20	84	79	58.250.176.704,00	47.284.909.831,92	81,18
29	Pengawasan	4	4	12	10	602.871.616,00	478.670.580,00	79,40
30	Perencanaan	8	7	24	22	1.672.663.400,00	1.379.765.003,00	82,49
31	Keuangan	10	10	38	33	4.875.274.970,00	3.840.235.097,00	78,77
32	Kepegawaian	7	7	20	18	3.100.089.390,00	2.508.835.025,00	80,93
33	Penelitian dan Pengembangan	1	1	3	3	194.200.000,00	180.805.000,00	93,10
	<b>Total</b>	<b>213</b>	<b>205</b>	<b>733</b>	<b>640</b>	<b>663.498.816.082,00</b>	<b>610.252.224.491,02</b>	<b>91,97</b>

### 3.1.4 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dengan menggunakan total realisasi pendapatan dan realisasi belanja dan transfer sebagai tolak ukur *persentase*, jumlah masing-masing perbandingan untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2020 sebesar Rp202.425.507.513,86 atau sebesar 14,95% dari keseluruhan realisasi Pendapatan sebesar Rp1.353.819.885.219,86;
- Realisasi Pendapatan Transfer TA 2020 sebesar Rp1.126.819.545.005,00 atau sebesar 83,23% dari keseluruhan realisasi Pendapatan sebesar Rp1.353.819.885.219,86;
- Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2020 sebesar Rp24.574.832.701,00 atau sebesar 1,82% dari keseluruhan realisasi Pendapatan sebesar Rp1.353.819.885.219,86;



- d. Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 sebesar Rp468.226.677.267,00 atau sebesar 35,29% dari total realisasi Belanja dan Transfer sebesar Rp1.326.747.578.187,02;
- e. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2020 sebesar Rp385.945.661.462,75 atau sebesar 29,09% dari total realisasi Belanja dan Transfer sebesar Rp1.326.747.578.187,02;
- f. Realisasi Belanja Hibah TA 2020 sebesar Rp27.917.073.003,00 atau sebesar 2,10% dari total realisasi Belanja dan Transfer sebesar Rp1.326.747.578.187,02;
- g. Realisasi Belanja Bansos TA 2020 sebesar Rp24.221.010.756,00 atau sebesar 1,83% dari total realisasi Belanja dan Transfer sebesar Rp1.326.747.578.187,02;
- h. Realisasi Belanja Modal TA 2020 sebesar Rp202.599.536.825,27 atau sebesar 15,27% dari total realisasi Belanja dan Transfer sebesar Rp1.326.747.578.187,02;
- i. Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2020 sebesar Rp22.165.472.553,00 atau sebesar 1,67% dari total realisasi Belanja dan Transfer sebesar Rp1.326.747.578.187,02;
- j. Realisasi Belanja Transfer TA 2020 sebesar Rp195.672.146.320,00 atau sebesar 14,75% dari total realisasi Belanja dan Transfer sebesar Rp1.326.747.578.187,02.

Belanja dan Transfer TA 2020 terealisasi 99,16% dibandingkan dengan anggarannya. Tidak tercapainya target Belanja TA 2020 merupakan akibat dari efisiensi anggaran pada tiap-tiap pos belanja serta *refocussing* anggaran untuk pendanaan Covid-19.



## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12) yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku entitas akuntansi, dengan rincian sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1.1

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. SKPD di Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi dinas, badan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kantor, kecamatan, dan kelurahan.

**Tabel 4.1.1 Entitas Akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

No	Kode	Nama SKPD
1	1.01.1	Dinas Pendidikan
2	1.02.1	Dinas Kesehatan
3	1.02.2	RSUD H. Hasan Basry
4	1.03.1	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5	1.04.1	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
6	1.05.1	Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik
7	1.05.2	Satuan Polisi Pamong Praja
8	1.06.1	Dinas Sosial
9	2.03.1	Dinas Ketahanan Pangan
10	2.06.1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11	2.07.1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12	2.08.1	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13	2.09.1	Dinas Perhubungan
14	2.10.1	Dinas Komunikasi dan Informatika
15	2.11.1	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian
16	2.12.1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
17	2.13.1	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
18	2.17.1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
19	3.01.1	Dinas Perikanan
20	3.03.1	Dinas Pertanian
21	3.06.1	Dinas Perdagangan
22	4.01.1	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
23	4.01.2	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

No	Kode	Nama SKPD
24	4.01.3	Sekretariat Daerah
25	4.01.3.2	Bagian Pemerintahan
26	4.01.3.3	Bagian Hukum dan Perundang-undangan
27	4.01.3.4	Bagian Kesejahteraan Rakyat
28	4.01.3.5	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
29	4.01.3.6	Bagian Protokol dan Kehumasan
30	4.01.3.7	Bagian Umum
31	4.01.3.8	Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah
32	4.01.3.9	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Tata Usaha
33	4.01.4	Sekretariat DPRD
34	4.01.7	Kecamatan Kandangan
35	4.01.7.2	Kelurahan Kandangan Kota
36	4.01.7.3	Kelurahan Kandangan Utara
37	4.01.7.4	Kelurahan Kandangan Barat
38	4.01.7.5	Kelurahan Jambu Hilir
39	4.01.8	Kecamatan Padang Batung
40	4.01.9	Kecamatan Loksado
41	4.01.10	Kecamatan Sungai Raya
42	4.01.11	Kecamatan Simpur
43	4.01.12	Kecamatan Kalumpang
44	4.01.13	Kecamatan Angkinang
45	4.01.14	Kecamatan Telaga Langsat
46	4.01.15	Kecamatan Daha Utara
47	4.01.16	Kecamatan Daha Selatan
48	4.01.17	Kecamatan Daha Barat
49	4.02.1	Inspektorat Kabupaten
50	4.03.1	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
51	4.04.5	Badan Keuangan Daerah
52	4.05.18	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Di samping entitas akuntansi berupa SKPD sebagaimana tersebut di atas, terdapat pula entitas akuntansi berupa unit kerja pada SKPD. Entitas akuntansi berupa unit kerja pada SKPD tersebut adalah unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Unit kerja pada SKPD yang menerapkan BLUD yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend H. Hasan Basry. Selain itu terdapat pula unit kerja sebagai Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan yang mengelola anggaran JKN yang sebagian bukan merupakan entitas akuntansi karena belum berstatus sebagai Badan Layanan Umum, sebagian lagi sudah bersatus BLUD namun belum menjalankan fungsi BLUD secara penuh yaitu Rumah Sakit Daha Sejahtera, Puskesmas Kandangan, dan Puskesmas Negara, sehingga masih berada di bawah



Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Adapun nama-nama UPT Dinas Kesehatan, diuraikan dalam Tabel 4.1.2 berikut:

**Tabel 4.1.2 UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

No	Kode	Nama SKPD
1.	1.02.1.2	Puskesmas Kandangan
2.	1.02.1.3	Puskesmas Gambah
3.	1.02.1.4	Puskesmas Jambu Hilir
4.	1.02.1.5	Puskesmas Sungai Raya
5.	1.02.1.6	Puskesmas Batang Kulur
6.	1.02.1.7	Puskesmas Angkinang
7.	1.02.1.8	Puskesmas Bamban
8.	1.02.1.9	Puskesmas Telaga Langsung
9.	1.02.1.10	Puskesmas Kaliring
10.	1.02.1.11	Puskesmas Padang Batung
11.	1.02.1.12	Puskesmas Loksado
12.	1.02.1.13	Puskesmas Malinau
13.	1.02.1.14	Puskesmas Wasah
14.	1.02.1.15	Puskesmas Simpur
15.	1.02.1.16	Puskesmas Kalumpang
16.	1.02.1.17	Puskesmas Bayanan
17.	1.02.1.18	Puskesmas Negara
18.	1.02.1.19	Puskesmas Pasungkan
19.	1.02.1.20	Puskesmas Bajayau
20.	1.02.1.21	Puskesmas Sungai Pinang
21.	1.02.1.22	Puskesmas Baruh Jaya
22.	1.02.1.23	RS. Pratama Daha Sejahtera

#### 4.2 Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menerapkan akuntansi berbasis akrual yang telah dimulai pada Tahun Anggaran 2015 hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Dimana pada Pasal 10 Ayat (2) dinyatakan bahwa penerapan SAP berbasis akrual pada Pemerintah Daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015. Kebijakan akuntansi untuk penerapan basis akuntansi secara akrual tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Beberapa bagian penting dari kebijakan akuntansi basis akrual yang diatur dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan diuraikan sebagai berikut.



### 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban.

#### 4.3.1 Pengukuran Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

##### 1. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Aset lancar diakui sebagai berikut:

- a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- c. Piutang dicatat berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yakni mengurangi nilai piutang dengan penyisihan piutang tidak tertagih;
- d. Persediaan dicatat sebesar:
  - 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
  - 2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
- e. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih beredar (*outstanding*).

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang, jenis piutang, serta mempertimbangkan keberadaan agunan dan barang sitaan. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut:



**Tabel 4.1.3 Kualitas Umur Piutang**

No.	Kategori Piutang	Piutang Pajak		Piutang Retribusi	
		% penyisihan piutang	Jatuh Tempo	% penyisihan piutang	Jatuh Tempo
1.	Lancar	0,50%	Kurang 1 tahun	0,50%	Kurang 1 bulan
2.	Kurang Lancar	10%	1 s/d 3 tahun	10%	1 s/d 3 bulan
3.	Diragukan	50%	2 s/d 5 tahun	50%	3 s/d 12 bulan
4.	Macet	100%	5 tahun lebih	100%	1 tahun lebih

## 2. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka panjang terdiri atas Investasi Permanen dan Investasi Non Permanen.

### a. Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan dan diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu.

### b. Investasi non permanen pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berupa pengelolaan dana bergulir kepada kelompok masyarakat, untuk ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu dan kemudian disalurkan kembali.

#### **Penilaian**

Investasi dalam bentuk dana bergulir kepada kelompok masyarakat dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah saldo investasi dalam bentuk dana bergulir kepada kelompok masyarakat setelah dikurangi penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih yang ditentukan berdasarkan umur dana bergulir yaitu sejak jatuh tempo atas kewajiban yang harus dipenuhi oleh kelompok masyarakat

#### **Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih**

Penyisihan dana bergulir tidak tertagih dihitung berdasarkan persentase tertentu dari saldo dana bergulir yang telah diklasifikasikan berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan dana bergulir, sebagai berikut:

**Tabel 4.1.4 Penyisihan Investasi Non Permanen Penggaduhan Sapi**

No.	Umur Sejak Jatuh Tempo	% penyisihan dana bergulir	Kategori
1.	Kurang dari 1 bulan	5%	Lancar
2.	1 s/d 3 bulan	10%	Kurang Lancar
3.	3 s/d 12 bulan	50%	Diragukan



No.	Umur Sejak Jatuh Tempo	% penyisihan dana bergulir	Kategori
4.	Lebih dari 12 bulan	100%	Macet

c. Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Permanen pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berupa penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Lainnya dan Investasi Permanen Lainnya.

***Pengakuan***

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria:

1. kemungkinan manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah
2. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

***Penilaian***

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan metode sebagai berikut:

a. Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Metode ini diterapkan untuk kepemilikan kurang dari 20%.

b. Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Metode ini diterapkan untuk: (1) kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas; dan (2) kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

Investasi Permanen Lainnya adalah investasi jangka panjang lainnya yang tidak termasuk ke dalam kategori Penyertaan Modal Pemerintah. Contoh investasi permanen lainnya adalah Pinjaman kepada BUMD, Lembaga



Lainnya dan Dana Abadi. Investasi ini dicatat sebesar harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperolehnya.

### **3. Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai selatan telah menerapkan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap (*minimum capitalization threshold*), yakni batasan jumlah biaya tertentu yang digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap terdiri atas pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, renovasi, dan restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diatur sebagai berikut:

- a. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk per satuan Peralatan dan Mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Seluruh aset tetap berupa Tanah dan Aset Tetap Lainnya seperti barang bercorak budaya/ kesenian, hewan, ternak, tanaman, buku-buku perpustakaan, dan aset tetap lainnya dikapitalisasi menjadi aset tetap tanpa melihat nilai satuan minimum atas perolehan aset tetap tersebut.
- c. Nilai satuan minimum kapitalisasi untuk pemeliharaan Gedung dan Bangunan sama dengan atau melebihi dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- d. Nilai satuan minimum kapitalisasi untuk pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan berapapun nilai perolehannya seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan (sesuai Bultek 15 Tahun 2014 halaman 26).

### **4. Aset Lainnya**

Aset Lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lainnya.

Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

### **5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan dalam Neraca sebagai pengurang nilai Aset Tetap dan disajikan secara akumulasi. Metode penyusutan yang



dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Untuk perhitungan penyusutan, dihitung secara bulanan yaitu pada saat perolehan aset tetap. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 tentang Masa Manfaat dan Penyusutan Barang Milik Daerah.

#### **4.3.2 Pengukuran Kewajiban**

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

##### **1. Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

##### **2. Kewajiban Jangka Panjang**

Utang jangka panjang merupakan utang yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal laporan keuangan.

#### **4.3.3 Ekuitas Dana**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dan utang Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ekuitas dicatat sebesar nilai transaksi. Ekuitas dinilai sebesar nilai ekuitas awal ditambah/dikurangi surplus/defisit dari laporan operasional dan ditambah dengan koreksi ekuitas.

#### **4.3.4 Pengukuran Pendapatan – LRA**

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LRA diakui dan diukur pada saat:

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.



- e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- f. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah neto-nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- g. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- h. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

#### **4.3.5 Pengukuran Belanja – LRA**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui dan diukur pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- d. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
- e. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Adapun Klasifikasi Belanja yang digunakan:

##### **1. Belanja Operasi**

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai (belanja langsung maupun belanja tidak langsung), belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.

##### **2. Belanja Modal**

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal antara lain belanja untuk pengadaan tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.



### 3. Belanja Tidak Terduga

Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

#### 4.3.6 Pengukuran Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diakui :

- a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
- c. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

#### 4.3.7 Pengukuran Pendapatan – LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
- b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengukuran Pendapatan-LO:

- a. Pengukuran Pendapatan Asli Daerah–LO diukur sesuai jumlah hak pemerintah daerah atas pendapatan tersebut yang dilakukan berdasarkan azas bruto dan tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya untuk mendapatkannya.
- b. Pengukuran Pendapatan Transfer – LO dilakukan berdasarkan jumlah yang diterima di RKUD.
- c. Pengukuran Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO dilakukan sebesar jumlah nominal yang diterima di RKUD.



- d. Pendapatan Non Operasional – LO diukur dengan azas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut sejumlah nilai nominal hak yang diterima.
- e. Pendapatan Luar Biasa – LO diukur berdasarkan azas bruto atau tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut dan diukur berdasarkan jumlah nominal atas pendapatan tersebut.
- f. Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban.

#### **4.3.8 Pengukuran Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan Beban:

- a. Saat timbulnya kewajiban

Beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban.

- b. Saat terjadinya konsumsi aset

Beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

- c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Pengukuran Beban:

- a. Pengukuran Beban Operasi berdasarkan jumlah nominal beban yang timbul. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
- b. Beban Transfer diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasikan. Beban transfer diukur dengan mata uang rupiah.
- c. Beban Non Operasional diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasikan. Beban Non Operasional diukur dengan mata uang rupiah.



- d. Beban Luar Biasa diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasikan. Beban Luar Biasa diukur dengan mata uang rupiah.

#### **4.3.9 Pengukuran Laporan Arus Kas (LAK)**

Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Laporan Arus Kas disusun dengan menggunakan metode langsung yaitu mencatat transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan berdasarkan realisasi anggaran pos-pos yang bersangkutan secara langsung dalam satu tahun periode laporan, yang meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar pada masing-masing kelompok sesuai dengan aktivitas arus kas serta kenaikan atau (penurunan) bersih kas selama periode. Urusan kas dan perhitungan dilaporkan sebagai Perhitungan Fihak Ketiga (PFK).

#### **4.3.10 Pengukuran Laporan Saldo Perubahan Anggaran Lebih (LP-SAL)**

Laporan saldo anggaran lebih menyajikan informasi mengenai penggunaan saldo SiLPA atau SiKPA pada tahun pelaporan dibanding tahun sebelumnya. Kebijakan akuntansi Laporan Saldo Anggaran Lebih (SAL) lebih hanya disajikan oleh entitas pemerintah (Pemerintah Daerah). SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu periode pelaporan. Saldo Anggaran Lebih adalah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian yang diperkenankan.

#### **4.3.11 Pengukuran Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**

Pelaporan perubahan ekuitas adalah untuk memberikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibanding dengan tahun sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas baik berasal dari dampak kumulatif atau koreksi kesalahan dan ekuitas akhir.

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang merupakan Ekuitas Awal ditambah dengan surplus/defisit-LO dikurangi koreksi ekuitas.

#### **4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)**

Sehubungan dengan penerapan Kebijakan Akuntansi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, maka mulai Tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, serta menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



#### **4.4.1 Pengakuan Pendapatan-LRA**

Berkaitan dengan pengakuan belanja, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada paragraf 21 menyatakan bahwa Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Pengakuan pendapatan pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah oleh KSAP diinterpretasikan dalam Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 2 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Kas Umum Negara/Daerah, bahwa pendapatan tersebut termasuk “Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD.”

Dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Kas Umum Daerah, sedangkan pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah, tidak diakui sebagai Pendapatan-LRA.

#### **4.4.2 Pengakuan Belanja**

Berkaitan dengan pengakuan belanja, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada paragraf 31 dan 32 menyatakan sebagai berikut:

31. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
32. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Untuk memenuhi ketentuan paragraf 31 tersebut di atas, belanja yang pembayarannya diajukan melalui Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) diakui pada saat diterbitkannya SP2D atas SPM LS tersebut.

Sedangkan pelaksanaan ketentuan paragraf 32, untuk pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran melalui bendahara pengeluaran dilakukan sebagai berikut:

- a. Kuasa BUD menerbitkan SP2D Ganti Uang (GU) sebagai perintah pencairan dana sekaligus sebagai bentuk pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran Uang Persediaan (UP) yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Sedangkan pada akhir tahun diterbitkan SP2D Nihil sebagai pengesahan atas penggunaan UP pada akhir tahun.
- b. Kuasa BUD menerbitkan SP2D Nihil atas pengeluaran melalui Tambah Uang (TU) sebagai pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran dana TU.
- c. Khusus untuk RSUD H. Hasan Basry yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan dengan Badan Layanan Umum (BLU), pengesahan belanja mengacu



pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

#### **4.4.3 Metode Penilaian Investasi**

PSAP No. 06 tentang Akuntansi Investasi pada paragraf 33 dan 34 mengatur metode penilaian yang digunakan pada investasi pemerintah, yakni: (a) investasi pemerintah dengan kepemilikan kurang dari 20% dinilai dengan menggunakan metode biaya; (b) investasi pemerintah dengan kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetap memiliki pengaruh yang signifikan dinilai menggunakan metode ekuitas; dan (c) investasi pemerintah dengan kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

Untuk memenuhi standar sebagaimana tersebut di atas, pada laporan keuangan tahun 2016 investasi pada PDAM Kabupaten Hulu Sungai Selatan, BPR Kandangan, BKK disajikan berdasarkan metode ekuitas sedangkan investasi pada PT. Bank Kalsel disajikan berdasarkan metode biaya.

Dalam penerapan metode ekuitas tersebut, digunakan pendekatan konservatif dan neto. Konservatif, artinya kenaikan nilai investasi didasarkan pada ekuitas perusahaan yang dapat dipastikan menambah ekuitas Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Neto, yakni Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak mencatat setiap mutasi yang menyangkut ekuitas perusahaan yang berpengaruh terhadap catatan nilai investasi pada pembukuan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pembukuan pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan hanya mencatat kenaikan atau penurunan bersih nilai investasi pada masing-masing perusahaan.



## BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

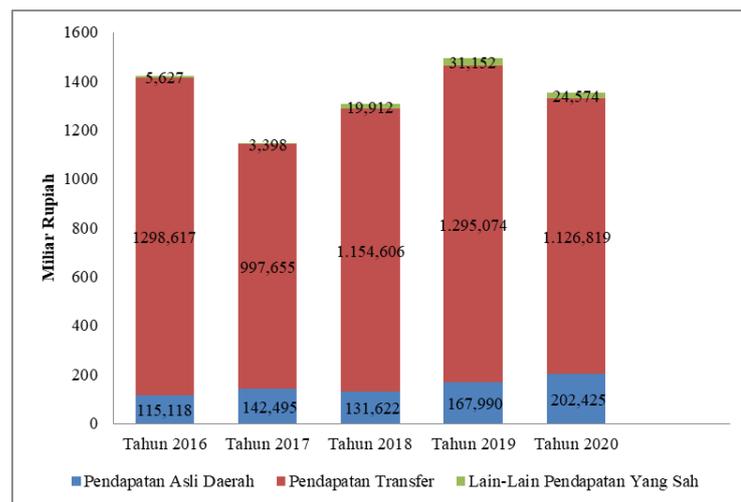
Rincian dan penjelasan masing-masing pos dalam Laporan Keuangan.

### 5.1 Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Pendapatan TA 2020 terealisasi sebesar Rp1.353.819.885.219,86 atau mencapai 106,14% dari target APBD Perubahan TA 2020 sebesar Rp1.275.504.067.026,00. Pendapatan Daerah TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp140.397.537.818,95 atau 9,40% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp1.494.217.423.038,81. Penurunan di seluruh sektor pendapatan terjadi akibat adanya pandemi Covid-19.

Perbedaan realisasi pendapatan TA 2020 dengan TA 2019 antara lain disebabkan naiknya Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp34.434.856.019,05 atau 20,50% dari realisasi PAD TA 2019. Selain itu dipengaruhi oleh turunnya realisasi yang cukup signifikan pada Pendapatan Transfer sebesar Rp168.254.919.864,00 atau 12,99% dari realisasi Pendapatan Transfer TA 2019; dan turunnya realisasi Pendapatan Hibah pada pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp6.577.473.974,00 atau 21,11% dari realisasi TA 2019 yang disebabkan oleh tidak adanya lagi Pendapatan Hibah dari Pemerintah seperti tahun sebelumnya dan penurunan pendapatan dari setoran SP3 (sumbangan pihak ke 3 dari masyarakat).

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2020 berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp202.425.507.513,86; Pendapatan Transfer sebesar Rp1.126.819.545.005,00; dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp24.574.832.701,00. Perkembangan realisasi Pendapatan sejak TA 2016 terlihat pada Grafik 5.1.



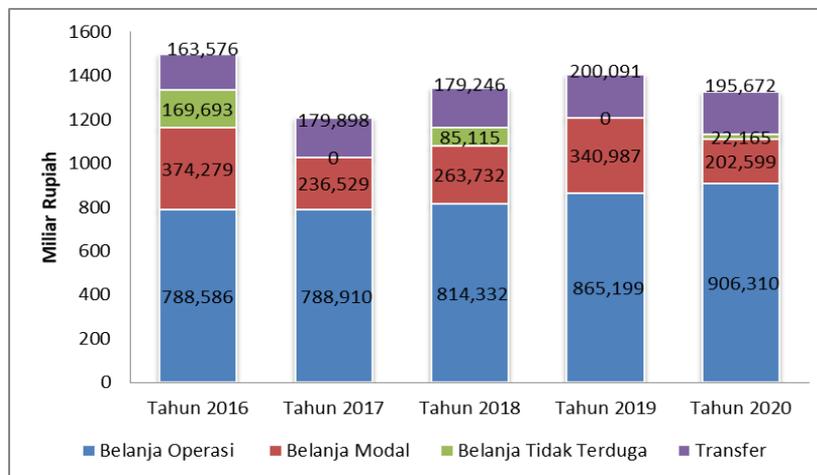
**Grafik 5.1: Perkembangan Realisasi Pendapatan TA 2016 - 2020**

Belanja TA 2020 terealisasi sebesar Rp1.131.075.431.867,02 atau sebesar 83,57% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp1.353.436.622.271,00. Belanja TA 2020 turun sebesar Rp75.111.600.761,73 atau



6,23% dari realisasi TA 2019 sebesar Rp1.206.187.032.628,75. Penurunan belanja disebabkan adanya kebijakan *refocussing* anggaran untuk penanganan Covid-19. Realisasi Belanja terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp906.310.422.488,75; Belanja Modal sebesar Rp202.599.536.825,27; dan Belanja Tak Terduga sebesar Rp22.165.472.553,00.

Transfer pada TA 2020 terealisasi sebesar Rp195.672.146.320,00 atau 99,16% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan TA 2020 sebesar Rp197.328.358.000,00. Transfer TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp4.419.059.778,00 atau 2,21% jika dibandingkan dengan TA 2019 sebesar Rp200.091.206.098,00. Perkembangan realisasi Belanja dan Transfer sejak TA 2016 terlihat pada Grafik 5.2.



**Grafik 5.2: Perkembangan Realisasi Belanja TA 2016 - 2020**

Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp1.353.819.885.219,86 dan realisasi Belanja Daerah sebesar Rp1.131.075.431.867,02 serta Transfer sebesar Rp195.672.146.320,00 maka terdapat surplus anggaran sebelum pembiayaan pada TA 2020 sebesar Rp27.072.307.032,84. Sementara itu, realisasi Pembiayaan (Neto) pada TA 2020 adalah sebesar Rp275.280.367.245,44 yang berasal dari Penerimaan Pembiayaan. Defisit anggaran sebelum pembiayaan dan realisasi Pembiayaan Neto membentuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2020 sebesar Rp302.352.674.278,28.

Laporan realisasi anggaran terdiri atas akun pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan. Uraian selengkapnya masing-masing akun laporan realisasi anggaran dijelaskan pada bagian berikut ini.

### 5.1.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan TA 2020 adalah sebesar Rp1.353.819.885.219,86 yang berarti mencapai 106,14% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp1.275.504.067.026,00. Pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.



Perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam TA 2020 serta realisasi TA 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.1 Pendapatan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

Pendapatan	Tahun 2020		Tahun 2019 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pendapatan Asli Daerah	195.079.436.026,00	202.425.507.513,86	167.990.651.494,81
Pendapatan Transfer	1.052.385.439.000,00	1.126.819.545.005,00	1.295.074.464.869,00
Lain-lain Pendapatan yang Sah	28.039.192.000,00	24.574.832.701,00	31.152.306.675,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.275.504.067.026,00</b>	<b>1.353.819.885.219,86</b>	<b>1.494.217.423.038,81</b>

#### 5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Realisasi PAD pada TA 2020 adalah sebesar Rp202.425.507.513,86 yang berarti mencapai 103,77% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp195.079.436.026,00. PAD terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

Perbandingan realisasi PAD dengan anggaran TA 2020 serta realisasi TA 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.2 Rincian Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah	Tahun 2020		Tahun 2019 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pendapatan Pajak Daerah	10.680.856.000,00	12.046.129.929,00	14.412.031.504,00
Pendapatan Retribusi Daerah	7.820.369.000,00	8.461.009.994,00	15.116.946.827,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.815.000.000,00	4.801.193.114,00	3.149.352.464,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	169.763.211.026,00	177.117.174.476,86	135.312.320.699,81
<b>Jumlah</b>	<b>195.079.436.026,00</b>	<b>202.425.507.513,86</b>	<b>167.990.651.494,81</b>

#### 5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dikelola oleh Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA).

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2020 sebesar Rp12.046.129.929,00 atau mencapai 112,78% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp10.680.856.000,00. Hal ini berarti realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2020 lebih rendah Rp2.365.901.575,00 atau 16,42% dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp14.412.031.504,00. Perbandingan realisasi Pajak Daerah dengan anggaran TA 2020 serta realisasi TA 2019 adalah sebagai berikut:



**Tabel 5.1.3 Rincian Pendapatan Pajak Daerah**

Pendapatan Pajak Daerah	Tahun 2020		Tahun 2019 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pajak Hotel	89.250.000,00	174.873.351,00	244.281.584,00
Pajak Restoran	1.265.000.000,00	1.865.524.883,00	2.406.680.650,00
Pajak Hiburan	30.620.000,00	17.130.000,00	60.130.000,00
Pajak Reklame	180.200.000,00	225.635.500,00	34.401.375,00
Pajak Penerangan Jalan	6.224.100.000,00	6.375.453.989,00	6.737.779.867,00
Pajak Parkir	11.400.000,00	11.377.100,00	11.515.000,00
Pajak Air Tanah	9.990.000,00	10.140.000,00	10.080.000,00
Pajak Sarang Burung Walet	30.000.000,00	5.471.250,00	9.014.975,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.120.702.000,00	1.205.528.916,00	2.930.610.170,00
Pajak Bumi dan Bangunan P2	1.221.394.000,00	1.175.286.591,00	1.295.901.294,00
Pajak BPHTB	498.200.000,00	979.708.349,00	671.636.589,00
<b>Jumlah</b>	<b>10.680.856.000,00</b>	<b>12.046.129.929,00</b>	<b>14.412.031.504,00</b>

Sistem pemungutan Pajak Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menerapkan sistem *Self Assesment* dan *Official Assesment*. Sistem *Self Assesment* yakni pajak daerah yang dihitung dan dilaporkan oleh wajib pajak sendiri, sedangkan sistem *Official Assesment* yakni penetapan pajak daerah oleh daerah berdasarkan Ketetapan Kepala Daerah.

Jenis Pajak Daerah yang menggunakan sistem *self assessment* :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Penerangan Jalan
- e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- f. Pajak Parkir
- g. Pajak Sarang Burung Walet
- h. Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan

Jenis Pajak Daerah yang menggunakan sistem *Official Assessment* :

- a. Pajak Reklame
- b. Pajak Air Tanah
- c. Pajak Bumi dan Bangunan

Pendapatan Pajak Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2020 dapat memenuhi/melebihi target yang telah direncanakan dan mengalami peningkatan dibanding dengan realisasi tahun 2019. Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah guna peningkatan realisasi



pendapatan pajak daerah yakni dengan melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah yang dilakukan yakni :

1. Melakukan sosialisasi pajak daerah, baik secara langsung maupun melalui media.
2. Penerbitan surat himbauan, surat teguran dan surat tagihan terhadap objek pajak.
3. Pembuatan dan pendistribusian saran promosi pajak (*banner* dan *leaflet*).
4. Melakukan koordinasi yang intens dengan SKPD terkait.
5. Melaksanakan program kegiatan anugerah pajak sebagai salah satu bentuk perhatian Pemerintah Daerah terhadap objek pajak.
6. Melakukan pendataan dan pemutakhiran data wajib pajak.
7. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi terkait adanya proyek-proyek pusat maupun provinsi yang pelaksanaan pekerjaannya ada di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, hal ini kaitannya dengan pajak mineral bukan logam dan batuan.

#### **A. Pajak Hotel dan Pajak Restoran**

Realisasi pajak hotel dan restoran yang melebihi target tahun 2020 dikarenakan adanya pendataan/pemutakhiran objek pajak hotel dan objek pajak restoran serta upaya yang intens dalam hal penerbitan surat himbauan, surat teguran dan surat tagihan terhadap objek pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Akan tetapi jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, penerimaan dari pajak hotel dan restoran mengalami penurunan, hal ini disebabkan semua restoran dan hotel di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami penurunan omset dikarenakan dampak pandemik covid-19.

#### **B. Pajak Hiburan**

Realisasi pajak hiburan pada tahun 2020 tidak mencapai target yang ditetapkan serta mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2019. Adapun hal yang mempengaruhi yakni adanya wabah pandemik covid-19, dimana beberapa objek hiburan terpaksa tidak beroperasi lagi, misalnya arena bermain anak *Sky Game* di Pasar Kandangan yang tidak diberikan izin untuk beroperasi karena pandemik covid-19 sehingga berimbas terhadap penerimaan pajak daerah.

#### **C. Pajak Reklame**

Penerimaan pajak reklame pada tahun 2020 dapat mencapai target yang direncanakan serta naik cukup signifikan dibanding dengan realisasi tahun 2019. Hal ini disebabkan upaya tim dari pemerintah daerah yang lebih intens dalam melakukan penyisiran terhadap objek pajak reklame terpasang yang



tidak memenuhi kewajiban perizinan dan perpajakannya, selanjutnya dilakukan teguran dan penagihan terhadap wajib pajak tersebut.

#### **D. Pajak Penerangan Jalan**

Realisasi pajak penerangan jalan tahun 2020 dapat mencapai target yang direncanakan, namun dibandingkan dengan penerimaan di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 5,38%. Penurunan ini disebabkan dengan adanya pandemik covid-19 pemerintah memberikan insentif terhadap pengguna listrik rumah tangga/kelas bawah sehingga mempengaruhi penerimaan pajak penerangan jalan.

#### **E. Pajak Parkir**

Untuk realisasi pajak parkir tidak mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2020. Adapun hal yang mempengaruhi yakni belum optimalnya pelaksanaan pemungutan pajak parkir.

#### **F. Pajak Air Tanah**

Realisasi pajak air tanah belum memenuhi target yang direncanakan pada tahun 2020 dan ada sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun 2019. Penurunan ini disebabkan adanya objek pajak air tanah yang sudah tidak beroperasi lagi.

#### **G. Pajak Sarang Burung Walet**

Untuk realisasi pajak sarang burung walet tahun 2020 masih belum mencapai target yang sudah ditetapkan, hal ini karena masih rendahnya kesadaran wajib pajak dan belum optimalnya pengelolaan dan pengawasan pajak sarang burung walet.

#### **H. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**

Realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan dapat memenuhi/melebihi target tahun 2020, namun dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup besar. Hal ini terutama disebabkan adanya pandemik Covid-19 sehingga pemerintah daerah melakukan *refocusing*/pemangkasan terhadap pekerjaan fisik pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ini menyebabkan rendahnya kebutuhan terhadap mineral bukan logam dan batuan dan berakibat terhadap penerimaan pajak dari jenis ini.

#### **I. Pajak Bumi dan Bangunan**

Realisasi pajak bumi dan bangunan pada tahun 2020 belum mencapai target yang telah ditetapkan dan mengalami penurunan dibanding tahun 2019 karena dampak dari pandemi Covid-19, terutama adanya pembatasan interaksi sehingga penagihan yang dilakukan kurang optimal.

#### **J. Pajak BPHTB**

Realisasi bea perolehan atas tanah dan bangunan (BPHTB) pada tahun 2020 melebihi target pendapatan dan mengalami kenaikan dibanding tahun 2019



disebabkan karena transaksi BPHTB untuk jual beli banyak yang di atas NPOTKP (Nilai Perolehan Objek Tidak Kena Pajak) dalam hal ini di atas Rp60.000.000,00.

#### 5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pendapatan Retribusi Daerah dikelola oleh masing-masing SKPD penghasil. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2020 adalah sebesar Rp8.461.009.994,00 atau mencapai 108,19% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp7.820.369.000,00. Hal ini berarti realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2020 lebih rendah Rp6.655.936.833,00 atau 44,03% dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp15.116.946.827,00.

Pendapatan Retribusi Daerah terdiri atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Retribusi daerah pengelolaannya dilaksanakan oleh SKPD pengelola penerimaan. Anggaran dan realisasi pada TA 2020 untuk masing-masing jenis retribusi serta perbandingannya dengan realisasi pada TA 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.4 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah**

Pendapatan Retribusi Daerah	Tahun 2020		Tahun 2019 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
<b>Retribusi Jasa Umum:</b>			
Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.834.216.600,00	2.643.379.964,00	8.043.985.782,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	532.740.000,00	411.865.000,00	487.820.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	336.840.000,00	225.400.000,00	348.250.900,00
Retribusi Pelayanan Pasar	657.492.000,00	731.310.000,00	777.803.000,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	180.725.000,00	183.560.000,00	134.835.600,00
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	55.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	297.305.000,00	303.496.300,00	323.347.065,00
Retribusi Pemberian Surat Keterangan Kaca Gelap (Riben)	18.000.000,00	18.125.000,00	12.480.000,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	18.000.000,00	11.193.500,00	15.740.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.930.318.600,00</b>	<b>4.528.329.764,00</b>	<b>10.145.262.347,00</b>
<b>Retribusi Jasa Usaha:</b>			
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	415.187.000,00	448.343.920,00	707.726.911,00
Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	1.544.423.400,00	1.637.059.855,00	1.627.715.660,00
Retribusi Terminal	43.600.000,00	31.090.000,00	97.650.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.300.940.000,00	973.160.400,00	1.112.044.225,00
Retribusi Tempat Penginapan.Pesanggrahan/Villa	78.800.000,00	121.700.000,00	219.800.000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	7.200.000,00	13.100.000,00	13.421.500,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	123.000.000,00	184.210.500,00	346.105.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Pendapatan Retribusi Daerah	Tahun 2020		Tahun 2019 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	49.400.000,00	51.650.000,00	72.850.000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	20.000.000,00	16.075.000,00	25.125.000,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.584.050.400,00</b>	<b>3.477.889.675,00</b>	<b>4.222.438.296,00</b>
<b>Retribusi Perizinan Tertentu:</b>			
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	298.500.000,00	454.490.555,00	748.946.184,00
Retribusi Izin Trayek	7.500.000,00	300.000,00	300.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>306.000.000,00</b>	<b>454.790.555,00</b>	<b>749.246.184,00</b>
<b>Jumlah Hasil Retribusi Daerah</b>	<b>7.820.369.000,00</b>	<b>8.461.009.994,00</b>	<b>15.116.946.827,00</b>

Berikut penjelasan mengenai pendapatan retribusi daerah pada TA 2020:

**A. Retribusi Jasa Umum**

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp2.643.379.964,00 dipungut oleh Dinas Kesehatan melalui Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan balai kesehatan.
- 2) Realisasi Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp411.865.000,00 berasal dari retribusi yang dipungut oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
- 3) Realisasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp225.400.000,00 terdiri atas penerimaan pendapatan retribusi yang dipungut melalui Dinas Perhubungan sebesar Rp1.500.000,00 dan Dinas Perdagangan sebesar Rp223.900.000,00.
- 4) Realisasi Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp731.310.000,00 terdiri atas penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinas Perdagangan berupa retribusi pelayanan pasar – los.
- 5) Realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar Rp164.170.000,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinas Perhubungan.
- 6) Realisasi Retribusi Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi sebesar Rp303.496.300,00 merupakan penerimaan retribusi pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- 7) Realisasi Retribusi Pemberian Surat Keterangan Kaca Gelap (Riben) sebesar Rp18.125.000,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinas Perhubungan.
- 8) Realisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebesar Rp11.193.500,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinas Perdagangan.



## B. Retribusi Jasa Usaha

- 1) Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp448.343.920,00 merupakan penerimaan atas penggunaan aset milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pada SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.1.5 Rincian Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

<b>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah: SKPD</b>	<b>Tahun 2020 Realisasi (Rp)</b>	<b>Tahun 2019 Realisasi (Rp)</b>
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	116.600.000,00	221.650.000,00
Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan LH	58.096.500,00	67.919.391,00
Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian	20.153.500,00	29.204.000,00
Dinas Perdagangan	48.511.920,00	61.461.520,00
Bagian Umum	42.692.000,00	90.850.000,00
Kecamatan Kandangan	4.700.000,00	12.550.000,00
Kecamatan Padang Batung	6.000.000,00	5.500.000,00
Kecamatan Simpur	0,00	2.800.000,00
Kecamatan Angkinang	300.000,00	1.400.000,00
Kecamatan Daha Selatan	1.640.000,00	11.800.000,00
Dinas Pertanian	0,00	700.000,00
Badan Keuangan Daerah	149.650.000,00	201.892.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>448.343.920,00</b>	<b>707.726.911,00</b>

- 2) Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan sebesar Rp1.637.059.855,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinas Perdagangan.
- 3) Realisasi Retribusi Terminal sebesar Rp31.090.000,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinas Perhubungan.
- 4) Realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp973.160.400,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinas Perhubungan sebesar Rp99.894.400,00 dan Dinas Perdagangan sebesar Rp873.266.000,00.
- 5) Realisasi Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebesar Rp121.700.000,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.
- 6) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebesar Rp13.100.000,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinas Perhubungan.
- 7) Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi sebesar Rp184.210.500,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.
- 8) Realisasi Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah sebesar



Rp51.650.000,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinas Perikanan sebesar Rp50.450.000,00 dan penapatan bagi hasil karet pada Dinas Pertanian sebesar Rp1.200.000,00.

- 9) Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar Rp16.075.000,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui Dinas Pertanian.

### C. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu terdiri atas realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar Rp454.490.555,00 dan Izin Trayek sebesar Rp300.000,00 merupakan penerimaan pendapatan retribusi melalui beberapa SKPD dan Kecamatan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.6 Rincian Retribusi Perizinan Tertentu**

Retribusi Perizinan Tertentu SKPD	Retribusi IMB Realisasi (Rp)	Retribusi Izin Trayek Realisasi (Rp)
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	262.201.695,00	0,00
Dinas Perhubungan	0,00	300.000,00
Kecamatan Kandangan	90.132.720,00	0,00
Kecamatan Padang Batung	16.081.750,00	0,00
Kecamatan Sungai Raya	24.265.405,00	0,00
Kecamatan Simpur	6.285.545,00	0,00
Kecamatan Kalumpang	4.162.500,00	0,00
Kecamatan Angkinang	11.573.975,00	0,00
Kecamatan Telaga Langsat	5.018.415,00	0,00
Kecamatan Daha Utara	10.631.000,00	0,00
Kecamatan Daha Selatan	17.858.750,00	0,00
Kecamatan Daha Barat	6.278.800,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>454.490.555,00</b>	<b>300.000,00</b>

Untuk pencapaian realisasi Retribusi Daerah pada tahun 2020 ini masih belum memenuhi target yang ditetapkan, selain itu mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pencapaian realisasi tahun 2019 dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada seluruh sektor ekonomi. Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah guna meningkatkan penerimaan pada sektor Retribusi Daerah yakni :

1. Koordinasi yang intens dengan SKPD pengelola Retribusi Daerah.
2. Pendataan objek Retribusi Daerah baru.
3. Revisi terhadap Peraturan Daerah sebagai bentuk tindak lanjut pendataan objek Retribusi Daerah baru.
4. Revisi terhadap tarif Retribusi Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan di masyarakat.



### 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, merupakan penerimaan PAD yang berasal dari hasil penyertaan modal Pemerintah Kabupaten berupa bagian laba dari lembaga keuangan bank dan bukan bank.

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2020 adalah sebesar Rp4.801.193.114,00 atau mencapai 70,45% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp6.815.000.000,00. Hal ini berarti realisasi TA 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp1.651.840.650,00 atau 52,45% dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp3.149.352.464,00. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dicatat berdasarkan basis kas, yakni diakui seluruhnya sebagai pendapatan atas semua penerimaan ke Kas Daerah pada TA 2020. Realisasi tersebut berasal dari obyek investasi Pemerintah Daerah pada Bank Kalsel sebesar Rp55.000.000.000,00 dan pada Koperasi Swarga sebesar Rp4.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.7 Rincian Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:	Tahun 2020		Tahun 2019 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
BPD Kalsel	6.815.000.000,00	4.796.693.114,00	3.144.852.464,00
KPN Swarga	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>6.815.000.000,00</b>	<b>4.801.193.114,00</b>	<b>3.149.352.464,00</b>

### 5.1.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin.

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2020 adalah sebesar Rp177.117.174.476,86 atau mencapai 104,33% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp169.763.211.026,00. Hal ini berarti realisasi TA 2020 naik sebesar Rp41.804.853.777,05 atau 23,60% dibandingkan dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp135.312.320.699,81. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2020 terdiri atas pendapatan sebagai berikut:

**Tabel 5.1.8 Rincian Realisasi Lain-lain PAD yang Sah**

Lain-lain PAD yang Sah	Tahun 2020		Tahun 2019 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	25.545.000,00	351.508.020,00	178.109.400,00
Penerimaan Jasa Giro	4.185.320.000,00	6.001.824.256,00	6.727.509.821,00
Penerimaan Bunga Deposito	5.412.000.000,00	7.824.063.619,00	5.090.484.761,00
Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaks. Pekerjaan	46.849.368,00	46.849.368,00	312.951.631,50
Pendapatan Denda Pajak	8.623.769,00	22.491.788,20	39.628.894,00
Pendapatan Denda Retribusi	4.408.926,00	16.154.272,00	11.231.666,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Lain-lain PAD yang Sah	Tahun 2020		Tahun 2019 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pendapatan dari Pengembalian	389.410.000,00	1.669.977.411,66	904.135.879,31
Pendapatan dari Angsuran/Cicilan	0,00	1.500.000,00	200.000,00
Pendapatan BLUD	150.587.616.536,00	152.122.308.367,00	110.471.446.305,00
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	1.200.000,00	9.084.000,00	0,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN	9.102.237.427,00	9.051.413.375,00	11.576.622.342,00
<b>Jumlah</b>	<b>169.763.211.026,00</b>	<b>177.117.174.476,86</b>	<b>135.312.320.699,81</b>

- A. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp351.508.020,00 yang terdapat pada Badan Keuangan Daerah terdiri atas:
1. Hasil penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp35.752.455,00 berupa hasil penjualan lelang TA 2020.
  2. Hasil penjualan Gedung dan Bangunan sebesar Rp263.795.565,00 berupa pembongkaran Asrama Putra Buchari.
  3. Hasil penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp51.960.000,00 berupa penerimaan atas biaya kompensasi pembongkaran trotoar TA 2020. Penerimaan tersebut terdiri atas penerimaan tahun 2020 sebesar Rp51.210.000,00 dan penerimaan atas kurang setor tahun 2019 sebesar Rp750.000,00.
- B. Penerimaan jasa giro sebesar Rp6.001.824.256,00 terdiri atas penerimaan jasa giro sebagai berikut:
1. Jasa giro atas kas daerah sebesar Rp5.867.471.671,00;
  2. Jasa giro atas rekening bendahara pengeluaran sebesar Rp134.352.585,00.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 25 ayat (1) bahwa bunga bank dan/atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah merupakan Pendapatan Negara/Daerah maka Jasa Giro yang diterima oleh pemegang kas dana JKN harus langsung disetorkan ke Kas Daerah, sehingga Jasa Giro Kas JKN mulai Tahun 2013 sudah masuk ke Kas Daerah.
- C. Pendapatan dari bunga deposito sebesar Rp7.824.063.619,00 merupakan pendapatan dari penempatan Kas Daerah pada deposito yang terdiri atas:
1. Bunga deposito pada Bank Kalsel Cabang Kandangan sebesar Rp3.056.931.477,00;
  2. Bunga deposito pada Bank Syariah Kalsel Cabang Kandangan sebesar Rp2.149.992.931,00;
  3. Bunga deposito pada BRI Cabang Kandangan sebesar Rp2.057.205.419,00; dan



4. Bunga deposito pada BNI sebesar Rp559.933.792,00.

Penempatan dana Kas Daerah dalam bentuk deposito merupakan bagian dari manajemen Kas Daerah yang bertujuan memperoleh hasil maksimal atas kas menganggur (*idle cash*).

D. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp46.849.368,00 yang terdiri atas:

**Tabel 5.1.9 Rincian Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**

Pendapatan atas Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	Realisasi (Rp)
Bidang Pendidikan	596.400,00
Bidang Kesehatan	38.632.968,00
Bidang Pekerjaan Umum	7.620.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>46.849.368,00</b>

E. Pendapatan Denda Pajak sebesar Rp22.491.788,20 terdiri atas:

1. Denda pajak restoran sebesar Rp13.667.347,00;
2. Denda pajak reklame sebesar Rp3.113.350,00;
3. Denda pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp80.261,20;
4. Denda pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebesar Rp1.951.710,00; dan
5. Denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Rp3.679.120,00.

F. Pendapatan Denda Retribusi sebesar Rp16.154.272,00 terdiri atas denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp297.000,00 dan denda retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebesar Rp15.857.272,00.

G. Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp1.669.977.411,66 terdiri atas beberapa pengembalian sebagai berikut:

1. Pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp306.116.305,00.
2. Pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas sebesar Rp25.441.800,00.
3. Pengembalian kelebihan pembayaran jasa pihak ketiga sebesar Rp938.812.496,66.
4. Pengembalian Bendahara Pengeluaran sebesar Rp119.748.810,00.
5. Pengembalian kelebihan pembayaran bantuan sosial sebesar Rp279.858.000,00.

H. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan sebesar Rp1.500.000,00 merupakan pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan *hand traktor*.



- I. Pendapatan BLUD sebesar Rp152.122.308.367,00, terdiri atas pendapatan BLUD:
1. RSUD Brigjend H. Hasan Basry sebesar Rp137.754.717.798,00 yang terdiri dari Pendapatan jasa layanan umum sebesar Rp122.994.159.488,00; Pendapatan Hibah dalam rangka pencegahan Covid-19 sebesar Rp14.519.225.872,00; dan Pendapatan lain-lain (non pelayanan) sebesar Rp241.332.438,00.
  2. Puskesmas Kandangan sebesar Rp1.505.517.461,00 merupakan pendapatan jasa layanan umum.
  3. Puskesmas Negara sebesar Rp2.034.015.091,00 merupakan pendapatan jasa layanan umum.
  4. RS Daha Sejahtera sebesar Rp10.828.058.017,00 yang terdiri dari Pendapatan jasa layanan umum sebesar Rp257.372.400,00 dan pendapatan hasil kerja sama sebesar Rp10.570.685.617,00.
- J. Lain-lain PAD yang sah lainnya sebesar Rp9.084.000,00 merupakan pendapatan dari setoran denda administratif protokol kesehatan Covid-19 pada Badan Keuangan Daerah.
- K. Pendapatan Dana Kapitasi JKN sebesar Rp9.051.413.375,00 berasal dari semua FKTP/ Puskesmas penerima dana Kapitasi, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.10 Rincian Puskesmas Penerima Dana Kapitasi JKN TA 2020**

Pendapatan Dana Kapitasi JKN	Realisasi (Rp)
Puskesmas Gambah	334.918.650,00
Puskesmas Jambu Hilir	905.110.675,00
Puskesmas Sungai Raya	544.040.400,00
Puskesmas Batang Kulur	272.730.900,00
Puskesmas Angkinang	646.362.825,00
Puskesmas Bamban	266.143.650,00
Puskesmas Telaga Langsat	532.449.300,00
Puskesmas Kaliring	474.191.700,00
Puskesmas Padang Batung	454.073.400,00
Puskesmas Loksado	320.102.650,00
Puskesmas Malinau	190.749.900,00
Puskesmas Wasah	331.241.250,00
Puskesmas Simpur	618.320.125,00
Puskesmas Kalumpang	327.778.500,00
Puskesmas Bayanan	457.018.950,00
Puskesmas Pasungkan	573.274.875,00
Puskesmas Bajayau	382.361.075,00



Pendapatan Dana Kapitasi JKN	Realisasi (Rp)
Puskesmas Sungai Pinang	713.538.450,00
Puskesmas Baruh Jaya	707.006.100,00
<b>Jumlah</b>	<b>9.051.413.375,00</b>

### 5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Transfer ke Daerah dan Dana Desa atau yang disingkat dengan TKDD adalah bagian dari belanja negara yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dan desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada daerah dana desa.

Pada Tahun 2020 alokasi dana transfer ke daerah ditetapkan melalui Perpres 78 Tahun 2020 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 dan terakhir alokasi ini dirubah melalui perpres 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020.

Sedangkan penyaluran dan penggunaan dana transfer untuk DAU, DAK, DID dan Dana Desa diatur terakhir melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2020 adalah sebesar Rp1.126.819.545.005,00 yang berarti mencapai 107,07% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp1.052.385.439.000,00. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Pemerintah Provinsi dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.11 Rincian Realisasi Pendapatan Transfer**

Pendapatan Transfer	Tahun 2020		Tahun 2019 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	800.280.799.000,00	864.401.301.956,00	1.057.953.649.787,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	192.156.860.000,00	192.156.860.000,00	148.706.398.200,00
Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	59.947.780.000,00	70.261.383.049,00	88.414.416.882,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.052.385.439.000,00</b>	<b>1.126.819.545.005,00</b>	<b>1.295.074.464.869,00</b>

#### 5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan TA 2020 sebesar Rp864.401.301.956,00 atau 108,01% dari anggaran yang telah ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp800.280.799.000,00 yang terdiri atas Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik dengan rincian sebagai berikut:



**Tabel 5.1.12 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat  
 Dana Perimbangan**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Tahun 2020		Tahun 2019 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Bagi Hasil Pajak	17.083.480.000,00	19.715.078.790,00	21.048.655.712,00
Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	137.705.888.000,00	202.667.755.404,00	259.067.374.884,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	485.605.763.000,00	482.100.383.000,00	538.186.183.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	63.751.893.000,00	61.965.883.202,00	144.558.338.534,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	96.133.775.000,00	97.952.201.560,00	95.093.097.657,00
<b>Jumlah</b>	<b>800.280.799.000,00</b>	<b>864.401.301.956,00</b>	<b>1.057.953.649.787,00</b>

#### 5.1.1.2.1.1 Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat sebesar Rp19.715.078.790,00 terdiri atas Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPH), dan Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.13 Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak**

Dana Perimbangan - Bagi Hasil Pajak:	Tahun 2020		Tahun 2019 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	11.122.955.000,00	11.341.176.731,00	17.597.647.712,00
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan	5.960.525.000,00	8.373.890.359,00	3.451.008.000,00
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0,00	11.700,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>17.083.480.000,00</b>	<b>19.715.078.790,00</b>	<b>21.048.655.712,00</b>

#### 5.1.1.2.1.2 Bagi Hasil Bukan Pajak

Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri atas Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp202.667.755.404,00, dengan rincian realisasi sebagai berikut:

**Tabel 5.1.14 Rincian Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak SDA**

Dana Perimbangan - Bagi Hasil Bukan Pajak:	Tahun 2020		Tahun 2019 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan	87.359.000,00	61.923.000,00	62.932.200,00
Bagi Hasil dari Iuran Tetap ( <i>Land-Rent</i> )	524.000.000,00	452.835.950,00	328.049.110,00
Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi ( <i>Royalti</i> )	135.813.489.000,00	200.835.345.283,00	257.369.753.874,00
Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	1.025.790.000,00	788.276.289,00	590.155.800,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	255.250.000,00	529.374.882,00	716.483.900,00
<b>Jumlah</b>	<b>137.705.888.000,00</b>	<b>202.667.755.404,00</b>	<b>259.067.374.884,00</b>



#### 5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Alokasi DAU TA 2020 untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah diterima seluruhnya pada TA 2020 sebesar Rp482.100.383.000,00.

#### 5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Penerimaan DAK pada TA 2020 sebesar Rp159.918.084.762,00 terdiri atas DAK fisik sebesar Rp61.965.883.202,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp97.952.201.560,00 dialokasikan untuk bidang-bidang sebagai berikut:

**Tabel 5.1.15 Rincian Realisasi Penerimaan DAK Fisik**

Dana Alokasi Khusus (DAK Fisik):	Tahun 2020		Tahun 2019 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Bidang Pendidikan	11.758.661.000,00	11.638.822.530,00	10.811.751.883,00
Bidang Kesehatan	18.214.849.000,00	18.274.053.864,00	62.181.390.714,00
Bidang Infrastruktur Jalan	0,00	0,00	24.066.962.423,00
Bidang Infrastruktur Irigasi	7.634.885.000,00	7.569.105.500,00	21.778.575.046,00
Bidang Infrastruktur Air Minum	10.714.739.000,00	10.511.346.310,00	3.822.245.900,00
Bidang Infrastruktur Sanitasi	6.234.950.000,00	6.234.949.998,00	7.668.187.100,00
Bidang Kelautan dan Perikanan	1.310.964.000,00	1.255.645.000,00	1.038.512.500,00
Bidang Pertanian	836.832.000,00	713.160.000,00	2.356.400.900,00
Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	0,00	766.907.800,00
Bidang Keluarga Berencana	1.037.200.000,00	0,00	0,00
Bidang Perdagangan	0,00	0,00	4.252.204.268,00
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.307.500.000,00	3.307.500.000,00	3.172.481.000,00
Bidang Pariwisata	984.900.000,00	984.900.000,00	2.642.719.000,00
Bidang Industri Kecil dan Menengah	1.716.413.000,00	1.476.400.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>63.751.893.000,00</b>	<b>61.965.883.202,00</b>	<b>144.558.338.534,00</b>

**Tabel 5.1.16 Rincian Realisasi Penerimaan DAK Non Fisik**

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik:	Tahun 2020		Tahun 2019 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Tunjangan Profesi Guru PNSD	65.740.462.000,00	64.437.312.000,00	62.066.184.500,00
Tambahan Penghasilan Guru PNSD	954.000.000,00	510.750.000,00	1.154.000.000,00
Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	4.776.000.000,00	4.533.584.250,00	4.724.400.000,00
Bantuan Operasional Kesehatan	15.804.709.000,00	21.707.403.801,00	17.796.761.022,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik:	Tahun 2020		Tahun 2019 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Akreditasi Puskesmas	1.316.375.000,00	0,00	0,00
Jaminan Persalinan	497.843.000,00	0,00	0,00
Bantuan Operasional Keluarga Berencana	1.316.893.000,00	1.613.209.000,00	1.147.642.770,00
Tunjangan Khusus Guru	0,00	0,00	2.917.986.040,00
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	370.389.000,00	235.767.009,00	992.953.325,00
Dana Pelayanan Kepariwisataaan	785.004.000,00	344.050.000,00	752.170.000,00
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum	600.000.000,00	600.000.000,00	450.000.000,00
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	3.972.100.000,00	3.970.125.500,00	3.091.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>96.133.775.000,00</b>	<b>97.952.201.560,00</b>	<b>95.093.097.657,00</b>

#### 5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya merupakan Dana Penyesuaian yang telah diterima pada TA 2020 sebesar Rp192.156.860.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.17 Rincian Realisasi Pendapatan Transfer  
Pemerintah Pusat Lainnya**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	Tahun 2020		Tahun 2019 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Dana Penyesuaian - Dana Insentif Daerah	74.722.664.000,00	74.722.664.000,00	30.326.045.000,00
Dana Penyesuaian - Dana Desa yang Bersumber dari APBN	117.434.196.000,00	117.434.196.000,00	118.380.353.200,00
<b>Jumlah</b>	<b>192.156.860.000,00</b>	<b>192.156.860.000,00</b>	<b>148.706.398.200,00</b>

Pendapatan Dana Penyesuaian terdiri atas:

- Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp74.722.664.000,00 yang terdiri dari DID regular sebesar Rp50.291.461.000,00; DID Tambahan sebesar Rp11.924.596.000,00; dan DID Tambahan 2 sebesar Rp12.506.607.000,00. DID Tambahan dialokasikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelola DID Tambahan TA 2020, sedangkan DID Tambahan 2 dialokasikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan DID Tambahan Periode Kedua TA 2020; dan
- Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp117.434.196.000,00 disalurkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditransfer langsung ke Rekening Kas Desa (RKD). Tata cara pencatatan Dana Desa diatur dalam SE Menteri Dalam Negeri Nomor 910/6966/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta



Pertanggungjawaban Dana Desa oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan mekanisme sebagai berikut:

1. KPPN menerbitkan SP2D untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
2. KPPN menyampaikan salinan SP2D kepada Bupati dan Kepala Desa.
3. Berdasarkan salinan SP2D tersebut, Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada KPPN dan Bupati melalui Badan Keuangan Daerah.
4. Berdasarkan salinan SP2D yang disampaikan kepada Bupati dan lembar konfirmasi penyaluran Dana Desa di RKD, PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan Dana Desa (SP2DD) sebagai dasar pencatatan realisasi pendapatan Dana Desa.

#### 5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya pada TA 2020 adalah sebesar Rp70.261.383.049,00 yang berarti mencapai 117,20% dari anggaran yang telah ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp59.947.780.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.18 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya**

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - Bagi Hasil Pajak	Tahun 2020		Tahun 2019 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pajak Kendaraan Bermotor	5.600.000.000,00	7.013.101.882,00	4.999.451.338,00
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	5.935.000.000,00	10.077.161.642,00	7.186.356.646,00
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	42.781.632.000,00	40.922.024.110,00	66.398.619.863,00
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	31.148.000,00	85.794.411,00	43.019.403,00
Bea Cukai rokok	5.600.000.000,00	12.163.301.004,00	9.786.969.632,00
<b>Jumlah</b>	<b>59.947.780.000,00</b>	<b>70.261.383.049,00</b>	<b>88.414.416.882,00</b>

#### 5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah penerimaan daerah selain yang telah dikelompokkan di atas. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berupa Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 971 – 7791 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pendapatan dana BOS dianggarkan pada akun Pendapatan, Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis Pendapatan Hibah, Obyek Pendapatan Hibah Dana BOS, Rincian Obyek Pendapatan Hibah



Dana BOS.

Pendapatan Hibah yang dapat direalisasi pada TA 2020 sebesar Rp24.574.832.701,00 atau mencapai 87,64% dari total anggaran yang telah ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp28.039.192.000,00. Pendapatan hibah terdiri atas Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat dan Pendapatan Hibah Dana BOS dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.19 Rincian Lain-lain Pendapatan Hibah**

Pendapatan Hibah	Tahun 2020		Tahun 2019 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Pendapatan Hibah dari Pemerintah	0,00	0,00	6.758.239.000,00
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	569.320.000,00	61.628.100,00	118.430.000,00
Pendapatan Hibah Dana BOS	27.469.872.000,00	24.513.204.601,00	24.275.637.675,00
<b>Jumlah</b>	<b>28.039.192.000,00</b>	<b>24.574.832.701,00</b>	<b>31.152.306.675,00</b>

#### 5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah sebesar Rp24.574.832.701,00 terdiri atas pendapatan hibah sebagai berikut:

##### 1. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat

Pendapatan hibah dari kelompok masyarakat sebesar Rp61.628.100,00 merupakan penerimaan atas sumbangan pihak ketiga.

##### 2. Pendapatan Hibah Dana BOS

Pendapatan hibah Dana BOS merupakan pendapatan hibah atas penerimaan transfer Dana BOS dari Provinsi sebesar Rp24.513.204.601,00 yang terdiri atas Pendapatan Dana BOS sebagai berikut:

**Tabel 5.1.20 Rincian Realisasi Pendapatan Dana BOS**

Pendapatan Hibah Dana BOS	Tahun 2020 Realisasi (Rp)	Tahun 2019 Realisasi (Rp)
SD Negeri	18.738.874.601,00	19.007.836.215,00
SMP Negeri	5.774.330.000,00	5.267.801.460,00
<b>Jumlah</b>	<b>24.513.204.601,00</b>	<b>24.275.637.675,00</b>

#### 5.1.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2020 sebesar Rp1.131.075.431.867,02 yang berarti mencapai 83,57% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp1.353.436.622.271,00. Belanja menurut jenisnya terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga (BTT) dengan rincian sebagai berikut:



**Tabel 5.1.21 Rincian Realisasi Belanja**

Belanja	Tahun 2020		Tahun 2019 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja Operasi	1.028.665.579.253,00	906.310.422.488,75	865.199.123.173,00
Belanja Modal	223.758.473.829,00	202.599.536.825,27	340.987.909.455,75
Belanja Tak Terduga	101.012.569.189,00	22.165.472.553,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.353.436.622.271,00</b>	<b>1.131.075.431.867,02</b>	<b>1.206.187.032.628,75</b>

### 5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek.

Realisasi Belanja Operasi TA 2020 adalah sebesar Rp906.310.422.488,75 yang berarti mencapai 88,11% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp1.028.665.579.253,00. Belanja Operasi terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.22 Rincian Belanja Operasi**

Belanja Operasi	Tahun 2020		Tahun 2019 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja Pegawai	550.328.242.050,00	468.226.677.267,00	475.340.937.446,75
Belanja Barang dan Jasa	413.050.683.605,00	385.945.661.462,75	326.935.755.106,25
Belanja Hibah	29.456.701.598,00	27.917.073.003,00	34.971.036.943,00
Belanja Bantuan Sosial	35.829.952.000,00	24.221.010.756,00	27.951.393.677,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.028.665.579.253,00</b>	<b>906.310.422.488,75</b>	<b>865.199.123.173,00</b>

### 5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 adalah sebesar Rp468.226.677.267,00 yang berarti mencapai 85,08% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp550.328.242.050,00. Realisasi Belanja Pegawai merupakan belanja yang berasal dari gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan termasuk di dalamnya Belanja Pegawai untuk RSUD/Puskesmas BLUD dan Belanja Pegawai Dana BOS dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.23 Rincian Realisasi Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai	Tahun 2020		Tahun 2019 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Gaji dan Tunjangan	414.595.358.620,00	352.623.742.480,00	366.913.283.219,00
Tambahan Penghasilan PNS	117.226.366.380,00	101.663.789.473,00	96.830.029.557,75
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	6.630.080.000,00	4.692.465.432,00	4.608.647.710,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Belanja Pegawai	Tahun 2020		Tahun 2019 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Insentif Pemungutan Pajak Daerah	580.000.000,00	575.069.855,00	512.052.068,00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	380.000.000,00	317.530.777,00	661.574.052,00
Belanja Pegawai Operasional BLUD	7.291.700.000,00	4.826.685.000,00	4.261.244.640,00
Belanja Operasional Penyuluh	10.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Pegawai Dana BOS	3.614.737.050,00	3.527.394.250,00	1.554.106.200,00
<b>Jumlah</b>	<b>550.328.242.050,00</b>	<b>468.226.677.267,00</b>	<b>475.340.937.446,75</b>

#### 5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang TA 2020 adalah sebesar Rp385.945.661.462,75 yang berarti mencapai 93,44% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp413.050.683.605,00. Realisasi belanja barang dan jasa merupakan belanja untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah, dengan realisasi selama TA 2020 dan TA 2019 sebagai berikut:

**Tabel 5.1.24 Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa**

Belanja Barang dan Jasa	Tahun 2020		Tahun 2019 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja Bahan Pakai Habis	9.105.478.587,00	7.714.702.688,00	7.513.207.516,00
Belanja Bahan/Material	10.546.455.934,00	9.144.067.102,00	8.780.622.407,00
Belanja Jasa Kantor	62.906.043.643,00	52.689.823.123,50	60.531.135.163,25
Belanja Premi Asuransi	49.102.600.000,00	47.321.728.277,00	31.731.687.123,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.245.455.915,00	4.111.248.441,00	5.049.288.639,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	5.880.348.195,00	4.770.721.286,00	6.900.457.865,00
Belanja Sewa rumah/Gedung/Gudang/Parkir	318.267.300,00	187.850.000,00	835.898.163,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas	0,00	0,00	2.400.000,00
Belanja Sewa Alat Berat	10.000.000,00	0,00	25.000.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.384.696.000,00	653.360.272,00	1.155.127.800,00
Belanja Makanan dan Minuman	13.265.175.100,00	9.239.068.157,00	15.924.250.267,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	480.125.000,00	386.855.000,00	618.094.000,00
Belanja Pakaian Kerja	2.472.655.000,00	2.299.760.100,00	917.163.450,00
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	876.807.000,00	651.547.200,00	1.225.633.300,00
Belanja Perjalanan Dinas	40.003.061.884,00	33.305.554.958,00	55.257.595.518,00
Belanja Pemeliharaan	14.224.034.410,00	13.187.720.357,00	10.458.862.100,00
Belanja Jasa Konsultasi	873.521.750,00	361.789.859,00	2.497.729.660,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Belanja Barang dan Jasa	Tahun 2020		Tahun 2019 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja Barang untuk Diserahkan kpd Masy/Pihak Ketiga	8.699.777.500,00	7.848.845.580,00	3.403.917.000,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	32.750.000,00	24.217.813,00	109.031.000,00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS	1.026.277.800,00	930.987.500,00	1.028.024.371,00
Belanja Honorarium PNS	476.600.000,00	340.775.000,00	413.220.000,00
Belanja Honorarium Non PNS	17.811.527.000,00	16.164.249.581,00	14.634.563.083,00
Belanja Barang Dana BOS	15.809.904.960,00	15.531.644.362,00	12.152.017.245,00
Belanja Barang dan Jasa Operasional BLUD	140.811.372.268,00	151.108.893.434,00	84.184.507.724,00
Belanja Barang Perlengkapan	687.748.359,00	551.160.415,25	1.586.321.712,00
Belanja Insentif Tenaga Medis Penanganan Covid-19	10.000.000.000,00	7.419.090.957,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>413.050.683.605,00</b>	<b>385.945.661.462,75</b>	<b>326.935.755.106,25</b>

#### 5.1.2.13 Belanja Hibah

Hibah merupakan pemberian uang/barang atau jasa kepada penerima yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Pengelolaan hibah diatur melalui Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 09 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Realisasi Belanja Hibah TA 2020 sebesar Rp27.917.073.003,00 yang berarti mencapai 94,77% dari total anggaran yang ditetapkan pada APBD sebesar Rp29.456.701.598,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.25 Rincian Belanja Hibah**

Belanja Hibah	Tahun 2020		Tahun 2019 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Hibah kepada Kelompok Masyarakat	29.456.701.598,00	27.917.073.003,00	34.971.036.943,00
<b>Jumlah</b>	<b>29.456.701.598,00</b>	<b>27.917.073.003,00</b>	<b>34.971.036.943,00</b>

Belanja Hibah terdiri atas Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp27.917.073.003,00 yang terdiri dari:

1. Hibah berupa uang sebesar Rp17.591.330.800,00 yang dikeluarkan berdasarkan beberapa Surat Keputusan Bupati (SK) sebagai berikut:
  - SK Bupati HSS Nomor 188.45/067/KUM/2020 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penyaluran Dana Hibah kepada Dewan Harian Cabang 45 Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp350.000.000,00.



- SK Bupati HSS Nomor 188.45/074/KUM/2020 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penyaluran Dana Hibah Kepada Lembaga dan Organisasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.933.320.800,00.
- SK Bupati HSS Nomor 188.45/075/KUM/2020 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penyaluran Dana Hibah Kepada Balai Adat Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 sebesar Rp30.000.000,00.
- SK Bupati HSS Nomor 188.45/163/KUM/2020 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Hibah Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Bagi Lembaga Swasta Tahap I Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.251.200.000,00.
- SK Bupati HSS Nomor 188.45/174/KUM/2020 tentang Penetapan Lembaga Penerima dan Besaran Hibah Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Bagi Lembaga Swasta Tahap I Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.811.200.000,00.
- SK Bupati HSS Nomor 188.45/201/KUM/2020 tentang Penetapan Lembaga Penerima dan Besaran Dana Hibah Bantuan Operasional Sekolah Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp555.000.000,00.
- SK Bupati HSS Nomor 188.45/207/KUM/2020 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penyaluran Dana Hibah Kepada Organisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.512.260.000,00.
- SK Bupati HSS Nomor 188.45/300/KUM/2020 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penyaluran Dana Hibah kepada Yayasan Izharussalam Baruh Jaya Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp200.000.000,00.
- SK Bupati HSS Nomor 188.45/330/KUM/2020 tentang Penetapan Lembaga Penerima dan Besaran Hibah Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Bagi Lembaga Swasta Tahap II Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.843.550.000,00.
- SK Bupati HSS Nomor 188.45/331/KUM/2020 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Hibah Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Bagi Lembaga Swasta Tahap II Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.104.800.000,00.



**Tabel 5.1.26 Rincian Realisasi Belanja Hibah Uang**

Uraian	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Rp)
Kwarcab Pramuka	144.000.000,00	250.000.000,00
KONI	2.472.200.000,00	1.200.000.000,00
MUI	2.400.000.000,00	2.101.675.000,00
Palang Merah Indonesia	466.000.000,00	500.000.000,00
Mesjid/Langgar/Majelis Ta'lim/Kubah Makam	1.645.000.000,00	4.568.358.000,00
BAZNAS Kab. HSS	250.000.000,00	225.000.000,00
Pondok Pesantren	200.000.000,00	75.000.000,00
<i>National Paralympic Committee</i>	430.060.000,00	876.500.000,00
Persatuan Wredatama	45.000.000,00	0,00
Dewan Kesenian Kab. HSS	0,00	200.000.000,00
GNOTA Kab. HSS	0,00	300.000.000,00
BOP Kesetaraan	3.654.750.000,00	2.940.950.000,00
BOP PAUD	4.356.000.000,00	4.385.400.000,00
BOSDA	555.000.000,00	555.000.000,00
Yayasan Izharussalam Baruh Jaya	200.000.000,00	0,00
Dewan Harian Cabang 45	350.000.000,00	0,00
Balai Adat Loksado	30.000.000,00	0,00
Gabungan Organisasi Wanita (GOW)	145.000.000,00	0,00
Dharma Wanita Persatuan	148.320.800,00	0,00
Gabungan Isteri Wakil Rakyat (GATRIWARA)	100.000.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>17.591.330.800,00</b>	<b>18.177.883.000,00</b>

2. Hibah berupa barang/jasa dan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp10.325.742.203,00. Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), belanja hibah barang/jasa dianggarkan dalam kelompok Belanja Barang namun untuk kepentingan penyajian laporan keuangan disajikan dalam kelompok Belanja Hibah. Hibah berupa barang/jasa dan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat dilaksanakan oleh SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.1.27 Rincian Realisasi Belanja Hibah Barang/Jasa**

SKPD	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Rp)
Dinas Pendidikan	260.502.000,00	726.472.360,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	8.160.968.863,00	10.497.634.000,00
Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan LH	0,00	300.580.500,00
Dinas Ketahanan Pangan	256.711.610,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja, KUK dan Perindustrian	67.648.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

SKPD	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Rp)
Dinas Sosial	0,00	3.000.000,00
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	74.514.000,00	45.250.000,00
Dinas Perikanan	0,00	1.829.853.500,00
Dinas Pertanian	1.063.801.130,00	3.153.908.583,00
Bagian Kesejahteraan Rakyat	0,00	174.055.000,00
Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Tata Usaha	0,00	62.400.000,00
Kelurahan Kandangan Barat	199.329.200,00	0,00
Keluaraha Jambu Hilir	242.267.400,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>10.325.742.203,00</b>	<b>16.793.153.943,00</b>

#### 5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial dimaksudkan untuk meningkatkan status sosial masyarakat baik secara langsung kepada anggota masyarakat maupun melalui kelompok dan organisasi kemasyarakatan di bidang pendidikan, keagamaan, kesehatan, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, serta kelompok sosial lainnya.

Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Pengelolaan bantuan sosial diatur melalui Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 09 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Bantuan sosial TA 2020 direalisasi sebesar Rp24.221.010.756,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.28 Rincian Belanja Bantuan Sosial**

Belanja Bantuan Sosial	Tahun 2020		Tahun 2019 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Bantuan Sosial kepada Kelompok	17.794.872.000,00	14.761.810.000,00	13.803.755.000,00
Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	18.035.080.000,00	9.459.200.756,00	14.147.638.677,00
<b>Jumlah</b>	<b>35.829.952.000,00</b>	<b>24.221.010.756,00</b>	<b>27.951.393.677,00</b>

- A. Bantuan Sosial kepada Kelompok sebesar Rp14.761.810.000,00 merupakan bantuan sosial berupa uang.
- B. Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat sebesar Rp9.459.200.756,00 terdiri dari bantuan sosial berupa uang sebesar Rp6.431.996.006,00 dan bantuan sosial berupa barang/jasa sebesar Rp3.027.204.750,00.

Bantuan sosial berupa uang melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)



Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) sedangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), bantuan sosial berupa barang/jasa dianggarkan dalam kelompok Belanja Barang namun untuk kepentingan penyajian laporan keuangan disajikan dalam kelompok Belanja Bantuan Sosial. Bantuan Sosial berupa barang/jasa dilaksanakan oleh SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.1.29 Rincian Realisasi Bantuan Sosial Berupa  
Barang/Jasa oleh SKPD**

SKPD	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Rp)
Dinas Pendidikan	80.250.000,00	437.488.840,00
Dinas Sosial	2.371.796.000,00	7.649.203.300,00
Dinas Ketahanan Pangan	351.757.650,00	655.753.537,00
Kelurahan Kandangan Kota	0,00	115.360.000,00
Kelurahan Kandangan Utara	0,00	124.000.000,00
Kelurahan Kandangan Barat	223.401.100,00	147.233.000,00
Kelurahan Jambu Hilir	0,00	129.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.027.204.750,00</b>	<b>9.258.038.677,00</b>

#### 5.1.2.2 Belanja Modal

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi pengeluaran atas perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya.

Realisasi Belanja Modal TA 2020 adalah sebesar Rp202.599.536.825,27 yang berarti mencapai 90,54% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp223.758.473.829,00.

Penganggaran Belanja Modal mengikuti kebijakan akuntansi mengenai nilai minimum kapitalisasi aset tetap. Nilai minimum kapitalisasi aset tetap adalah batasan besaran minimum belanja per unit barang untuk dianggarkan sebagai Belanja Modal. Pembelian barang yang tidak memenuhi nilai minimum kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam Belanja Barang. Realisasi Belanja Modal menurut jenis adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.30 Rincian Realisasi Belanja Modal per Jenis**

Belanja Modal	Tahun 2020		Tahun 2019 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Tanah	5.957.750.000,00	5.665.753.150,00	19.667.528.871,00
Peralatan dan Mesin	63.491.774.758,00	46.653.731.769,00	49.819.929.451,00
Gedung dan Bangunan	59.483.137.610,00	57.811.004.588,92	117.039.470.166,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	92.321.767.775,00	90.023.175.380,35	149.267.120.517,75
Aset Tetap Lainnya	2.395.043.686,00	2.338.663.937,00	4.844.160.450,00
Aset Lainnya	109.000.000,00	107.208.000,00	349.700.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>223.758.473.829,00</b>	<b>202.599.536.825,27</b>	<b>340.987.909.455,75</b>



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Belanja modal dan realisasi aset yang diperoleh dari belanja modal dijelaskan pada bab Neraca mengenai Aset Tetap.

Realisasi belanja modal berdasarkan obyek belanja adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.31 Rincian Realisasi Belanja Modal per Obyek Belanja**

Uraian Belanja Modal	Tahun 2020		Tahun 2019 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
<b>Belanja Modal Tanah</b>	<b>5.957.750.000,00</b>	<b>5.665.753.150,00</b>	<b>19.667.528.871,00</b>
Pengadaan Tanah Perkampungan	0,00	0,00	4.964.314.000,00
Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung	4.797.750.000,00	4.530.005.250,00	8.645.934.071,00
Pengadaan Tanah untuk Bangunan Bukan Gedung	1.160.000.000,00	1.135.747.900,00	6.057.280.800,00
<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>63.491.774.758,00</b>	<b>46.653.731.769,00</b>	<b>49.819.929.451,00</b>
Pengadaan Alat-alat Besar Darat	0,00	0,00	761.815.800,00
Pengadaan Alat-alat Bantu	8.500.000,00	8.500.000,00	17.125.000,00
Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	4.404.724.150,00	3.948.159.000,00	7.693.624.329,00
Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	236.000.000,00	235.490.000,00	0,00
Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	0,00	0,00	65.493.000,00
Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	0,00	0,00	50.574.800,00
Pengadaan Alat Ukur	360.825.000,00	281.525.000,00	979.266.200,00
Pengadaan Alat Pengolahan	0,00	0,00	1.000.000,00
Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	308.563.500,00	285.080.200,00	220.120.000,00
Pengadaan Alat Kantor	6.928.411.361,00	6.819.942.318,00	7.404.151.548,00
Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.390.262.681,00	4.215.891.126,00	3.464.434.543,00
Pengadaan Komputer	3.143.624.873,00	2.984.834.300,00	3.266.914.050,00
Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	533.368.750,00	445.197.000,00	385.373.700,00
Pengadaan Alat Studio	444.369.524,00	404.091.721,00	747.779.223,00
Pengadaan Alat Komunikasi	64.687.000,00	46.385.000,00	160.003.545,00
Pengadaan Peralatan Pemancar	0,00	0,00	191.070.000,00
Pengadaan Alat Kedokteran	38.736.967.919,00	23.245.058.174,00	23.567.856.213,00
Pengadaan Alat Kesehatan	20.970.000,00	17.787.500,00	22.192.500,00
Pengadaan Unit-unit Laboratorium	1.193.150.000,00	1.165.706.000,00	9.285.000,00
Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	2.616.750.000,00	2.450.859.430,00	468.947.000,00
Pengadaan Peralatan Laboratorium Lingkungan Hidup	34.950.000,00	34.950.000,00	0,00
Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	5.500.000,00	5.500.000,00	17.500.000,00
Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	60.150.000,00	58.775.000,00	325.403.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian Belanja Modal	Tahun 2020		Tahun 2019 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>59.483.137.610,00</b>	<b>57.811.004.588,92</b>	<b>117.039.470.166,00</b>
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	48.063.376.060,00	46.576.511.326,92	115.095.493.847,00
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	11.101.491.550,00	10.919.622.262,00	1.557.236.819,00
Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	204.170.000,00	203.364.500,00	44.000.000,00
Pengadaan Bangunan Monumen/Bangunan Bersejarah	0,00	0,00	87.500.000,00
Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	76.100.000,00	75.921.500,00	90.739.500,00
Pengadaan Bangunan Rambu-rambu	38.000.000,00	35.585.000,00	164.500.000,00
<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>92.321.767.775,00</b>	<b>90.023.175.380,35</b>	<b>149.267.120.517,75</b>
Pengadaan Jalan	42.242.439.975,00	41.037.164.443,00	83.395.014.327,75
Pengadaan Jembatan	17.500.138.800,00	17.202.635.183,35	23.644.637.126,00
Pengadaan Bangunan Air Irigasi	10.378.390.000,00	10.049.044.296,00	28.401.229.835,00
Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai	3.690.300.000,00	3.534.186.486,00	3.734.450.998,00
Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	0,00	0,00	2.142.379.000,00
Pengadaan Bangunan Air Kotor	1.141.960.000,00	1.095.506.000,00	0,00
Pengadaan Bangunan Air	31.200.000,00	30.900.000,00	0,00
Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	10.745.639.000,00	10.541.146.310,00	163.596.483,00
Pengadaan Instalasi Air Kotor	754.825.000,00	722.194.252,00	938.362.600,00
Pengadaan Instalasi Pengelolaan Sampah	190.000.000,00	189.500.000,00	0,00
Pengadaan Jaringan Air Minum	0,00	0,00	7.300.000,00
Pengadaan Jaringan Listrik	5.466.875.000,00	5.441.398.410,00	6.840.150.148,00
Pengadaan Jaringan Gas	180.000.000,00	179.500.000,00	0,00
<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>	<b>2.395.043.686,00</b>	<b>2.338.663.937,00</b>	<b>4.844.160.450,00</b>
Pengadaan Buku	2.067.993.686,00	2.014.130.537,00	4.759.728.450,00
Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	35.950.000,00	35.800.000,00	52.150.000,00
Pengadaan Alat Olah raga Lainnya	106.100.000,00	105.908.000,00	0,00
Pengadaan Tanaman	0,00	0,00	19.500.000,00
Pengadaan Hewan Ternak	110.000.000,00	108.000.000,00	0,00
Pengadaan Aset Tetap Renovasi	75.000.000,00	74.825.400,00	12.782.000,00
<b>Belanja Modal Aset Lainnya</b>	<b>109.000.000,00</b>	<b>107.208.000,00</b>	<b>349.700.000,00</b>
Aplikasi, Aset Tak Berwujud	109.000.000,00	107.208.000,00	349.700.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>223.758.473.829,00</b>	<b>202.599.536.825,27</b>	<b>340.987.909.455,75</b>

Belanja Modal tersebut termasuk di dalamnya adalah belanja modal Dana BOS



yang direalisasi sebesar Rp5.361.518.716,00 dan belanja modal BOS Afirmasi yang direalisasi sebesar Rp1.872.555.503,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.32 Belanja Modal Dana BOS**

Belanja Modal Dana BOS	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Rp)
SD	5.382.092.052,00	7.259.692.254,00
SMP	1.851.982.167,00	1.564.986.140,00
<b>Jumlah</b>	<b>7.234.074.219,00</b>	<b>8.824.678.394,00</b>

**Tabel 5.1.33 Rincian Belanja Modal Dana BOS per Jenis Belanja**

Belanja Modal BOS	Jumlah Sekolah	Nilai (Rp)		Jumlah (Rp)
		Dana BOS	BOS Afirmasi	
Peralatan dan Mesin:				5.559.621.318,00
- SDN	187 dan 44	2.753.227.717,00	1.437.908.163,00	
- SMPN	29 dan 13	969.704.798,00	398.780.640,00	
		<b>3.722.932.515,00</b>	<b>1.836.688.803,00</b>	
Aset Tetap Lainnya:				1.674.452.901,00
- SDN	204	1.190.956.172,00	0,00	
- SMPN	31 dan 3	447.630.029,00	35.866.700,00	
		<b>1.638.586.201,00</b>	<b>35.866.700,00</b>	
<b>Jumlah</b>				<b>7.234.074.219,00</b>

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menganggarkan alokasi dana BOS Afirmasi berdasarkan pagu alokasi Satdikdas Negeri yang tercantum dalam naskah Perjanjian Hibah Daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 320/P/2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 364/P/2020, melalui mekanisme penganggaran.

### 5.1.2.3 Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga (BTT) adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bantuan sosial dan pengeluaran tak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan adalah pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana yang berhubungan langsung dengan masyarakat, tetapi anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Realisasi belanja tak terduga selama tahun 2020 sebesar Rp22.165.472.553,00 atau 21,94% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp101.012.569.189,00. Perbandingan belanja tak terduga TA 2020 dan TA 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel 5.1.34 Belanja Tak Terduga**

Belanja Tak Terduga	Tahun 2020		Tahun 2019 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Belanja Tak Terduga	101.012.569.189,00	22.165.472.553,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>101.012.569.189,00</b>	<b>22.165.472.553,00</b>	<b>0,00</b>

Belanja tak terduga digunakan untuk belanja penanganan Covid-19 melalui PPKD untuk beberapa SKPD penerima sebagai berikut:

**Tabel 5.1.35 Rincian Realisasi BTT untuk SKPD**

SKPD	SP2D (Rp)	SP2D nihil/ dikembalikan (Rp)	Realisasi (Rp)
Dinas Kesehatan	38.965.534.810,00	20.167.262.137,00	18.798.272.673,00
BPBD	4.194.348.550,00	1.073.348.670,00	3.120.999.880,00
Dinas Sosial	609.600.000,00	363.400.000,00	246.200.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>43.769.483.360,00</b>	<b>21.604.010.807,00</b>	<b>22.165.472.553,00</b>

**a. Dinas Kesehatan**

Belanja tak terduga untuk Dinas Kesehatan tahun 2020 direalisasi sebesar Rp18.798.272.673,00 dari total yang dianggarkan pada RKB Covid sebesar Rp38.965.534.810,00 melalui PPKD. BTT Covid untuk Dinas Kesehatan dilakukan sebanyak 7 tahap Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) Covid dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.36 Rincian BTT Covid Dinas Kesehatan**

Uraian	Realisasi (Rp)
Belanja Bahan/Alat Kesehatan Pakai Habis	6.927.417.768,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.090.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	34.950.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	29.601.510,00
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	268.514.000,00
Belanja Honorarium non PNS lainnya	357.600.000,00
Belanja sewa peralatan/mesin lainnya	2.430.878,00
Belanja makanan dan minuman pasien	306.261.500,00
Belanja Persediaan Alat Tulis Kantor	1.370.000,00
Belanja Penggandaan	4.350.000,00
Belanja Jasa listrik	33.278.400,00
Belanja Pemberian Makanan Tambahan	104.027.800,00
Belanja Upah instruktur/pemandu senam/pelatih tari dan lainnya	7.000.000,00
Belanja insentif satgas/petugas penanganan Covid 19	266.594.000,00
Belanja bahan peralatan/perengkapan rumah tangga	34.769.200,00
Belanja Perlengkapan Kantor Habis Pakai	108.404.780,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Realisasi (Rp)
Belanja Jasa telepon	1.085.000,00
Belanja Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	14.670.970,00
Belanja bahan kelengkapan peralatan kerja/kantor	6.400.000,00
Belanja Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	1.554.300,00
Belanja Jasa Kawat/Faksimili/Internet	2.588.767,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan (EX RSHB yg masih merupakan aset RSHB)	4.025.000,00
Belanja Modal Meubelair	54.915.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	60.942.590,00
Belanja Modal Alat Dapur	11.860.000,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	357.605.800,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	16.500.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	48.002.062,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	7.782.000,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Teelephone	4.323.900,00
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	7.500.000,00
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	6.235.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	325.000.000,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	26.813.100,00
Belanja Modal Bangunan Kesehatan	357.820.000,00
Belanja Lain-lain	386.720.552,00
<b>Jumlah</b>	<b>10.204.003.877,00</b>

Selain itu Dinas Kesehatan juga menyalurkan dana BTT Covid ke RSUD Brigjen H. Hasan Basry dengan rincian realisasi belanja sebagai berikut:

**Tabel 5.1.37 Realisasi BTT Covid RSUD per Jenis Belanja**

Uraian	Realisasi (Rp)
Belanja Bahan/Alat Kesehatan Pakai Habis	2.979.350.200,00
Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	617.176.290,00
Belanja Honorarium non PNS lainnya	11.351.613,00
Belanja Pemberian Makanan Tambahan	558.855.880,00
Belanja insentif satgas/petugas penanganan Covid 19	995.859.000,00
Belanja Honorarium Tenaga Teknis Kesehatan	798.993.568,00
Belanja bahan peralatan/perlengkapan rumah tangga	71.904.250,00
Belanja Sewa Gedung/Tenda	31.548.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	539.000.000,00
Belanja Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	146.695.120,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Meubelair	245.101.700,00
Belanja Modal Alat Pendingin	1.131.673.350,00
Belanja Modal Alat Dapur	1.499.025,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	191.800.000,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	80.000.000,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	70.760.800,00
Belanja Modal Bangunan Kesehatan	122.700.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>8.594.268.796,00</b>

**b. Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik (BPB Kesbangpol)**

Realisasi belanja tak terduga untuk BPB Kesbangpol tahun 2020 sebesar Rp3.120.9999.880,00 dari total yang dianggarkan pada RKB Covid Tahap 1 sampai dengan Tahap 10 sebesar Rp4.194.348.550,00. Dana BTT Covid dari BPB Kesbangpol kemudian disalurkan kepada 2 instansi vertikal, 5 SKPD, 11 Kecamatan, dan 4 Kelurahan.

**Tabel 5.1.38 Realisasi BTT Covid per SKPD pada BPB Kesbangpol**

SKPD/Instansi Vertikal	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
BPB Kesbangpol	566.215.000,00	465.469.000,00
Dinas Kesehatan	244.720.000,00	147.630.000,00
RSUD H. Hasan Basry	276.948.000,00	269.472.000,00
Dinas Perdagangan	232.630.000,00	209.085.000,00
Dinas Perhubungan	86.240.000,00	82.234.100,00
Satuan Polisi PP	736.239.000,00	638.585.130,00
Kecamatan Kandangan	122.535.000,00	49.876.000,00
Kelurahan Kandangan Kota	143.630.000,00	68.807.600,00
Kelurahan Kandangan Utara	114.730.000,00	46.218.000,00
Kelurahan Kandangan Barat	125.270.000,00	71.916.000,00
Kelurahan Jambu Hilir	122.250.000,00	56.810.000,00
Kecamatan Padang Batung	85.190.000,00	33.950.000,00
Kecamatan Loksado	62.305.000,00	53.405.000,00
Kecamatan Sungai Raya	81.775.000,00	30.208.600,00
Kecamatan Simpur	49.455.000,00	38.440.500,00
Kecamatan Kalumpang	91.795.000,00	23.835.600,00
Kecamatan Angkinang	72.510.000,00	21.582.000,00
Kecamatan Telaga Langsat	81.245.000,00	27.652.800,00
Kecamatan Daha Selatan	100.135.000,00	47.756.000,00
Kecamatan Daha Utara	126.635.000,00	103.900.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

SKPD/Instansi Vertikal	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Kecamatan Daha Barat	66.360.000,00	49.720.000,00
Polres HSS	480.646.550,00	459.556.550,00
Kodim 1003 Kandangan	124.890.000,00	124.890.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>4.194.348.550,00</b>	<b>3.120.999.880,00</b>

### 1. Badan Penanggulangan Bencana Kesbangpol

Realisasi penggunaan dana dari BTT Covid pada Badan Penanggulangan Bencana, Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2020 sebesar Rp465.469.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.39 Realisasi BTT Covid per Jenis Belanja**

Uraian	Realisasi (Rp)
Belanja Persediaan Bahan Pakai Habis Kesehatan	9.026.500,00
Belanja Persediaan Alat/Bahan Kebersihan	26.400.000,00
Belanja Sewa alat	12.500.000,00
Belanja honorarium	79.310.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	187.610.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak	10.360.000,00
Belanja Makanan Pokok	80.475.000,00
Belanja Cetak	10.437.500,00
Belanja ATK	1.450.000,00
Belanja Modal Thermo Gun	3.500.000,00
Belanja Modal Hand Sprayer	7.400.000,00
Belanja Moda Tandon Air	37.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>465.469.000,00</b>

### 2. Dinas Kesehatan

Realisasi penggunaan dana dari BTT Covid pada Dinas Kesehatan tahun 2020 sebesar Rp147.630.000,00 yang terdiri atas Belanja Persediaan Habis Pakai sebesar Rp145.200.000,00; dan Belanja Honorarium Non PNS sebesar Rp2.430.000,00.

### 3. RSUD H. Hasan Basry

Realisasi penggunaan dana dari BTT Covid pada RSUD H. Hasan Basry tahun 2020 berupa Belanja Honorarium Non PNS sebesar Rp269.472.000,00.

### 4. Satuan Polisi Pamong Praja

Realisasi penggunaan dana dari BTT Covid pada Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2020 sebesar Rp638.585.130,00 dengan rincian sebagai



berikut:

**Tabel 5.1.40 Realisasi BTT Covid per Jenis Belanja**

Uraian	Realisasi (Rp)
Belanja Persediaan Bahan Pakai Habis Kesehatan	26.488.400,00
Belanja Bahan Cetak	2.525.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	555.510.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak	36.909.000,00
Belanja ATK	4.105.000,00
Belanja bahan Pakai Habis	375.000,00
Belanja Modal Thermo Gun	1.700.000,00
Belanja Modal Hand Sprayer	2.266.000,00
Belanja Modal Tandon	4.114.230,00
Belanja Modal Megaphone	2.275.000,00
Belanja Modal Speaker/Wireless	2.317.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>638.585.130,00</b>

#### 5. Dinas Perhubungan

Realisasi penggunaan dana dari BTT Covid pada Dinas Perhubungan tahun 2020 sebesar Rp82.234.100,00 yang terdiri atas Belanja Honorarium PNS Rp58.240.000,00; Belanja Bahan Bakar Minyak sebesar Rp7.994.100,00; dan Belanja Modal Megaphone sebesar Rp16.000.000,00.

#### 6. Dinas Perdagangan

Realisasi penggunaan dana dari BTT Covid pada Dinas Perdagangan tahun 2020 sebesar Rp209.085.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.41 Realisasi BTT Covid per Jenis Belanja**

Uraian	Realisasi (Rp)
Belanja Bahan Habis Pakai Kesehatan	88.140.000,00
Belanja Persediaan Alat/Bahan Kebersihan	9.820.000,00
Belanja Cetak	3.470.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	4.200.000,00
Belanja Habis Pakai	7.955.000,00
Belanja Modal Thermo Gun	6.000.000,00
Belanja Modal Tandon	79.500.000,00
Belanja Modal Megaphone	10.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>209.085.000,00</b>

#### 7. Kecamatan Kandangan

Realisasi penggunaan dana dari BTT Covid pada Kecamatan Kandangan



tahun 2020 sebesar Rp49.876.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.42 Realisasi BTT Covid per Jenis Belanja**

Uraian	Realisasi (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas	37.310.000,00
Belanja Makanan	5.250.000,00
Belanja Cetak	3.000.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak	1.000.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis	665.000,00
Belanja Modal Thermo Gun	1.771.000,00
Belanja Modal Megaphone	880.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>49.876.000,00</b>

## 8. Kelurahan Kandangan Kota

Realisasi penggunaan dana dari BTT Covid pada Kelurahan Kandangan Kota tahun 2020 sebesar Rp68.807.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.43 Realisasi BTT Covid per Jenis Belanja**

Uraian	Realisasi (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas	18.120.000,00
Belanja Makanan	2.550.000,00
Belanja Cetak	1.950.000,00
Belanja Persediaan Alat/bahan kebersihan	6.736.600,00
Belanja habis pakai kesehatan	36.941.000,00
Belanja Modal Thermo Gun	1.950.000,00
Belanja Modal Megaphone	560.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>68.807.600,00</b>

## 9. Kelurahan Kandangan Utara

Realisasi penggunaan dana dari BTT Covid pada Kelurahan Kandangan Utara tahun 2020 sebesar Rp57.288.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.44 Realisasi BTT Covid per Jenis Belanja**

Uraian	Realisasi (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas	21.720.000,00
Belanja Makanan	13.050.000,00
Belanja Cetak	2.330.000,00
Belanja Persediaan Alat/bahan kebersihan	1.700.000,00
Belanja habis pakai kesehatan	16.012.000,00
Belanja Modal Thermo Gun	1.716.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Megaphone	760.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>57.288.000,00</b>

#### 10. Kelurahan Kandangan Barat

Realisasi penggunaan dana dari BTT Covid pada Kelurahan Kandangan Barat tahun 2020 sebesar Rp60.846.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.45 Realisasi BTT Covid per Jenis Belanja**

Uraian	Realisasi (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas	19.920.000,00
Belanja Makanan	3.500.000,00
Belanja Cetak	3.760.000,00
Belanja Persediaan Alat/bahan kebersihan	1.950.000,00
Belanja Habis Pakai Kesehatan	27.250.000,00
Belanja ATK	1.800.000,00
Belanja Modal Thermo Gun	1.716.000,00
Belanja Modal Megaphone	950.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>60.846.000,00</b>

#### 11. Kelurahan Jambu Hilir

Realisasi penggunaan dana dari BTT Covid pada Kelurahan Jambu Hilir tahun 2020 sebesar Rp56.810.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.46 Realisasi BTT Covid per Jenis Belanja**

Uraian	Realisasi (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas	19.740.000,00
Belanja Makanan	2.900.000,00
Belanja Cetak	3.550.000,00
Belanja Persediaan Alat/bahan kebersihan	3.090.000,00
Belanja habis pakai kesehatan	24.000.000,00
Belanja atk	864.000,00
Belanja Modal Thermo Gun	1.716.000,00
Belanja Modal Megaphone	950.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>56.810.000,00</b>

#### 12. Kecamatan Padang Batung

Realisasi penggunaan dana dari BTT Covid pada Kecamatan Padang Batung tahun 2020 sebesar Rp33.950.000,00 dengan rincian sebagai berikut:



**Tabel 5.1.47 Realisasi BTT Covid per Jenis Belanja**

Uraian	Realisasi (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas	20.300.000,00
Belanja Makanan	6.300.000,00
Belanja Cetak	4.200.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak	1.500.000,00
Belanja Modal Thermo Gun	1.650.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>33.950.000,00</b>

### 13. Kecamatan Loksado

Realisasi penggunaan dana dari BTT Covid pada Kecamatan Loksado tahun 2020 sebesar Rp53.405.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.48 Realisasi BTT Covid per Jenis Belanja**

Uraian	Realisasi (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas	32.340.000,00
Belanja Makanan	18.200.000,00
Belanja Cetak	1.155.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak	210.000,00
Belanja Modal Thermo Gun	1.500.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>53.405.000,00</b>

### 14. Kecamatan Sungai Raya

Realisasi penggunaan dana dari BTT Covid pada Kecamatan Sungai Raya tahun 2020 sebesar Rp30.208.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.49 Realisasi BTT Covid per Jenis Belanja**

Uraian	Realisasi (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas	22.400.000,00
Belanja Makanan	4.900.000,00
Belanja Modal Thermo Gun	1.623.600,00
Belanja Modal Megaphone	1.285.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>30.208.600,00</b>

### 15. Kecamatan Simpur

Realisasi penggunaan dana dari BTT Covid pada Kecamatan Simpur tahun 2020 sebesar Rp38.440.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.50 Realisasi BTT Covid per Jenis Belanja**

Uraian	Realisasi (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas	21.320.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Realisasi (Rp)
Belanja Makanan	5.950.000,00
Belanja Cetak	4.400.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak	1.500.000,00
Belanja bahan pakai Habis	910.000,00
Belanja Modal Thermo Gun	3.400.000,00
Belanja Modal Megaphone	960.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>38.440.500,00</b>

#### 16. Kecamatan Kalumpang

Realisasi penggunaan dana dari BTT Covid pada Kecamatan Kalumpang tahun 2020 sebesar Rp23.835.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.51 Realisasi BTT Covid per Jenis Belanja**

Uraian	Realisasi (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas	14.000.000,00
Belanja Makanan	7.000.000,00
Belanja Cetak	1.212.000,00
Belanja Modal Thermo Gun	1.623.600,00
<b>Jumlah</b>	<b>23.835.600,00</b>

#### 17. Kecamatan Angkinang

Realisasi penggunaan dana dari BTT Covid pada Kecamatan Angkinang tahun 2020 sebesar Rp21.582.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.52 Realisasi BTT Covid per Jenis Belanja**

Uraian	Realisasi (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas	14.000.000,00
Belanja Makanan	3.360.000,00
Belanja Cetak	975.000,00
Belanja Modal Thermo Gun	3.247.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>21.582.000,00</b>

#### 18. Kecamatan Telaga Langsat

Realisasi penggunaan dana dari BTT Covid pada Kecamatan Telaga Langsat tahun 2020 sebesar Rp27.652.800,00 dengan rincian sebagai berikut:



**Tabel 5.1.53 Realisasi BTT Covid per Jenis Belanja**

Uraian	Realisasi (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas	12.350.000,00
Belanja Makanan	4.775.000,00
Belanja Cetak	2.802.800,00
Belanja Modal Thermo Gun	6.440.000,00
Belanja Modal Megaphone	1.285.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>27.652.800,00</b>

### 19. Kecamatan Daha Selatan

Realisasi penggunaan dana dari BTT Covid pada Kecamatan Daha Selatan tahun 2020 sebesar Rp47.756.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.54 Realisasi BTT Covid per Jenis Belanja**

Uraian	Realisasi (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas	34.300.000,00
Belanja Makanan	7.000.000,00
Belanja Cetak	1.250.000,00
Belanja Bahan pakai Habis	1.140.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak	1.200.000,00
Belanja Modal Thermo Gun	1.716.000,00
Belanja Modal Megaphone	1.150.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>47.756.000,00</b>

### 20. Kecamatan Daha Utara

Realisasi penggunaan dana dari BTT Covid pada Kecamatan Daha Utara tahun 2020 sebesar Rp103.900.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.55 Realisasi BTT Covid per Jenis Belanja**

Uraian	Realisasi (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas	89.600.000,00
Belanja Makanan	7.000.000,00
Belanja Cetak	1.250.000,00
Belanja Bahan pakai Habis	1.800.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak	1.700.000,00
Belanja Modal Thermo Gun	1.700.000,00
Belanja Modal Megaphone	850.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>103.900.000,00</b>



## 21. Kecamatan Daha Barat

Realisasi penggunaan dana dari BTT Covid pada Kecamatan Daha Barat tahun 2020 sebesar Rp49.720.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.56 Realisasi BTT Covid per Jenis Belanja**

Uraian	Realisasi (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00
Belanja Makanan	5.250.000,00
Belanja Cetak	4.650.000,00
Belanja Bahan pakai Habis	2.090.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak	230.000,00
Belanja Modal Thermo Gun	2.500.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>49.720.000,00</b>

## 22. Polres Hulu Sungai Selatan

Realisasi penggunaan dana dari BTT Covid pada Polres Hulu Sungai Selatan tahun 2020 sebesar Rp459.556.550,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.57 Realisasi BTT Covid per Jenis Belanja**

Uraian	Realisasi (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas	368.060.000,00
Belanja cetak spanduk/banner	51.651.550,00
Belanja bahan kebersihan	8.350.000,00
Belanja Sewa	26.100.000,00
Belanja Bahan Perlengkapan	5.395.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>459.556.550,00</b>

## 23. Kodim 1003 Kandangan

Realisasi penggunaan dana dari BTT Covid pada Kodim 1003 Kandangan tahun 2020 sebesar Rp124.890.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.58 Realisasi BTT Covid per Jenis Belanja**

Uraian	Realisasi (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas	107.590.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak	7.500.000,00
Belanja Bahan Pakai Habis	5.000.000,00
Belanja Bahan Perlengkapan	800.000,00
Belanja Modal Thermo Gun	4.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>124.890.000,00</b>



**c. Dinas Sosial**

Realisasi belanja tak terduga untuk Dinas Sosial tahun 2020 sebesar Rp246.200.000,00 dari total yang dianggarkan pada RKB Covid Tahap 1 sampai dengan Tahap 4 sebesar Rp609.600.000,00. Dana BTT Covid tersebut digunakan untuk belanja bahan makanan keperluan dapur umum sebesar Rp60.000.000,00 dan belanja bantuan sosial untuk masyarakat perorangan yang terdampak covid sebesar Rp186.200.000,00.

**Tabel 5.1.59 Realisasi BTT Covid per Jenis Belanja**

Uraian	Realisasi (Rp)
Belanja Bahan Makanan Pokok	60.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial	186.200.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>246.200.000,00</b>

**5.1.3 TRANSFER**

Menurut Permendagri 64 Tahun 2013 Belanja Transfer merupakan belanja yang terdiri atas Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Transfer Bantuan Keuangan. Belanja Transfer Pendapatan terdiri dari belanja bagi hasil pajak daerah dan belanja bagi hasil pendapatan lainnya. Sedangkan Transfer Bantuan Keuangan terdiri atas Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Bantuan Keuangan Lainnya. Realisasi Transfer TA 2020 sebesar Rp195.672.146.320,00,00 yang berarti mencapai 99,16% dari anggaran yang ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp197.328.358.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.60 Rincian Realisasi Transfer**

Transfer	Tahun 2020		Tahun 2019 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	2.288.000.000,00	2.288.000.000,00	2.840.000.000,00
Transfer Bantuan Keuangan	195.040.358.000,00	193.384.146.320,00	197.251.206.098,00
<b>Jumlah</b>	<b>197.328.358.000,00</b>	<b>195.672.146.320,00</b>	<b>200.091.206.098,00</b>

**5.1.3.1 Transfer Bagi Hasil Pendapatan**

Realisasi Transfer bagi hasil pendapatan sebesar Rp2.288.000.000,00 merupakan transfer atas pendapatan bagi hasil pajak dan retribusi daerah untuk pembiayaan APB-Desa sebanyak 144 Desa se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Transfer Bagi Hasil Pendapatan direalisasikan sebesar 100,00% dari total anggaran yang telah ditetapkan pada APBD Perubahan sebesar Rp2.288.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.61 Rincian Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan**

Transfer Bagi Hasil Pendapatan	Tahun 2020		Tahun 2019 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Bagi Hasil Pajak	1.274.000.000,00	1.274.000.000,00	1.290.000.000,00



Transfer Bagi Hasil Pendapatan	Tahun 2020		Tahun 2019 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Bagi Hasil Retribusi	1.014.000.000,00	1.014.000.000,00	1.550.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.288.000.000,00</b>	<b>2.288.000.000,00</b>	<b>2.840.000.000,00</b>

#### 5.1.3.1.1 Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Realisasi transfer bagi hasil pajak daerah (BHPD) TA 2020 sebesar Rp1.274.000.000,00 merupakan belanja bagi hasil pajak daerah yang disalurkan kepada 114 Desa berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2020. Penyaluran terhadap BHPD dilakukan dalam 4 (empat) tahap, yaitu tahap I sebesar 10%, tahap II sebesar 40%, tahap III sebesar 40% dan tahap IV sebesar 10%. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dana sudah disalurkan seluruhnya kepada 144 Desa yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

#### 5.1.3.1.2 Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah

Realisasi transfer bagi hasil retribusi daerah (BHRD) TA 2020 sebesar Rp1.014.000.000,00 merupakan belanja bagi hasil pajak daerah yang disalurkan kepada 114 Desa berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2020. Penyaluran terhadap BHRD dilakukan dalam 4 (empat) tahap, yaitu tahap I sebesar 10%, tahap II sebesar 40%, tahap III sebesar 40% dan tahap IV sebesar 10%. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 dana sudah disalurkan seluruhnya kepada 144 Desa yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

#### 5.1.3.2 Transfer Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan dalam kelompok Belanja Bantuan Keuangan, namun untuk kepentingan penyajian laporan keuangan disajikan dalam kelompok Belanja Transfer sesuai dengan Bagan Akun Standar dalam Lampiran III Permendagri 64 Tahun 2013. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp193.384.146.320,00 atau mencapai 99,15% dari total anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp195.040.358.000,00. Transfer Bantuan Keuangan terdiri atas Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Bantuan Keuangan Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.62 Rincian Realisasi Transfer Bantuan Keuangan**

Transfer Bantuan Keuangan	Tahun 2020		Tahun 2019 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Bantuan Keuangan kepada Desa	194.256.404.000,00	192.700.196.000,00	196.583.735.200,00



Transfer Bantuan Keuangan	Tahun 2020		Tahun 2019 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Bantuan Keuangan Lainnya	783.954.000,00	683.950.320,00	667.470.898,00
<b>Jumlah</b>	<b>195.040.358.000,00</b>	<b>193.384.146.320,00</b>	<b>197.251.206.098,00</b>

#### 5.1.3.2.1 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa

Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa TA 2020 direalisasi sebesar Rp192.700.196.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.63 Rincian Realisasi Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa**

Bantuan Keuangan kepada Desa	Tahun 2020		Tahun 2019 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Alokasi Dana Desa	75.266.000.000,00	75.266.000.000,00	78.266.000.000,00
Dana Desa	118.990.404.000,00	117.434.196.000,00	118.317.735.200,00
<b>Jumlah</b>	<b>194.256.404.000,00</b>	<b>192.700.196.000,00</b>	<b>196.583.735.200,00</b>

Transfer bantuan keuangan kepada desa terdiri atas:

- Alokasi Dana Desa sebesar Rp75.266.000.000,00 yang diberikan kepada 144 Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui 4 tahapan realisasi;
- Dana Desa sebesar Rp117.434.196.000,00 dengan mekanisme pencairan yang diatur dalam SE Menteri Dalam Negeri Nomor 910/6966/SJ Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana Desa oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai berikut:
  1. KPPN menerbitkan SP2D untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
  2. KPPN menyampaikan salinan SP2D kepada Bupati dan Kepala Desa.
  3. Berdasarkan salinan SP2D tersebut, Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada KPPN dan Bupati melalui Badan Keuangan Daerah.
  4. Berdasarkan salinan SP2D yang disampaikan kepada Bupati dan lembar konfirmasi penyaluran Dana Desa di RKD, PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan Dana Desa (SP2DD) sebagai dasar pencatatan realisasi pendapatan Dana Desa.
  5. Berdasarkan SP2DD tersebut, PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Pengesahan Belanja Dana Desa (SPBDD) sebagai dasar pencatatan realisasi belanja bantuan keuangan ke desa.
  6. Penerbitan SP2DD dan SPBDD dilakukan berdasarkan tahapan penyaluran Dana Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



### 5.1.3.2.2 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya TA 2020 direalisasikan sebesar Rp683.950.320,00 merupakan bantuan keuangan kepada Partai Politik dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.64 Rincian Realisasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik**

Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Tahun 2020		Tahun 2019 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	0,00	0,00	25.268.658,00
Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	155.124.000,00	155.123.509,00	125.639.568,00
Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	69.261.000,00	69.260.935,00	51.623.220,00
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	172.137.000,00	172.136.946,00	141.379.500,00
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	51.605.000,00	51.604.417,00	59.340.700,00
Partai Golongan Karya (GOLKAR)	78.253.000,00	78.252.784,00	94.630.200,00
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	35.257.000,00	35.256.625,00	41.772.000,00
Partai Bulan Bintang (PBB)	0,00	0,00	14.932.826,00
Partai Demokrasi Ondonesia Perjuangan (PDIP)	51.391.000,00	51.390.057,00	48.046.785,00
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	0,00	0,00	8.094.921,00
Partai Demokrat (DEMOKRAT)	33.097.000,00	33.096.099,00	40.980.420,00
Partai Amanat Nasional (PAN)	37.829.000,00	37.828.948,00	15.762.100,00
Partai Politik (Cadangan)	100.000.000,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>783.954.000,00</b>	<b>683.950.320,00</b>	<b>667.470.898,00</b>

Belanja bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2013 diantaranya menyebutkan pada point 7 bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis bantuan keuangan obyek bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek nama partai politik penerima bantuan keuangan.

### 5.1.4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Realisasi Pembiayaan Neto TA 2020 adalah sebesar Rp275.280.367.245,44 yang berarti mencapai 100,01% dari jumlah yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp275.260.913.245,00. Pembiayaan Neto terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, dengan rincian sebagai berikut:



**Tabel 5.1.65 Rincian Pembiayaan Neto**

Pembiayaan	Tahun 2020		Tahun 2019 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Penerimaan Pembiayaan	275.260.913.245,00	275.280.367.245,44	187.321.728.933,38
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Pembiayaan Netto</b>	<b>275.260.913.245,00</b>	<b>275.280.367.245,44</b>	<b>187.321.728.933,38</b>

#### 5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Realisasi Penerimaan dari Pembiayaan Daerah TA 2020 sebesar Rp275.280.367.245,44 atau 100,01% dari total anggaran perubahan sebesar Rp275.260.913.245,00. Penerimaan pembiayaan mencakup penerimaan Kas Daerah yang berasal dari penggunaan SiLPA tahun lalu, penerimaan kembali piutang, dan penerimaan hasil investasi non permanen dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.66 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah**

Penerimaan Pembiayaan Daerah	Tahun 2020		Tahun 2019 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
Penggunaan SiLPA	275.260.913.245,00	275.260.913.245,44	187.248.978.933,38
Penerimaan Kembali Piutang	0,00	5.504.000,00	30.750.000,00
Penerimaan Hasil Investasi Non Permanen	0,00	13.950.000,00	42.000.000,00
<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>275.260.913.245,00</b>	<b>275.280.367.245,44</b>	<b>187.321.728.933,38</b>

#### 5.1.4.1.1 Penggunaan SiLPA

Penggunaan SiLPA merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2019 yang dialokasikan untuk pembiayaan pada TA 2020.

Penggunaan SiLPA TA 2020 sebesar Rp275.260.913.245,44. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan TA 2019. Penetapan penggunaan SiLPA sebagai sumber pembiayaan anggaran ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja TA 2020.

Penggunaan SiLPA berasal dari:

1. Sisa kas di Kas Daerah sebesar Rp249.364.637.403,69;
2. Sisa kas di Kas BLUD sebesar Rp22.085.611.087,00;
3. Sisa kas di Kas Dana Kapitasi JKN sebesar Rp1.600.857.949,75; dan
4. Sisa kas di Bendahara Dana BOS sebesar Rp2.209.806.805,00.

#### 5.1.4.1.2 Penerimaan Kembali Piutang

Realisasi penerimaan kembali piutang TA 2020 sebesar Rp5.504.000,00 terdiri



atas penerimaan kembali dana talangan ketahanan pangan LUEP atas nama Hamdi (LUEP Karya Bersama) sebesar Rp1.000.000,00 dan penerimaan kembali pinjaman Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebesar Rp4.504.000,00 pada satu Kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.67 Rincian Penerimaan Kembali BUMDES**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Rp)
Kec. Loksado PT GERBANG LOKSADO LESTARI	0,00	17.750.000,00
Kec. Kandangan PT BUMI ANTALUDIN	4.504.000,00	5.500.000,00
Kec. Angkinang PT ANGKINANG MAKMUR SEJAHTERA	0,00	4.500.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.504.000,00</b>	<b>27.750.000,00</b>

**Tabel 5.1.68 Rincian Penerimaan LUEP**

LUEP	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Rp)
LUEP Karya Bersama	1.000.000,00	3.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>

#### 5.1.4.1.3 Penerimaan Hasil Investasi Non Permanen

Realisasi penerimaan hasil investasi non permanen TA 2020 sebesar Rp13.950.000,00 yang merupakan setoran dari beberapa kelompok tani pada pengembangan sapi yang dikelola oleh Dinas Pertanian.

#### 5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak menganggarkan Pengeluaran Pembiayaan selama Tahun 2020.

#### 5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Berdasarkan surplus anggaran sebelum pembiayaan sebesar Rp27.072.307.032,84 dan realisasi Pembiayaan Neto sebesar Rp275.280.367.245,44 sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2020 sebesar Rp302.352.674.278,28. SiLPA TA 2020 tersebut berasal dari kelebihan penerimaan pendapatan, efisiensi anggaran belanja, dan kelebihan pembiayaan neto sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Dari target pendapatan sebesar Rp1.275.504.067.026,00 realisasinya sebesar Rp1.353.819.885.219,86 sehingga terdapat pelampauan target pendapatan sebesar Rp78.315.818.193,86.
2. Dari anggaran belanja sebesar Rp1.353.436.622.271,00 realisasinya sebesar Rp1.131.075.431.867,02 sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp222.361.190.403,98.

Efisiensi anggaran belanja tersebut terdiri atas rincian sebagai berikut:

- a. Efisiensi anggaran belanja operasi sebesar Rp122.355.156.764,25;



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

---

- b. Efisiensi anggaran belanja modal sebesar Rp21.158.937.003,73; dan
- c. Efisiensi anggaran belanja tak terduga sebesar Rp78.847.096.636,00.
3. Dari anggaran Transfer sebesar Rp197.328.358.000,00 realisasinya sebesar Rp195.672.146.320,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.656.211.680,00.
4. Terdapat pelampauan target pembiayaan neto sebesar Rp19.454.000,44 yang berasal dari pelampauan target penerimaan pembiayaan.



## **5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)**

### **5.2.1 Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal**

Saldo Anggaran Lebih (SAL) TA 2019 sebesar Rp275.260.913.245,44 ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019.

### **5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan**

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp275.260.913.245,44 direalisasikan sebagai penggunaan SiLPA TA 2020 dari yang dianggarkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan APBD TA 2020 sebesar Rp275.260.913.245,00.

### **5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2020**

Berdasarkan surplus anggaran sebelum pembiayaan sebesar Rp27.072.307.032,84 dan realisasi Pembiayaan Neto sebesar Rp275.280.367.245,44 sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2020 sebesar Rp302.352.674.278,28. SiLPA TA 2020 tersebut berasal dari pelampauan target pendapatan, efisiensi belanja, transfer, dan pelampauan target pembiayaan neto, sebagaimana diuraikan berikut ini.

- A. Dari target pendapatan sebesar Rp1.275.504.067.026,00 realisasinya sebesar Rp1.353.819.885.219,86 sehingga terdapat pelampauan target pendapatan sebesar Rp78.315.818.193,86. Pelampuan target pendapatan tersebut berasal dari pelampauan target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp7.346.071.487,86; ditambah pelampuan target Pendapatan Transfer sebesar Rp74.434.106.005,00; dikurangi belum tercapainya target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp3.464.359.299,00.
- B. Dari anggaran belanja sebesar Rp1.353.436.622.271,00 realisasinya sebesar Rp1.131.075431.867,02 sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp222.361.190.403,98. Efisiensi anggaran belanja tersebut terdiri atas rincian sebagai berikut:
  1. Efisiensi anggaran belanja operasi sebesar Rp122.355.156.764,25 yang terdiri atas:
    - Efisiensi anggaran pembayaran belanja pegawai sebesar Rp82.101.564.783,00.
    - Efisiensi anggaran pembayaran belanja barang dan jasa sebesar Rp27.105.022.142,25.
    - Sisa anggaran untuk pembayaran belanja hibah sebesar Rp1.539.628.595,00.
    - Sisa anggaran untuk pembayaran belanja Bantuan Sosial sebesar Rp11.608.941.244,00.
  2. Sisa anggaran belanja modal sebesar Rp21.158.937.003,73 dengan



rincian:

- Sisa anggaran belanja modal tanah sebesar Rp291.996.850,00.
  - Sisa anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp16.838.042.989,00.
  - Sisa anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp1.672.133.021,08.
  - Sisa anggaran belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp2.298.592.394,65.
  - Sisa anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp56.379.749,00.
  - Sisa anggaran belanja modal aset lainnya sebesar Rp1.792.000,00.
3. Efisiensi anggaran belanja tidak terduga sebesar Rp78.847.096.636,00.
- C. Terdapat sisa anggaran Transfer sebesar Rp1.656.211.680,00 berupa sisa anggaran transfer bantuan keuangan yang terdiri atas sisa anggaran bantuan keuangan ke desa sebesar Rp1.556.208.000,00 dan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp100.003.680,00.
- D. Terdapat pelampauan target pembiayaan neto sebesar Rp19.454.000,44 yang berasal dari pelampauan target penerimaan pembiayaan yang terdiri atas pelampauan target penerimaan kembali piutang (LUEP dan BUMDES) sebesar Rp5.504.000,00; pelampauan realisasi SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp0,44; dan pelampauan target penerimaan hasil investasi non permanen sebesar Rp13.950.000,00.

#### **5.2.4 Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir**

Jumlah SAL per 31 Desember 2020 sebesar Rp302.352.674.278,28. Dari SiLPA TA 2020 sebesar Rp302.352.674.278,28 terdapat SiLPA terikat sebesar Rp34.039.544.160,00 yang terdiri dari:

1. Sisa DAK Fisik Tahun 2020 sebesar Rp96.299.293,00;
2. Sisa DAK Non Fisik Tahun 2020 sebesar Rp15.951.327.087,00;
3. Sisa Dana Desa Tahun 2019 sebesar Rp320.264.800,00, dan telah disetor ke Kas Negara pada tanggal 20 April 2021;
4. Dana BLUD sebesar Rp15.962.571.745,00;
5. Dana Kapitasi JKN sebesar Rp1.279.182.660,00;
6. Dana BOS sebesar Rp429.898.575,00.



### 5.3 Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Pada penjelasan Neraca ini digunakan Neraca per 31 Desember 2019 sebagai komparatif.

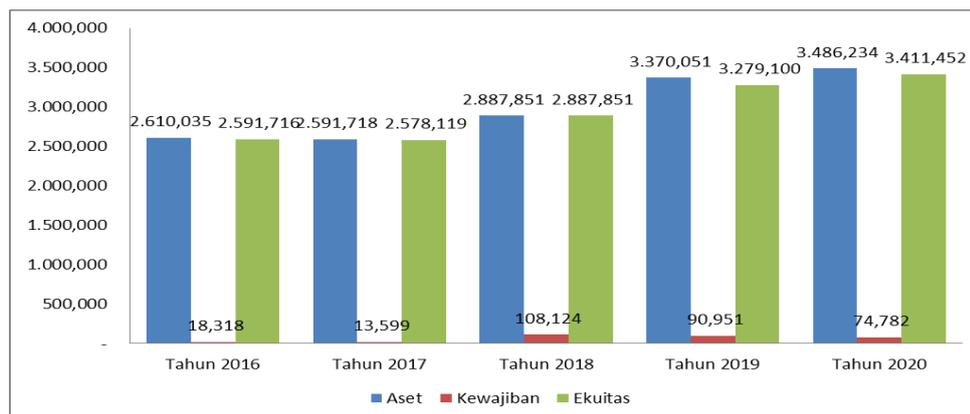
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.3.1 Ringkasan Neraca Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

Uraian:	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Aset Lancar	395.740.541.491,97	337.712.519.458,56
Investasi Jangka Panjang	87.548.450.074,96	87.166.450.036,04
Aset Tetap	2.993.686.015.370,44	2.937.131.721.037,06
Dana Cadangan	0,00	0,00
Aset Lainnya	8.351.368.121,00	8.041.216.848,00
<b>Jumlah Aset</b>	<b>3.485.326.375.058,37</b>	<b>3.370.051.907.379,66</b>
Kewajiban Jangka Pendek	74.326.063.069,00	90.951.033.325,00
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>74.326.063.069,00</b>	<b>90.951.033.325,00</b>
Ekuitas	3.411.000.311.989,37	3.279.100.874.054,66
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>3.485.326.375.058,37</b>	<b>3.370.051.907.379,66</b>

Perbandingan aset, kewajiban dan ekuitas dana selama lima tahun terakhir untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan disajikan dalam grafik berikut:

**Grafik 5.3: Perbandingan aset, kewajiban dan ekuitas pada Neraca Tahun 2016-2020**



#### 5.3.1 Aset

Jumlah Aset per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp3.485.326.375.058,37 dan Rp3.370.051.907.379,66 naik sebesar Rp115.274.467.678,71 atau 3,42%.



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

**Tabel 5.3.2 Ringkasan Aset Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

Uraian:	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Aset Lancar	395.740.541.491,97	337.712.519.458,56
Investasi Jangka Panjang	87.548.450.074,96	87.166.450.036,04
Aset Tetap	2.993.686.015.370,44	2.937.131.721.037,06
Dana Cadangan	0,00	0,00
Aset Lainnya	8.351.368.121,00	8.041.216.848,00
<b>Jumlah Aset</b>	<b>3.485.326.375.058,37</b>	<b>3.370.051.907.379,66</b>

**5.3.1.1 Aset Lancar**

Aset lancar merupakan kelompok pos/rekening yang menggambarkan kekayaan daerah yang dicairkan atau memiliki perputaran paling lama satu tahun dihitung sejak tanggal neraca. Jumlah aset lancar per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp395.740.541.491,97 dan Rp337.712.519.458,56 naik sebesar Rp58.028.022.033,41 atau 17,18%. Saldo keseluruhan kelompok akun aset lancar per 31 Desember 2020 dan 2019 dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.3.3 Rincian Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

Aset Lancar	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Kas	302.365.102.234,28	275.268.016.563,44
Piutang Pajak	2.165.838.743,00	3.270.388.550,00
Piutang Retribusi	1.571.289.065,00	3.616.356.360,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	18.177.423.834,00	1.460.005.175,00
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	24.917.319.944,00	27.926.092.099,00
Piutang Bagian Lancar TPA	596.562.500,00	598.062.500,00
Piutang Bagian Lancar TGR	211.915.000,00	211.915.000,00
Piutang Lainnya	29.667.291.529,71	18.797.013.040,00
Penyisihan Piutang	(5.494.440.234,49)	(7.977.148.162,79)
Persediaan	21.562.238.876,47	14.541.818.333,91
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>395.740.541.491,97</b>	<b>337.712.519.458,56</b>

**Tabel 5.3.4 Rincian Kas Neraca**

Kas	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Kas di Kas Daerah	284.681.021.298,28	249.364.637.403,69
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Badan Layanan Umum Daerah	15.962.571.745,00	22.085.611.087,00
Kas di Bendahara Kapitasi JKN	1.279.182.660,00	1.600.857.949,75
Kas di Bendahara Dana BOS	429.898.575,00	2.209.806.805,00
Kas Lainnya	12.427.956,00	7.103.318,00
<b>Jumlah Kas</b>	<b>302.365.102.234,28</b>	<b>275.268.016.563,44</b>



### 5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp284.681.021.298,28 dan Rp249.364.637.403,69. Saldo kas di Kas Daerah per 31 Desember 2020 naik sebesar Rp35.316.383.894,59 atau 14,16%. Saldo Kas di Kas Daerah adalah penempatan berupa giro dengan rincian saldo sebagai berikut:

**Tabel 5.3.5 Rincian Kas di Kas Daerah**

Kas di Kas Daerah	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Rekening Giro	284.681.021.298,28	149.364.637.403,69
Rekening Deposito	0,00	100.000.000.000,00
<b>Jumlah Kas di Kas Daerah</b>	<b>284.681.021.298,28</b>	<b>249.364.637.403,69</b>

#### 1. Rekening Giro

Rekening giro bank merupakan bagian dari kekayaan milik Pemerintah Daerah yang ditempatkan di bank dalam bentuk rekening giro, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.6 Rincian Rekening Giro**

Rekening Giro pada Bank Kal-Sel Cab. Kandangan	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Kas Umum Daerah (Kasda) No. 008.00.03.00017.0	284.681.021.298,28	149.364.637.403,69
<b>Jumlah Rekening Giro</b>	<b>284.681.021.298,28</b>	<b>149.364.637.403,69</b>

Pada rekening Kas Daerah terdapat sisa kas Dana Desa TA 2019 yang tidak disalurkan sebesar Rp320.264.800,00. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 dan Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Berita Acara Konfirmasi dan Rekonsiliasi Nomor BAR-1504/403623/2020, bahwa sisa Dana Desa harus dikembalikan ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN).

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui SK Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/102/KUM/2021 tentang Penetapan Besaran Pengembalian Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Taun Anggaran 2019 menetapkan besaran dana yang harus dikembalikan sebesar Rp320.264.800,00. Sisa dana tersebut telah dikembalikan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Negara pada tanggal 20 April 2021 melalui mekanisme pencairan SP2D pada pos anggaran belanja tak terduga.

#### 2. Deposito

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan per 31 Desember 2020 tidak mempunyai saldo pada rekening deposito.



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Saldo deposito per 31 Desember 2019 sebesar Rp100.000.000.000,00 adalah dana Pemerintah Daerah yang ditempatkan di bank dalam bentuk deposito untuk jangka waktu satu bulan, dan diperpanjang secara otomatis atau *automatic roll over* (ARO). Tingkat bunga deposito tahun 2020 adalah sesuai tingkat bunga yang berlaku pada masing-masing bank, yang pendapatannya diakui/dibukukan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Selain itu pada Tahun 2020 dilakukan penambahan deposito pada Bank Kalsel Cabang Kandangan sebesar Rp5.000.000.000,00; Bank BNI sebesar Rp7.000.000.000,00; dan penempatan deposito pada BRI Cabang Kandangan sebesar Rp38.000.000.000,00. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 131 menyebutkan bahwa deposito harus disetor/dicairkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada akhir tahun berjalan. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui surat Nomor 950/1477/BAKEUDA meminta kepada masing-masing Bank agar memindahbukukan seluruh deposito berjangka milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ke Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Kalsel Cabang Kandangan. Berikut disajikan rincian deposito beserta tanggal pencairannya:

**Tabel 5.3.7 Rincian Rekening Deposito**

Rekening Deposito	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi (Rp)		31 Desember 2020 (Rp)	Tanggal Pencairan
		Penambahan	Pencairan		
<b>Bank Kalsel Cabang Kandangan</b>					
No. Rekening 008.04.01.01779.7	35.000.000.000,00	0,00	35.000.000.000,00	0,00	15 Desember 2020
No. Rekening 008.04.01.11718.9	5.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00	0,00	7 Desember 2020
No. Rekening 008.04.01.01824.6	5.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00	0,00	14 Desember 2020
No. Rekening 008.04.01.11729.7	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	21 Desember 2020
<b>Bank Syariah Kalsel</b>					
No. Rekening 902.04.01.00206.6	30.000.000.000,00	0,00	30.000.000.000,00	0,00	17 Desember 2020
No. Rekening 902.04.01.00264.1	5.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00	0,00	21 Desember 2020
No. Rekening 902.04.01.00312.4	15.000.000.000,00	0,00	15.000.000.000,00	0,00	15 Desember 2020
<b>BNI</b>					
No. Rekening 909957854	5.000.000.000,00	0,00	5.000.000.000,00	0,00	21 Desember 2020
No. Rekening 907320501	0,00	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00	7 Desember 2020
<b>BRI Cabang Kandangan</b>					
No. Rekening 0031.01.000793.40.8	0,00	38.000.000.000,00	38.000.000.000,00	0,00	8 Desember 2020
<b>Jumlah</b>	<b>100.000.000.000,00</b>	<b>50.000.000.000,00</b>	<b>150.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	

#### 5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan uang tunai maupun non tunai



yang berada di rekening bank bendahara pengeluaran SKPD. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak mempunyai saldo kas di bendahara pengeluaran.

#### 5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 merupakan penerimaan pendapatan tahun 2020 yang belum disetor ke Kas Daerah. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak mempunyai saldo kas di bendahara penerimaan.

#### 5.3.1.1.4 Kas di Badan Layanan Umum Daerah

Kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan kas dan setara kas yang digunakan untuk pengelolaan penerimaan pendapatan dan biaya yang berasal dari hasil operasional BLUD. Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp15.962.571.745,00 dan Rp22.085.611.087,00 turun sebesar Rp6.123.039.342,00 atau 27,72% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.8 Rincian Kas di Badan Layanan Umum Daerah**

Kas di BLUD	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
RSUD Hasan Basry	8.262.825.049,00	22.085.611.087,00
Puskesmas Kandangan	265.202.119,00	0,00
Puskesmas Negara	402.406.426,00	0,00
RS Daha Sejahtera	7.032.138.151,00	0,00
<b>Jumlah Kas di BLUD</b>	<b>15.962.571.745,00</b>	<b>22.085.611.087,00</b>

Selama tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan meresmikan 3 (tiga) BLUD yaitu Puskesmas Kandangan, Puskesmas Negara dan Rumah Sakit Daha Sejahtera.

#### 1. RSUD Hasan Basry

Saldo kas BLUD RSUD Hasan Basry per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp8.262.825.049,00 dan Rp22.085.611.087,00 turun sebesar Rp13.822.786.038,00 atau 62,59%. Turunnya pendapatan layanan terutama berasal dari layanan rawat inap dan rawat jalan karena pandemi Covid-19 baik dari pasien umum maupun BPJS. Namun untuk pendapatan non layanan dapat melampaui target pendapatan.

**Tabel 5.3.9 Rincian Kas BLUD RSUD Hasan Basry**

Kas di BLUD	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
<b>Rekening Pendapatan pada BNI</b>		
No. Rekening 08.3374.0288	8.262.459.289,00	22.085.488.778,00
<b>Rekening Pengeluaran pada BNI</b>		
No. Rekening 08.3374.0131	365.760,00	122.309,00
<b>Jumlah Kas di BLUD</b>	<b>8.262.825.049,00</b>	<b>22.085.611.087,00</b>



## 2. Puskesmas Kandangan

Puskesmas Kandangan ditetapkan sebagai BLUD berdasarkan SK Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/398/KUM/2019 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat Kandangan sebagai Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD tanggal 18 Desember 2019. Saldo kas BLUD Puskesmas Kandangan per 31 Desember 2020 sebesar Rp265.202.119,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.10 Rincian Kas BLUD Puskesmas Kandangan**

Kas di BLUD	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
No. Rekening 008.00.04.00369.2	265.202.119,00	0,00
<b>Jumlah Kas di BLUD</b>	<b>265.202.119,00</b>	<b>0,00</b>

## 3. Puskesmas Negara

Puskesmas Negara ditetapkan sebagai BLUD berdasarkan SK Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/399/KUM/2019 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat Negara sebagai Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD tanggal 18 Desember 2019. Saldo kas BLUD Puskesmas Negara per 31 Desember 2020 sebesar Rp402.406.426,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.11 Rincian Kas BLUD Puskesmas Negara**

Kas di BLUD	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
No. Rekening 008.00.04.00375.3	402.406.426,00	0,00
<b>Jumlah Kas di BLUD</b>	<b>402.406.426,00</b>	<b>0,00</b>

## 4. RS Daha Sejahtera

Rumah Sakit Daha Sejahtera ditetapkan sebagai BLUD berdasarkan SK Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/396/KUM/2019 tentang Penetapan rumah Sakit Daha Sejahtera sebagai Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah tanggal 18 Desember 2019. Saldo kas BLUD RS Daha Sejahtera per 31 Desember 2020 sebesar Rp7.032.138.151,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.12 Rincian Kas BLUD RS Daha Sejahtera**

Kas di BLUD	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
No. Rekening 008.00.00752.7	7.032.138.151,00	0,00
<b>Jumlah Kas di BLUD</b>	<b>7.032.138.151,00</b>	<b>0,00</b>



### 5.3.1.1.5 Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN

Kas Dana Kapitasi JKN adalah dana hasil klaim Puskesmas atas Pelayanan Kesehatan ke BPJS yang masih belum digunakan. Saldo Kas Dana Kapitasi JKN per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp1.279.182.660,00 dan Rp1.600.857.949,75. Saldo Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN turun sebesar Rp321.675.289,75 atau 20,09% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.13 Rincian Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN**

Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Puskesmas Kandangan	0,00	194.438.382,00
Puskesmas Gambah	59.450.007,00	78.270.342,00
Puskesmas Jambu Hilir	136.673.673,00	172.280.201,00
Puskesmas Sungai Raya	142.559.791,00	66.653.066,00
Puskesmas Batang Kulur	37.384.034,00	34.151.785,00
Puskesmas Angkinang	96.560.260,00	82.782.782,00
Puskesmas Bamban	38.927.279,00	26.988.586,75
Puskesmas Telaga Langsung	75.483.318,00	85.677.143,00
Puskesmas Kaliring	55.028.356,00	44.114.227,00
Puskesmas Padang Batung	64.124.992,00	51.071.081,00
Puskesmas Loksado	54.827.376,00	54.195.388,00
Puskesmas Malinau	23.537.663,00	16.038.838,00
Puskesmas Wasah	34.555.767,00	69.311.286,00
Puskesmas Simpur	128.352.281,00	91.184.909,00
Puskesmas Kalumpang	43.328.578,00	38.883.283,00
Puskesmas Bayanan	38.030.256,00	37.600.944,00
Puskesmas Negara	0,00	199.698.395,00
Puskesmas Pasungkan	74.102.376,00	66.497.618,00
Puskesmas Bajayau	35.849.149,00	41.197.907,00
Puskesmas Sungai Pinang	73.647.742,00	69.625.892,00
Puskesmas Baruh Jaya	66.759.762,00	80.195.894,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.279.182.660,00</b>	<b>1.600.857.949,75</b>

Penurunan kas di Bendahara Kapitasi JKN tahun 2020 disebabkan adanya 2 (dua) Puskesmas yang telah ditetapkan sebagai BLUD.

### 5.3.1.1.6 Kas di Bendahara Dana BOS

Kas di Bendahara Dana BOS per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp429.898.575,00 dan Rp2.209.806.805,00 turun sebesar Rp1.779.908.230,00 atau 80,55%. Mulai Tahun 2017, penerimaan dan pengeluaran Dana BOS dikelola melalui mekanisme APBD. Kas di Bendahara Dana BOS merupakan sisa kas pada masing-masing sekolah penerima dana BOS Tahun 2020, sebagai



berikut:

**Tabel 5.3.14 Rincian Kas di Bendahara Dana BOS**

Sekolah	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi (Rp)		31 Desember 2020 (Rp)
		Penerimaan	Pengeluaran	
SD	1.748.399.192,00	18.738.874.601,00	20.244.398.495,00	242.875.298,00
SMP	461.407.613,00	5.774.330.000,00	6.048.714.336,00	187.023.277,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.209.806.805,00</b>	<b>24.513.204.601,00</b>	<b>26.293.112.831,00</b>	<b>429.898.575,00</b>

Rincian per sekolah pada *Lampiran 1 dan 2*.

#### 5.3.1.1.7 Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp12.427.956,00 dan Rp7.103.318,00. Kas Lainnya Tahun 2020 merupakan utang pajak yang berasal dari pengeluaran Dana BOS SDN dan SMPN TA 2020 yang sampai tanggal 31 Desember 2020 belum terbayarkan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.15 Rincian Kas Lainnya**

Kas Lainnya	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
<b>Utang Pajak Dana BOS</b>		
SDN	2.126.624,00	1.023.630,00
SMPN	10.301.332,00	6.079.688,00
<b>Jumlah Kas Lainnya</b>	<b>12.427.956,00</b>	<b>7.103.318,00</b>

#### 5.3.1.1.8 Piutang Pajak

Akun Piutang Pajak menggambarkan hak Pemerintah Daerah dari pajak daerah yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum diterima pendapatannya. Piutang Pajak per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp2.165.838.743,00 dan Rp3.270.388.550,00 turun sebesar Rp1.104.549.807,00 atau 33,77%. Piutang Pajak terdiri dari Piutang PBB- P2 dan Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.16 Rincian Piutang Pajak**

Piutang Pajak	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Piutang PBB - P2	1.665.201.431,00	2.675.548.468,00
Piutang PPJ	500.637.312,00	594.840.082,00
<b>Jumlah Piutang Pajak</b>	<b>2.165.838.743,00</b>	<b>3.270.388.550,00</b>

#### 1. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp1.665.201.431,00 dan sebesar Rp2.675.548.468,00 turun sebesar Rp1.010.347.037,00 terdiri atas tagihan PBB-P2 dan penerimaan atas ketetapan PBB-P2 TA 2020, serta koreksi piutang PBB P2 karena verifikasi dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

**Tabel 5.3.17 Rincian Saldo Piutang PBB-P2**

Piutang PBB	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi (Rp)			31 Desember 2020 (Rp)
		Koreksi	Pelunasan	Penambahan	
Tahun 2011	1.136.995.018,00	(477.758.288,00)	129.198,00	0,00	659.107.532,00
Tahun 2012	592.421.161,00	(322.461.777,00)	84.164,00	0,00	269.875.220,00
Tahun 2013	608.024.729,00	(353.620.656,00)	87.044,00	0,00	254.317.029,00
Tahun 2014	53.242.167,00	0,00	123.311,00	0,00	53.118.856,00
Tahun 2015	1.293.485,00	0,00	442.383,00	0,00	851.102,00
Tahun 2016	104.722.066,00	0,00	952.780,00	0,00	103.769.286,00
Tahun 2017	107.448.739,00	0,00	1.158.539,00	0,00	106.290.200,00
Tahun 2018	59.902.325,00	0,00	975.108,00	0,00	58.927.217,00
Tahun 2019	11.498.778,00	0,00	922.649,00	0,00	10.576.129,00
Tahun 2020	0,00	0,00	1.170.411.415,00	1.318.780.275,00	148.368.860,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.675.548.468,00</b>	<b>(1.153.840.721,00)</b>	<b>1.175.286.591,00</b>	<b>1.318.780.275,00</b>	<b>1.665.201.431,00</b>

Penerimaan selama TA 2020 terdiri atas penerimaan tahun berjalan dan pelunasan tahun sebelumnya. Atas pembayaran tersebut sudah dilakukan identifikasi untuk memastikan NOP dan tahun pajak yang dibayar. Selain itu atas saldo piutang PBB Tahun 2020 termasuk di dalamnya verifikasi piutang PBB pada 35 Desa di 3 Kecamatan sebesar Rp1.153.840.721,00 dan sudah dilakukan penghapusan piutang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/383/KUM/2020 tentang Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Tanggal 28 Desember 2020.

## 2. Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ)

Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) merupakan hak Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang belum dibayar oleh PLN sampai dengan 31 Desember 2020. Saldo piutang PPJ per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp500.637.312,00 dan Rp594.840.082,00 turun sebesar Rp94.202.770,00 atau 15,84%. Piutang Pajak Penerangan Jalan untuk bulan Desember Tahun 2020 telah diterima seluruhnya pada tanggal 15 Januari 2020. Berikut disajikan mutasi piutang pajak penerangan jalan selama tahun 2020:

**Tabel 5.3.18 Rincian Piutang Pajak Penerangan Jalan**

Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2020 (Rp)
		Pelunasan	Penambahan	
Piutang PPJ	594.840.082,00	594.840.082,00	500.637.312,00	500.637.312,00
<b>Jumlah</b>	<b>594.840.082,00</b>	<b>594.840.082,00</b>	<b>500.637.312,00</b>	<b>500.637.312,00</b>

### 5.3.1.1.8.1 Penyisihan Piutang Pajak

Penyisihan Piutang Pajak dilakukan berdasarkan umur piutang yang dibagi berdasarkan kategori kelancaran. Perhitungan penyisihan piutang dilakukan



untuk menentukan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) atas piutang pajak. Saldo penyisihan piutang pajak per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.349.991.660,90 dengan rincian penyisihan Tahun 2020 sebagai berikut:

**Tabel 5.3.19 Perhitungan Penyisihan Piutang PBB-P2**

Kategori Umur Piutang PBB-P2	Jumlah Bruto (Rp)	Penyisihan Tidak tertagih	Jumlah Penyisihan (Rp)
Lancar	148.368.860,00	0,50%	741.844,30
Kurang Lancar	69.503.346,00	10%	6.950.334,60
Diragukan	210.059.486,00	50%	105.029.743,00
Macet	1.237.269.739,00	100%	1.237.269.739,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.665.201.431,00</b>		<b>1.349.991.660,90</b>

Berdasarkan Bultek Akuntansi Nomor 21 bahwa piutang yang sifatnya tidak diusahakan sendiri oleh Pemerintah Daerah maka tidak diberlakukan penyisihan atas piutang tersebut. Oleh karena itu atas Piutang Pajak Penerangan Jalan Umum tidak dilakukan penyisihan piutang.

#### 5.3.1.19 Piutang Retribusi

Akun piutang retribusi merupakan hak Pemerintah Daerah dari pengenaan retribusi daerah yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum diterima pembayarannya. Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp1.571.289.065,00 dan Rp3.616.356.360,00. Saldo Piutang Retribusi turun sebesar Rp2.045.067.295,00 atau 56,55% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.20 Rincian Piutang Retribusi**

Piutang Retribusi	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Retribusi Pelayanan Pasar (Dinas Perdagangan)	1.504.937.065,00	1.301.500.560,00
Retribusi Menara (Dinas Kominfo)	0,00	3.065.000,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan (Dinkes)	66.352.000,00	2.311.790.800,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.571.289.065,00</b>	<b>3.616.356.360,00</b>

Rincian Piutang retribusi pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

##### 1. Dinas Perdagangan

Piutang retribusi pada Dinas Perdagangan per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp1.504.937.065,00 dan Rp1.301.500.560,00. Piutang retribusi pelayanan pasar grosir naik sebesar Rp203.436.505,00 atau 15,63% dibandingkan dengan tahun 2019. Rincian piutang retribusi pada Dinas Perdagangan disajikan sebagai berikut berikut:



**Tabel 5.3.21 Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Grosir**

Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2020 (Rp)
		Pelunasan	Penambahan	
Tahun 2011	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00
Tahun 2012	77.871.850,00	0,00	0,00	77.871.850,00
Tahun 2013	54.000.000,00	80.000,00	0,00	53.920.000,00
Tahun 2014	92.988.300,00	820.000,00	0,00	92.168.300,00
Tahun 2015	107.025.850,00	4.282.500,00	0,00	102.743.350,00
Tahun 2016	174.907.800,00	4.212.600,00	0,00	170.695.200,00
Tahun 2017	186.205.200,00	15.312.200,00	0,00	170.893.000,00
Tahun 2018	175.306.550,00	39.012.750,00	0,00	136.293.800,00
Tahun 2019	430.877.010,00	186.623.810,00	0,00	244.253.200,00
Tahun 2020	0,00	0,00	454.718.365,00	454.718.365,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.300.562.560,00</b>	<b>250.343.860,00</b>	<b>454.718.365,00</b>	<b>1.504.937.065,00</b>

Penambahan piutang retribusi pelayanan pasar grosir selama tahun 2020 sebesar Rp454.718.365,00 terdiri atas piutang retribusi yang terdapat pada 3 lokasi pasar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu:

1. Pasar Kandangan sebesar Rp294.737.300,00;
2. Pasar Angkinang sebesar Rp7.059.375,00; dan
3. Pasar Negara sebesar Rp152.921.690,00.

Piutang retribusi pelayanan pasar los sebesar Rp938.000,00 merupakan kekurangan setor retribusi pelayanan pasar los pada tahun 2019. Atas kekurangan setor tersebut, bendahara Dinas Perdagangan telah menyetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 23 Januari 2020.

**Tabel 5.3.21a Rincian Mutasi Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Los**

Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi (Rp)		31 Desember 2020 (Rp)
		Pelunasan	Penambahan	
Kurang setor pasar los 2019	938.000,00	938.000,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>938.000,00</b>	<b>938.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 2. Dinas Komunikasi dan Informatika

Piutang retribusi pada Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp0,00 dan Rp3.065.000,00 merupakan piutang retribusi menara telekomunikasi pada PT Solusi Tunas Pratama. Piutang retribusi menara telekomunikasi sudah dibayar seluruhnya pada 26 Juni 2020. Berikut disajikan rincian pelunasan dan penambahan piutang retribusi menara selama tahun 2020:



**Tabel 5.3.22 Rincian Piutang Retribusi Menara**

Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi (Rp)		31 Desember 2020 (Rp)
		Pelunasan	Penambahan	
PT Solusi Tunas Pratama	3.065.000,00	3.065.000,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.065.000,00</b>	<b>3.065.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 3. Dinas Kesehatan

Piutang Retribusi pada Dinas Kesehatan per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp66.352.000,00 dan Rp2.311.790.800,00 merupakan piutang retribusi pelayanan kesehatan klaim BPJS. Terdapat koreksi saldo awal atas piutang retribusi pelayanan kesehatan dikarenakan kesalahan jumlah (dobel pencatatan) sebesar Rp46.950.000,00 dengan rincian mutasi selama tahun 2020 sebagai berikut:

**Tabel 5.3.23 Rincian Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan**

Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi (Rp)			31 Desember 2020 (Rp)
		Koreksi	Pelunasan	Penambahan	
Rawat Inap (BPJS)	468.167.000,00	(46.950.000,00)	421.217.000,00	66.352.000,00	66.352.000,00
Rawat Inap RSDS (BPJS)	1.792.581.200,00	0,00	1.792.581.200,00	0,00	0,00
Ambulance RSDS (BPJS)	51.042.600,00	0,00	51.042.600,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.311.790.800,00</b>	<b>(46.950.000,00)</b>	<b>2.264.840.800,00</b>	<b>66.352.000,00</b>	<b>66.352.000,00</b>

Piutang retribusi pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan dikategorikan lancar.

#### 5.3.1.1.9.1 Penyisihan Piutang Retribusi

Penyisihan Piutang Retribusi dilakukan berdasarkan umur piutang yang dibagi berdasarkan kategori kelancaran. Perhitungan penyisihan piutang retribusi dilakukan untuk menentukan nilai bersih yang dapat direalisasikan atas piutang retribusi. Saldo penyisihan piutang retribusi per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.277.909.642,50 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.24 Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Grosir**

Kategori Umur Piutang Retribusi Pasar/Pertokoan	Jumlah Bruto (Rp)	Penyisihan Tidak tertagih	Jumlah Penyisihan (Rp)
Lancar	0,00	0,50%	0,00
Kurang Lancar	0,00	10%	0,00
Diragukan	454.718.365,00	50%	227.359.182,50
Macet	1.050.218.700,00	100%	1.050.218.700,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.504.937.065,00</b>		<b>1.277.577.882,50</b>



**Tabel 5.3.25 Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan**

Kategori Umur Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	Jumlah Bruto (Rp)	Penyisihan Tidak tertagih	Jumlah Penyisihan (Rp)
Lancar	66.352.000,00	0,50%	331.760,00
Kurang Lancar	0,00	10%	0,00
Diragukan	0,00	50%	0,00
Macet	0,00	100%	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>66.352.000,00</b>		<b>331.760,00</b>

#### 5.3.1.1.10 Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

Merupakan Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam, yang diberikan baik oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah maupun dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota. Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp18.177.423.834,00 dan Rp1.460.005.175,00.

Piutang DBH dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Alokasi piutang transfer pemerintah pusat atas dana perimbangan dihitung berdasarkan PMK Nomor 25/PMK.07/2021 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Pada saat Peraturan Menteri tersebut mulai berlaku, maka PMK Nomor 113/PMK.07/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Tabel 5.3.26 Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat**

Jenis Pajak Kurang Bayar sesuai PMK Nomor 25 Tahun 2021	Tahun (Rp)		Jumlah (Rp)
	2019	2020	
Piutang Bagi Hasil Pajak			
PPh Pasal 21, 25/29	0,00	1.461.556.800,00	1.461.556.800,00
PBB Bagian Daerah	168.240.639,00	2.977.516.900,00	3.145.757.539,00
PBB Biaya Pemungutan	5.707.520,00	103.958.700,00	109.666.220,00
PBB Bagi Rata	0,00	265.689.700,00	265.689.700,00
<b>Total</b>	<b>173.948.159,00</b>	<b>4.808.722.100,00</b>	<b>4.982.670.259,00</b>
Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA			
SDA Minyak dan Gas Bumi	0,00	9.271.300,00	9.271.300,00
SDA Minerba Iuran Tetap	0,00	61.164.025,00	61.164.025,00
SDA Minerba Royalti	0,00	12.786.519.750,00	12.786.519.750,00
SDA Kehutanan PSDH	0,00	20.917.500,00	20.917.500,00
SDA Perikanan	0,00	316.881.000,00	316.881.000,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>13.194.753.575,00</b>	<b>13.194.753.575,00</b>
<b>Jumlah Piutang</b>	<b>173.948.159,00</b>	<b>18.003.475.675,00</b>	<b>18.177.423.834,00</b>



**Tabel 5.3.27 Rincian Mutasi Piutang Transfer Pemerintah Pusat**

Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi (Rp)		31 Desember 2020 (Rp)
		Pelunasan	Penambahan	
Piutang Bagi Hasil Pajak	1.169.416.404,00	1.169.416.404,00	4.982.670.259,00	4.982.670.259,00
Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	290.588.771,00	290.588.771,00	13.194.753.575,00	13.194.753.575,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.460.005.175,00</b>	<b>1.460.005.175,00</b>	<b>18.177.423.834,00</b>	<b>18.177.423.834,00</b>

Berdasarkan Bultek Akuntansi Nomor 21 piutang transfer tidak dapat diberlakukan penyisihan piutang.

#### 5.3.1.1.11 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Piutang Bagi Hasil Pajak seluruhnya merupakan piutang atas Bagi Hasil Pajak Provinsi Kalimantan Selatan dari penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) serta penerimaan Pajak Rokok.

Saldo piutang transfer pemerintah daerah lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp24.917.319.944,00 dan Rp27.926.092.099,00. Piutang Bagi Hasil Pajak tersebut merupakan pendapatan hasil pajak Provinsi yang belum diterima pada Triwulan IV/2020 periode Oktober s/d Desember yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 ditambah dengan sisa pendapatan bagi hasil pajak provinsi Triwulan III dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.28 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya**

Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi (Rp)			31 Desember 2020 (Rp)
		Koreksi Saldo Awal	Pelunasan	Penambahan	
PKB	3.898.175.032,00	0,00	3.898.175.032,00	3.003.473.151,00	3.003.473.151,00
BBNKB	5.081.328.879,00	0,00	5.081.328.879,00	2.178.817.616,00	2.178.817.616,00
PBBKB	17.606.395.282,00	0,00	17.606.395.282,00	17.342.391.232,00	17.342.391.232,00
PAP	31.795.402,00	0,00	31.795.402,00	36.141.212,00	36.141.212,00
Pajak Rokok	1.308.397.504,00	3.289.246.746,00	4.597.644.250,00	2.356.496.733,00	2.356.496.733,00
<b>Jumlah</b>	<b>27.926.092.099,00</b>	<b>3.289.246.746,00</b>	<b>31.215.338.845,00</b>	<b>24.917.319.944,00</b>	<b>24.917.319.944,00</b>

Terdapat koreksi saldo awal piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp3.289.246.746,00 disebabkan karena adanya bagi hasil pajak rokok yang diterima kasda pada tanggal 12 Juni 2020 atas Pajak Rokok bulan Desember 2019 berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 054 Tahun 2020 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok Untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Bulan Desember Tahun 2019.

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2020 terdiri atas dana bagi hasil pajak Pemerintah Provinsi Triwulan IV dan sisa Triwulan III yang meliputi:



- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp3.003.473.151,00 yang terdiri atas:
  1. Sisa (50%) dana bagi hasil penerimaan pajak Triwulan III periode Bulan Juni – September 2020 sebesar Rp858.799.537,00 sesuai Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2020 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Bulan Juli – September 2020. Sisa dana bagi hasil PKB Triwulan III sudah masuk ke rekening kas daerah pada tanggal 2 Januari 2021 sebesar Rp858.799.537,00;
  2. Bagi hasil penerimaan pajak Triwulan IV periode Bulan Oktober – Desember 2020 sebesar Rp2.144.673.614,00 sesuai Peraturan Gubernur Nomor 015 Tahun 2021 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Bulan Oktober Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2020.
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp2.178.817.616,00 yang terdiri atas:
  1. Sisa (50%) dana bagi hasil BBNKB Triwulan III Periode Bulan Juli – September 2020 sesuai Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2020 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Bulan Juli – September 2020 sebesar Rp631.659.853,00. Sisa dana bagi hasil BBNKB sudah masuk ke rekening kas daerah pada tanggal 2 Januari 2021 sebesar Rp631.659.853,00; dan
  2. Dana bagi hasil BBNKB Triwulan IV sesuai Peraturan Gubernur Nomor 015 Tahun 2021 tentang Bagi Hasil Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Bulan Oktober Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2021 sebesar Rp1.547.157.763,00.
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp17.342.391.232,00 yang terdiri atas:
  1. Dana bagi hasil PBBKB Triwulan III sesuai Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Bulan Juli – September 2020 sebesar Rp8.329.676.699,00. Sisa dana bagi hasil BBKB sudah masuk ke rekening kas daerah pada tanggal 19 Januari dan 8 Maret 2021 masing-masing sebesar Rp4.164.838.350,00;
  2. Dana bagi hasil PBBKB Triwulan IV sesuai Peraturan Gubernur Nomor 017 Tahun 2021 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Penerimaan Bulan Oktober



Sampai Dengan Desember Tahun 2021 sebesar Rp9.012.714.533,00.

- Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp36.141.212,00 yang terdiri atas:
  1. Sisa (50%) dana bagi hasil PAP Triwulan III sesuai Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Air Permukaan untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Bulan Juli – September 2020 sebesar Rp10.457.459,00. Sisa dana bagi hasil pajak tersebut sudah masuk ke rekening kas daerah pada tanggal 15 Januari 2021; dan
  2. Dana bagi hasil PAP Triwulan IV sesuai Peraturan Gubernur Nomor 018 Tahun 2021 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Air Permukaan untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Bulan Oktober Sampai dengan Bulan Desember Tahun 2020 sebesar Rp25.683.753,00.
- Pajak Rokok sebesar Rp2.356.496.733,00 merupakan dana bagi hasil Triwulan IV sesuai Peraturan Gubernur Nomor 016 Tahun 2021 Tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok Untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Bulan Oktober Sampai Dengan Bulan November Tahun 2020.

Berdasarkan Bultek Akuntansi nomor 21 piutang transfer tidak dapat diberlakukan penyisihan piutang.

#### 5.3.1.1.12 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp596.562.500,00 dan sebesar Rp598.062.500,00. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan tagihan atas penjualan alat mesin pertanian berupa *Hand Tractor*, *Power Thresher* dan Pompa Air, yang sudah jatuh tempo dan akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun.

**Tabel 5.3.29 Rincian Penerimaan Cicilan Tagihan Penjualan Angsuran**

Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi (Rp)		31 Desember 2020 (Rp)
		Pelunasan	Penambahan	
Hand Traktor dan Power Thresher (2004-2007)	65.870.000,00	0,00	0,00	65.870.000,00
Hand Traktor (2005-2008)	61.200.000,00	0,00	0,00	61.200.000,00
Pompa Air (2005-2010)	465.492.500,00	0,00	0,00	465.492.500,00
Hand Traktor (2008-2009)	5.500.000,00	1.500.000,00	0,00	4.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>598.062.500,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596.562.500,00</b>

#### 5.3.1.1.12.1 Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dilakukan berdasarkan umur piutang yang dibagi berdasarkan kategori kelancaran. Perhitungan penyisihan bagian lancar TPA dilakukan untuk menentukan nilai bersih yang dapat direalisasikan atas bagian lancar TPA. Saldo penyisihan bagian lancar TPA per 31 Desember 2020 sebesar Rp596.562.500,00 dengan



rincian penyisihan Tahun 2020 sebagai berikut:

**Tabel 5.3.30 Rincian Penyisihan Bagian Lancar TPA**

Kategori Umur Piutang Bagian Lancar Tagihan PA	Jumlah Bruto (Rp)	Penyisihan Tidak tertagih	Jumlah Penyisihan (Rp)
Lancar	0,00	0,50%	0,00
Kurang Lancar	0,00	10%	0,00
Diragukan	0,00	50%	0,00
Macet	596.562.500,00	100%	596.562.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>596.562.500,00</b>		<b>596.562.500,00</b>

### 5.3.1.1.13 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Piutang Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp211.915.000,00. Piutang ganti rugi atas kekayaan daerah terdiri atas saldo piutang ganti rugi dari temuan pemeriksaan yang berdasarkan keputusan pembebanan telah dan akan jatuh tempo kurang dari satu tahun yang terdapat pada RSUD Brigjend. H. Hasan Basry berupa tagihan terhadap Bendahara Penerimaan Jamkesda TA 2012 yang ditetapkan berdasarkan LHPT BPK atas Penyelesaian Kerugian Daerah Semester II Tahun 2016 Nomor 21/LHPT/XIX.BJM/2016 tanggal 30 Desember 2016. Sampai dengan 31 Desember 2020 tidak ada pembayaran atas ganti rugi tersebut.

**Tabel 5.3.31 Rincian Piutang Bagian Lancar TGR**

Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2020 (Rp)
		Pelunasan	Penambahan	
RSUD Hasan Basry	211.915.000,00	0,00	0,00	211.915.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>211.915.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.915.000,00</b>

Terkait piutang TGR atas nama Mansyuri, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) menerbitkan surat Nomor S-1515/WKN.12/KNL.03/2020 tanggal 18 September 2020 perihal Penagihan Langsung dan Penyampaian Surat Paksa a.n Mansyuri.

### 5.3.1.1.13.1 Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dilakukan berdasarkan kategori kelancaran umur piutang. Perhitungan penyisihan Bagian Lancar TGR dilakukan untuk menentukan nilai bersih yang dapat direalisasikan atas Bagian Lancar TGR. Saldo penyisihan Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2020 sebesar Rp211.915.000,00 dengan rincian penyisihan Tahun 2020 sebagai berikut:

**Tabel 5.3.32 Rincian Penyisihan Bagian Lancar TGR**

Kategori Umur Piutang Bag. Lancar TGR	Jumlah Bruto (Rp)	Penyisihan Tidak tertagih	Jumlah Penyisihan (Rp)
Lancar	0,00	0,50%	0,00
Kurang Lancar	0,00	10%	0,00
Diragukan	0,00	50%	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Kategori Umur Piutang Bag. Lancar TGR	Jumlah Bruto (Rp)	Penyisihan Tidak tertagih	Jumlah Penyisihan (Rp)
Macet	211.915.000,00	100%	211.915.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>211.915.000,00</b>		<b>211.915.000,00</b>

#### 5.3.1.1.14 Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp29.667.291.529,71 dan Rp18.797.013.040,00 naik sebesar Rp10.870.278.489,71 atau 57,83%. Piutang Lainnya merupakan pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2020, yang terdiri dari:

**Tabel 5.3.33 Rincian Piutang Lainnya**

Piutang Lainnya	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Piutang Bunga Deposito	52.246.584,71	393.069.548,00
Piutang BLUD	27.720.318.945,00	16.507.467.492,00
Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah	0,00	750.000,00
Piutang Pinjaman DPKUP	1.863.726.000,00	1.863.726.000,00
Piutang Pinjaman DPM LUEP	28.000.000,00	29.000.000,00
Piutang Denda Pinjaman DPM LUEP	3.000.000,00	3.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>29.667.291.529,71</b>	<b>18.797.013.040,00</b>

#### 1. Piutang Bunga Deposito

Saldo piutang bunga deposito per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp52.246.584,71 dan Rp393.069.548,00.

Berdasarkan surat dari Bank Kalsel Nomor 463/OPR-KDG/2021 tanggal 20 April 2021 terdapat kurang setor bunga deposito periode Maret sampai dengan Desember tahun 2020 sebesar Rp52.246.584,71 dan telah dikembalikan ke Kas Daerah.

#### 2. Piutang BLUD

Piutang BLUD merupakan kewajiban pihak ketiga terhadap BLUD. Saldo piutang BLUD per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp27.720.318.945,00 dan Rp16.507.467.492,00 naik sebesar Rp11.212.851.453,00 atau 67,93%. Piutang BLUD tahun 2020 terdapat pada 4 (empat) BLUD sebagai berikut:

**Tabel 5.3.34 Rincian Piutang BLUD**

Piutang BLUD	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
RSUD H. Hasan Basry	23.634.253.845,00	16.507.467.492,00
Puskesmas Kandangan	9.030.000,00	0,00
Puskesmas Negara	28.770.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Piutang BLUD	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
RS Daha Sejahtera	4.048.265.100,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>27.720.318.945,00</b>	<b>16.507.467.492,00</b>

**a. Piutang BLUD RSUD H. Hasan Basry**

Piutang BLUD RSUD H. Hasan Basry Kandangan berupa Jasa Pelayanan atau Retribusi Daerah yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2020. Saldo piutang BLUD per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp23.634.253.845,00 dan Rp16.507.467.492,00 dengan rincian mutasi selama tahun 2020 sebagai berikut:

**Tabel 5.3.35 Rincian Piutang Lain-lain BLUD**

RSUD HASAN BASRY	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi (Rp)		31 Desember 2020 (Rp)
		Pelunasan	Penambahan	
Covid	0,00	0,00	19.236.293.000,00	19.236.293.000,00
BPJS	16.401.264.110,00	16.401.264.110,00	4.279.567.784,00	4.279.567.784,00
PT. SAM	0,00	0,00	13.598.429,00	13.598.429,00
PT. Hasnur	24.748.328,00	0,00	0,00	24.748.328,00
Yulia Ningsih	5.851.224,00	5.851.224,00	0,00	0,00
H. Ihur	10.320.000,00	2.820.000,00	0,00	7.500.000,00
PT Tribuana Mas	56.198.014,00	56.198.014,00	37.132.217,00	37.132.217,00
Tn. Alpianor	2.178.806,00	2.178.806,00	0,00	0,00
Yeni Dewi Puspita	5.757.010,00	5.757.010,00	0,00	0,00
An. Akhmad Yuseri Fauzi	0,00	0,00	7.974.731,00	7.974.731,00
Tn. Basariani	0,00	0,00	2.975.900,00	2.975.900,00
Tn. Kurdi	0,00	0,00	1.368.814,00	1.368.814,00
Tn. Tahmid	0,00	0,00	5.443.405,00	5.443.405,00
Ny. Mujahadah	0,00	0,00	1.920.885,00	1.920.885,00
Jalaludin	0,00	0,00	2.320.352,00	2.320.352,00
Kantin An. Ny. Sarifah	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
Retribusi parkir umum	0,00	0,00	2.810.000,00	2.810.000,00
Sewa ATM Bank Kalsel	0,00	0,00	9.450.000,00	9.450.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>16.507.467.492,00</b>	<b>16.474.069.164,00</b>	<b>23.600.855.517,00</b>	<b>23.634.253.845,00</b>

**b. Piutang BLUD Puskesmas Kandangan**

Piutang BLUD Puskesmas Kandangan berupa Jasa Pelayanan hasil klaim BPJS yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2020. Saldo piutang BLUD per 31 Desember 2020 sebesar Rp9.030.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.36 Rincian Piutang BLUD Puskesmas Kandangan**



PUSKESMAS KANDANGAN	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi (Rp)		31 Desember 2020 (Rp)
		Pelunasan	Penambahan	
BPJS Rawat Inap dan Rawat Jalan	0,00	0,00	9.030.000,00	9.030.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.030.000,00</b>	<b>9.030.000,00</b>

### c. Piutang BLUD Puskesmas Negara

Piutang BLUD Puskesmas Negara berupa Jasa Pelayanan hasil klaim BPJS yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2020. Saldo piutang BLUD per 31 Desember 2020 sebesar Rp28.770.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.37 Rincian Piutang BLUD Puskesmas Negara**

PUSKESMAS NEGARA	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi (Rp)		31 Desember 2020 (Rp)
		Pelunasan	Penambahan	
BPJS Rawat Inap	0,00	0,00	26.400.000,00	26.400.000,00
BPJS Rawat Jalan	0,00	0,00	2.370.000,00	2.370.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.770.000,00</b>	<b>28.770.000,00</b>

### d. Piutang BLUD RS Daha Sejahtera

Piutang BLUD RS Daha Sejahtera berupa Jasa Pelayanan hasil klaim BPJS yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2020. Saldo piutang BLUD per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.048.265.100,00.

**Tabel 5.3.38 Rincian Piutang BLUD RS. Daha Sejahtera**

RS DAHA SEJAHTERA	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi (Rp)		31 Desember 2020 (Rp)
		Pelunasan	Penambahan	
Klaim Covid-19	0,00	0,00	3.836.186.000,00	3.836.186.000,00
Klaim BPJS	0,00	0,00	212.079.100,00	212.079.100,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.048.265.100,00</b>	<b>4.048.265.100,00</b>

## 3. Piutang Pinjaman DPKUP

DPKUP merupakan piutang lainnya berupa hewan ternak (penggemukan sapi) yang diserahkan kepada masyarakat yang penyalurannya dilakukan melalui Dinas Pertanian. Saldo Piutang DPKUP per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp1.863.726.000,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

**Tabel 5.3.39 Rincian Piutang DPKUP**

Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2020 (Rp)
		Pelunasan	Penambahan	
Tahun 2012	52.000.000,00	0,00	0,00	52.000.000,00
Tahun 2013	346.450.000,00	0,00	0,00	346.450.000,00
Tahun 2014	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00



Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2020 (Rp)
		Pelunasan	Penambahan	
Tahun 2015	459.000.000,00	0,00	0,00	459.000.000,00
Tahun 2016	978.276.000,00	0,00	0,00	978.276.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.863.726.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.863.726.000,00</b>

Tidak ada penerimaan kembali atas piutang DPKUP selama Tahun 2020.

#### 4. Piutang DPM LUEP

Piutang DPM-LUEP merupakan piutang pengembalian pinjaman DPM LUEP yang belum terlunasi sampai dengan 31 Desember 2020. Pinjaman DPM LUEP diberikan kepada Badan Usaha Perdesaan yang bergerak dalam jual beli gabah dan beras dengan tujuan mengamankan harga gabah dan beras di tingkat petani sesuai dengan harga referensi pemerintah. Saldo Piutang DPM LUEP per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp28.000.000,00 dan Rp29.000.000,00 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 5.3.40 Rincian Piutang DPM LUEP**

Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2020 (Rp)
		Pelunasan	Penambahan	
Tahun 2015	29.000.000,00	1.000.000,00	0,00	28.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000.000,00</b>

Saldo piutang pengembalian pinjaman DPM LUEP per 31 Desember 2020 sebesar Rp28.000.000,00 merupakan saldo piutang tahun 2015 yang masih harus dibayar oleh penerima pinjaman dikurangi pelunasan cicilan selama tahun 2020.

#### 5. Piutang Denda Pinjaman DPM LUEP

Piutang denda pinjaman DPM LUEP merupakan piutang atas denda yang timbul dari Piutang Pinjaman DPM LUEP berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Kandungan Nomor 9/Pen.Somasi/2011/PN.Kgn. pada Tahun 2011 berupa kewajiban denda sebesar Rp3.000.000,00.

##### 5.3.1.1.14.1 Penyisihan Piutang Lainnya

Penyisihan Piutang Lainnya dilakukan berdasarkan umur piutang yang dibagi ke dalam kategori kelancaran. Perhitungan penyisihan piutang lainnya dilakukan untuk menentukan nilai bersih yang dapat direalisasikan atas piutang lainnya. Saldo penyisihan Piutang Lainnya terdiri atas:

**Tabel 5.3.41 Rincian Penyisihan Piutang BLUD RSUD H. Hasan Basry**



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Kategori Umur Piutang BLUD RSUD H. Hasan Basry	Jumlah Bruto (Rp)	Penyisihan Tidak tertagih	Jumlah Penyisihan (Rp)
Lancar	23.608.355.517,00	0,50%	118.041.777,59
Kurang Lancar	1.150.000,00	10%	115.000,00
Diragukan	0,00	50%	0,00
Macet	24.748.328,00	100%	24.748.328,00
<b>Jumlah</b>	<b>23.634.253.845,00</b>		<b>142.905.105,59</b>

**Tabel 5.3.42 Rincian Penyisihan Piutang BLUD Puskesmas Kandangan**

Kategori Umur Piutang BLUD Puskesmas Kandangan	Jumlah Bruto (Rp)	Penyisihan Tidak tertagih	Jumlah Penyisihan (Rp)
Lancar	9.030.000,00	0,50%	45.150,00
Kurang Lancar	0,00	10%	0,00
Diragukan	0,00	50%	0,00
Macet	0,00	100%	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>9.030.000,00</b>		<b>45.150,00</b>

**Tabel 5.3.43 Rincian Penyisihan Piutang BLUD Puskesmas Negara**

Kategori Umur Piutang BLUD Puskesmas Negara	Jumlah Bruto (Rp)	Penyisihan Tidak tertagih	Jumlah Penyisihan (Rp)
Lancar	28.770.000,00	0,50%	143.850,00
Kurang Lancar	0,00	10%	0,00
Diragukan	0,00	50%	0,00
Macet	0,00	100%	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>28.770.000,00</b>		<b>143.850,00</b>

**Tabel 5.3.44 Rincian Penyisihan Piutang BLUD RS Daha Sejahtera**

Kategori Umur Piutang BLUD RS Daha Sejahtera	Jumlah Bruto (Rp)	Penyisihan Tidak tertagih	Jumlah Penyisihan (Rp)
Lancar	4.048.265.100,00	0,50%	20.241.325,50
Kurang Lancar	0,00	10%	0,00
Diragukan	0,00	50%	0,00
Macet	0,00	100%	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.048.265.100,00</b>		<b>20.241.325,50</b>

**Tabel 5.3.45 Rincian Penyisihan Piutang DPKUP**

Kategori Umur Piutang DPKUP	Jumlah Bruto (Rp)	Penyisihan Tidak tertagih	Jumlah Penyisihan (Rp)
Lancar	0,00	0,50%	0,00
Kurang Lancar	0,00	10%	0,00
Diragukan	0,00	50%	0,0
Macet	1.863.726.000,00	100%	1.863.726.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.863.726.000,00</b>		<b>1.863.726.000,00</b>



**Tabel 5.3.46 Rincian Penyisihan Piutang DPM LUEP**

Kategori Umur Piutang DPM LUEP	Jumlah Bruto (Rp)	Penyisihan Tidak tertagih	Jumlah Penyisihan (Rp)
Lancar	0,00	0,50%	0,00
Kurang Lancar	0,00	10%	0,00
Diragukan	0,00	50%	0,00
Macet	28.000.000,00	100%	28.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>28.000.000,00</b>		<b>28.000.000,00</b>

**Tabel 5.3.47 Rincian Penyisihan Piutang Denda Pinjaman DPM LUEP**

Kategori Umur Piutang Denda Pinjaman DPM LUEP	Jumlah Bruto (Rp)	Penyisihan Tidak tertagih	Jumlah Penyisihan (Rp)
Lancar	0,00	0,50%	0,00
Kurang Lancar	0,00	10%	0,00
Diragukan	0,00	50%	0,00
Macet	3.000.000,00	100%	3.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>

#### 5.3.1.1.15 Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang masih berada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Jumlah persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp21.562.238.876,47 (*Lampiran 3*) dan Rp14.541.818.33,91 naik sebesar Rp7.020.420.542,56 atau 48,28% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.48 Rincian Persediaan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

Persediaan	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Bahan Baku Bangunan dan Konstruksi	114.364.469,35	289.854.917,64
Bahan Kimia	572.220.358,00	454.094.256,00
Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	123.560.360,00	91.474.584,00
Bahan/Bibit Tanaman	88.411.980,00	170.809.374,00
Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	16.953.500,00	302.388.500,00
Bahan Lainnya (Persediaan Covid)	2.814.986.088,23	0,00
Suku Cadang Sarana mobilitas	0,00	17.720.000,00
Alat Tulis Kantor	360.139.388,00	881.557.319,00
Bahan cetak	613.080.300,00	190.949.475,00
Benda Pos	300.000,00	1.572.000,00
Alat Listrik	1.077.881.546,00	799.432.400,00
Perlengkapan Pendukung Olahraga	4.500.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Persediaan	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	176.840.495,00	98.344.395,00
Obat	13.947.563.826,89	10.811.976.488,27
Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.617.602.865,00	235.349.625,00
Bahan Makanan Pokok	33.833.700,00	196.295.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>21.562.238.876,47</b>	<b>14.541.818.333,91</b>

Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (*opname*) terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir dan/atau nilai wajar yang ditetapkan oleh bendahara barang masing-masing SKPD. Berikut penjelasan dari masing-masing jenis persediaan:

**a. Persediaan Bahan Bangunan dan Konstruksi**

Saldo persediaan bahan bangunan dan konstruksi sebesar Rp114.364.469,35 merupakan sisa persediaan plang nama pada 3 SKPD yaitu Dinas Pengendalian Penduduk KBPPPA sebesar Rp266.720,00; Dinas Penanaman Modal PTSP sebesar Rp17.444.000,00; dan Badan Keuangan Daerah sebesar Rp96.653.749,35.

**b. Persediaan Bahan Kimia**

Saldo persediaan bahan kimia sebesar Rp572.220.358,00 merupakan persediaan obat-obatan cairan kimia yang terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat KPLH sebesar Rp545.591.198,00; dan persediaan obat cairan kimia dan pupuk pada Dinas Pertanian sebesar Rp26.629.160,00.

**c. Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas**

Saldo persediaan bahan bakar dan pelumas sebesar Rp123.560.360,00 merupakan persediaan bahan bakar solar pada RSUD BLUD H. Hasan Basry.

**d. Persediaan Bahan/Bibit Tanaman**

Saldo persediaan bahan/bibit tanaman sebesar Rp88.411.980,00 merupakan persediaan bibit tanaman yang terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat KPLH.

**e. Persediaan Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan**

Saldo persediaan bahan/bibit ternak/bibit ikan sebesar Rp16.953.500,00 merupakan persediaan bibit ikan yang terdapat pada Dinas Perikanan.

**f. Persediaan Bahan Lainnya**

Saldo persediaan bahan lainnya sebesar Rp2.814.986.088,23 merupakan persediaan yang berasal dari dana BTT Covid dan pendapatan hibah Covid berupa obat-obatan dan persediaan bahan pakai habis kesehatan yang terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp2.798.169.238,23; dan



pada RSUD BLUD H. Hasan Basry sebesar Rp16.816.850,00.

**g. Persediaan Alat Tulis Kantor**

Saldo persediaan alat tulis kantor sebesar Rp360.139.388,00 berupa sisa persediaan alat tulis kantor yang terdapat pada beberapa SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.3.49 Saldo Persediaan ATK per SKPD**

SKPD	31 Desember 2020 (Rp)
BOS SDN	26.372.700,00
BOS SMPN	5.590.125,00
Dinas Kesehatan	4.365.500,00
RSUD BLUD Hasan Basry	196.064.174,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.370.250,00
Dinas Perumahan Rakyat dan KPLH	3.362.500,00
Badan Penanggulangan Bencana Kesbangpol	188.750,00
Dinas Sosial	1.975.000,00
Dinas Ketahanan Pangan	6.800.839,00
Dinas Tenaga Kerja KUKP	11.100,00
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	300.000,00
Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	1.627.400,00
Bagian Pemerintahan	385.000,00
Bagian Protokol dan Kehumasan	89.634.050,00
Bagian Organisasi	1.316.600,00
Bagian Perekonomian	733.500,00
Sekretariat DPRD	6.305.100,00
Kelurahan Kandangan Utara	1.100,00
Inspektorat Kabupaten	13.735.700,00
<b>Jumlah</b>	<b>360.139.388,00</b>

**h. Persediaan Bahan Cetak**

Saldo persediaan bahan cetak sebesar Rp613.080.300,00 merupakan persediaan cetak sampul raport pada BOS SDN sebesar Rp675.000,00; persediaan cetak register dan blanko sebesar Rp251.559.500,00; persediaan cetak tas jinjing dan buku cetakan pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp52.900.000,00; dan persediaan karcis dan blanko cetakan untuk tahun 2021 pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp307.945.800,00.

**i. Persediaan Benda Pos**

Saldo persediaan benda pos per 31 Desember 2020 sebesar Rp300.000,00 berupa sisa persediaan materai yang terdapat pada BOS SDN.



**j. Persediaan Alat Listrik**

Saldo persediaan alat listrik per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.077.881.546,00 berupa persediaan kabel, lampu, dan peralatan kelistrikan lainnya yang terdapat pada 5 SKPD yaitu: Dinas kesehatan sebesar Rp262.500,00; RSUD BLUD H. Hasan Basry sebesar Rp21.942.270,00; Dinas Perumahan Rakyat dan KPLH sebesar Rp1.053.012.696,00; Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp1.810.080,00; dan Inspektorat Kabupaten sebesar Rp854.000,00.

**k. Persediaan Perlengkapan Pendukung Olahraga**

Saldo persediaan perlengkapan pendukung olahraga sebesar Rp4.500.000,00 merupakan persediaan dana BOS peralatan olahraga yang terdapat pada Sekolah Dasar Negeri.

**l. Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya**

Saldo persediaan alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp176.840.495,00 berupa persediaan alat kebersihan dan bahan pembersih yang terdapat pada beberapa SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.3.50 Persediaan Bahan Pembersih per SKPD**

SKPD	31 Desember 2020 (Rp)
BOS SDN	26.347.000,00
BOS SMPN	2.533.000,00
Dinas Kesehatan	135.500,00
RSUD BLUD Hasan Basry	77.191.055,00
Dinas Perumahan Rakyat dan KPLH	45.005.590,00
Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	19.964.600,00
Bagian Umum	4.083.000,00
Kelurahan Kandangan Utara	750,00
Inspektorat Kabupaten	1.580.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>176.840.495,00</b>

**m. Persediaan Obat**

Saldo persediaan obat sebesar Rp13.947.563.826,89 merupakan persediaan obat-obatan medis yang terdapat pada persediaan BOS SDN sebesar Rp2.002.800,00; BOS SMPN sebesar Rp879.500,00; Dinas Kesehatan sebesar Rp7.047.610.205,89; RSUD BLUD H. Hasan Basry sebesar Rp6.581.653.751,00; dan Dinas Pengendalian Penduduk KBPPPA sebesar Rp315.417.570,00.

**n. Persediaan Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat**

Saldo persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp1.617.602.865,00 merupakan saldo persediaan bantuan



bencana yang terdapat pada Dinas Sosial dan beberapa pekerjaan fisik yang sampai dengan tahun anggaran berakhir belum dilakukan penyerahan kepada masyarakat/pihak ketiga dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.3.51 Persediaan Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat**

SKPD	31 Desember 2020 (Rp)	Keterangan
Dinas Pendidikan	565.033.000,00	Rehab Pesantren Ibnu Umar (Fisik Rp549.688.000,00 dan jasa konsultan Rp15.345.000,00)
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	705.746.865,00	Rumah Dinas Kapolres HSS (Fisik Rp561.591.865,00 dan jasa konsultan Rp144.155.000,00)
Dinas Perumahan Rakyat dan KPLH	55.620.000,00	Kantong pengganti plastik dan hadiah penghargaan kampung iklim
Satuan Polisi Pamong Praja	31.974.500,00	Baju kaos pelatihan Satinmas
Dinas Sosial	178.948.500,00	Bantuan bencana
Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	27.000.000,00	Cinderamata
Bagian Umum	28.900.000,00	Cinderamata/Plakat
Badan Keuangan Daerah	24.380.000,00	Hadiah penganugerahan Pajak Asli Daerah
<b>Jumlah</b>	<b>1.617.602.865,00</b>	

**o. Persediaan Bahan Makanan Pokok**

Saldo persediaan bahan makanan pokok sebesar Rp33.833.700,00 merupakan persediaan makanan bagi para guru pada persediaan Dana BOS SD sebesar Rp4.199.500,00; dan persediaan bahan makanan/minuman pasien pada RSUD BLUD H. Hasan Basry sebesar Rp29.634.200,00.

Selain saldo persediaan tersebut, terdapat juga persediaan yang sudah tidak terpakai lagi/usang/*expired* yang terdapat pada 3 SKPD sebesar Rp542.047.000,75 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.52 Rincian Persediaan Usang TA 2020**

No	SKPD	Persediaan	Sisa (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Dinas Kesehatan	Obat pada UPT Gudang Farmasi	160.809.767,00	425.396.168,25
		Obat pada RS Pratama	78.383.263,00	
		Obat pada 16 Puskesmas	186.203.138,25	
2	RSUD BLUD H. Hasan Basry	Obat-obatan	72.158.147,00	72.158.147,00
3	Badan Keuangan Daerah	Blanko/Karcis TA 2020	44.492.685,50	44.492.685,50
<b>TOTAL</b>				<b>542.047.000,75</b>

Sampai dengan laporan ini dibuat telah dilakukan usulan untuk pemusnahan persediaan usang yang terdapat pada 3 SKPD. Persediaan usang tahun



berjalan disajikan sebagai beban lain-lain pada Laporan Operasional. Selain itu terdapat persediaan obat kedaluwarsa tahun 2019 yang belum dilakukan pemusnahan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp10.349.658,00 dan persediaan ATK usang tahun 2018 pada RSUD H. Hasan Basry sebesar Rp1.986.448,00.

### 5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Saldo Investasi Jangka Panjang merupakan saldo penempatan Dana Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan umur lebih dari satu tahun. Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp87.548.450.074,96 dan Rp87.166.450.036,04. Selama Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak melakukan penambahan dalam Investasi Jangka Panjang.

**Tabel 5.3.53 Rincian Investasi Jangka Panjang**

Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Investasi Non Permanen Lainnya	1.819.475.000,00	1.833.425.000,00
Penyisihan INP Dana Bergulir	(1.819.475.000,00)	(1.833.425.000,00)
<b>INP Lainnya Netto</b>	0,00	0,00
Investasi Permanen	87.548.450.074,96	87.166.450.036,04
<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>	<b>87.548.450.074,96</b>	<b>87.166.450.036,04</b>

#### 5.3.1.2.1 Investasi Non Permanen Lainnya

Jumlah Investasi Non Permanen per 31 Desember 2020 merupakan nilai penempatan dana Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam bentuk program dana bergulir. Saldo Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp1.819.475.000,00 dan sebesar Rp1.833.425.000,00 turun sebesar Rp13.950.000,00 atau 0,76%. Adanya pengembalian atas investasi non permanen pengembangan sapi disebabkan oleh adanya upaya penagihan yang dilakukan terhadap kelompok ternak oleh Dinas Pertanian sebagai tindak lanjut atas temuan BPK dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.54 Rincian INP Penggaduhan (Pengembangan) Sapi**

Uraian	Saldo Tahun 2019 (Rp)	Mutasi (Rp)		Saldo Tahun 2020 (Rp)
		Pelunasan	Penambahan	
Tahun 2006 s/d Tahun 2010	33.100.000,00	0,00	0,00	33.100.000,00
Tahun 2007 s/d Tahun 2012	288.450.000,00	300.000,00	0,00	288.150.000,00
Tahun 2008 s/d Tahun 2012	437.950.000,00	4.550.000,00	0,00	433.400.000,00
Tahun 2009 s/s Tahun 2015	978.300.000,00	9.100.000,00	0,00	969.200.000,00
Tahun 2010 s/d Tahun 2014	12.250.000,00	0,00	0,00	12.250.000,00
Tahun 2012 s/d Tahun 2016	63.500.000,00	0,00	0,00	63.500.000,00
Tahun 2013 s/d Tahun 2017	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Tahun 2015 s/d Tahun 2020	9.875.000,00	0,00	0,00	9.875.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.833.425.000,00</b>	<b>13.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.819.475.000,00</b>



Berdasarkan surat pernyataan dari Dinas Pertanian Nomor 520/542/DISTAN Tanggal 7 April 2021 menyatakan bahwa kegiatan Pengembangan Ternak Sapi yang dipelihara oleh kelompok sudah tidak ada lagi (dijual) dikarenakan terdesak kebutuhan ekonomi keluarga.

Dinas Pertanian hanya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerimaan angsuran dari kelompok ternak sapi yang dilakukan setiap triwulan.

#### 5.3.1.2.1.1 Penyisihan Investasi Non Permanen

Penyisihan Investasi Non Permanen dilakukan berdasarkan umur piutang menurut kategori kelancaran yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penyisihan investasi non permanen dilakukan untuk memenuhi nilai bersih yang dapat direalisasikan untuk dikembalikan atas investasi non permanen.

Nilai Investasi Non Permanen per 31 Desember 2020 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp1.819.475.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.55 Rincian Penyisihan INP Pengembangan Sapi**

Kategori Umur INP Penggaduhan Sapi	Jumlah Bruto (Rp)	Penyisihan Tidak tertagih	Jumlah Penyisihan (Rp)
Lancar	0,00	0,50%	0,00
Kurang Lancar	0,00	10%	0,00
Diragukan	0,00	50%	0,00
Macet	1.819.475.000,00	100%	1.819.475.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.819.475.000,00</b>		<b>1.819.475.000,00</b>

#### 5.3.1.2.2 Investasi Permanen

Jumlah Investasi Permanen merupakan penempatan dana Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam bentuk Penyertaan modal Pemerintah Daerah yang bersifat permanen (ditujukan untuk kepemilikan) yang dicatat dengan menggunakan metode biaya (*cost method*) maupun metode ekuitas (*equity method*). Jumlah Investasi Permanen per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp87.548.450.074,96 dan Rp87.166.450.036,04.

##### 5.3.1.2.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp87.548.450.074,96 dan Rp87.166.450.036,04. Tidak ada penambahan penyertaan modal baik pada PDAM Tirta Dharma Kandangan maupun PD BPR HSS selama Tahun 2020.



**Tabel 5.3.56 Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah**

Penyertaan Modal (Invesasi) Pemda	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Bank Kalsel	55.000.000.000,00	55.000.000.000,00
Perusahaan Daerah	27.669.167.243,07	27.217.835.399,04
BPR HSS	4.131.074.105,10	4.195.901.505,00
Koperasi	75.000.000,00	75.000.000,00
BKK	80.053.495,00	80.053.495,00
BUMDes	593.155.637,00	597.659.637,00
<b>Jumlah</b>	<b>87.548.450.074,96</b>	<b>87.166.450.036,04</b>

**1. Bank Kalsel**

Saldo Penyertaan Modal pada Bank Kalsel per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp55.000.000.000,00. Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Bank Kalsel dicatat dengan metode biaya. Tidak ada penambahan penyertaan modal pada Bank Kalsel selama tahun 2020.

**2. Perusahaan Daerah**

Saldo penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Perusahaan Daerah per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp27.669.167.243,07 dan Rp27.217.835.399,04. Perusahaan Daerah pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri atas PDAM Tirta Dharma Kandangan dan PD Sasangga Banua dengan rincian nilai penyertaan modal sebagai berikut:

**Tabel 5.3.57 Rincian Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah**

Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi (Rp)			31 Desember 2020 (Rp)
		Koreksi	Penambahan	Bagian Laba/ (Rugi)	
PDAM Tirta Dharma	25.838.467.948,94	0,25	0,00	451.331.843,78	26.289.799.792,97
PD Sasangga Banua	1.379.367.450,10	0,00	0,00	0,00	1.379.367.450,10
<b>Jumlah</b>	<b>27.217.835.399,04</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>451.331.843,78</b>	<b>27.669.167.243,07</b>

**a. PDAM Tirta Dharma Kandangan**

Penyertaan Modal pada PDAM Kabupaten Hulu Sungai Selatan per 31 Desember 2020 dicatat dengan metode ekuitas dengan persentase kepemilikan 82% (berdasarkan Laporan Keuangan PDAM *Audited*). Tidak ada penambahan investasi pada PDAM Tirta Dharma Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2020.

Selama tahun 2020 berdasarkan laporan keuangan *Audited*, PDAM Tirta Dharma mencatat bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar Rp451.331.843,78. Terdapat koreksi penyertaan modal Pemerintah Daerah karena kesalahan hitung pembulatan desimal sebesar Rp0,25. Saldo Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Dharma



Kandungan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp26.289.799.792,97 dan Rp25.838.467.948,94.

**b. PD Sasangga Banua**

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada PD Sasangga Banua per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp1.379.367.450,10. Status PD Sasangga Banua sampai dengan tahap penyusunan laporan keuangan ini sudah dilikuidasi dengan diterbitkannya Laporan Likuidasi PD Sasangga Banua oleh Kantor Hukum DR. Masdari Tasmin, SH.,MH. namun masih menunggu Raperda pengesahan pembubaran oleh DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai surat Bupati kepada Ketua DPRD dengan Nomor 500/271/ Ekobang tanggal 15 April 2021 perihal Tindak Lanjut Pembubaran PD Sasangga Banua.

Data utama likuidasi adalah data yang disajikan oleh Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang didampingi oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan, yaitu: Laporan Keuangan Penutupan Perusahaan Daerah Sasangga Banua Untuk Tahun Buku yang Berakhir Tanggal 15 September 2012 dan 31 Desember 2011 dengan posisi neraca pada saat penutupan sebagai berikut:

**Tabel 5.3.58 Neraca Penutupan PD Sasangga Banua**

Uraian:	2012 (Rp)	2011 (Rp)
Aset Lancar	1.865.406.091,60	1.818.328.158,48
Aset Tidak Lancar	0,00	0,00
<b>Jumlah Aset</b>	<b>1.865.406.091,60</b>	<b>1.818.328.158,48</b>
Kewajiban Jangka Pendek	486.038.641,50	1.853.065.661,56
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>486.038.641,50</b>	<b>1.853.065.661,56</b>
Modal (penyertaan modal Kab. HSS)	3.050.000.000,00	3.050.000.000,00
Akumulasi Kerugian	(1.670.632.549,90)	(3.084.737.503,08)
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>1.379.367.450,10</b>	<b>(34.737.503,08)</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>	<b>1.865.406.091,60</b>	<b>1.818.328.158,48</b>

**3. BPR Hulu Sungai Selatan**

Saldo penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada BPR HSS per 31 Desember 2020 dan 2019 berdasarkan Laporan Keuangan BPR *Audited* sebesar Rp4.131.073.699,89 dan Rp4.195.901.505,00. Tidak ada penambahan investasi pada BPR HSS selama tahun 2020.

Terdapat koreksi sebesar Rp22.017,27 yang terdiri atas:

- Koreksi lebih catat saldo awal penyertaan modal pada BPR HSS tahun 2019 sebesar Rp0,42 karena kesalahan penghitungan pembulatan



desimal.

- Koreksi kurang catat bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Daerah Tahun 2019 sebesar Rp22.016,85 (berdasarkan Laporan Keuangan BPR Tahun 2019 *Audited*).

Selama tahun 2020 berdasarkan Laporan Keuangan BPR HSS *Audited* mencatat bagian rugi atas penyertaan modal Pemerintah Daerah sebesar Rp64.805.787,84. Penilaian penyertaan modal dicatat dengan metode ekuitas dengan persentase kepemilikan sebesar 55% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.59 Rincian Penyertaan Modal pada BPR HSS**

Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi (Rp)			31 Desember 2020 (Rp)
		Koreksi	Penambahan	Bagian Laba/ (Rugi)	
BPR HSS	4.195.901.505,00	(22.017,27)	0,00	(64.805.787,84)	4.131.073.699,89
<b>Jumlah</b>	<b>4.195.901.505,00</b>	<b>(22.017,27)</b>	<b>0,00</b>	<b>(64.805.787,84)</b>	<b>4.131.073.699,89</b>

#### 4. KPN Swarga

Saldo penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada KPN Swarga Kandangan dicatat dengan metode biaya. Saldo penyertaan modal per 31 Desember 2020 sebesar Rp75.000.000,00. Selama Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak melakukan penambahan atas penyertaan modal pada KPN Swarga Kandangan.

#### 5. Badan Kredit Kecamatan (BKK)

Saldo penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Badan Kredit Kecamatan (BKK) per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp80.053.495,00. Tidak ada penambahan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada BKK sampai dengan tahun anggaran 2020.

#### 6. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Saldo penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp593.155.637,00 dan Rp597.659.637,00. Tidak ada penambahan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan seiring dengan perubahan perundang-undangan pengelolaan BUMDes di wilayah Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi Perseroan Terbatas (PT). Tidak ada pembekuan untuk BUMDes tetapi ada kesepakatan bersama agar masing-masing BUMDes melalui RUPS harus mengembalikan dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai Surat Nomor: 500.2/413/Ekobang Tanggal 23 Mei 2012.



**Tabel 5.3.60 Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMDes**

Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	31 Desember 2019 (Rp)	Pengembalian (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
BUMDes Kandangan	85.925.539,00	4.504.000,00	81.421.539,00
BUMDes Padang Batung	273.800.000,00	0,00	273.800.000,00
BUMDes Sungai Raya	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
BUMDes Simpur	11.600.000,00	0,00	11.600.000,00
BUMDes Angkinang	76.334.098,00	0,00	76.334.098,00
<b>Jumlah</b>	<b>597.659.637,00</b>	<b>4.504.000,00</b>	<b>593.155.637,00</b>

#### 5.3.1.2.2.2 Investasi Permanen Lainnya

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak mempunyai saldo atas investasi permanen lainnya.

#### 5.3.1.3 ASET TETAP

Akun ini menunjukkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berupa aset tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik.

Mulai Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah. Perubahan penggolongan dan kodefikasi barang berdasarkan Permendagri 108 Tahun 2016 sudah dapat diakomodir melalui SIMDA BMD. Penyesuaian kebijakan akuntansi atas Permendagri 108 diatur secara lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Masa Manfaat dan Penyusutan Barang Milik Daerah.

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2020 merupakan nilai Aset Tetap yang dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp2.993.686.015.370,44 dan Rp2.937.131.721.037,06, yang terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan serta Akumulasi Penyusutan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.61 Ringkasan Aset Tetap**

Aset Tetap	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Tanah	599.431.287.627,00	594.677.710.912,00
Peralatan dan Mesin	505.553.125.124,51	444.196.263.156,62
Gedung dan Bangunan	1.095.014.166.622,16	1.024.231.227.264,24
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.756.049.479.588,45	1.675.134.767.024,10
Aset Tetap Lainnya	48.463.991.579,83	52.787.329.621,72
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.613.771.380,00	7.205.188.675,00
Akumulasi Penyusutan	(1.016.439.806.551,51)	(861.100.765.616,62)
<b>Jumlah</b>	<b>2.993.686.015.370,44</b>	<b>2.937.131.721.037,06</b>



Penambahan nilai Aset Tetap terdiri atas: (1) penambahan aset dari belanja modal tahun 2020; (2) penambahan aset dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA 2020; (3) penambahan aset dari belanja Dana BTT Covid; (4) penerimaan aset dari donasi/hibah; (5) penambahan aset dari belanja non modal tahun 2020; (6) klasifikasi masuk berupa Konstruksi Dalam Pekerjaan yang telah selesai dikerjakan dan menjadi aset; dan (7) koreksi pengelompokan yang menambah nilai aset.

Pengurangan nilai Aset Tetap terdiri atas: (1) penghapusan aset tetap; (2) klasifikasi keluar berupa Konstruksi dalam Pekerjaan yang fisiknya belum selesai dikerjakan; (3) koreksi pengelompokan yang mengurangi nilai aset; (4) reklasifikasi ke aset lainnya; dan (5) reklasifikasi menjadi barang ekstrakompatabel.

Mutasi Aset Tetap (tanpa akumulasi penyusutan) Kabupaten Hulu Sungai Selatan per 31 Desember 2020 sesuai realisasi penambahan dan pengurangan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.62 Rincian Mutasi Aset Tetap**

Aset Tetap	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi Selama TA 2020		31 Desember 2020 (Rp)
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Tanah	594.677.710.912,00	9.936.713.700,00	(5.183.136.985,00)	599.431.287.627,00
Peralatan dan Mesin	444.196.263.156,62	73.698.267.875,89	(12.341.405.908,00)	505.553.125.124,51
Gedung dan Bangunan	1.024.231.227.264,24	124.530.684.023,92	(53.747.744.666,00)	1.095.014.166.622,16
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.675.134.767.024,10	92.740.308.104,35	(11.825.595.540,00)	1.756.049.479.588,45
Aset Tetap Lainnya	52.787.329.621,72	2.785.886.337,00	(7.109.224.378,89)	48.463.991.579,83
Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.205.188.675,00	1.802.983.105,00	(3.394.400.400,00)	5.613.771.380,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.798.232.486.653,68</b>	<b>305.494.843.146,16</b>	<b>(93.601.507.877,89)</b>	<b>4.010.125.821.921,95</b>

#### 5.3.1.3.1 Tanah

Berdasarkan PSAP 07, tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.

Tanah yang termasuk dalam aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan dalam kondisi siap pakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan.

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp599.431.287.627,00 dan Rp594.677.710.912,00. Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2020 naik sebesar Rp4.753.576.715,00 atau 0,80%



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

dari saldo Aset Tetap Tanah tahun 2019. Adapun Daftar Aset Tetap Tanah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.3.63 Rincian Aset Tetap Tanah per SKPD**

NO	SKPD	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	75.777.683.014,00	74.993.637.014,00
2	Dinas Kesehatan	16.246.109.606,00	15.590.625.056,00
3	RSUD Hasan Basry Kandangan	23.272.989.232,00	23.272.989.232,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	163.310.458.997,00	163.310.458.997,00
5	Dinas Perumahan Rakyat KPLH	44.276.331.725,00	43.211.961.350,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Kesbangpol	267.223.770,00	267.223.770,00
7	Dinas Sosial	1.488.153.770,00	1.488.153.770,00
8	Dinas Ketahanan Pangan	96.705.000,00	96.705.000,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100.500.000,00	100.500.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	144.000.000,00	144.000.000,00
11	Dinas Pengend.Penduduk KB, PPA	466.500.000,00	466.500.000,00
12	Dinas Perhubungan	19.112.873.410,00	19.082.873.410,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	639.367.770,00	639.367.770,00
14	Dinas Tenaga Kerja, KUK, dan Perindustrian	2.089.660.500,00	1.567.913.400,00
15	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	5.620.381.145,00	3.444.834.770,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.089.114.000,00	5.089.114.000,00
17	Dinas Perikanan	840.375.000,00	840.375.000,00
18	Dinas Pertanian	43.578.030.762,00	43.578.030.762,00
19	Dinas Perdagangan	10.604.133.917,00	10.850.533.917,00
20	Sekretariat Daerah	79.647.071.142,00	79.689.221.142,00
21	Bagian Pemerintahan	16.968.143.421,00	16.968.143.421,00
22	Bagian Umum	40.820.170.720,00	40.820.170.720,00
23	Sekretariat DPRD	343.200.000,00	343.200.000,00
24	Kecamatan Kandangan	154.839.170,00	154.839.170,00
25	Kelurahan Kandangan Kota	261.126.770,00	261.126.770,00
26	Kelurahan Kandangan Utara	63.020.000,00	63.020.000,00
27	Kelurahan Kandangan Barat	75.636.770,00	75.636.770,00
28	Kelurahan Jambu Hilir	845.560.000,00	845.560.000,00
29	Kecamatan Padang Batung	805.363.609,00	805.363.609,00
30	Kecamatan Loksado	489.530.500,00	489.530.500,00
31	Kecamatan Sungai Raya	11.289.694.300,00	11.289.694.300,00
32	Kecamatan Simpur	709.460.000,00	461.410.000,00
33	Kecamatan Kalumpang	199.281.503,00	447.331.503,00
34	Kecamatan Angkinang	4.030.634.407,00	4.030.634.407,00
35	Kecamatan Telaga Langsat	513.872.971,00	513.872.971,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

NO	SKPD	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
36	Kecamatan Daha Utara	503.835.280,00	503.835.280,00
37	Kecamatan Daha Selatan	13.018.262.800,00	13.018.262.800,00
38	Kecamatan Daha Barat	293.398.560,00	293.398.560,00
39	Inspektorat Kabupaten	800.000.000,00	800.000.000,00
40	Badan Keuangan Daerah	13.238.328.316,00	13.427.396.001,00
41	Badan Kepegawaian dan Diklat	1.340.265.770,00	1.340.265.770,00
<b>Jumlah</b>		<b>599.431.287.627,00</b>	<b>594.677.710.912,00</b>

Adapun mutasi tanah Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5.3.64 Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2020**

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal Per 1 Januari 2020	594.677.710.912,00
Penambahan Aset Tetap Tanah Tahun 2020	9.936.713.700,00
Pengurangan Aset Tetap tanah Tahun 2020	(5.183.136.985,00)
<b>Saldo Akhir Per 31 Desember 2020</b>	<b>599.431.287.627,00</b>

**A. Penambahan Aset Tetap Tanah**

Penambahan aset tetap Tanah sebesar Rp9.936.713.700,00 terdiri atas penambahan sebagai berikut:

1. Penambahan berupa Realisasi Belanja Modal Tanah pada LRA sebesar Rp5.665.753.150,00 dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.3.65 Daftar Pengadaan Tanah Tahun 2020**

No	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Perumahan Rakyat KPLH	2.938.459.675,00
2	Dinas Perhubungan	30.000.000,00
3	Dinas Tenaga Kerja, KUKP	521.747.100,00
4	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	2.175.546.375,00
<b>Total</b>		<b>5.665.753.150,00</b>

Rincian mengenai belanja modal Tanah per jenis barang pada *Lampiran 4*.

2. Hibah sebesar Rp2.573.700.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup berupa hibah tanah kompleks perumahan, pemukiman dan jalan lingkungan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.66 Rincian Hibah Tanah pada Dinas Perumahan Rakyat KPLH**

No	Jenis	Luas (m <sup>2</sup> )	Alamat	Berita Acara	Jumlah (Rp)
1	Tanah Jalan kompleks	2.351	Perumahan Mega Gerilya Ds. Karang Jawa Muka	No. 01/BA.PSU-MGA/DISPERA/HSS/VIII/2020	705.300.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

No	Jenis	Luas (m2)	Alamat	Berita Acara	Jumlah (Rp)
2	Tanah Jalan komplek	2.813	Perumahan Jambu Asri kel. Jambu Hilir	No. 01/BAEHP/PRM-AFM/DISPERA/HSS/VIII/2020	843.900.000,00
3	Tanah Jalan komplek	2.049	Perumahan Al-Fairuz Madina Kel. Kandangan Kota	No. 01/BA.PSU-AFM/DISPERA/HSS/VIII/2020	1.024.500.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>7.213</b>			<b>2.573.700.000,00</b>

- Reklasifikasi dari Barang dan Jasa sebesar Rp9.680.000,00 yaitu pada Dinas Perumahan Rakyat KPLH berupa jasa tenaga ahli pengukuran tanah.
- Reklasifikasi antar KIB, merupakan mutasi masuk dari KIB lain guna menyesuaikan masing-masing aset dengan KIB yang seharusnya sebesar Rp191.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.67 Reklasifikasi dari KIB lain**

No	SKPD	Dari KIB	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	KIB B (Peralatan Mesin)	1.600.000,00	Pasir/Sirtu
2	Dinas Kesehatan	KIB C (Gedung dan Bangunan)	189.400.000,00	Pengurangan halaman Puskesmas Sungai Pinang
<b>Total</b>			<b>191.000.000,00</b>	

- Mutasi masuk antar SKPD merupakan aset yang pengadaannya atau pembeliannya dari SKPD asal kemudian dimutasikan ke masing-masing SKPD pengguna sebesar Rp494.450.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.68 Rincian Mutasi Masuk antar SKPD**

No	SKPD Tujuan	SKPD Asal	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	Dinas Perdagangan	246.400.000,00	Tanah bangunan pasar
2	Kecamatan Simpur	Kecamatan Kalumpang	248.050.000,00	Tanah lapangan bola
<b>Total</b>			<b>494.450.000,00</b>	

Mutasi masuk antar SKPD memiliki nilai yang sama dengan mutasi keluar antar SKPD.

- Koreksi penambahan dari aset tetap tanah yang bernilai nol. Aset-aset tanah tersebut bernilai 0 (nol) karena belum jelas dari aspek kepemilikan. Dari SIMDA BMD diketahui asal usul tanah tersebut adalah aset pinjam pakai yang sebagian besar adalah tanah desa dan sebagian lagi milik masyarakat, tetapi belum dilengkapi dengan dokumen pinjam pakai. Penilaian atas tanah yang bernilai nol terdapat pada 2 SKPD sebesar Rp1.002.130.550,00 yaitu pada:
  - Dinas Pendidikan sebesar Rp536.046.000,00 dengan luas tanah seluruhnya seluas 15.410 meter persegi.
  - Dinas Kesehatan sebesar Rp466.084.550,00 dengan luas tanah seluruhnya seluas 10.990 meter persegi.



## B. Pengurangan Aset Tetap Tanah

Pengurangan aset tetap tanah sebesar Rp5.183.136.985,00 terdiri atas pengurangan aset tetap sebagai berikut:

1. Mutasi keluar SKPD merupakan aset yang dimutasikan ke masing-masing SKPD pengguna tetapi pembeliannya atau pengadaannya dari SKPD asal. Mutasi keluar SKPD mempunyai nilai yang sama dengan mutasi masuk sebesar Rp494.450.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.69 Rincian Mutasi Keluar antar SKPD**

No	SKPD Asal	SKPD Tujuan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Perdagangan	Dinas Pendidikan	246.400.000,00	Tanah bangunan pasar
2	Kecamatan Kalumpang	Kecamatan Simpur	248.050.000,00	Tanah lapangan bola
<b>Total</b>			<b>494.450.000,00</b>	

2. Penghapusan merupakan pengurangan aset Tanah karena dihibahkan sebesar Rp4.688.686.985,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.70 Rincian Hibah Tanah**

No.	SKPD	Jumlah (Rp)	Keterangan	Berita Acara
1	Dinas Perumahan Rakyat KPLH	920.863.000,00	Hibah tanah ke Polres HSS	No. 032/1648-BAST-HBH/BAKEUDA/2020
		3.536.606.300,00	Hibah tanah ke Pengadilan Negeri HSS	No. 032/1725-BAST-HBH/BAKEUDA/2020
2	Sekretariat Daerah	42.150.000,00	Hibah tanah ke Pemerintahan Desa Simpur	SK Sekda Nomor 9 Tahun 2020
3	Badan Keuangan Daerah	136.800.000,00	Hibah tanah ke Polsek Loksado	No. 032/534-BAST-HBH/BAKEUDA/2020
		52.267.685,00	Hibah tanah ke Polsek Kalumpang	
<b>Total</b>		<b>4.688.686.985,00</b>		

Dari aspek legalitas kepemilikan berupa sertifikat, dari 1.841 persil tanah milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah mempunyai bukti kepemilikan berupa sertifikat sebanyak 822 persil tanah yang disimpan pada Bidang Barang Milik Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan rincian sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 5.3.71 Keadaan Aset Tetap Tanah Berdasarkan Bukti Kepemilikan Sertifikat**

No	Uraian	Persil Tanah
1	Tanah Bersertifikat	822 Persil
2	Tanah Belum Bersertifikat	1.019 Persil
<b>Jumlah</b>		<b>1.841 Persil</b>

### 5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik dan seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp505.553.125.124,51 dan Rp444.196.263.156,62 terjadi kenaikan sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Rp61.356.861.967,89 atau 13,81% dari total Peralatan dan Mesin Tahun 2019 dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.3.72 Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin per SKPD**

NO	SKPD	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	66.361.899.758,51	55.925.649.699,62
2	Dinas Kesehatan	67.515.976.811,00	59.535.889.617,00
3	RSUD Hasan Basry Kandangan	191.691.152.216,00	163.234.438.600,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	10.445.960.638,00	10.513.611.638,00
5	Dinas Perumahan Rakyat KPLH	35.736.559.977,00	30.945.295.797,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Kesbangpol	3.697.141.567,00	3.722.891.867,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	3.449.084.710,00	3.376.037.980,00
8	Dinas Sosial	2.123.003.658,00	1.987.936.898,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	1.136.392.006,00	1.252.397.006,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.064.588.387,00	1.869.896.183,00
11	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa	758.541.400,00	717.080.800,00
12	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	4.959.328.384,00	5.031.014.284,00
13	Dinas Perhubungan	12.389.119.968,00	8.097.522.508,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.464.018.154,00	7.070.873.154,00
15	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKP	3.102.384.275,00	3.104.584.275,00
16	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1.623.373.534,00	1.382.576.234,00
17	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	3.371.331.864,00	3.107.914.264,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.241.275.974,00	1.793.296.374,00
19	Dinas Perikanan	3.441.872.633,00	3.372.922.633,00
20	Dinas Pertanian	10.576.180.345,00	10.667.035.145,00
21	Dinas Perdagangan	3.665.257.504,00	3.521.445.004,00
22	Sekretariat Daerah	419.637.500,00	419.637.500,00
23	Bagian Tata Pemerintahan	1.886.242.561,00	1.872.542.561,00
24	Bagian Hukum dan Perundang-undangan	360.729.734,00	397.110.634,00
25	Bagian Kesejahteraan Rakyat	314.772.584,00	304.897.584,00
26	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	1.160.581.234,00	923.582.234,00
27	Bagian Protokol dan Kehumasan	1.480.293.004,00	1.351.288.004,00
28	Bagian Umum	22.857.536.270,00	22.588.958.269,00
29	Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah	506.739.703,00	483.539.703,00
30	Bagian Perekoniman, Pembangunan dan TU	413.552.294,00	413.552.294,00
31	Sekretariat DPRD	6.578.742.790,00	5.657.915.936,00
32	Kecamatan Kandangan	1.723.640.033,00	1.542.263.033,00
33	Kelurahan Kandangan Kota	397.473.906,00	285.448.906,00
34	Kelurahan Kandangan Utara	308.864.932,00	210.667.532,00
35	Kelurahan Kandangan Barat	405.662.877,00	342.546.877,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

NO	SKPD	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
36	Kelurahan Jambu Hilir	555.993.731,00	416.108.031,00
37	Kecamatan Padang Batung	1.242.988.399,00	1.176.845.399,00
38	Kecamatan Loksado	1.035.513.571,00	1.034.013.571,00
39	Kecamatan Sungai Raya	1.266.290.696,00	1.250.982.096,00
40	Kecamatan Simpur	1.175.305.787,00	1.123.282.787,00
41	Kecamatan Kalumpang	1.363.854.483,00	1.222.305.883,00
42	Kecamatan Angkinang	1.117.652.137,00	1.030.594.137,00
43	Kecamatan Telaga Langsat	974.463.437,00	951.058.937,00
44	Kecamatan Daha Utara	1.498.383.603,00	1.436.033.603,00
45	Kecamatan Daha Selatan	1.476.216.472,00	1.353.163.472,00
46	Kecamatan Daha Barat	1.180.863.829,00	1.125.163.829,00
47	Inspektorat Kabupaten	1.945.212.245,00	1.864.402.245,00
48	BAPPELITBANGDA	2.087.896.788,00	1.928.991.188,00
49	Badan Keuangan Daerah	9.547.261.729,00	8.763.388.729,00
50	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	2.456.315.032,00	2.495.668.222,00
<b>TOTAL</b>		<b>505.553.125.124,51</b>	<b>444.196.263.156,62</b>

Adapun rincian mutasi aset tetap Peralatan dan Mesin selama Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.73 Mutasi Peralatan dan Mesin**

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal Per 1 Januari 2020	444.196.263.156,62
Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2020	73.698.267.875,89
Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2020	(12.341.405.908,00)
<b>Saldo Akhir Per 31 Desember 2020</b>	<b>505.553.125.124,51</b>

**A. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin**

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama TA 2020 sebesar Rp73.698.267.875,89 disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Modal (LRA) Tahun Anggaran 2020 yang merupakan realisasi Belanja Modal seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan nilai sebesar Rp46.653.731.769,00 dengan rincian SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.3.74 Daftar Pengadaan Peralatan dan Mesin Tahun 2020**

No	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	9.308.967.148,00
2	Dinas Kesehatan	8.023.825.220,00
3	RSUD Hasan Basry Kandangan	20.245.908.851,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	94.490.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

No	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
5	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH	1.240.440.200,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Kesbangpol	11.110.000,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	113.500.000,00
8	Dinas Sosial	126.585.000,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	70.850.000,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	72.800.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	77.000.000,00
12	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	269.436.000,00
13	Dinas Perhubungan	511.515.000,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	393.145.000,00
15	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKP	20.630.000,00
16	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	226.094.800,00
17	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	387.431.100,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	401.048.600,00
19	Dinas Perikanan	68.950.000,00
20	Dinas Pertanian	22.780.000,00
21	Dinas Perdagangan	14.925.000,00
22	Bagian Pemerintahan	13.700.000,00
23	Bagian Kesejahteraan Rakyat	9.875.000,00
24	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	236.999.000,00
25	Bagian Protokol dan Kehumasan	129.005.000,00
26	Bagian Umum	756.236.800,00
27	Bagian Organisasi	23.200.000,00
28	Sekretariat DPRD	671.230.850,00
29	Kecamatan Kandangan	193.426.000,00
30	Kelurahan Kandangan Kota	147.875.000,00
31	Kelurahan Kandangan Utara	99.209.400,00
32	Kelurahan Kandangan Barat	50.250.000,00
33	Kelurahan Jambu Hilir	127.019.700,00
34	Kecamatan Padang Batung	32.375.000,00
35	Kecamatan Loksado	1.400.000,00
36	Kecamatan Sungai Raya	12.400.000,00
37	Kecamatan Simpur	106.100.000,00
38	Kecamatan Kalumpang	141.325.000,00
39	Kecamatan Angkinang	105.425.000,00
40	Kecamatan Telaga Langsat	57.673.500,00
41	Kecamatan Daha Utara	59.800.000,00
42	Kecamatan Daha Selatan	51.375.000,00
43	Kecamatan Daha Barat	53.200.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

No	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
44	Inspektorat Kabupaten	97.760.000,00
45	Bappelitbangda	170.324.600,00
46	Badan Keuangan Daerah	1.537.235.000,00
47	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	67.880.000,00
<b>Total</b>		<b>46.653.731.769,00</b>

Rincian mengenai belanja modal Peralatan dan Mesin per jenis barang pada *Lampiran 5*.

- Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp117.476.070,00 pada beberapa SKPD dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.75 Daftar Reklasifikasi dari Belanja Non Modal (Barang dan Jasa)**

No	SKPD	Reklas dari	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	Beban Barang dan Jasa	5.483.790,00	Lihat tabel 5.3.70
2	Dispera KPLH	Beban Barang dan Jasa	65.065.280,00	Peralatan standar
		Beban Barang dan Jasa	6.180.000,00	Alat pemeliharaan tanaman
		Beban Barang dan Jasa	3.725.000,00	Alat rumah tangga
3	Kelurahan Kandangan Utara	Beban Barang dan Jasa	650.000,00	Kran air
4	Kecamatan Daha Selatan	Beban Barang dan Jasa	36.372.000,00	Pengadaan gordena dan taplak meja
<b>Total</b>			<b>117.476.070,00</b>	

Berikut disajikan daftar reklasifikasi Peralatan dan Mesin ke non modal (Barang dan Jasa) per sekolah.

**Tabel 5.3.76 Daftar Reklasifikasi ke Non Modal per Sekolah**

No	Sekolah	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	SDN Amparaya 2	930.000,00	Kipas angin dan thermogun
2	SDN Baruh Kambang 1	960.000,00	Thermogun
3	SDN Hamayung Utara	2.769.250,00	Matras
4	SMPN 2 Padang Batung	350.000,00	Kasur
5	SMPN 1 Kandangan	474.540,00	Kipas angin
<b>Total</b>		<b>5.483.790,00</b>	

- Reklasifikasi dari belanja modal yang menggunakan dana BTT Covid sebesar Rp2.864.286.757,00 pada beberapa SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.3.77 Daftar Belanja Aset Tetap Peralatan dan Mesin Dana BTT Covid per SKPD**

No	SKPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Kesehatan	927.479.452,00	Alat penyimpanan, alat kantor lainnya, meubelair, alat dapur, alar rumah tangga, alat



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
			komunikasi, alat kedokteran umum, alat kedokteran jantung, alat kedokteran radiodiagnostic, alat kesehatan umum, komputer.
2	RSUD H. Hasan Basry	1.720.834.875,00	Alat kesehatan umum, meubelair, alat penyimpan perlengkapan kantor, AC, alat rumah tangga lainnya, telepon,
3	BPB Kesbangpol	47.900.000,00	Handsprayer, thermogun infrared, tandon air
4	Satpol PP	12.672.730,00	Thermometer infrared dan megaphone
5	Dinas Perhubungan	16.000.000,00	Megaphone
6	Dinas Perdagangan	95.500.000,00	Thermo gun, tandon, pengeras suara
7	Kecamatan Kandangan	2.651.000,00	Thermometer infrared dan megaphone
8	Kelurahan Kandangan Kota	2.510.000,00	Thermometer infrared dan megaphone
9	Kelurahan Kandangan Utara	2.476.000,00	Thermometer infrared dan megaphone
10	Kelurahan Kandangan Barat	2.666.000,00	Thermometer dan megaphone
11	Kelurahan Jambu Hilir	2.666.000,00	Thermomer dan megaphone
12	Kecamatan Padang Batung	1.650.000,00	Thermometer
13	Kecamatan Loksado	1.500.000,00	Thermometer
14	Kecamatan Sungai Raya	2.908.600,00	Thermometer dan megaphone
15	Kecamatan Simpur	4.360.500,00	Thermometer dan megaphone
16	Kecamatan Kalumpang	1.623.600,00	Thermometer
17	Kecamatan Angkinang	3.247.000,00	Thermometer
18	Kecamatan Telaga Langsat	7.725.000,00	Thermometer dan megaphone
19	Kecamatan Daha Utara	2.550.000,00	Thermometer dan megaphone
20	Kecamatan Daha Selatan	2.866.000,00	Thermometer dan megaphone
21	Kecamatan Daha Barat	2.500.000,00	Thermometer
<b>Total</b>		<b>2.864.286.757,00</b>	

4. Hibah yang diterima Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar Rp10.968.769.177,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.78 Rincian Hibah Peralatan dan Mesin**

No	SKPD	Jumlah (Rp)	Keterangan	Berita Acara
1	Dinas Pendidikan	2.403.560.000,00	Dara Kemendikbud	
2	Dinas Kesehatan	4.610.500,00	Dari Kemenkes RI berupa KIT kebugaran	No. 024/1307-Set.2/Dinkes
3	RSUD Hasan Basry	5.155.516.577,00	Dari BPBD Prov. Kalsel	No. 360/BA/KL-BPBD/VI/2020
		2.575.000.000,00	Dari Dinas Kesehatan Prov. Kalsel	No. 442.1/1420/IF/VI/2020
				No. 442.1/2204/IF/X/2020
		15.950.000,00	Dari Kemenkes RI	KS.02.01/V.2/3766/2020



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD	Jumlah (Rp)	Keterangan	Berita Acara
		25.000.000,00	Dari Universitas Indonesia	KEMENKES RI AKD 20403021003
		50.000.000,00	Dari Rumah Aman Salman	-
		220.163.800,00	PT Madesa Sejahtera Utama	-
4	Dinas Perumahan Rakyat KPLH	360.038.200,00	Dari Dinas LH Prop.Kalsel berupa dump truck (Hibah Adipura)	BAST Dump Truk Merk HINO Hadiah Anugeah Adipura Tingkat Prov. Kalimantan Selatan Tahun 2018
5	Dinas PPKBPPA	22.330.100,00	Dari Provinsi Sepeda motor perlindungan perempuan dan anak	No. 47/set.KPP-PA/D.III.5/PL.06/NH-TORLIN/08/2019
6	Dinas Perdagangan	38.000.000,00	PT AGM berupa tempat cuci tangan	
		32.250.000,00	BRI Cab. Kandangan berupa tempat cuci tangan	
7	Bagian Perekonomian	66.350.000,00	Dari PT AGM dan BRI Cab. Kandangan berupa wastafel dan Sprayer elektrik desinfektan	
<b>Total</b>		<b>10.968.769.177,00</b>		

Penerima hibah aset tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan pada beberapa sekolah sebagai berikut:

**Tabel 5.3.79 Daftar Sekolah Penerima Hibah dari Kemendikbud**

No.	Sekolah	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	SDN Pandulangan	93.685.000,00	Laptop, proyektor, router, usb.
2	SDN Pagar Haur	93.685.000,00	Laptop, proyektor, router, usb.
3	SDN Keramat Raya 2	93.685.000,00	Laptop, proyektor, router, usb.
4	SDN Panggungan	93.685.000,00	Laptop, proyektor, router, usb.
5	SDN Sungai Raya Tengah	93.685.000,00	Laptop, proyektor, router, usb.
6	SDN Jarau	93.685.000,00	Laptop, proyektor, router, usb.
7	SDN Bagambir	93.685.000,00	Laptop, proyektor, router, usb.
8	SDN Telaga Langsat	93.685.000,00	Laptop, proyektor, router, usb.
9	Bamban Utara	93.685.000,00	Laptop, proyektor, router, usb.
10	SDN Karang Jawa Muka 2	93.685.000,00	Laptop, proyektor, router, usb.
11	SDN Tambak Bitin 1	93.685.000,00	Laptop, proyektor, router, usb.
12	SDN Kelumpang	93.685.000,00	Laptop, proyektor, router, usb.
13	SDN Sirih Hulu	93.685.000,00	Laptop, proyektor, router, usb.
14	SDN Pantai Ulin	93.685.000,00	Laptop, proyektor, router, usb.
15	SDN Wasah Hulu	93.685.000,00	Laptop, proyektor, router, usb.
16	SMPN 1 Daha Barat	90.485.000,00	Laptop, proyektor, router.
17	SMPN 2 Daha Utara	90.485.000,00	Laptop, proyektor, router.
18	SMPN 2 Loksado	90.485.000,00	Laptop, proyektor, router.



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Sekolah	Jumlah (Rp)	Keterangan
19	SMPN 2 Telaga Langsung	90.485.000,00	Laptop, proyektor, router.
20	SMPN 3 Daha Selatan	90.485.000,00	Laptop, proyektor, router.
21	SMPN 3 Daha Utara	90.485.000,00	Laptop, proyektor, router.
22	SMPN 3 Padang Batung	90.485.000,00	Laptop, proyektor, router.
23	SMPN 4 Daha Selatan	90.485.000,00	Laptop, proyektor, router.
24	SMPN 4 Daha Utara	90.485.000,00	Laptop, proyektor, router.
25	SMPN 4 Padang Batung	90.485.000,00	Laptop, proyektor, router.
26	SMPN 7 Daha Selatan	90.485.000,00	Laptop, proyektor, router.
27	SMPN 1 Telaga Langsung	2.950.000,00	Lemari dan mesin obras
<b>Total</b>		<b>2.403.560.000,00</b>	

5. Reklasifikasi antar KIB merupakan mutasi masuk dari KIB lain guna menyesuaikan masing-masing aset dengan KIB yang seharusnya sebesar Rp8.316.971.289,89 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.80 Rincian Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin**

No	SKPD	Dari KIB	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	KIB C (Gedung dan Bangunan)	20.000.000,00	Lihat tabel 5.3.75
			22.750.000,00	Teralis
		KIB E (Aset Tetap Lainnya)	57.500.000,00	Rambu papan tambahan
		KIB D (JIJ)	333.171.829,89	Lihat pada tabel
2	Dinas Kesehatan	KIB D (JIJ)	35.100.000,00	wastafel/sarana ctps
3	RSUD H. Hasan Basry	KIB C (Gedung dan Bangunan)	211.050.600,00	Peralatan kesehatan di ruangan instalasi gizi
4	Dinas Perumahan Rakyat KPLH	KIB C (Gedung dan Bangunan)	17.325.000,00	Rambu-rambu
		KIB D (JIJ)	3.152.000.000,00	Lampu LED
5	Dinas Sosial	KIB C (Gedung dan Bangunan)	1.000.000,00	Teralis
6	Dinas Perhubungan	KIB C (Gedung dan Bangunan)	1.986.775.500,00	Rambu-rambu
		KIB D (JIJ)	1.866.171.960,00	Instalasi pengembangan jalan
7	Dinas Pengendalian Penduduk KBPPPA	KIB C (Gedung dan Bangunan)	27.150.000,00	Personal komputer, rak buku, papan nama, printer, honor
8	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	KIB C (Gedung dan Bangunan)	1.550.000,00	Rambu-rambu
		KIB E (Aset Tetap Lainnya)	105.908.000,00	Pelampung keselamatan
		KIB E (Aset Tetap Lainnya)	23.800.000,00	Peralatan olahraga
9	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	KIB C (Gedung dan Bangunan)	74.997.500,00	Meubelair
10	Dinas Perpustakaan dan Kerasipan	KIB C (Gedung dan Bangunan)	4.000.000,00	Teralis



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD	Dari KIB	Jumlah (Rp)	Keterangan
11	Dinas Pertanian	KIB C (Gedung dan Bangunan)	72.350.000,00	Alat rumah tangga lainnya
12	Dinas Perdagangan	KIB C (Gedung dan Bangunan)	136.687.500,00	Pembuatan sumur bor, lamu sorot, dan rambu-rambu
		KIB D (JIJ)	4.800.000,00	instalasi pengamanan jalan
13	Sekretariat DPRD	KIB E (Aset Tetap Lainnya)	74.825.400,00	Rehab frame baliho
14	Kecamatan Kandangan	KIB C (Gedung dan Bangunan)	15.000.000,00	Pintu aula kantor
15	Kecamatan Padang Batung	KIB C (Gedung dan Bangunan)	32.118.000,00	Meja pelayanan
16	Kecamatan Angkinang	KIB C (Gedung dan Bangunan)	3.500.000,00	Teralis
17	Kecamatan Daha Selatan	KIB C (Gedung dan Bangunan)	22.440.000,00	Alat kantor dan rumah tangga
		KIB E (Aset Tetap Lainnya)	10.000.000,00	Peralatan olahraga
18	Badan Keuangan Daerah	KIB E (Aset Tetap Lainnya)	5.000.000,00	Peralatan olahraga
<b>Total</b>			<b>8.316.971.289,89</b>	

Pada Dinas Pendidikan terdapat reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin untuk kemudian didistribusikan ke beberapa sekolah sebagai berikut:

**Tabel 5.3.81 Daftar Sekolah Penerima Aset Peralatan dan Mesin**

No	Sekolah	Jumlah (Rp)
1	Pembelian pompa air untuk SDN Kandangan Barat 5	350.000,00
2	Pembelian tong air untuk SDN Kandangan Barat 5	9.650.000,00
3	Pembelian pompa air untuk SDN Hamalau 2	350.000,00
4	Pembelian tong air untuk SDN Hamalau 2	9.650.000,00
<b>Total</b>		<b>20.000.000,00</b>

6. Mutasi masuk SKPD merupakan aset yang pengadaannya atau pembeliannya dari SKPD asal kemudian dimutasikan ke masing-masing SKPD pengguna sebesar Rp4.765.732.813,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.82 Rincian Mutasi Masuk Aset Peralatan dan Mesin per SKPD**

No	SKPD Tujuan	SKPD Asal	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	Bagian Umum	259.705.000,00	Kendaraan roda 4
2		Bakeuda	255.475.604,00	Kendaraan roda 4
3	Dinas Kesehatan	Dinas PPKB, PPPA	107.200.000,00	Lemari alokon
4		RSUD H. Hasan Basry	325.136.000,00	Kendaraan roda 4, alat rumah tangga
5		Bagian Perekonomian	1.200.000,00	Wastafel
6		Bakeuda	312.530.000,00	Kendaraan roda 2 dan roda 4
7	RSUD Hasan Basry	Dinas PPKB, PPPA	14.275.000,00	Lemari alokon



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD Tujuan	SKPD Asal	Jumlah (Rp)	Keterangan
8		Bagian Perekonomian	4.800.000,00	Wastafel
9	Dinas Perumahan Rakyat KPLH	Bagian Perekonomian	6.000.000,00	Wastafel
10	Dinas Sosial	Bakeuda	32.000.000,00	Kendaraan roda 2
11	Dinas Perhubungan	Bagian Perekonomian	2.400.000,00	Wastafel
12	Dinas Kependudukan dan Catpil	Bagian Umum	170.057.794,00	Kendaraan roda 4
13		Bagian Perekonomian	2.935.000,00	wasatafel dan sprayer desinfektan
14		Bakeuda	18.200.000,00	Kendaraan roda 2
15	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Dinas Kesehatan	2.400.000,00	Thermo gun
16		Bagian Perekonomian	1.200.000,00	Wastafel
17	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	Bagian Perekonomian	6.000.000,00	Wastafel
18	Dinas Perpustakaan	Bakeuda	99.485.000,00	Kendaraan roda 2
19	Dinas Perdagangan	Bagian Perekonomian	13.000.000,00	Wastafel
20	Dinas Pertanian	Bakeuda	18.200.000,00	Kendaraan roda 2
21	Bagian Umum	Dinas Pendidikan	174.325.604,00	Kendaraan roda 4
22		Dinas Kesehatan	35.599.999,00	Thermo gun dan Thermal Scanner TV
23		Sekretariat DPRD	417.952.500,00	Kendaraan roda 4
24		Bagian Perekonomian	19.070.000,00	Wastafel, sprayer desinfektan
25	Sekretariat DPRD	Bakeuda	1.139.675.604,00	Kendaraan roda 4 dan roda 2
26		Bagian Perekonomian	1.200.000,00	Wastafel
27		Dinas Kesehatan	2.400.000,00	Thermo gun
28	Kelurahan Kandangan Utara	Bakeuda	18.200.000,00	Kendaraan roda 2
29	Kelurahan Kandangan Barat	Bakeuda	18.200.000,00	Kendaraan roda 2
30	Kelurahan Jambu Hilir	Bakeuda	18.200.000,00	Kendaraan roda 2
31	Bappelitbangda	Bagian Perekonomian	1.200.000,00	Wastafel
32		Bakeuda	18.200.000,00	Kendaraan roda 2
33	Inspektorat Kabupaten	Bagian Perekonomian	1.200.000,00	Wastafel
34	Bakeuda	Dinas PPKB, PPPA	171.806.000,00	Kendaraan roda 2
35		Dinas Kesehatan	13.000.000,00	Mobil jenazah
36		Sekretariat DPRD	549.952.500,00	Kendaraan roda 4
37		Bagian Umum	510.951.208,00	Kendaraan roda 4
38		Bagian Perekonomian	2.400.000,00	Wastafel
<b>Total</b>			<b>4.765.732.813,00</b>	



7. Penambahan karena penakuan aset tetap yang tidak jelas kepemilikannya sebesar Rp11.300.000,00 pada Badan Keuangan Daerah.

#### **B. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin**

Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun 2020 sebesar Rp12.341.405.908,00 disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Reklasifikasi ke ekstrakompatabel yaitu kumulatif belanja modal aset tetap Peralatan dan Mesin dengan nilai di bawah Rp750.000,00 untuk setiap unit barang dari seluruh SKPD sebagai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar Rp3.126.560.485,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.83 Rincian Aset Ekstrakompatabel Peralatan dan Mesin per SKPD**

No	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	1.824.434.948,00
2	Dinas Kesehatan	313.294.462,00
3	RSUD Hasan Basry	305.727.075,00
4	Dinas Perumahan Rakyat KPLH	29.127.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Kesbangpol	7.400.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	24.751.000,00
7	Dinas Perhubungan	12.190.000,00
8	Dinas Pengendalian Penduduk KBPPPA	2.463.000,00
9	Dinas Kependudukan dan Catpil	535.000,00
10	Dinas Tenaga Kerja KUKP	11.250.000,00
11	Dinas Porapar	142.588.000,00
12	Dinas Penanaman Modal PTSP	3.495.000,00
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	43.114.000,00
14	Dinas Ketahanan Pangan	1.025.000,00
15	Bagian Umum	187.961.000,00
16	Bagian Perekonomian	3.745.000,00
17	Sekretariat DPRD	600.000,00
18	Kecamatan Kandangan	29.700.000,00
19	Kelurahan Kandangan Kota	38.360.000,00
20	Kelurahan Kandangan Utara	16.750.000,00
21	Kelurahan Kandangan Barat	8.000.000,00
22	Kelurahan Jambu Hilir	8.000.000,00
23	Kecamatan Loksado	1.400.000,00
24	Kecamatan Simpur	56.200.000,00
25	Kecamatan Kalumpang	1.400.000,00
26	Kecamatan Angkinang	10.500.000,00
27	Bappelitbangda	23.400.000,00
28	Inspektorat Kabupaten	18.150.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD	Jumlah (Rp)
29	Badan Keuangan Daerah	1.000.000,00
<b>Total</b>		<b>3.126.560.485,00</b>

2. Adanya penghapusan barang-barang inventaris berupa Peralatan dan Mesin karena kondisi rusak berat sebesar Rp3.376.656.075,00 yang sampai dengan tanggal neraca telah dilakukan proses penghapusan berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penghapusan Barang Milik Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.84 Daftar Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin karena Rusak Berat**

No.	SKPD	Jumlah (Rp)	Keterangan	Nomor SK
1	Dinas Kesehatan	1.216.585.517,00	Alat kedokteran umum, alat kantor, peralatan personal komputer, personal komputer, alat kesehatan kebidanan, peralatan studio dan film, alat kesehatan, alat komunikasi, meubelair, kendaraan roda 4.	Sekda No. 3 ,6, 8, 10, 12, 13 dan 14 Tahun 2020
2	RSUD Hasan Basry	559.579.138,00	Ambulan, meubelair, alat rumah tangga, alat kedokteran umum, alat kedokteran lainnya, peralatan personal komputer	Sekda No. 13 Tahun 2020
3	Dinas Perumahan Rakyat KPLH	30.382.500,00	GPS, laptop, notebook	Sekda no.13 tahun 2020
4	Dinas Pekerjaan Umum TR	162.141.000,00	AC, personal komputer, peralatan personal komputer, alat kantor lainnya, meubelair	Sekda No. 6 dan No. 13 Tahun 2020
5	BPB Kesbangpol	77.360.300,00	Meja, kursi, kamera digital, handy talky, PC unit, LCD	Sekda No. 6 dan No. 13 Tahun 2020
6	Satuan Pol PP	28.375.000,00	Senjata	Sekda No. 8 Tahun 2020
7	Dinas Sosial	22.018.240,00	Personal komputer	Sekda No. 13 Tahun 2020
8	Dinas PPKBPPPA	48.058.000,00	Kendaraan roda 2, meubelair, personal komputer	Sekda No. 13 Tahun 2020 dan No. 188.45/002/KUM/2020
9	Dinas Kependudukan dan Catpil	68.765.590,00	Meubelair, alat pendingin, alat rumah tangga lainnya, personal komputer, peralatan personal komputer	Sekda No. 6 dan No. 13 Tahun 2020
10	Dinas Perhubungan	79.075.000,00	Meubelair, AC, alat rumah tangga, personal komputer	Sekda no.13 tahun 2020
11	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	105.219.500,00	Alat rumah tangga, peralatan studio visual, meubelair	Sekda No. 12 Tahun 2020
12	Dinas Tenaga kerja	11.580.000,00	Alat pendingin dan personal komputer	Sekda no.13 tahun 2020
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	35.539.400,00	Meubelair, alat pendingin, peralatan personal komputer	Sekda No. 8 Tahun 2020
14	Dinas Penanaman Modal PTSP	60.400.000,00	Alat pendingin, telepon, personal komputer	Sekda No. 8 dan No. 14 Tahun 2020
15	Dinas Ketahanan Pangan	185.830.000,00	Alat ukur, alat peternakan, mesin ketik, alat kantor lainnya, meubelair, kursi rapat, peralatan studio, komputer jaringan, personal	Sekda No. 8 Tahun 2020



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

No.	SKPD	Jumlah (Rp)	Keterangan	Nomor SK
			komputer, peralatan personal komputer	
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	13.440.000,00	Alat pendingin, alat rumah tangga lainnya, personal komputer	Sekda No. 8 dan No. 13 Tahun 2020
17	Dinas Pertanian	204.184.800,00	Hand traktor	Sekda No. 4 Tahun 2020
18	Dinas Perdagangan	191.350.000,00	Tenda	Sekda No. 13 Tahun 2020
19	Bagian Hukum	36.380.900,00	Personal komputer	Sekda No. 8 dan 13 Tahun 2020
20	Kelurahan Kandungan Utara	5.588.000,00	Personal komputer	Sekda No. 13 Tahun 2020
21	Kecamatan Simpur	2.237.500,00	Meubelair dan kipas angin	Sekda No. 8 Tahun 2020
22	Kecamatan Angkinang	14.614.000,00	Alat kantor lainnya, meubelair, meja kursi rapat, telepon	Sekda No. 8 Tahun 2020
23	Kecamatan Telaga Langsat	15.314.000,00	Mesin ketik, alat rumah tangga, peralatan studio, peralatan personal komputer	Sekda No. 8 Tahun 2020
		26.680.000,00	Personal komputer	Sekda No. 13 Tahun 2020
24	Bappelitbangda	7.419.000,00	Personal komputer, peralatan personal komputer	Sekda No. 13 Tahun 2021
25	BKD dan Diklat	107.233.190,00	Personal komputer, alat pendingin	Sekda No. 13 Tahun 2020
26	Badan Keuangan Daerah	61.305.500,00	Alat kantor, meubelair, alat rumah tangga, studio visual, telepon, peralatan mini komputer, peralatan personal komputer	Sekda No. 8 Tahun 2020
<b>Total</b>		<b>3.376.656.075,00</b>		

- Adanya penghapusan karena dihibahkan sebesar Rp26.800.000,00 yaitu aset peralatan dan mesin yang dihibahkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Dinas Pengendalian Penduduk, KBPPPA berupa lemari alokon ke RS Ceria sebesar Rp13.400.000,00 sesuai Berita Acara Nomor 027/146-BA/Set; dan ke Poliklinik Perkebunan sebesar Rp13.400.000,00 sesuai Berita Acara Nomor 027/536-BA/Set.
- Reklasifikasi ke beban barang dan jasa sebesar Rp43.618.761,00 karena belanja modal tidak menambah nilai aset tetap atau tidak tergolong sebagai aset tetap dengan rincian SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.3.85 Rincian Reklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa per SKPD**

No	SKPD	Ke	Nama Barang	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	Beban Barang dan Jasa	Alat peraga	22.574.230,00	24.686.861,00
			Penyusunan kurikulum	1.009.231,00	
			Faceshield	500.000,00	
			Jasa Listrik	603.400,00	
2	Dinas Pengendalian Penduduk	Beban Barang dan Jasa	Alat permainan edukatif	9.500.000,00	13.000.000,00
			Tirai	3.500.000,00	
3	Bagian Umum	Beban Barang	Konektor	220.000,00	5.931.900,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD	Ke	Nama Barang	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
		dan Jasa	Kabel	3.951.900,00	
			Pemasangan	1.760.000,00	
<b>Total</b>					<b>43.618.761,00</b>

Pada Dinas Pendidikan, reklasifikasi aset tetap ke barang dan jasa (non modal) terdapat pada beberap sekolah sebagai berikut:

**Tabel 5.3.86 Daftar Reklasifikasi ke Non Modal per Sekolah**

No	Sekolah	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	SMPN 1 Angkinang	1.009.231,00	Penyusunan kurikulum
2	SMPN 1 Simpur	500.000,00	Faceshield
3	SDN Kaliring	603.400,00	Jasa Listrik
<b>Total</b>		<b>2.112.631,00</b>	

5. Reklasifikasi ke KIB Lain guna menyesuaikan aset sesuai dengan KIB yang seharusnya sebesar Rp1.002.037.774,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.87 Rincian Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin**

No	SKPD	Ke KIB	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	KIB A (Tanah)	1.600.000,00	Pasir/Sirtu
		KIB B (Peralatan dan Mesin)	133.700.000,00	Bangunan menara, gerbang sekolah SDN Amawang Kiri Muka, pagar SMP 3 Daha Selatan
		KIB D (JIJ)	27.587.500,00	Instalasi pemasangan listrik dan air bersih
		KIB E (Aset Tetap Lainnya)	44.028.400,00	Buku pelajaran dan audio visual
2	Dinas Kesehatan	KIB C (gedung dan Bangunan)	173.714.000,00	Rehab rumah dinas wakil direktur
3	RSUD Hasan Basry	KIB C (gedung dan Bangunan)	493.349.924,00	Bangunan kesehatan
		KIB F (KDP)	97.993.950,00	Pembangunan RTH dan honor
4	Dinas Sosial	KIB E (Aset Tetap Lainnya)	2.500.000,00	tanaman hias
5	Dinas PPKB PPPA	KIB C (gedung dan Bangunan)	7.000.000,00	tandon air
6	Disporapar	KIB E (Aset Tetap Lainnya)	13.464.000,00	Ornamen kayu ukir
7	Badan Keuangan Daerah	KIB C (gedung dan Bangunan)	7.100.000,00	Bangunan menara
<b>TOTAL</b>			<b>1.002.037.774,00</b>	

6. Mutasi keluar ke SKPD lain dengan nilai total sama dengan mutasi masuk dari SKPD lain sebesar Rp4.765.732.813,00 dengan rincian per SKPD sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

**Tabel 5.3.88 Rincian Mutasi Keluar Aset Peralatan dan Mesin antar SKPD**

No	SKPD Asal	SKPD Tujuan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	Bagian Umum	174.325.604,00	Kendaraan roda 4
2	Dinas Kesehatan	Sekretariat DPRD	2.400.000,00	Thermo gun
3		Bakeuda	13.000.000,00	Mobil jenazah
4		Dinas Penanaman Modal PTSP	2.400.000,00	Thermo gun
5		Bagian Umum	35.599.999,00	Thermo gun dan Thermal Scanner TV
6	RSUD H. Hasan Basry	Dinas Kesehatan	325.136.000,00	Kendaraan roda 4, alat rumah tangga
7	Dinas PPKB, PPPA	Bakeuda	171.806.000,00	Kendaraan roda 2
8		Dinas Kesehatan	107.200.000,00	Lemari alokon
9		RSUD	14.275.000,00	Lemari alokon
10	Bagian Umum	Dinas Pendidikan	259.705.000,00	Kendaraan roda 4
11		Dinas Kependudukan dan Catpil	170.057.794,00	Kendaraan roda 4
12		Bakeuda	510.951.208,00	Kendaraan roda 4
13	Bagian Perkeonomian	Dinas Kesehatan	1.200.000,00	Wastafel
14		RSUD Hasan Basry	4.800.000,00	Wastafel
15		Dinas Perumahan Rakyat KPLH	6.000.000,00	Wastafel
16		Dinas Perhubungan	2.400.000,00	Wastafel
17		Dinas Kependudukan dan Catpil	2.935.000,00	Wastafel
18		Dinas Penanaman Modal PTSP	1.200.000,00	Wastafel
19		Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	6.000.000,00	Wastafel
20		Dinas Perdagangan	13.000.000,00	Wastafel
21		Bagian Umum	19.070.000,00	Wastafel
22		Sekretariat DPRD	1.200.000,00	Wastafel
23		Bappelitbangda	1.200.000,00	Wastafel
24		Inspektorat Kabupaten	1.200.000,00	Wastafel
25		Bakeuda	2.400.000,00	Wastafel
26	Sekretariat DPRD	Bagian Umum	417.952.500,00	Kendaraan roda 4
27		Bakeuda	549.952.500,00	Kendaraan roda 4
28	Bakeuda	Dinas Kependudukan dan Catpil	18.200.000,00	Kendaraan roda 2
29		Sekretariat DPRD	1.139.675.604,00	Kendaraan roda 4 dan roda 2
30		Dinas Sosial	32.000.000,00	Kendaraan roda 2
31		Dinas Perpustakaan	99.485.000,00	Kendaraan roda 2
32		Dinas Pertanian	18.200.000,00	Kendaraan roda 2
33		Kelurahan Kandangan Barat	18.200.000,00	Kendaraan roda 2
34		Kelurahan Kandangan Utara	18.200.000,00	Kendaraan roda 2



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD Asal	SKPD Tujuan	Jumlah (Rp)	Keterangan
35		Keluarahan Jambu Hilir	18.200.000,00	Kendaraan roda 2
36		Bappelitbangda	18.200.000,00	Kendaraan roda 2
37		Dinas Pendidikan	255.475.604,00	Kendaraan roda 4
38		Dinas Kesehatan	312.530.000,00	Kendaraan roda 4 dan roda 2
<b>Total</b>			<b>4.765.732.813,00</b>	

### 5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh Gedung dan Bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah Perkantoran, Rumah Dinas, Bangunan Tempat Ibadah, Bangunan Menara, Taman, Monumen/Bangunan Bersejarah, Gudang, Gedung dan Museum.

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp1.095.014.166.622,16 dan Rp1.024.231.227.264,24. Terjadi Penambahan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp70.782.939.357,92 atau 6,91% dari total Gedung dan Bangunan Tahun 2019. Adapun Daftar Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.3.89 Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan per SKPD**

NO	SKPD	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	258.851.226.587,59	245.087.208.315,59
2	Dinas Kesehatan	97.871.968.825,00	94.098.442.742,00
3	RSUD Hasan Basry Kandangan	188.521.134.333,00	181.737.610.674,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	42.524.240.182,00	24.465.679.015,00
5	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH	48.416.060.766,00	45.394.415.316,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Kesbangpol	942.188.700,00	942.188.700,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	1.628.301.080,00	1.608.399.000,00
8	Dinas Sosial	9.602.399.910,00	9.257.688.110,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	1.722.540.000,00	1.656.607.500,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	529.052.000,00	529.052.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa	385.000.000,00	385.000.000,00
12	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	5.268.092.124,00	5.030.906.124,00
13	Dinas Perhubungan	7.769.909.302,00	9.721.099.802,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.560.079.868,00	1.532.952.937,00
15	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKP	6.065.328.040,00	4.457.467.040,00
16	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1.258.016.800,00	814.625.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

NO	SKPD	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
17	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	106.380.629.773,31	67.701.769.927,31
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.869.037.000,00	1.187.358.000,00
19	Dinas Perikanan	5.845.038.800,00	4.563.761.800,00
20	Dinas Pertanian	26.785.397.339,00	26.790.766.339,00
21	Dinas Perdagangan	156.563.884.858,00	143.223.256.605,00
22	Sekretariat Daerah	2.381.841.000,00	6.683.601.000,00
23	Bagian Tata Pemerintahan	547.563.494,00	462.754.500,00
24	Bagian Protokol dan Kehumasan	37.600.000,00	37.600.000,00
25	Bagian Umum	33.182.829.034,34	65.454.331.285,34
26	Sekretariat DPRD	2.836.809.917,00	2.665.874.017,00
27	Kecamatan Kandangan	7.248.952.953,00	7.168.454.423,00
28	Kelurahan Kandangan Kota	981.641.984,00	810.436.000,00
29	Kelurahan Kandangan Utara	948.297.439,00	748.476.739,00
30	Kelurahan Kandangan Barat	527.066.700,00	418.132.500,00
31	Kelurahan Jambu Hilir	279.913.000,00	0,00
32	Kecamatan Padang Batung	4.558.841.702,00	4.191.881.334,00
33	Kecamatan Loksado	2.187.371.804,00	2.187.371.804,00
34	Kecamatan Sungai Raya	1.873.422.736,92	1.823.569.549,00
35	Kecamatan Simpur	4.602.696.487,00	3.882.168.807,00
36	Kecamatan Kalumpang	3.738.778.974,00	3.738.778.974,00
37	Kecamatan Angkinang	3.693.066.252,00	3.597.014.766,00
38	Kecamatan Telaga Langsat	2.418.016.154,00	2.418.016.154,00
39	Kecamatan Daha Utara	4.856.721.843,00	4.442.255.287,00
40	Kecamatan Daha Selatan	23.387.041.378,00	22.639.576.378,00
41	Kecamatan Daha Barat	3.284.160.297,00	2.599.771.615,00
42	Inspektorat Kabupaten	1.736.814.864,00	1.736.814.864,00
43	Badan Keuangan Daerah	14.884.916.811,00	14.877.816.811,00
44	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	1.460.275.510,00	1.460.275.510,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.095.014.166.622,16</b>	<b>1.024.231.227.264,24</b>

Adapun mutasi aset Gedung Bangunan selama Tahun 2020 sebagai berikut:

**Tabel 5.3.90 Mutasi Gedung Bangunan Tahun 2020**

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal Per 1 Januari 2020	1.024.231.227.264,24
Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2020	124.530.684.023,92
Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2020	(53.747.744.666,00)
<b>Saldo Akhir Per 31 Desember 2020</b>	<b>1.095.014.166.622,16</b>



#### A. Penambahan Aset Gedung dan Bangunan

Penambahan Aset Gedung dan Bangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun 2020 sebesar Rp124.530.684.023,92 disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada LRA Tahun 2020 sebesar Rp57.811.004.588,92 dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.3.91 Daftar Pengadaan Gedung dan Bangunan Tahun 2020**

No	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	13.576.893.922,00
2	Dinas Kesehatan	4.361.975.649,00
3	RSUD Hasan Basry Kandangan	6.155.836.335,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	18.098.680.017,00
5	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH	2.017.829.475,00
6	Dinas Sosial	203.364.500,00
7	Dinas Ketahanan Pangan	108.432.500,00
8	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	257.336.000,00
9	Dinas Perhubungan	168.007.900,00
10	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKP	1.498.507.000,00
11	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	469.638.400,00
12	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	1.189.291.960,00
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.626.235.000,00
14	Dinas Perdagangan	3.274.650.753,00
15	Bagian Pemerintahan	75.921.500,00
16	Bagian Umum	395.242.700,00
17	Sekretariat DPRD	170.935.900,00
18	Kecamatan Kandangan	207.853.780,00
19	Kelurahan Kandangan Kota	171.205.984,00
20	Kelurahan Kandangan Utara	79.432.700,00
21	Kelurahan Kandangan Barat	108.934.200,00
22	Kelurahan Jambu Hilir	270.101.000,00
23	Kecamatan Padang Batung	389.233.368,00
24	Kecamatan Sungai Raya	49.853.187,92
25	Kecamatan Simpur	248.910.734,00
26	Kecamatan Angkinang	99.551.486,00
27	Kecamatan Daha Utara	366.269.556,00
28	Kecamatan Daha Barat	147.213.682,00
29	Badan Keuangan Daerah	23.665.400,00
<b>Total</b>		<b>57.811.004.588,92</b>

Rincian daftar pengadaan aset tetap Gedung dan Bangunan selama tahun 2020 per jenis barang pada *Lampiran 6*.



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

2. Hibah sebesar Rp11.002.264.000,00 merupakan penambahan aset tetap gedung dan bangunan yang berasal dari hibah Pemerintah yang terdapat pada 2 SKPD yaitu:
  - RSUD BLUD H. Hasan Basry sebesar Rp1.052.926.000,00 berupa bangunan wisma hibah dari Pengadilan Agama Kandangan dengan BAST Nomor W15-A4/395/PL.01/3/2019.
  - Dinas Perdagangan sebesar Rp9.949.338.000,00 berupa bangunan pasar terpadu hibah dari Kementerian Perdagangan dengan BAST Nomor 209/M-DAG/BAST/11/2020.
3. Reklasifikasi antar KIB yang terjadi guna menyesuaikan aset sesuai dengan KIB yang seharusnya dan adanya paket pekerjaan gedung bangunan yang telah selesai dikerjakan pada Tahun 2020 sebesar Rp7.137.986.318,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.92 Rincian Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan**

No.	SKPD	Dari KIB	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	KIB B (Peralatan dan Mesin)	133.700.000,00	Bangunan menara, gerbang sekolah SDN Amawang Kiri Muka, pagar SMP 3 Daha Selatan
		KIB D (JIJ)	950.000,00	Bangunan Ruang terbuka hijau
		KIB F (KDP)	205.280.350,00	Lihat pada table 5.3.86
2	Dinas Kesehatan	KIB B (Peralatan dan Mesin)	173.714.000,00	Rehab rumah dinas wakil direktur
		KIB F (KDP)	73.855.000,00	Jasa konsultan perencanaan pembangunan IGD Puskesmas Simur
3	RSUD Hasan Basry	KIB B (Peralatan dan Mesin)	493.349.924,00	Bangunan kesehatan
4	Dinas PUTR	KIB F (KDP)	302.205.000,00	Lihat pada tabel 5.3.86
5	Dinas Perumahan Rakyat KPLH	KIB D (JIJ)	4.177.799.000,00	Bangunan taman permanen
		KIB F (KDP)	426.641.500,00	Perencanaan Bangunan RTH
6	Dinas Sosial	KIB F (KDP)	6.800.000,00	Perencanaan rumah singgah
7	Dinas Pengendalian Penduduk KBPPPA	KIB B (Peralatan dan Mesin)	7.000.000,00	Bangunan Tandon
8	Dinas Penanaman Modal PTSP	KIB F (KDP)	48.750.900,00	Perencanaan bangunan gedung kantor
9	Dinas Perpustakaan	KIB F (KDP)	59.444.000,00	Perencanaan pembangunan gedung perpustakaan Daha Selatan
10	Dinas Perdagangan	KIB D (JIJ)	938.850.000,00	Taman terbuka hijau
11	Bagian Umum	KIB F (KDP)	19.679.400,00	Perencanaan rehab ruang Bagian Protokol
12	Bagian Pemerintahan	KIB E (Aset tetap lainnya)	8.887.494,00	Tugu titik kontrol/pasti
13	Kecamatan Kandangan	KIB F (KDP)	5.062.750,00	Pembangunan taman kantor
14	Kelurahan Kandangan Utara	KIB F (KDP)	2.970.000,00	Perencanaan rehab gedung kantor



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

No.	SKPD	Dari KIB	Jumlah (Rp)	Keterangan
15	Kelurahan Jambu Hilir	KIB F (KDP)	9.812.000,00	Pembuatan pintu gerbang kantor, pagar kantor, tempat parkir dan paving blok
16	Kecamatan Padang Batung	KIB F (KDP)	9.845.000,00	Perencanaann pembuatan pagar, pintu gerbang kantor
17	Kecamatan Simpur	KIB F (KDP)	9.680.000,00	Perencanaan pagar rumah dinas camat
18	Kecamatan Daha Utara	KIB F (KDP)	9.900.000,00	Perencanaan rehab aula kecamatan
19	Kecamatan Daha Barat	KIB F (KDP)	6.710.000,00	Perencanaan rehab rumah dinas camat
20	Badan Keuangan Daerah	KIB B (Peralatan dan Mesin)	7.100.000,00	Bangunan menara
<b>Total</b>			<b>7.137.986.318,00</b>	

Reklasifikasi dari aset tetap KDP yang menjadi aset tetap Gedung Bangunan berupa pekerjaan konsultan perencanaan yang telah selesai pengerjaannya baik yang membentuk bangunan baru atau mengkapitalisasi aset yang sudah ada dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.93 Daftar Penambahan Aset Tetap Gedung Bangunan dari KDP**

No.	SKPD	Kegiatan Perencanaan	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	Rehab TK Tahun 2020	3.347.300,00	205.280.350,00
		Pembangunan ruang ibadah SD Tahun 2020	46.590.500,00	
		Pembangunan pagar SD Tahun 2020	7.348.000,00	
		Rehab kelas SD Tahun 2020	46.568.500,00	
		Pembangunan halaman SD Tahun 2020	55.638.000,00	
		Rehabilitasi ruang kelas SMP 1 Daha Barat	18.892.500,00	
		Pembangunan dan rehab wc SD Tahun 2020	20.542.500,00	
		Penambahan ruang kelas baru TK Tahun 2020	6.353.050,00	
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Perencanaan pembangunan lapangan dance sport	49.486.000,00	302.205.000,00
		Honorarium PPK, PPBJ dan PPHP	1.200.000,00	
		<b>Jumlah</b>	<b>50.686.000,00</b>	
		Perencanaan pembangunan kantor MUI	98.848.000,00	
		Honorarium PPK dan PPHP	900.000,00	
		<b>Jumlah</b>	<b>99.748.000,00</b>	
		Jasa konsultan perencanaan rehabilitasi GOS Aluh Idut	70.208.000,00	
		Honorarium PPK, PPBJ dan PPHP	1.200.000,00	
		<b>Jumlah</b>	<b>71.408.000,00</b>	
		Jasa konsultan perencanaan pembangunan lapangan volley 2 Desember	69.901.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

No.	SKPD	Kegiatan Perencanaan	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
		Honorarium PPK, PPBJ dan PPHP	1.200.000,00	
		Jumlah	<b>71.101.000,00</b>	
		Perencanaan pemeliharaan taman Dinas PUTR serta pemeliharaan RTH Palidangan Sehati	<b>9.262.000,00</b>	

4. Reklasifikasi dari barang dan jasa sebesar Rp1.862.566.381,00 pada beberapa SKPD dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.94 Daftar Reklasifikasi dari Barang dan Jasa**

No	SKPD	Dari KIB	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Sosial	Beban Barang dan Jasa	202.528.300,00	Rehab rumah singgah
2	Satuan Polisi Pamong Praja	Beban Barang dan Jasa	19.902.080,00	Bangunan Parkir
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	Beban Barang dan Jasa	27.126.931,00	Rehab atap kantor
4	Dinas Tenaga Kerja KUKP	Beban Barang dan Jasa	49.600.000,00	Perencanaan Pembangunan UPT Logam
5	Dinas Poropar	Beban Barang dan Jasa	196.111.800,00	Rehab kolam renang
6	Dinas Perikanan	Beban Barang dan Jasa	1.281.277.000,00	Rehab kolam (bak larva)
7	Kecamatan Simpur	Beban Barang dan Jasa	69.020.270,00	Tambahan daya listrik
8	Kecamatan Daha Utara	Beban Barang dan Jasa	17.000.000,00	Bahan material pemeliharaan rumah dinas Camat
<b>Total</b>			<b>1.862.566.381,00</b>	

5. Reklasifikasi dari Belanja Tak Terduga berupa belanja aset tetap gedung bangunan yang berasal dari dana BTT Covid-19 sebesar Rp480.520.000,00 pada beberapa SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.3.95 Daftar Aset Tetap Gedung Bangunan dari Dana BTT Covid**

No.	SKPD	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Kesehatan	357.820.000,00	Rehab bangsal ex RSHB
2	RSUD H. Hasan Basry	122.700.000,00	Renovasi ruang lab pathologi klinik dan ruang lab patologi anatomi
<b>Total</b>		<b>480.520.000,00</b>	

6. Mutasi Masuk dari SKPD Lain sebesar Rp46.236.342.736,00 dengan rincian SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.3.96 Daftar Mutasi Masuk Antar SKPD**

No.	SKPD Tujuan	SKPD Asal	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	Dinas Perdagangan	600.854.000,00	Bangunan gedung kantor
		Bagian Umum	99.320.000,00	Rehab gedung kesenian



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

No.	SKPD Tujuan	SKPD Asal	Jumlah (Rp)	Keterangan
2	RSUD Hasan Basry	Dinas Kesehatan	317.820.000,00	Ruang isolasi covid 19 (kalibaru), rehab eks bangsal jiwa
3	Dinas PUTR	Dinas Perumahan Rakyat KPLH	164.292.650,00	IPLT Malutu
4	Dinas Tenaga Kerja KUKP	Dinas Perdagangan	59.754.000,00	Bangunan gedung kantor
5	Dinas Porapar	Bagian Umum	37.328.733.086,00	Bangunan GOS Aluh Idu, Stadion ganda, lapangan basket, lapangan tenis
6	Dinas Perpustakaan	Kecamatan Daha Selatan	123.970.000,00	Bangunan gedung serbaguna
7	Dinas Pertanian	Dinas Sosial	66.981.000,00	Bangunan gedung kantor
8	Bagian Umum	Dinas Perumahan Rakyat KPLH	247.078.000,00	Gedung open stage
			278.771.000,00	Taman pendopo Bupati
			198.270.000,00	Taman pendopo Wakil Bupati
			228.070.000,00	Taman lapangan Setda
		Sekretariat Daerah	4.301.760.000,00	Asrama
9	Kelurahan Kandangan Utara	Kecamatan Kandangan	117.418.000,00	Gedung kantor
10	Kecamatan Simpur	Dinas Perumahan Rakyat KPLH	531.234.000,00	Bangunan RTH
11	Kecamatan Daha Utara	Bagian Umum	147.677.000,00	Bangunan gedung olah raga
12	Kecamatan Daha Selatan	Dinas Perumahan Rakyat KPLH	893.875.000,00	Bangunan RTH
13	Kecamatan Daha Barat	Dinas Perumahan Rakyat KPLH	530.465.000,00	Bangunan RTH
<b>Total</b>			<b>46.236.342.736,00</b>	

### B. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun 2020 sebesar Rp53.747.744.666,00 disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Reklasifikasi ke KIB lain guna menyesuaikan aset dengan KIB yang seharusnya dan adanya pekerjaan aset gedung bangunan yang masih berupa perencanaan kegiatan sebesar Rp4.355.273.299,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.97 Rincian Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan**

No.	SKPD	Ke KIB	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	KIB B (Peralatan dan Mesin)	20.000.000,00	Pompa dan tong air
			22.750.000,00	Teralis
			57.500.000,00	Rambu papan tambahan
		KIB F (KDP)	154.505.000,00	Lihat pada table 5.3.91
2	Dinas Kesehatan	KIB C (Gedung dan Bangunan)	189.400.000,00	Pengurangan halaman Puskesmas Sungai Pinang
3	RSUD H. Hasan Basry	KIB B (Peralatan dan Mesin)	211.050.600,00	Peralatan kesehatan di ruangan instalasi gizi
		KIB F (KDP)	71.190.000,00	Perencanaan rehab gedung poliklinik/eks IGD



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

No.	SKPD	Ke KIB	Jumlah (Rp)	Keterangan
4	Dinas PUTR	KIB F (KDP)	268.845.000,00	Lihat pada table 5.3.91
5	Dinas Perumahan Rakyat KPLH	KIB B (Peralatan dan Mesin)	17.325.000,00	Rambu-rambu
		KIB F (KDP)	511.243.875,00	Lihat pada table 5.3.91
6	Dinas Sosial	KIB B (Peralatan dan Mesin)	1.000.000,00	Teralis
7	Dinas Perhubungan	KIB B (Peralatan dan Mesin)	1.986.775.500,00	Rambu-rambu
		KIB D (JIJ)	132.422.900,00	Bangunan pengaman sungai (dermaga ferry)
8	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	KIB B (Peralatan dan Mesin)	74.997.500,00	Mebeulair
9	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	KIB F (KDP)	25.840.000,00	Rehab cottage wisma air panas Tanuhi
			7.887.000,00	Rehab ringan ruang musholla dan ruang sanitasi kantor
		KIB B (Peralatan dan Mesin)	1.550.000,00	Rambu papan tambahan
10	Dinas Pengendalian Penduduk KBPPPA	KIB B (Peralatan dan Mesin)	27.150.000,00	Lihat pada tabel
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	KIB B (Peralatan dan Mesin)	4.000.000,00	Teralis
12	Dinas Pertanian	KIB B (Peralatan dan Mesin)	72.350.000,00	Teralis
13	Dinas Perdagangan	KIB B (Peralatan dan Mesin)	136.687.500,00	Pembuatan sumur bor, lampu sorot, rambu-rambu pasar terpadu
		KIB F (KDP)	24.915.000,00	Perencanaan pengecatan blok Pasar Negara
14	Bagian Umum	KIB F (KDP)	100.847.700,00	Pereencanaan rehab gedung kantor, tugu, tempat parkir, pagar lapangan, dan bangunan lainnya
15	Kecamatan Kandangan	KIB B (Peralatan dan Mesin)	15.000.000,00	Pintu aula kantor kecamatan
16	Kecamatan Padang Batung	KIB B (Peralatan dan Mesin)	32.118.000,00	Meja pelayanan
17	Kecamatan Simpur	KIB D (JIJ)	138.317.324,00	Tambahan daya listrik
18	Kecamatan Angkinang	KIB B (Peralatan dan Mesin)	3.500.000,00	Teralis
19	Kecamatan Daha Selatan	KIB B (Peralatan dan Mesin)	22.440.000,00	Teralis
20	Badan Keuangan Daerah	KIB F (KDP)	23.665.400,00	Perencanaan rehab rumah dinas
<b>Total</b>			<b>4.355.273.299,00</b>	

Berikut disajikan rincian reklasifikasi dari aset tetap Gedung dan Bangunan yang menjadi aset tetap KDP dikarenakan pekerjaan yang masih berupa kegiatan perencanaan maupun yang belum selesai pada beberapa SKPD sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

**Tabel 5.3.98 Daftar Reklasifikasi Gedung dan Bangunan yang Menjadi KDP**

No.	SKPD	Kegiatan Perencanaan	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	Rehab sedang/berat SMPN 2 Loksado	6.800.000,00	<b>154.505.000,00</b>
		Rehab sedang/berat ruang kelas 2021	35.650.000,00	
		Pembangunan sarpras dan utilitas 2021	97.250.000,00	
		Rehab sarpras dan utilitas 2021	14.805.000,00	
2	Dinas Pekerjaan Umum	Pembangunan gedung futsal Kec. Loksado Thn 2021	49.885.000,00	<b>268.845.000,00</b>
		Honorarium PPK, PPBJ dan PPHP	1.200.000,00	
		Jumlah	<b>51.085.000,00</b>	
		Jasa konsultansi perencanaan pembuatan pelayanan publik Dinas PUTR	19.600.000,00	
		Honorarium PPK, PPBJ dan PPHP	1.200.000,00	
		Jumlah	<b>20.800.000,00</b>	
		Perencanaan pembuatan mall pelayanan publik Kab. HSS	99.110.000,00	
		Honorarium PPK, PPBJ dan PPHP	1.450.000,00	
		Jumlah	<b>100.560.000,00</b>	
		Perencanaan rehabilitasi asrama putra Kab HSS Amuk Hantarukung Yogyakarta	94.950.000,00	
		Honorarium PPK, PPBJ dan PPHP	1.450.000,00	
		Jumlah	<b>96.400.000,00</b>	
3	Dinas Perumahan Rakyat KPLH	Angsuran 30% pembangunan RTH Padang Batung	148.830.000,00	<b>511.243.875,00</b>
		Angsuran 30% pembangunan RTH Kalumpang	148.860.000,00	
		Angsuran 30% pengembangan teknologi persampahan, pengurangan halaman samping dan pembuatan pagar	11.600.545,00	
		Pengembangan teknologi persampahan, pengurangan halaman samping dan pembuatan pagar TPST 3R Baluti	53.865.000,00	
		Perencanaan pembangunan tugu Desa Longawang	9.779.000,00	
		Perencanaan pembangunann RTH Kalumpang	24.359.500,00	
		Perencanaan rehabilitasi gerbang batas Kabupaten	24.502.500,00	
		Perencanaan pembangunan RTH Padang Batung	24.343.000,00	
		Perencanaan hutan kota menjadi hutan edukasi	14.883.000,00	
		Perencanaan tempat parkir	6.759.830,00	
		Perencanaan pengurangan halaman samping dan pembuatan pagar TPST 3R Baluti	10.780.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

No.	SKPD	Kegiatan Perencanaan	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
		Honorarium PPK, PPHP dan PPBJ kampung iklim	1.100.000,00	
		Perencanaan rehabilitasi bank sampah induk	5.825.000,00	
		Perencanaan pembangunan mess penjaga TPA Malutu	24.656.500,00	
		Honorarium PPK, PPHP dan PPBJ pengelolaan persampahan	1.100.000,00	

2. Mutasi Keluar antar SKPD karena adanya aset gedung bangunan yang berpindah dari satu SKPD ke SKPD lain/terjadi perubahan pengguna sebesar Rp46.236.342.736,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel. 5.3.99 Daftar Mutasi Keluar Antar SKPD**

No.	SKPD Asal	SKPD Tujuan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Kesehatan	RSUD Hasan Basry	317.820.000,00	Ruang isolasi covid 19 (kalibaru), rehab eks bangsal jiwa
2	Dinas Perumahan Rakyat KPLH	Dinas Pekerjaan Umum TR	164.292.650,00	IPLT Malutu
		Bagian Umum	247.078.000,00	Gedung open stage
			278.771.000,00	Taman pendopo Bupati
			198.270.000,00	Taman pendopo Wakil Bupati
			228.070.000,00	Taman lapangan Setda
		Kecamatan Simpur	531.234.000,00	Bangunan RTH
		Kecamatan Daha Selatan	893.875.000,00	Bangunan RTH
		Kecamatan Daha Barat	530.465.000,00	Bangunan RTH
3	Dinas Sosial	Dinas Pertanian	66.981.000,00	Bangunan gedung kantor
4	Dinas Perdagangan	Dinas Tenaga Kerja KUKP	59.754.000,00	Bangunan gedung kantor
		Dinas Pendidikan	600.854.000,00	Bangunan gedung kantor
5	Sekretariat Daerah	Bagian Umum	4.301.760.000,00	Asrama
6	Bagian Umum	Kecamatan Daha Utara	147.677.000,00	Bangunan gedung olahraga
		Dinas Pendidikan	99.320.000,00	Rehab gedung kesenian
		Dinas Porapar	37.328.733.086,00	Bangunan GOS Aluh Idut, Stadion ganda, lapangan basket, lapangan tenis
7	Kecamatan Kandangan	Kelurahan Kandangan Utara	117.418.000,00	Gedung kantor
8	Kecamatan Daha Selatan	Dinas Perpustakaan	123.970.000,00	Bangunan gedung serbaguna
<b>Total</b>			<b>46.236.342.736,00</b>	

3. Penghapusan sebesar Rp2.918.357.131,00 terdiri atas penghapusan aset tetap gedung dan bangunan berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada beberapa SKPD sebagai berikut:



**Tabel 5.3.100 Daftar Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan**

No.	SKPD	Jumlah (Rp)	Keterangan	Surat Keputusan
1	Dinas Pendidikan	598.225.000,00	Bangunan sekolah SDN Habirau Tengah 2 dan rumah dinas guru	SK Sekda No. 9 Tahun 2020
2	Dinas Kesehatan	686.618.566,00	Bangunan Kesehatan, gedung kantor, rumah dinas, gedung aula	SK Sekda No. 3, 12, dan 14 Tahun 2020
3	RSUD H. Hasan Basry	1.076.868.000,00	Bangunan RSU	SK Sekda No. 9 Tahun 2020
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	123.970.000,00	gedung serbagunan daha selatan	SK Sekda No. 9 Tahun 2020
5	Dinas Ketahanan Pangan	42.500.000,00	bangunan gudang lumbung pangan dan lantai jemur	SK Sekda No. 12 thn 2020
6	Bagian Umum	263.795.565,00	Asrama santri Buchari 2	SK Sekda No. 14 tahun 2020
7	Kecamatan Daha Utara	29.795.000,00	bangunan pagar kantor	SK Sekda No. 9 thn 2020
		96.585.000,00	bangunan gedung	SK Sekda No. 9 Tahun 2020
<b>Total</b>		<b>2.918.357.131,00</b>		

4. Penghapusan karena hibah sebesar Rp237.771.500,00 berupa hibah sumur bor ke Rumah Tahanan Kandangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 14 Tahun 2020.

#### 5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang bangunan oleh Pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah dalam kondisi siap pakai. Jalan, Irigasi dan Jaringan selain digunakan dalam kegiatan Pemerintah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam klasifikasi Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik dan jaringan telepon.

Saldo aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp1.756.049.479.588,45 dan Rp1.675.134.767.024,10. Terjadi penambahan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Tahun 2020 sebesar Rp80.914.712.564,35 atau 4,83% dari total aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2019 dengan rincian aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.3.101 Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD**

NO.	SKPD	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	744.038.941,50	717.401.441,50
2	Dinas Kesehatan	4.393.014.179,00	4.132.464.244,00
3	RSUD Hasan Basry Kandangan	29.220.845.765,00	29.031.345.765,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.584.657.733.789,60	1.509.336.006.746,60



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

NO.	SKPD	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
5	Dinas Perumahan Rakyat KPLH	102.263.283.004,00	101.921.967.833,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Kesbangpol	6.530.313.876,35	28.136.900,00
7	Dinas Sosial	100.772.880,00	100.772.880,00
8	Dinas Ketahanan Pangan	3.592.288,00	3.592.288,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	30.621.000,00	30.621.000,00
10	Dinas Pengend.Penduduk KB, PPA	46.842.200,00	29.375.300,00
11	Dinas Perhubungan	4.300.802.590,00	6.034.551.650,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	134.870.000,00	134.870.000,00
13	Dinas Naker Kop dan UKP	119.300.000,00	119.300.000,00
14	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	41.823.633,00	41.823.633,00
15	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	331.270.375,00	275.202.000,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	81.238.450,00	81.238.450,00
17	Dinas Perikanan	3.132.247.000,00	3.132.247.000,00
18	Dinas Pertanian	17.177.943.359,00	17.177.943.359,00
19	Dinas Perdagangan	735.078.000,00	954.482.000,00
20	Bagian Umum	1.054.500.900,00	1.054.500.900,00
21	Sekretariat DPRD	90.940.450,00	90.940.450,00
22	Kecamatan Kandangan	63.894.065,00	63.894.065,00
23	Kelurahan Kandangan Utara	3.013.650,00	3.013.650,00
24	Kelurahan Kandangan Barat	19.796.000,00	19.796.000,00
25	Kelurahan Jambu Hilir	7.350.000,00	7.350.000,00
26	Kecamatan Padang Batung	40.756.400,00	26.650.000,00
27	Kecamatan Loksado	2.400.000,00	2.400.000,00
28	Kecamatan Sungai Raya	18.500.000,00	18.500.000,00
29	Kecamatan Simpur	138.317.324,00	0,00
30	Kecamatan Kalumpang	2.000.000,00	2.000.000,00
31	Kecamatan Telaga Langsat	8.464.143,00	8.464.143,00
32	Kecamatan Daha Selatan	10.990.000,00	10.990.000,00
33	Kecamatan Daha Barat	22.850.600,00	22.850.600,00
34	Inspektorat Kabupaten	136.433.356,00	136.433.356,00
35	Bappelitbangda	64.950.970,00	64.950.970,00
36	Badan Keuangan Daerah	318.690.400,00	318.690.400,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.756.049.479.588,45</b>	<b>1.675.134.767.024,10</b>

Adapun mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2020 sebagai berikut:

**Tabel 5.3.102 Mutasi Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2020**

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal Per 1 januari 2020	1.675.134.767.024,10



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Jumlah (Rp)
Penambahan Aset Tetap JIJ Tahun 2020	92.740.308.104,35
Pengurangan Aset Tetap JIJ Tahun 2020	(11.825.595.540,00)
<b>Saldo Akhir Per 31 Desember 2020</b>	<b>1.756.049.479.588,45</b>

**A. Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Penambahan aset tetap pada Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp92.740.308.104,35 disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Modal pada LRA Tahun 2020 sebesar Rp90.023.175.380,35 dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.3.103 Daftar Pengadaan Jalan Irigasi dan Jaringan Tahun 2020**

No	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Kesehatan	295.649.935,00
2	RSUD Hasan Basry	189.500.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	74.534.944.223,00
4	Dinas Perumahan Rakyat KPLH	8.382.362.571,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Kesbangpol	6.502.176.976,35
6	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP, dan PA	17.466.900,00
7	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	86.968.375,00
8	Kecamatan Padang Batung	14.106.400,00
<b>Total</b>		<b>90.023.175.380,35</b>

Rincian mengenai daftar pengadaan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per jenis barang pada *Lampiran 7*.

2. Reklasifikasi dari non modal (belanja barang dan jasa) sebesar Rp30.000.000,00 berupa rehabilitasi saluran pembuangan D.I Padang Batung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
3. Reklasifikasi dari KIB lain guna menyesuaikan aset sesuai dengan KIB yang seharusnya dan adanya paket pekerjaan jalan, irigasi, dan jaringan yang telah selesai dikerjakan pada Tahun 2020 sebesar Rp1.962.886.724,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.104 Daftar Reklasifikasi ke KIB JIJ**

No.	Nama SKPD	Dari KIB	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	KIB B (Peralatan dan Mesin)	27.587.500,00	Lihat pada table 5.3.98
2	Dinas Pekerjaan Umum TR	KIB F (KDP)	347.962.000,00	Jalan kabupaten
			399.667.000,00	Jembatan
			303.519.000,00	Bangunan pengaman sungai
			150.435.000,00	Bangunan pembuang air kotor
			345.870.000,00	Instalasi air bersih



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Nama SKPD	Dari KIB	Jumlah (Rp)	Keterangan
3	Dinas Perumahan Rakyat KPLH	KIB F (KDP)	117.106.000,00	Jalan khusus
4	Dinas Perhubungan	KIB C (Gedung dan Bangunan)	132.422.900,00	Bangunan pengaman sungai (dermaga ferry)
5	Kecamatan Simpur	KIB C (Gedung dan Bangunan)	138.317.324,00	Tambahan daya listrik
<b>Total</b>			<b>1.962.886.724,00</b>	

Berikut disajikan daftar rincian reklasifikasi dari KIB F (KDP) berupa pekerjaan yang telah selesai tahun 2020 pada beberapa SKPD dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.105 Daftar Reklasifikasi dari KIB F (KDP) ke KIB D (JIJ)**

No	SKPD	Kegiatan Perencanaan	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Peningkatan jalan Ida Manggala	49.261.000,00	347.962.000,00	Jalan Kabupaten
		Honorarium PPK dan PPHP	650.000,00		
		<b>Jumlah</b>	<b>49.911.000,00</b>		
		Peningkatan jalan ruas Pagat Batu Muara Hariang	49.495.000,00		
		Honorarium PPK dan PPHP	650.000,00		
		<b>Jumlah</b>	<b>50.145.000,00</b>		
		Jasa konsultan rehabilitasi jalan tahun 2020	49.356.000,00		
		Honor PPK dan PPBJ	900.000,00		
		<b>Jumlah</b>	<b>50.256.000,00</b>		
		Jasa konsultan peningkatan jalan tahun 2020	49.256.000,00		
		Honor PPK dan PPBJ	900.000,00		
		<b>Jumlah</b>	<b>50.156.000,00</b>		
		Jalan akses stadion 2 Desember	49.582.000,00		
		Honor PPK dan PPBJ	900.000,00		
		<b>Jumlah</b>	<b>50.482.000,00</b>		
		Jasa konsultan peningkatan jalan (DAK 2020)	96.112.000,00		
		Honor PPK dan PPBJ	900.000,00		
		<b>Jumlah</b>	<b>97.012.000,00</b>		
		Perkuatan tebing Ds. Muara Banta RT.08	24.508.000,00	303.519.000,00	Bangunan Pengaman Sungai
		Honorarium PPBJ dan PPHP	650.000,00		
		<b>Jumlah</b>	<b>25.158.000,00</b>		
		Perkuatan Tebing Kel. Kandangan Kota	14.640.000,00		



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD	Kegiatan Perencanaan	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
		Honorarium PPK, PPBJ dan PPHP	1.150.000,00		
		Jumlah	<b>15.790.000,00</b>		
		Perkuatan Tebing dengan Pasangan Bronjong Sungai Tumpahan	20.927.000,00		
		Honorarium PPK, PPBJ dan PPHP	1.150.000,00		
		Jumlah	<b>22.077.000,00</b>		
		Perkuatan Tebing Ds. Sungai Kupag RT.01	23.815.000,00		
		Honorarium PPK, PPBJ dan PPHP	1.150.000,00		
		Jumlah	<b>24.965.000,00</b>		
		Perkuatan Tebing dengan Pasangan Bronjong Rt.7 Kandangan Kota	20.817.000,00		
		Honorarium PPK, PPBJ dan PPHP	1.150.000,00		
		Jumlah	<b>21.967.000,00</b>		
		Perkuatan Tebing RT.07 Kec. Kandangan	24.662.000,00		
		Honorarium PPK, PPBJ dan PPHP	1.150.000,00		
		Jumlah	<b>25.812.000,00</b>		
		Perkuatan Tebing sekitar lingkungan SMPN Simpur	24.854.500,00		
		Honorarium PPBJ dan PPHP	650.000,00		
		Jumlah	<b>25.504.500,00</b>		
		Perkuatan Tebing sekitar kantor Pengamat Daerah Irigasi Telaga Langsung	24.854.500,00		
		Honorarium PPBJ dan PPHP	650.000,00		
		Jumlah	<b>25.504.500,00</b>		
		Perkuatan Tebing Desa Loksado	22.055.000,00		
		Honorarium PPBJ dan PPHP	650.000,00		
		Jumlah	<b>22.705.000,00</b>		
		Perkuatan Tebing dengan Pasangan Bronjong RT.05 Kel. Jambu Hilir	21.037.000,00		
		Honorarium PPK, PPBJ dan PPHP	1.150.000,00		
		Jumlah	<b>22.187.000,00</b>		
		Perkuatan Tebing di belakang Masjid al Mutazikirin Ds. Jembatan Merah	23.815.000,00		
		Honorarium PPBJ dan PPHP	650.000,00		



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD	Kegiatan Perencanaan	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
		Jumlah	<b>24.465.000,00</b>		
		Perkuatan Tebing dengan Pasangan Bronjong Ds. Jambu	20.900.000,00		
		Honorarium PPK , PPBJ dan PPHP	1.150.000,00		
		Jumlah	<b>22.050.000,00</b>		
		Perkuatan Tebing Ds. Angkinang Selatan	24.684.000,00		
		Honorarium PPBJ dan PPHP	650.000,00		
		Jumlah	<b>25.334.000,00</b>		
		Perbaikan saluran drainase di Jl. Merah Djohansyah	48.757.500,00	150.435.000,00	Saluran drainase
		Honorarium PPK , PPBJ dan PPHP	1.200.000,00		
		Jumlah	<b>49.957.500,00</b>		
		Pembuatan saluran drainase Kab. HSS	49.620.000,00		
		Honorarium PPK dan PPBJ	900.000,00		
		Jumlah	<b>50.520.000,00</b>		
		Pbaikan saluran drainase di Jl. Sekolah Islam	48.757.500,00		
		Honorarium PPK , PPBJ dan PPHP	1.200.000,00		
		Jumlah	<b>49.957.500,00</b>		
		Rehabilitasi jembatan tahun 2020	49.133.000,00	399.667.000,00	Jembatan
		Honorarium PPK dan PPBJ	900.000,00		
		Jumlah	<b>50.033.000,00</b>		
		Rehabilitasi jembatan di Ruas Bukuanin-Riam Tajam	49.289.000,00		
		Honorarium PPK dan PP	650.000,00		
		Jumlah	<b>49.939.000,00</b>		
		Peningkatan jembatan di Ruas Sungai Kudung Kalinduku	49.475.000,00		
		Honorarium PPK dan PP	650.000,00		
		Jumlah	<b>50.125.000,00</b>		
		Peningkatan jembatan di Ruas Pandak Daun Baruh Jaya	49.141.000,00		
		Honorarium PPK dan PP	650.000,00		
		Jumlah	<b>49.791.000,00</b>		
		Peningkatan jembatan di Ruas Sungai Kupang Utara	49.467.000,00		
		Honorarium PPK dan PP	650.000,00		



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD	Kegiatan Perencanaan	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
		Jumlah	<b>50.117.000,00</b>		
		Pembangunan jembatan tahun 2020	48.972.000,00		
		Honorarium PPK dan PPBJ	900.000,00		
		Jumlah	<b>49.872.000,00</b>		
		Pembangunan jembatan (DAK tahun 2020)	98.890.000,00		
		Honorarium PPK dan PPBJ	900.000,00		
		Jumlah	<b>99.790.000,00</b>		
		Pengembangan jaringan distribusi perpipaan Ds. Hariti, Ds. Ida Manggala	97.515.000,00	345.870.000,00	instalasi air bersih
		Honorarium PPK , PPBJ dan PPHP	1.200.000,00		
		Jumlah	<b>98.715.000,00</b>		
		Pembangunan jaringan transmisi air baku Kec. Sungai Raya	49.595.000,00		
		Honorarium PPK dan PP	900.000,00		
		Jumlah	<b>50.495.000,00</b>		
		Pengembangan jaringan perpipaan SPAM Ds. Malutu	97.185.000,00		
		Honorarium PPK , PPBJ dan PPHP	1.200.000,00		
		Jumlah	<b>98.385.000,00</b>		
		Pengembangan jaringan perpipaan Kec. Sungai Raya dan Simpur	97.075.000,00		
		Honorarium PPK , PPBJ dan PPHP	1.200.000,00		
		Jumlah	<b>98.275.000,00</b>		
		<b>Total</b>		<b>1.547.453.000,00</b>	
2	Dinas Perumahan Rakyat KPLH	Pembuatan/Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Tanjung Selor Kec.Daha Barat	39.127.000,00	<b>117.106.000,00</b>	
		Penataan PSU Perumahan Dar Assalam Kec. Kandangan	28.957.500,00		
		Penataan PSU Perumahan Pondok Jambu Asri, Kel. Jambu Hilir	49.021.500,00		

4. Mutasi masuk dari SKPD lain karena adanya aset tetap JII yang berpindah dari satu SKPD ke SKPD lain/terjadi perubahan pengguna sebesar Rp724.246.000,00 yang terdapat pada Dinas Perdagangan berupa mutasi taman RTH Pasar Kandangan dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.



**B. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Pengurangan aset tetap pada Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2020 sebesar Rp11.825.595.540,00 disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Reklasifikasi ke KIB Lain guna menyesuaikan Aset sesuai dengan KIB yang seharusnya sebesar Rp10.678.231.140,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.106 Daftar Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan**

No.	Nama SKPD	Ke KIB	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	KIB D (JIJ)	950.000,00	Bangunan Ruang terbuka hijau
2	Dinas Kesehatan	KIB B (Peralatan dan Mesin)	35.100.000,00	Wastafel/sarana ctps
3	Dinas Pekerjaan Umum	KIB F (KDP)	471.660.180,00	Lihat pada tabel 5.3.100
4	Dinas Perumahan Rakyat KPLH	KIB B (Peralatan dan Mesin)	3.152.000.000,00	Lampu LED
		KIB C (Gedung dan Bangunan)	4.177.799.000,00	Taman Permanen
5	Dinas Perhubungan	KIB B (Peralatan dan Mesin)	1.866.171.960,00	instalasi pengamanan jalan
6	Dinas Porapar	KIB F (KDP)	30.900.000,00	menara air kolam renang
7	Dinas Perdagangan	KIB C (Gedung dan Bangunan)	943.650.000,00	Taman RTH
<b>Total</b>			<b>10.678.231.140,00</b>	

Berikut disajikan daftar rincian reklasifikasi ke KIB F (KDP) berupa pekerjaan yang belum selesai tahun 2020 pada beberapa SKPD dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.107 Daftar Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang Menjadi KDP**

No.	SKPD	Kegiatan Perencanaan	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum	Perkuatan tebing di Ds. Amawang Kiri	19.881.180,00	471.660.180,00
		Honorarium PPK, PPBJ, dan PPHP	1.100.000,00	
		<b>Jumlah</b>	<b>20.981.180,00</b>	
		Perkuatan tebing di Kel. Jambu Hilir	19.899.000,00	
		Honorarium PPK, PPBJ, dan PPHP	1.100.000,00	
		<b>Jumlah</b>	<b>20.999.000,00</b>	
		Perkuatan tebing di Ds. Baluti	19.800.000,00	
		Honorarium PPK, PPBJ, dan PPHP	1.100.000,00	
		<b>Jumlah</b>	<b>20.900.000,00</b>	
		Perkuatan tebing di Kec. Padang Batung	19.900.000,00	
		Honorarium PPK, PPBJ, dan PPHP	1.100.000,00	
		<b>Jumlah</b>	<b>21.000.000,00</b>	
		Pembangunan MCK di Ponpes Tarbiyatul Furqon	49.600.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

No.	SKPD	Kegiatan Perencanaan	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
		Honorarium PPK, PPBJ, dan PPHP	1.450.000,00	
		Jumlah	<b>51.050.000,00</b>	
		Pembangunan MCK di Ponpes Dalam Pagar	49.650.000,00	
		Honorarium PPK, PPBJ, dan PPHP	1.450.000,00	
		Jumlah	<b>51.100.000,00</b>	
		Rehabilitasi saluran drainase di Jl. Al-Falah	62.200.000,00	
		Honorarium PPK, PPBJ dan PPHP	1.450.000,00	
		Jumlah	<b>63.650.000,00</b>	
		Rehabilitasi jalan di Kec. Sungai Raya, Telaga Langsat, dan Padang Batung	44.330.000,00	
		Honorarium PPK, PPBJ dan PPHP	0,00	
		Jumlah	<b>44.330.000,00</b>	
		Peningkatan jalan Kec. Sungai Raya, Simpur, Padang Batung, dan Loksado	98.780.000,00	
		Honorarium PPK, PPBJ dan PPHP	0,00	
		Jumlah	<b>98.780.000,00</b>	
		Peningkatan jalan Kec. Daha Utara, Daha Selatan, Angkinang	78.870.000,00	
		Honorarium PPK, PPBJ dan PPHP		
		Jumlah	<b>78.870.000,00</b>	

2. Reklasifikasi ke aset lainnya aset tak berwujud sebesar Rp267.800.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berupa dokumen kajian penyusunan DED saluran drainase perkotaan Kandangan.
3. Penghapusan sebesar Rp155.318.400,00 yang terdiri dari:
  - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp51.210.000,00 berupa penghapusan trotoar (saluran drainase) yang berasal dari usulan masyarakat dengan kompensasi ganti rugi atas pembongkaran tersebut dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.108 Rincian Pembongkaran Trotoar (Saluran Drainase)**

No.	SK Sekda	Jenis Barang	Lokasi/Alamat	Panjang	Biaya Ganti Rugi (Rp)
1	Nomor 5 Tahun 2020	Saluran Drainase	Jl. A. Yani	6,8 meter	6.120.000,00
2	Nomor 5 Tahun 2020	Saluran Drainase	Jl. Jend Sudirman Hamalau	1,50 meter	1.350.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

No.	SK Sekda	Jenis Barang	Lokasi/Alamat	Panjang	Biaya Ganti Rugi (Rp)
3	Nomor 5 Tahun 2020	Saluran Drainase	Jl. Musyawarah - Jl. Panglima Batur	4,9 meter	4.410.000,00
4	Nomor 5 Tahun 2020	Saluran Drainase	Jl. A.Yani Parincahan	1 meter	900.000,00
5	Nomor 6 Tahun 2020	Saluran Drainase	Jl. S Parman	3,3 meter	2.970.000,00
6	Nomor 8 Tahun 2020	Saluran Drainase	Jl. A. Yani	10,05 meter	9.045.000,00
7	Nomor 10 Tahun 2020	Saluran Drainase	Jl. A. Yani	7 meter	6.300.000,00
8	Nomor 10 Tahun 2020	Saluran Drainase	Jl. A. Yani	5,2 meter	4.680.000,00
9	Nomor 12 Tahun 2020	Saluran Drainase	Jl. A. Yani	1,85 meter	1.665.000,00
10	Nomor 12 Tahun 2020	Saluran Drainase	Jl. A. Yani	12,3 meter	11.070.000,00
11	Nomor 14 Tahun 2021	Saluran Drainase	Kecamatan Kandangan	3 meter	2.700.000,00
<b>Total</b>					<b>51.210.000,00</b>

- Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebesar Rp104.108.400,00 berupa penghapusan jaringan lampu Asmaul Husna berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 2020.

4. Mutasi keluar ke SKPD lain karena adanya aset tetap JIJ yang berpindah dari satu SKPD ke SKPD lain/terjadi perubahan pengguna sebesar Rp724.246.000,00 yang terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup berupa mutasi taman RTH Pasar Kandangan ke Dinas Perdagangan.

### 5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dikelompokkan ke dalam kelompok tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah dalam kondisi siap pakai.

Aset yang termasuk dalam katagori aset tetap lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam katagori aset tetap lainnya adalah aset tetap renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp48.463.991.579,83 dan Rp52.787.329.621,72. Aset Tetap Lainnya untuk Tahun 2020 turun sebesar Rp4.323.338.041,89 atau 8,19% dari total Aset Tetap Lainnya Tahun 2019 dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.3.109 Rincian Aset Tetap Lainnya per SKPD**

No.	SKPD	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	38.616.567.477,83	43.403.412.025,72



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

No.	SKPD	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
2	Dinas Kesehatan	137.682.000,00	137.682.000,00
3	RSUD Hasan Basry Kandangan	69.800.500,00	69.800.500,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	3.106.138.720,00	3.106.138.720,00
5	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH	1.008.574.800,00	1.008.574.800,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Kesbangpol	3.042.000,00	3.042.000,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	3.995.460,00	3.995.460,00
8	Dinas Sosial	41.522.500,00	39.022.500,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.000.000,00	3.000.000,00
10	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	90.750.000,00	90.750.000,00
11	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKP	11.875.000,00	11.875.000,00
12	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	2.779.475,00	2.779.475,00
13	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	114.608.000,00	124.944.000,00
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.623.533.447,00	1.623.533.447,00
15	Dinas Perikanan	900.000,00	900.000,00
16	Dinas Pertanian	750.376.000,00	255.146.000,00
17	Sekretariat Daerah	9.625.000,00	9.625.000,00
18	Bagian Pemerintahan	72.050.000,00	80.937.494,00
19	Bagian Hukum dan Perundang-undangan	45.834.800,00	45.834.800,00
20	Bagian Umum	234.519.000,00	234.519.000,00
21	Sekretariat DPRD	229.002.750,00	229.002.750,00
22	Kecamatan Padang Batung	250.000,00	250.000,00
23	Kecamatan Loksado	600.000,00	600.000,00
24	Kecamatan Kalumpang	300.000,00	300.000,00
25	Kecamatan Daha Selatan	105.000,00	10.105.000,00
26	Inspektorat Kabupaten	23.459.400,00	23.459.400,00
27	BAPPELITBANGDA	2.214.207.500,00	2.214.207.500,00
28	Badan Keuangan Daerah	18.642.750,00	23.642.750,00
29	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	30.250.000,00	30.250.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>48.463.991.579,83</b>	<b>52.787.329.621,72</b>

Adapun mutasi Aset Tetap Lainnya selama Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.3.110 Mutasi Aset Tetap Lainnya**

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal Per 1 Januari 2020	52.787.329.621,72
Penambahan Aset Tetap Lainnya Tahun 2020	2.785.886.337,00
Pengurangan Aset Tetap Lainnya Tahun 2020	(7.109.224.378,89)
<b>Saldo Akhir Per 31 Desember 2020</b>	<b>48.463.991.579,83</b>



**A. Penambahan Aset Tetap Lainnya**

Penambahan aset tetap lainnya selama TA 2020 sebesar Rp2.785.886.337,00 disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Modal pada LRA TA 2020 sebesar Rp2.338.663.937,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.111 Daftar Pengadaan Aset Tetap Lainnya Tahun 2020**

No	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	2.049.930.537,00
2	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	105.908.000,00
3	Dinas Pertanian	108.000.000,00
4	Sekretariat DPRD	74.825.400,00
<b>Total</b>		<b>2.338.663.937,00</b>

Rincian mengenai daftar pengadaan Aset Tetap Lainnya per jenis barang pada **Lampiran 8**.

2. Reklasifikasi dari KIB Lain sebesar Rp59.992.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.112 Daftar Reklasifikasi ke KIB E (Aset Tetap Lainnya)**

No	SKPD	Dari KIB	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	KIB B (Peralatan dan Mesin)	44.028.400,00	Buku pelajaran dan audio visual
3	Dinas Sosial	KIB B (Peralatan dan Mesin)	2.500.000,00	Tanaman hias
4	Disporapar	KIB B (Peralatan dan Mesin)	13.464.000,00	Ornamen kayu
<b>Total</b>			<b>59.992.400,00</b>	

Berikut disajikan reklasifikasi dari peralatan dan mesin (KIB) ke aset tetap lainnya (KIB E) per sekolah pada Dinas Pendidikan.

**Tabel 5.3.113 Rincian Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin (KIB B) pada Dinas Pendidikan**

No	Sekolah	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	SDN Sungai Pinang 1 (Kec. Daha Selatan)	3.954.200,00	Buku umum
2	SDN Tumbukan Banyu (Kec. Daha Selatan)	2.500.000,00	Buku umum
3	SDN Bukuanin (Kec. Padang Batung)	2.408.200,00	Buku umum
4	SDN Tawia Barat (Kec. Angkinang)	6.000.000,00	Buku umum
5	SMPN 4 Padang Batung	12.000.000,00	Buku umum
6	SDN Muara Ulang (Kec. Loksado)	750.000,00	Buku umum
7	SDN Jembatan Merah (Kec. Padang Batung)	910.000,00	Buku umum
8	SMPN 1 Sungai Raya	635.000,00	Buku umum
9	SMPN 4 Kandangan	635.000,00	Buku umum
10	SMPN 6 Daha Selatan	635.000,00	Buku umum



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

No	Sekolah	Jumlah (Rp)	Keterangan
11	SMPN 4 Padang Batung	635.000,00	Buku umum
12	Dinas Pendidikan	12.966.000,00	Audio visual
<b>Total</b>		<b>44.028.400,00</b>	

- Reklasifikasi dari aset lancar sebesar Rp387.230.000,00 berupa persediaan hewan ternak sapi sebanyak 42 ekor pada Dinas Pertanian, karena hewan ternak tersebut tidak untuk dihibahkan ataupun dijual, tetapi untuk dikembangkan.

#### B. Pengurangan Aset Tetap Lainnya

Pengurangan aset tetap lainnya selama TA 2020 sebesar Rp7.109.224.378,89 disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Reklasifikasi ke KIB lain sebesar Rp561.592.723,89 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.114 Daftar Reklasifikasi dari KIB E (Aset Tetap Lainnya)**

No.	SKPD	Ke KIB	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	KIB B (Peralatan dan Mesin)	333.171.829,89	Lihat pada tabel
2	Dinas Porapar	KIB B (Peralatan dan Mesin)	129.708.000,00	Perahu keselamatan, peralatan olahraga
3	Sekretariat DPRD	KIB B (Peralatan dan Mesin)	74.825.400,00	Rehab frame baliho
4	Bagian Pemerintahan	KIB C (Gedung dan Bangunan)	8.887.494,00	Tugu titik kontrol/pasti
5	Kecamatan Daha Selatan	KIB B (Peralatan dan Mesin)	10.000.000,00	Peralatan Olahraga
6	Bakeuda	KIB B (Peralatan dan Mesin)	5.000.000,00	Peralatan Olahraga
<b>Total</b>			<b>561.592.723,89</b>	

Berikut disajikan reklasifikasi dari peralatan dan mesin (KIB B) pada Dinas Pendidikan.

**Tabel 5.3.115 Reklasifikasi pada Dinas Pendidikan**

No.	Sekolah	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	SDN Jambu Hilir 1	2.778.600,00	Alat peraga
2	SDN Kandangan Barat 2	2.400.000,00	Thermometer digital
3	SDN Kandangan Utara 3	1.561.000,00	Thermometer digital
4	SMPN 2 Padang Batung	4.199.080,00	Meubelair dan kipas angin
5	Dinas Pendidikan	322.233.149,89	Peralatan olahraga
<b>Total</b>		<b>333.171.829,89</b>	

- Penghapusan karena rusak berat berupa buku-buku pelajaran pada Dinas Pendidikan sebesar Rp6.547.631.655,00 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 1 Tahun 2020 tentang Penghapusan Barang



Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

### 5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp5.613.771.380,00 dan Rp7.205.188.675,00. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan untuk Tahun 2020 turun sebesar Rp1.591.417.295,00 atau 22,09% dari total Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2019 dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.3.116 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per SKPD**

NO	SKPD	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	199.161.000,00	249.936.350,00
2	Dinas Kesehatan	424.197.000,00	498.052.000,00
3	RSUD Hasan Basry Kandangan	949.675.950,00	780.492.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.425.359.680,00	3.067.718.000,00
5	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH	446.834.950,00	479.338.575,00
6	Dinas Sosial	13.490.000,00	6.800.000,00
7	Dinas Ketahanan Pangan	19.969.000,00	19.969.000,00
8	Dinas Perhubungan	307.887.500,00	307.887.500,00
9	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKP	73.222.000,00	73.222.000,00
10	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	0,00	48.750.900,00
11	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	64.627.000,00	0,00
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	100.775.000,00	160.219.000,00
13	Dinas Perikanan	30.779.000,00	30.779.000,00
14	Dinas Pertanian	21.670.000,00	21.670.000,00
15	Dinas Perdagangan	181.145.000,00	156.230.000,00
16	Bagian Pemerintahan	44.000.000,00	44.000.000,00
17	Bagian Umum	215.437.700,00	134.269.400,00
18	Kecamatan Kandangan	5.000.000,00	10.062.750,00
19	Kelurahan Kandangan Utara	0,00	2.970.000,00
20	Kelurahan Jambu Hilir	14.900.000,00	24.712.000,00
21	Kecamatan Padang Batung	0,00	9.845.000,00
22	Kecamatan Loksado	25.946.000,00	25.946.000,00
23	Kecamatan Sungai Raya	14.971.000,00	14.971.000,00
24	Kecamatan Simpur	0,00	9.680.000,00
25	Kecamatan Kalumpang	3.950.000,00	3.950.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

NO	SKPD	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
26	Kecamatan Telaga Langsat	79.200.000,00	79.200.000,00
27	Kecamatan Daha Utara	0,00	9.900.000,00
28	Kecamatan Daha Selatan	10.670.000,00	10.670.000,00
29	Kecamatan Daha Barat	0,00	6.710.000,00
30	Badan Keuangan Daerah	891.003.600,00	867.338.200,00
31	Badan Kepegawaian, Diklat	49.900.000,00	49.900.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.613.771.380,00</b>	<b>7.205.188.675,00</b>

Adapun mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan selama Tahun 2020 sebagai berikut:

**Tabel 5.3.117 Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal Per 1 Januari 2020	7.205.188.675,00
Penambahan Aset Tetap KDP Tahun 2020	1.802.983.105,00
Pengurangan Aset Tetap KDP Tahun 2020	(3.394.400.400,00)
<b>Saldo Akhir Per 31 Desember 2020</b>	<b>5.613.771.380,00</b>

**A. Penambahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Penambahan Aset Tetap KDP Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun 2020 sebesar Rp1.802.983.105,00 disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Reklasifikasi dari KIB lain berupa pekerjaan fisik yang sampai dengan tahun anggaran berakhir belum selesai pengerjaannya atau masih dalam tahap perencanaan sebesar Rp1.789.493.105,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.118 Rincian Reklasifikasi ke KDP**

No	SKPD	Dari KIB	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	KIB C (Gedung dan Bangunan)	154.505.000,00	Lihat pada table 5.3.112
2	RSUD H. Hasan Basry	KIB B (Peralatan dan Mesin)	97.993.950,00	Pembangunan RTH dan honor
		KIB C (Gedung dan Bangunan)	71.190.000,00	Perencanaan rehab gedung poliklinik/eks IGD
3	Dinas Pekerjaan Umum	KIB C (Gedung dan Bangunan)	268.845.000,00	Lihat pada table 5.3.112
		KIB D (JIJ)	471.660.180,00	Lihat pada table 5.3.113
4	Dinas Perumahan Rakyat KPLH	KIB C (Gedung dan Bangunan)	511.243.875,00	RTH dan mess/wisma
5	Dinas Porapar	KIB C (Gedung dan Bangunan)	25.840.000,00	Rehab cottage wisma air panas Tanuhi
			7.887.000,00	Rehab ringan ruang musholla dan ruang sanitasi kantor
		KIB D (JIJ)	30.900.000,00	menara air kolam renang
6	Dinas Perdagangan	KIB C (Gedung dan Bangunan)	24.915.000,00	Perencanaan pengecatan blok Pasar Negara



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD	Dari KIB	Jumlah (Rp)	Keterangan
7	Bagian Umum	KIB C (Gedung dan Bangunan)	100.847.700,00	Pereencanaan rehab gedung kantor, tugu, tempat parkir, pagar lapangan, dan bangunan lainnya
8	Badan Keuangan Daerah	KIB C (Gedung dan Bangunan)	23.665.400,00	Perencanaan rehab rumah dinas
<b>Total</b>			<b>1.789.493.105,00</b>	

Berikut disajikan rincian reklasifikasi ke KDP dari Gedung dan Bangunan dan dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada beberapa SKPD.

**Tabel 5.3.119 Rincian Reklasifikasi dari KIB C (Gedung dan Bangunan) ke KDP**

No.	SKPD	Kegiatan Perencanaan	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	Rehab sedang/berat SMPN 2 Loksado	6.800.000,00	154.505.000,00
		Rehab sedang/berat ruang kelas 2021	35.650.000,00	
		Pembangunan sarpras dan utilitas 2021	97.250.000,00	
		Rehab sarpras dan utilitas 2021	14.805.000,00	
2	Dinas Pekerjaan Umum	Pembangunan gedung futsal Kec. Loksado Thn 2021	49.885.000,00	268.845.000,00
		Honorarium PPK, PPBJ dan PPHP	1.200.000,00	
		<b>Jumlah</b>	<b>51.085.000,00</b>	
		Jasa konsultasi perencanaan pembuatan pelayanan publik Dinas PUTR	19.600.000,00	
		Honorarium PPK, PPBJ dan PPHP	1.200.000,00	
		<b>Jumlah</b>	<b>20.800.000,00</b>	
		Perencanaan pembuatan mall pelayanan publik Kab. HSS	99.110.000,00	
		Honorarium PPK, PPBJ dan PPHP	1.450.000,00	
		<b>Jumlah</b>	<b>100.560.000,00</b>	
		Perencanaan rehabilitasi asrama putra Kab HSS Amuk Hantarakung Yogyakarta	94.950.000,00	
		Honorarium PPK, PPBJ dan PPHP	1.450.000,00	
		<b>Jumlah</b>	<b>96.400.000,00</b>	

**Tabel 5.3.120 Daftar Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi, dan Jaringan ke KDP**

No.	SKPD	Kegiatan Perencanaan	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum	Perkuatan tebing di Ds. Amawang Kiri	19.881.180,00	471.660.180,00
		Honorarium PPK, PPBJ, dan PPHP	1.100.000,00	
		<b>Jumlah</b>	<b>20.981.180,00</b>	
		Perkuatan tebing di Kel. Jambu Hilir	19.899.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

No.	SKPD	Kegiatan Perencanaan	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
		Honorarium PPK, PPBJ, dan PPHP	1.100.000,00	
		Jumlah	<b>20.999.000,00</b>	
		Perkuatan tebing di Ds. Baluti	19.800.000,00	
		Honorarium PPK, PPBJ, dan PPHP	1.100.000,00	
		Jumlah	<b>20.900.000,00</b>	
		Perkuatan tebing di Kec. Padang Batung	19.900.000,00	
		Honorarium PPK, PPBJ, dan PPHP	1.100.000,00	
		Jumlah	<b>21.000.000,00</b>	
		Pembangunan MCK di Ponpes Tarbiyatul Furqon	49.600.000,00	
		Honorarium PPK, PPBJ, dan PPHP	1.450.000,00	
		Jumlah	<b>51.050.000,00</b>	
		Pembangunan MCK di Ponpes Dalam Pagar	49.650.000,00	
		Honorarium PPK, PPBJ, dan PPHP	1.450.000,00	
		Jumlah	<b>51.100.000,00</b>	
		Rehabilitasi saluran drainase di Jl. Al-Falah	62.200.000,00	
		Honorarium PPK, PPBJ dan PPHP	1.450.000,00	
		Jumlah	<b>63.650.000,00</b>	
		Rehabilitasi jalan di Kec. Sungai Raya, Telaga Langsat, dan Padang Batung	44.330.000,00	
		Honorarium PPK, PPBJ dan PPHP	0,00	
		Jumlah	<b>44.330.000,00</b>	
		Peningkatan jalan Kec. Sungai Raya, Simpur, Padang Batung, dan Loksado	98.780.000,00	
		Honorarium PPK, PPBJ dan PPHP	0,00	
		Jumlah	<b>98.780.000,00</b>	
		Peningkatan jalan Kec. Daha Utara, Daha Selatan, Angkinang	78.870.000,00	
		Honorarium PPK, PPBJ dan PPHP	0,00	
		Jumlah	<b>78.870.000,00</b>	

2. Reklasifikasi dari barang dan jasa pada Dinas Sosial sebesar Rp13.490.000,00 berupa perencanaan rehabilitasi rumah singgah.

**B. Pengurangan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Pengurangan Aset Tetap KDP Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun 2020 sebesar Rp3.394.400.400,00 disebabkan oleh adanya reklasifikasi ke KIB lain sebesar Rp2.861.194.900,00 dan reklasifikasi ke aset lainnya aset tidak berwujud berupa dokumen kajian sebesar Rp533.205.500,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

**Tabel 5.3.121 Rincian Reklasifikasi Dari KDP**

No	SKPD	Ke KIB	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	KIB C (Gedung dan Bangunan)	205.280.350,00	Lihat pada tabel 5.3.115
2	Dinas Kesehatan	KIB C (Gedung dan Bangunan)	73.855.000,00	Jasa konsultan perencanaan pembangunan IGD Puskesmas Simur
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	KIB C (Gedung dan Bangunan)	302.205.000,00	Lihat pada tabel 5.3.115
		KIB D (JIJ)	1.547.453.000,00	Lihat pada tabel 5.3.116
4	Dinas Perumahan Rakyat KPLH	KIB C (Gedung dan Bangunan)	426.641.500,00	Perencanaan bangunan RTH
		KIB D (JIJ)	117.106.000,00	Jalan khusus (Lihat Tabel 5.3.116)
5	Dinas Sosial	KIB C (Gedung dan Bangunan)	6.800.000,00	Perencanaan rumah singgah
6	Dinas Penanaman Modal PTSP	KIB C (Gedung dan Bangunan)	48.750.900,00	Perencanaan bangunan gedung kantor
7	Dinas Perpustakaan	KIB C (Gedung dan Bangunan)	59.444.000,00	Perencanaan pembangunan gedung perpustakaan Daha Selatan
8	Bagian Umum	KIB C (Gedung dan Bangunan)	19.679.400,00	Perencanaan rehab ruang Bagian Protokol
9	Kecamatan Kandungan	KIB C (Gedung dan Bangunan)	5.062.750,00	Pembangunan taman kantor
10	Kelurahan Kandungan Utara	KIB C (Gedung dan Bangunan)	2.970.000,00	Perencanaan rehab gedung kantor
11	Kelurahan Jambu Hilir	KIB C (Gedung dan Bangunan)	9.812.000,00	Pembuatan pintu gerbang kantor, pagar kantor, tempat parkir dan paving blok
12	Kecamatan Padang Batung	KIB C (Gedung dan Bangunan)	9.845.000,00	Perencanaann pembuatan pagar, pintu gerbang kantor
13	Kecamatan Simpur	KIB C (Gedung dan Bangunan)	9.680.000,00	Perencanaan pagar rumah dinas camat
14	Kecamatan Daha Utara	KIB C (Gedung dan Bangunan)	9.900.000,00	Perencanaan rehab aula kecamatan
15	Kecamatan Daha Barat	KIB C (Gedung dan Bangunan)	6.710.000,00	Perencanaan rehab rumah dinas camat
<b>Total</b>			<b>2.861.194.900,00</b>	

Berikut disajikan rincian reklasifikasi dari KIB F (KDP) ke KIB C (Gedung dan Bangunan) dan ke KIB D (JIJ) pada beberapa SKPD.

**Tabel 5.3.122 Daftar KDP yang menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan**

No.	SKPD	Kegiatan Perencanaan	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	Rehab TK Tahun 2020	3.347.300,00	<b>205.280.350,00</b>
		Pembangunan ruang ibadah SD Tahun 2020	46.590.500,00	
		Pembangunan pagar SD Tahun 2020	7.348.000,00	
		Rehab kelas SD Tahun 2020	46.568.500,00	
		Pembangunan halaman SD Tahun 2020	55.638.000,00	
		Rehabilitasi ruang kelas SMP 1 Daha Barat	18.892.500,00	
		Pembangunan dan rehab wc SD Tahun 2020	20.542.500,00	



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

No.	SKPD	Kegiatan Perencanaan	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
		Penambahan ruang kelas baru TK Tahun 2020	6.353.050,00	
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Perencanaan pembangunan lapangan dance sport	49.486.000,00	<b>302.205.000,00</b>
		Honorarium PPK, PPBJ dan PPHP	1.200.000,00	
		<b>Jumlah</b>	<b>50.686.000,00</b>	
		Perencanaan pembangunan kantor MUI	98.848.000,00	
		Honorarium PPK dan PPHP	900.000,00	
		<b>Jumlah</b>	<b>99.748.000,00</b>	
		Jasa konsultan perencanaan rehabilitasi GOS Aluh Idut	70.208.000,00	
		Honorarium PPK, PPBJ dan PPHP	1.200.000,00	
		<b>Jumlah</b>	<b>71.408.000,00</b>	
		Jasa konsultan perencanaan pembangunan lapangan volly 2 Desember	69.901.000,00	
		Honorarium PPK, PPBJ dan PPHP	1.200.000,00	
		<b>Jumlah</b>	<b>71.101.000,00</b>	
		Perencanaan pemeliharaan taman Dinas PUTR serta pemeliharaan RTH Palidangan Sehati	<b>9.262.000,00</b>	

**Tabel 5.3.123 Daftar KDP yang Menjadi Aset Tetap JIJ**

No.	SKPD	Kegiatan Perencanaan	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Peningkatan jalan Ida Manggala	49.261.000,00	347.962.000,00	Jalan Kabupaten
		Honorarium PPK dan PPHP	650.000,00		
		<b>Jumlah</b>	<b>49.911.000,00</b>		
		Peningkatan jalan ruas Pagat Batu Muara Hariang	49.495.000,00		
		Honorarium PPK dan PPHP	650.000,00		
		<b>Jumlah</b>	<b>50.145.000,00</b>		
		Jasa konsultan rehabilitasi jalan tahun 2020	49.356.000,00		
		Honor PPK dan PPBJ	900.000,00		
		<b>Jumlah</b>	<b>50.256.000,00</b>		
		Jasa konsultan peningkatan jalan tahun 2020	49.256.000,00		
		Honor PPK dan PPBJ	900.000,00		
		<b>Jumlah</b>	<b>50.156.000,00</b>		
		Jalan akses stadion 2 Desember	49.582.000,00		
		Honor PPK dan PPBJ	900.000,00		



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

No.	SKPD	Kegiatan Perencanaan	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan	
		Jumlah	<b>50.482.000,00</b>			
		Jasa konsultan peningkatan jalan (DAK 2020)	96.112.000,00			
		Honor PPK dan PPBJ	900.000,00			
		Jumlah	<b>97.012.000,00</b>			
		Perkuatan tebing Ds. Muara Banta RT.08	24.508.000,00	303.519.000,00	Bangunan Pengaman Sungai	
		Honorarium PPBJ dan PPHP	650.000,00			
		Jumlah	<b>25.158.000,00</b>			
		Perkuatan Tebing Kel. Kandangan Kota	14.640.000,00			
		Honorarium PPK, PPBJ dan PPHP	1.150.000,00			
		Jumlah	<b>15.790.000,00</b>			
		Perkuatan Tebing dengan Pasangan Bronjong Sungai Tumpahan	20.927.000,00			
		Honorarium PPK, PPBJ dan PPHP	1.150.000,00			
		Jumlah	<b>22.077.000,00</b>			
		Perkuatan Tebing Ds. Sungai Kupag RT.01	23.815.000,00			
		Honorarium PPK, PPBJ dan PPHP	1.150.000,00			
		Jumlah	<b>24.965.000,00</b>			
		Perkuatan Tebing dengan Pasangan Bronjong Rt.7 Kandangan Kota	20.817.000,00			
		Honorarium PPK, PPBJ dan PPHP	1.150.000,00			
		Jumlah	<b>21.967.000,00</b>			
		Perkuatan Tebing RT.07 Kec. Kandangan	24.662.000,00			
		Honorarium PPK, PPBJ dan PPHP	1.150.000,00			
		Jumlah	<b>25.812.000,00</b>			
		Perkuatan Tebing sekitar lingkungan SMPN Simpur	24.854.500,00			
		Honorarium PPBJ dan PPHP	650.000,00			
		Jumlah	<b>25.504.500,00</b>			
		Perkuatan Tebing sekitar kantor Pengamat Daerah Irigasi Telaga Langsat	24.854.500,00			
		Honorarium PPBJ dan PPHP	650.000,00			
		Jumlah	<b>25.504.500,00</b>			
		Perkuatan Tebing Desa Loksado	22.055.000,00			



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

No.	SKPD	Kegiatan Perencanaan	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan	
		Honorarium PPBJ dan PPHP	650.000,00			
		Jumlah	<b>22.705.000,00</b>			
		Perkuatan Tebing dengan Pasangan Bronjong RT.05 Kel. Jambu Hilir	21.037.000,00			
		Honorarium PPK , PPBJ dan PPHP	1.150.000,00			
		Jumlah	<b>22.187.000,00</b>			
		Perkuatan Tebing di belakang Mesjid al Mutazikirin Ds. Jembatan Merah	23.815.000,00			
		Honorarium PPBJ dan PPHP	650.000,00			
		Jumlah	<b>24.465.000,00</b>			
		Perkuatan Tebing dengan Pasangan Bronjong Ds. Jambu	20.900.000,00			
		Honorarium PPK , PPBJ dan PPHP	1.150.000,00			
		Jumlah	<b>22.050.000,00</b>			
		Perkuatan Tebing Ds. Angkinang Selatan	24.684.000,00			
		Honorarium PPBJ dan PPHP	650.000,00			
		Jumlah	<b>25.334.000,00</b>			
		Perbaikan saluran drainase di Jl. Merah Djohansyah	48.757.500,00	150.435.000,00	Saluran drainase	
		Honorarium PPK , PPBJ dan PPHP	1.200.000,00			
		Jumlah	<b>49.957.500,00</b>			
		Pembuatan saluran drainase Kab. HSS	49.620.000,00			
		Honorarium PPK dan PPBJ	900.000,00			
		Jumlah	<b>50.520.000,00</b>			
		Pbaikan saluran drainase di Jl. Sekolah Islam	48.757.500,00			
		Honorarium PPK , PPBJ dan PPHP	1.200.000,00			
		Jumlah	<b>49.957.500,00</b>			
		Rehabilitasi jembatan tahun 2020	49.133.000,00	399.667.000,00	Jembatan	
		Honorarium PPK dan PPBJ	900.000,00			
		Jumlah	<b>50.033.000,00</b>			
		Rehabilitasi jembatan di Ruas Bukuanin-Riam Tajam	49.289.000,00			
		Honorarium PPK dan PP	650.000,00			
		Jumlah	<b>49.939.000,00</b>			



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

No.	SKPD	Kegiatan Perencanaan	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
		Peningkatan jembatan di Ruas Sungai Kudung Kalinduku	49.475.000,00		
		Honorarium PPK dan PP	650.000,00		
		Jumlah	<b>50.125.000,00</b>		
		Peningkatan jembatan di Ruas Pandak Daun Baruh Jaya	49.141.000,00		
		Honorarium PPK dan PP	650.000,00		
		Jumlah	<b>49.791.000,00</b>		
		Peningkatan jembatan di Ruas Sungai Kupang Utara	49.467.000,00		
		Honorarium PPK dan PP	650.000,00		
		Jumlah	<b>50.117.000,00</b>		
		Pembangunan jembatan tahun 2020	48.972.000,00		
		Honorarium PPK dan PPBJ	900.000,00		
		Jumlah	<b>49.872.000,00</b>		
		Pembangunan jembatan (DAK tahun 2020)	98.890.000,00		
		Honorarium PPK dan PPBJ	900.000,00		
		Jumlah	<b>99.790.000,00</b>		
		Pengembangan jaringan distribusi perpipaan Ds. Hariti, Ds. Ida Manggala	97.515.000,00	345.870.000,00	
		Honorarium PPK , PPBJ dan PPHP	1.200.000,00		
		Jumlah	<b>98.715.000,00</b>		
		Pembangunan jaringan transmisi air baku Kec. Sungai Raya	49.595.000,00		instalasi air bersih
		Honorarium PPK dan PP	900.000,00		
		Jumlah	<b>50.495.000,00</b>		
		Pengembangan jaringan perpipaan SPAM Ds. Malutu	97.185.000,00		
		Honorarium PPK , PPBJ dan PPHP	1.200.000,00		
		Jumlah	<b>98.385.000,00</b>		
		Pengembangan jaringan perpipaan Kec. Sungai Raya dan Simpur	97.075.000,00		
		Honorarium PPK , PPBJ dan PPHP	1.200.000,00		
		Jumlah	<b>98.275.000,00</b>		
		<b>Total</b>		<b>1.547.453.000,00</b>	



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

No.	SKPD	Kegiatan Perencanaan	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
2	Dinas Perumahan Rakyat KPLH	Pembuatan/Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Tanjung Selor Kec.Daha Barat	39.127.000,00	117.106.000,00	
		Penataan PSU Perumahan Dar Assalam Kec. Kandangan	28.957.500,00		
		Penataan PSU Perumahan Pondok Jambu Asri, Kel. Jambu Hilir	49.021.500,00		

**Tabel 5.3.124 Reklasifikasi KDP ke Aset Lainnya (Aset Tidak Berwujud)**

No	SKPD	Kegiatan Perencanaan	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum	Masterplan drainase	222.464.000,00	<b>533.205.500,00</b>
		Honorarium PPK, PPBJ dan PPHP	2.550.000,00	
		Jumlah	<b>225.014.000,00</b>	
		Masterplan air minum	237.149.000,00	
		Honorarium PPK, PPBJ dan PPHP	2.550.000,00	
		Jumlah	<b>239.699.000,00</b>	
		RAD AMPL Kab. HSS	67.292.500,00	
		Honorarium PPK, PPBJ dan PPHP	1.200.000,00	
		Jumlah	<b>68.492.500,00</b>	

### 5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan diatur dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Perhitungan penyusutan aset tetap dihitung dengan metode garis lurus dengan masing-masing masa manfaat yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 tentang Masa Manfaat dan Penyusutan Barang Milik Daerah.

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp1.016.439.806.551,51 dan Rp861.100.765.616,62. Saldo akumulasi penyusutan TA 2020 berasal dari perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2019 ditambah beban penyusutan selama tahun 2020 dikurangi akumulasi penyusutan aset tetap yang dihapuskan, dikapitalisasi, dan direklasifikasi antar aset tetap.

**Tabel 5.3.125 Rincian Akumulasi Penyusutan per SKPD**

No	SKPD	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	(98.867.554.302,51)	(88.136.774.291,62)
2	Dinas Kesehatan	(60.923.567.145,00)	(54.155.148.880,00)
3	RSUD Hasan Basry Kandangan	(156.879.174.676,00)	(130.014.094.217,00)



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	(467.511.252.528,00)	(385.959.870.184,00)
5	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH	(62.647.472.170,00)	(55.099.089.113,00)
6	Badan Penanggulangan Bencana Kesbangpol	(3.424.682.822,00)	(3.193.293.350,00)
7	Satuan Polisi Pamong Praja	(1.535.119.133,00)	(1.147.916.938,00)
8	Dinas Sosial	(3.543.878.468,00)	(3.216.965.611,00)
9	Dinas Ketahanan Pangan	(1.253.026.804,00)	(1.315.252.840,00)
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(1.844.516.815,00)	(1.543.983.932,00)
11	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa	(628.043.232,00)	(574.426.854,00)
12	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	(4.517.070.384,00)	(4.246.108.584,00)
13	Dinas Perhubungan	(14.294.784.080,00)	(11.749.732.767,00)
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	(4.711.822.902,00)	(3.793.948.315,00)
15	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKP	(3.916.700.451,00)	(3.602.688.484,00)
16	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	(1.208.816.524,00)	(1.043.112.323,00)
17	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	(11.428.761.482,00)	(6.432.273.074,00)
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(1.820.026.118,00)	(1.428.964.326,00)
19	Dinas Perikanan	(4.784.290.376,00)	(4.370.010.074,00)
20	Dinas Pertanian	(20.098.083.880,00)	(18.523.571.284,00)
21	Dinas Perdagangan	(23.875.213.665,00)	(20.586.498.453,00)
22	Sekretariat Daerah	(1.373.893.466,00)	(2.494.493.644,00)
23	Bagian Pemerintahan	(1.721.525.310,00)	(1.604.586.914,00)
24	Bagian Hukum dan Perundang-undangan	(267.431.260,00)	(251.661.189,00)
25	Bagian Kesejahteraan Rakyat	(265.438.252,00)	(222.512.094,00)
26	Bagian Pengadaan Barang / Jasa	(817.681.898,00)	(693.938.563,00)
27	Bagian Protokol dan Kehumasan	(975.046.185,00)	(777.876.401,00)
28	Bagian Umum	(22.090.428.619,00)	(20.752.624.019,00)
29	Bagian Organisasi	(428.665.537,00)	(367.046.967,00)
30	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan TU	(313.187.258,00)	(256.706.573,00)
31	Sekretariat DPRD	(4.907.379.188,00)	(4.733.782.447,00)
32	Kecamatan Kandangan	(1.961.664.993,00)	(1.629.067.915,00)
33	Kelurahan Kandangan Kota	(331.651.148,00)	(261.720.815,00)
34	Kelurahan Kandangan Utara	(226.845.030,00)	(176.369.364,00)
35	Kelurahan Kandangan Barat	(288.639.762,00)	(226.249.663,00)
36	Kelurahan Jambu Hilir	(284.724.500,00)	(204.534.212,00)
37	Kecamatan Padang Batung	(1.453.632.626,00)	(1.216.365.047,00)
38	Kecamatan Loksado	(1.193.997.442,00)	(1.032.340.348,00)
39	Kecamatan Sungai Raya	(1.248.832.167,00)	(1.107.443.750,00)
40	Kecamatan Simpur	(1.309.636.487,00)	(1.080.742.482,00)



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
41	Kecamatan Kalumpang	(1.390.487.705,00)	(1.175.250.332,00)
42	Kecamatan Angkinang	(1.315.440.728,00)	(1.121.405.200,00)
43	Kecamatan Telaga Langsat	(1.173.217.900,00)	(1.094.373.987,00)
44	Kecamatan Daha Utara	(1.938.910.313,00)	(1.762.136.884,00)
45	Kecamatan Daha Selatan	(3.702.418.134,00)	(3.143.663.053,00)
46	Kecamatan Daha Barat	(1.367.609.653,00)	(1.181.978.123,00)
47	Inspektorat Kabupaten	(2.046.354.291,00)	(1.792.968.830,00)
48	BAPPELITBANGDA	(1.801.550.009,00)	(1.658.558.970,00)
49	Badan Keuangan Daerah	(8.307.879.780,00)	(6.943.043.750,00)
50	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	(2.221.778.953,00)	(2.003.600.186,00)
<b>TOTAL</b>		<b>(1.016.439.806.551,51)</b>	<b>(861.100.765.616,62)</b>

Berikut disajikan rincian akumulasi penyusutan per jenis aset tetap yang disusutkan:

**Tabel 5.3.126 Rincian Akumulasi Penyusutan per Jenis Aset Tetap**

No	SKPD	Akumulasi Penyusutan (Rp)				31 Desember 2020 (Rp)
		Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	JIJ	Aset Tetap Lainnya	
1	Dinas Pendidikan	(44.028.745.499,51)	(54.715.677.005,00)	(123.131.798,00)	0,00	(98.867.554.302,51)
2	Dinas Kesehatan	(46.461.731.873,00)	(13.911.926.034,00)	(549.909.238,00)	0,00	(60.923.567.145,00)
3	RSUD Hasan Basry Kandangan	(133.879.390.202,00)	(17.764.156.286,00)	(5.235.628.188,00)	0,00	(156.879.174.676,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan TR	(7.374.191.976,00)	(1.722.686.866,00)	(458.414.373.686,00)	0,00	(467.511.252.528,00)
5	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH	(20.254.303.350,00)	(4.875.930.341,00)	(37.517.238.479,00)	0,00	(62.647.472.170,00)
6	Badan Penanggulangan Bencana Kesbangpol	(3.316.948.972,00)	(94.125.540,00)	(13.608.310,00)	0,00	(3.424.682.822,00)
7	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	(1.448.065.718,00)	(87.053.415,00)	0,00	0,00	(1.535.119.133,00)
8	Dinas Sosial	(1.750.097.477,00)	(1.778.717.068,00)	(12.563.923,00)	(2.500.000,00)	(3.543.878.468,00)
9	Dinas Ketahanan Pangan	(922.254.941,00)	(330.562.324,00)	(209.539,00)	0,00	(1.253.026.804,00)
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(1.768.903.440,00)	(70.863.452,00)	0,00	0,00	(1.839.766.892,00)
11	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa	(496.713.557,00)	(131.329.675,00)	(4.749.923,00)	0,00	(632.793.155,00)
12	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	(3.854.630.977,00)	(655.715.180,00)	(6.724.227,00)	0,00	(4.517.070.384,00)
13	Dinas Perhubungan	(9.730.167.433,00)	(1.390.363.500,00)	(3.174.253.147,00)	0,00	(14.294.784.080,00)
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	(4.532.098.017,00)	(136.534.778,00)	(43.190.107,00)	0,00	(4.711.822.902,00)
15	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKP	(2.809.417.963,00)	(1.065.518.142,00)	(41.764.346,00)	0,00	(3.916.700.451,00)
16	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	(994.254.061,00)	(212.264.663,00)	(2.297.800,00)	0,00	(1.208.816.524,00)
17	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	(2.168.126.525,00)	(9.206.287.587,00)	(54.347.370,00)	0,00	(11.428.761.482,00)
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(1.509.087.878,00)	(296.968.917,00)	(13.969.323,00)	0,00	(1.820.026.118,00)
19	Dinas Perikanan	(3.007.826.018,00)	(913.153.069,00)	(863.311.289,00)	0,00	(4.784.290.376,00)



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

No	SKPD	Akumulasi Penyusutan (Rp)				31 Desember 2020 (Rp)
		Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	JIJ	Aset Tetap Lainnya	
20	Dinas Pertanian	(8.514.294.224,00)	(6.575.349.519,00)	(5.008.440.137,00)	0,00	(20.098.083.880,00)
21	Dinas Perdagangan	(1.791.876.869,00)	(21.741.482.439,00)	(341.854.357,00)	0,00	(23.875.213.665,00)
22	Sekretariat Daerah	(419.637.500,00)	(953.010.966,00)	0,00	(1.245.000,00)	(1.373.893.466,00)
23	Bagian Pemerintahan	(1.646.954.361,00)	(74.570.949,00)	0,00	0,00	(1.721.525.310,00)
24	Bagian Hukum dan Perundang-undangan	(267.431.260,00)	0,00	0,00	0,00	(267.431.260,00)
25	Bagian Kesejahteraan Rakyat	(265.438.252,00)	0,00	0,00	0,00	(265.438.252,00)
26	Bagian Pengadaan Barang / Jasa	(817.681.898,00)	0,00	0,00	0,00	(817.681.898,00)
27	Bagian Protokol dan Kehumasan	(966.711.518,00)	(8.334.667,00)	0,00	0,00	(975.046.185,00)
28	Bagian Umum	(16.423.446.676,00)	(5.376.807.496,00)	(290.174.447,00)	0,00	(22.090.428.619,00)
29	Bagian Organisasi	(428.665.537,00)	0,00	0,00	0,00	(428.665.537,00)
30	Bagian Perekonomian	(313.187.258,00)	0,00	0,00	0,00	(313.187.258,00)
31	Sekretariat DPRD	(4.059.086.428,00)	(836.777.747,00)	(11.515.013,00)	0,00	(4.907.379.188,00)
32	Kecamatan Kandangan	(1.310.493.284,00)	(645.963.690,00)	(5.208.019,00)	0,00	(1.961.664.993,00)
33	Kelurahan Kandangan Kota	(208.357.178,00)	(123.293.970,00)	0,00	0,00	(331.651.148,00)
34	Kelurahan Kandangan Utara	(145.104.355,00)	(81.100.471,00)	(640.204,00)	0,00	(226.845.030,00)
35	Kelurahan Kandangan Barat	(237.207.426,00)	(50.896.194,00)	(536.142,00)	0,00	(288.639.762,00)
36	Kelurahan Jambu Hilir	(281.259.785,00)	(3.265.652,00)	(199.063,00)	0,00	(284.724.500,00)
37	Kecamatan Padang Batung	(1.016.256.143,00)	(435.181.783,00)	(2.194.700,00)	0,00	(1.453.632.626,00)
38	Kecamatan Loksado	(872.695.323,00)	(319.774.847,00)	(1.527.272,00)	0,00	(1.193.997.442,00)
39	Kecamatan Sungai Raya	(1.102.432.381,00)	(143.922.702,00)	(2.477.084,00)	0,00	(1.248.832.167,00)
40	Kecamatan Simpur	(960.252.618,00)	(349.095.708,00)	(288.161,00)	0,00	(1.309.636.487,00)
41	Kecamatan Kalumpang	(955.512.243,00)	(434.422.129,00)	(553.333,00)	0,00	(1.390.487.705,00)
42	Kecamatan Angkinang	(910.703.974,00)	(404.736.754,00)	0,00	0,00	(1.315.440.728,00)
43	Kecamatan Telaga Langsat	(751.525.808,00)	(421.403.033,00)	(289.059,00)	0,00	(1.173.217.900,00)
44	Kecamatan Daha Utara	(1.135.465.393,00)	(803.444.920,00)	0,00	0,00	(1.938.910.313,00)
45	Kecamatan Daha Selatan	(1.081.709.622,00)	(2.618.673.112,00)	(2.035.400,00)	0,00	(3.702.418.134,00)
46	Kecamatan Daha Barat	(966.015.185,00)	(397.724.474,00)	(3.869.994,00)	0,00	(1.367.609.653,00)
47	Inspektorat Kabupaten	(1.630.861.258,00)	(384.018.243,00)	(31.474.790,00)	0,00	(2.046.354.291,00)
48	BAPPELITBANGDA	(1.789.212.982,00)	0,00	(12.337.027,00)	0,00	(1.801.550.009,00)
49	Badan Keuangan Daerah	(6.557.176.025,00)	(1.701.732.735,00)	(48.971.020,00)	0,00	(8.307.879.780,00)
50	Badan Kepegawaian, Diklat	(1.920.563.873,00)	(301.215.080,00)	0,00	0,00	(2.221.778.953,00)
<b>TOTAL</b>		<b>(350.054.172.514,51)</b>	<b>(154.546.033.122,00)</b>	<b>(511.835.855.915,00)</b>	<b>(3.745.000,00)</b>	<b>(1.016.439.806.551,51)</b>

Penjelasan lebih lanjut mengenai mutasi akumulasi masing-masing aset tetap adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

**5.3.1.3.7.1 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin**

Saldo akumulasi penyusutan peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp350.054.172.514,51 dan Rp298.965.755.825,62 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

**Tabel 5.3.127 Rincian Mutasi Penyusutan Peralatan dan Mesin**

NO	SKPD	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi (Rp)		31 Desember 2020 (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
1	Dinas Pendidikan	(37.048.092.806,62)	(7.180.040.239,89)	(199.387.547,00)	(44.028.745.499,51)
2	Dinas Kesehatan	(41.977.122.424,00)	(5.543.224.815,00)	(1.058.615.366,00)	(46.461.731.873,00)
3	RSUD Hasan Basry Kandangan	(112.292.650.534,00)	(22.291.499.107,00)	(704.759.439,00)	(133.879.390.202,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	(6.531.861.135,00)	(1.004.471.841,00)	(162.141.000,00)	(7.374.191.976,00)
5	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH	(17.162.169.559,00)	(3.122.516.291,00)	(30.382.500,00)	(20.254.303.350,00)
6	Badan Penanggulangan Bencana Kesbangpol	(3.114.884.529,00)	(279.333.076,00)	(77.268.633,00)	(3.316.948.972,00)
7	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	(987.159.040,00)	(484.552.511,00)	(23.645.833,00)	(1.448.065.718,00)
8	Dinas Sosial	(1.615.182.710,00)	(159.433.007,00)	(24.518.240,00)	(1.750.097.477,00)
9	Dinas Ketahanan Pangan	(1.011.862.436,00)	(96.222.505,00)	(185.830.000,00)	(922.254.941,00)
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(1.479.869.136,00)	(357.799.894,00)	(68.765.590,00)	(1.768.903.440,00)
11	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa	(426.901.854,00)	(102.574.950,00)	(32.763.247,00)	(496.713.557,00)
12	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	(3.698.077.057,00)	(376.417.920,00)	(219.864.000,00)	(3.854.630.977,00)
13	Dinas Perhubungan	(6.107.600.987,00)	(3.701.641.446,00)	(79.075.000,00)	(9.730.167.433,00)
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	(3.621.781.667,00)	(910.316.350,00)	0,00	(4.532.098.017,00)
15	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKP	(2.607.425.062,00)	(213.572.901,00)	(11.580.000,00)	(2.809.417.963,00)
16	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	(856.660.336,00)	(197.493.725,00)	(59.900.000,00)	(994.254.061,00)
17	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	(1.916.632.386,00)	(353.502.095,00)	(102.007.956,00)	(2.168.126.525,00)
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(1.180.536.665,00)	(341.991.213,00)	(13.440.000,00)	(1.509.087.878,00)
19	Dinas Perikanan	(2.775.218.894,00)	(232.607.124,00)	0,00	(3.007.826.018,00)
20	Dinas Pertanian	(7.950.503.584,00)	(767.975.440,00)	(204.184.800,00)	(8.514.294.224,00)
21	Dinas Perdagangan	(1.550.527.696,00)	(424.305.841,00)	(182.956.668,00)	(1.791.876.869,00)
22	Sekretariat Daerah	(419.637.500,00)	0,00	0,00	(419.637.500,00)
23	Bagian Pemerintahan	(1.542.805.293,00)	(104.149.068,00)	0,00	(1.646.954.361,00)
24	Bagian Hukum dan Perundang-undangan	(251.661.189,00)	(52.150.971,00)	(36.380.900,00)	(267.431.260,00)
25	Bagian Kesejahteraan Rakyat	(222.512.094,00)	(42.926.158,00)	0,00	(265.438.252,00)
26	Bagian Pengadaan Barang / Jasa	(693.938.563,00)	(123.743.335,00)	0,00	(817.681.898,00)
27	Bagian Protokol dan Kehumasan	(770.293.734,00)	(196.417.784,00)	0,00	(966.711.518,00)
28	Bagian Umum	(14.008.525.673,00)	(3.096.890.622,00)	(681.969.619,00)	(16.423.446.676,00)
29	Bagian Organisasi	(367.046.967,00)	(61.618.570,00)	0,00	(428.665.537,00)
30	Bagian Perekonomian, Pembangunan dan TU	(256.706.573,00)	(56.480.685,00)	0,00	(313.187.258,00)
31	Sekretariat DPRD	(3.970.417.224,00)	(740.750.990,00)	(652.081.786,00)	(4.059.086.428,00)
32	Kecamatan Kandangan	(1.106.643.942,00)	(203.849.342,00)	0,00	(1.310.493.284,00)



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

NO	SKPD	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi (Rp)		31 Desember 2020 (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
33	Kelurahan Kandangan Kota	(156.632.968,00)	(51.724.210,00)	0,00	(208.357.178,00)
34	Kelurahan Kandangan Utara	(112.231.237,00)	(37.122.326,00)	(4.249.208,00)	(145.104.355,00)
35	Kelurahan Kandangan Barat	(183.856.434,00)	(53.350.992,00)	0,00	(237.207.426,00)
36	Kelurahan Jambu Hilir	(204.518.899,00)	(76.740.886,00)	0,00	(281.259.785,00)
37	Kecamatan Padang Batung	(876.385.224,00)	(139.870.919,00)	0,00	(1.016.256.143,00)
38	Kecamatan Loksado	(758.478.998,00)	(114.216.325,00)	0,00	(872.695.323,00)
39	Kecamatan Sungai Raya	(984.692.598,00)	(117.739.783,00)	0,00	(1.102.432.381,00)
40	Kecamatan Simpur	(826.778.729,00)	(135.696.806,00)	(2.222.917,00)	(960.252.618,00)
41	Kecamatan Kalumpang	(806.739.841,00)	(148.772.402,00)	0,00	(955.512.243,00)
42	Kecamatan Angkinang	(821.723.191,00)	(103.161.450,00)	(14.180.667,00)	(910.703.974,00)
43	Kecamatan Telaga Langsat	(681.930.135,00)	(111.589.673,00)	(41.994.000,00)	(751.525.808,00)
44	Kecamatan Daha Utara	(975.481.144,00)	(159.984.249,00)	0,00	(1.135.465.393,00)
45	Kecamatan Daha Selatan	(908.399.870,00)	(173.309.752,00)	0,00	(1.081.709.622,00)
46	Kecamatan Daha Barat	(848.771.177,00)	(117.244.008,00)	0,00	(966.015.185,00)
47	Inspektorat Kabupaten	(1.423.310.592,00)	(207.550.666,00)	0,00	(1.630.861.258,00)
48	BAPPELITBANGDA	(1.647.906.460,00)	(148.038.147,00)	(6.731.625,00)	(1.789.212.982,00)
49	Badan Keuangan Daerah	(5.489.028.179,00)	(1.900.634.548,00)	(832.486.702,00)	(6.557.176.025,00)
50	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	(1.735.980.900,00)	(289.277.100,00)	(104.694.127,00)	(1.920.563.873,00)
<b>TOTAL</b>		<b>(298.965.755.825,62)</b>	<b>(56.906.494.058,89)</b>	<b>(5.818.077.370,00)</b>	<b>(350.054.172.514,51)</b>

Mutasi akumulasi penyusutan aset tetap Peralatan dan Mesin selama Tahun 2020 dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Mutasi yang mempengaruhi penambahan penyusutan aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp56.906.672,89 terdiri dari:
  - Mutasi masuk antar SKPD yang menambah nilai penyusutan sebesar Rp2.586.026.185,00.
  - Penambahan karena adanya beban penyusutan yang terjadi selama TA 2020 sebesar Rp54.320.646.205,89 (penjelasan lebih lanjut mengenai beban penyusutan ada pada Bab Laporan Operasional).
2. Mutasi yang mempengaruhi pengurangan penyusutan aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp5.818.077.370,00:
  - Mutasi keluar antar SKPD yang mengurangi nilai penyusutan sebesar Rp2.586.026.185,00.
  - Pengurangan karena aset yang dihapuskan sebesar Rp3.182.719.528,00 dengan rincian sebagai berikut:



**Tabel 5.3.128 Rincian Penyusutan karena Penghapusan**

No.	SKPD	Nilai Aset (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)
1	Dinas Kesehatan	1.216.585.517,00	1.058.615.366,00
2	RSUD Hasan Basry	559.579.138,00	553.267.439,00
3	Dinas Perumahan Rakyat KPLH	30.382.500,00	30.382.500,00
4	Dinas Pekerjaan Umum TR	162.141.000,00	162.141.000,00
5	BPB Kesbangpol	77.360.300,00	77.268.633,00
6	Satuan Pol PP	28.375.000,00	23.645.833,00
7	Dinas Sosial	22.018.240,00	22.018.240,00
8	Dinas PPKBPPPA	48.058.000,00	48.058.000,00
9	Dinas Kependudukan dan Catpil	68.765.590,00	68.765.590,00
10	Dinas Perhubungan	79.075.000,00	79.075.000,00
11	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	105.219.500,00	102.007.956,00
12	Dinas Tenaga kerja	11.580.000,00	11.580.000,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	35.539.400,00	32.763.247,00
14	Dinas Penanaman Modal PTSP	60.400.000,00	59.900.000,00
15	Dinas Ketahanan Pangan	185.830.000,00	185.830.000,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	13.440.000,00	13.440.000,00
17	Dinas Pertanian	204.184.800,00	204.184.800,00
18	Dinas Perdagangan	191.350.000,00	182.956.668,00
19	Bagian Hukum	36.380.900,00	36.380.900,00
20	Kelurahan Kandungan Utara	5.588.000,00	4.249.208,00
21	Kecamatan Simpur	2.237.500,00	2.222.917,00
22	Kecamatan Angkinang	14.614.000,00	14.180.667,00
23	Kecamatan Telaga Langsat	41.994.000,00	41.994.000,00
24	Bappelitbangda	7.419.000,00	6.731.625,00
25	BKD dan Diklat	107.233.190,00	104.694.127,00
26	Badan Keuangan Daerah	61.305.500,00	56.365.812,00
<b>Total</b>		<b>3.376.656.075,00</b>	<b>3.182.719.528,00</b>

- Pengurangan karena aset yang direklasifikasi ke KIB lain sebesar Rp49.331.657,00 pada beberapa SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.3.129 Rincian Penyusutan karena Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin**

No.	SKPD	Reklas ke	Nilai Penyusutan (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	KIB C (Gedung dan Bangunan)	45.814.990,00	Bangunan Menara
2	RSUD Hasan Basry	KIB C (Gedung dan Bangunan)	70.000,00	Bangunan Menara
3	Dinas Sosial	KIB E (Aset Tetap Lainnya)	2.500.000,00	Tanaman Hias



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

No.	SKPD	Reklas ke	Nilai Penyusutan (Rp)	Keterangan
4	Badan Keuangan Daerah	KIB C (Gedung dan Bangunan)	946.667,00	Bangunan Menara
<b>Total</b>			<b>49.331.657,00</b>	

### 5.3.1.3.7.2 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Saldo akumulasi penyusutan gedung dan bangunan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp154.546.033.122,00 dan Rp135.141.180.351,00 dengan rincian mutasi dan penjelasannya sebagai berikut:

**Tabel 5.3.130 Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan**

NO	SKPD	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi (Rp)		31 Desember 2020 (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
1	Dinas Pendidikan	(50.942.843.134,00)	(5.892.702.518,00)	(2.119.868.647,00)	(54.715.677.005,00)
2	Dinas Kesehatan	(11.762.380.547,00)	(2.610.866.226,00)	(461.320.739,00)	(13.911.926.034,00)
3	RSUD Hasan Basry Kandungan	(14.201.418.321,00)	(3.682.263.952,00)	(119.525.987,00)	(17.764.156.286,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	(1.153.996.613,00)	(570.253.789,00)	(1.563.536,00)	(1.722.686.866,00)
5	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH	(3.652.103.100,00)	(1.397.026.801,00)	(173.199.560,00)	(4.875.930.341,00)
6	Badan Penanggulangan Bencana Kesbangpol	(76.395.431,00)	(18.860.662,00)	(1.130.553,00)	(94.125.540,00)
7	Satuan Polisi Pamong Praja	(160.757.898,00)	(22.858.932,00)	(96.563.415,00)	(87.053.415,00)
8	Dinas Sosial	(1.591.851.357,00)	(197.369.433,00)	(10.503.722,00)	(1.778.717.068,00)
9	Dinas Ketahanan Pangan	(303.271.281,00)	(36.074.376,00)	(8.783.333,00)	(330.562.324,00)
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(60.130.398,00)	(10.733.054,00)	0,00	(70.863.452,00)
11	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa	(147.525.000,00)	(9.179.675,00)	(25.375.000,00)	(131.329.675,00)
12	Dinas Pengendalian Penduduk, KBPPPA	(542.546.815,00)	(113.168.365,00)	0,00	(655.715.180,00)
13	Dinas Perhubungan	(1.520.003.426,00)	(175.679.031,00)	(305.318.957,00)	(1.390.363.500,00)
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	(132.371.506,00)	(25.277.369,00)	(21.114.097,00)	(136.534.778,00)
15	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKP	(956.373.677,00)	(109.144.465,00)	0,00	(1.065.518.142,00)
16	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	(185.217.425,00)	(30.074.238,00)	(3.027.000,00)	(212.264.663,00)
17	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	(4.475.999.758,00)	(4.759.957.231,00)	(29.669.402,00)	(9.206.287.587,00)
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(236.587.324,00)	(110.290.398,00)	(49.908.805,00)	(296.968.917,00)
19	Dinas Perikanan	(818.652.814,00)	(94.500.255,00)	0,00	(913.153.069,00)
20	Dinas Pertanian	(5.985.280.360,00)	(622.233.040,00)	(32.163.881,00)	(6.575.349.519,00)
21	Dinas Perdagangan	(18.692.480.317,00)	(3.140.987.311,00)	(91.985.189,00)	(21.741.482.439,00)
22	Sekretariat Daerah	(2.073.611.144,00)	(76.072.545,00)	(1.196.672.723,00)	(953.010.966,00)
23	Bagian Pemerintahan	(61.781.621,00)	(12.789.328,00)	0,00	(74.570.949,00)
24	Bagian Protokol dan Kehumasan	(7.582.667,00)	(752.000,00)	0,00	(8.334.667,00)
25	Bagian Umum	(6.480.373.584,00)	(1.969.178.755,00)	(3.072.744.843,00)	(5.376.807.496,00)
26	Sekretariat DPRD	(754.275.492,00)	(84.389.891,00)	(1.887.636,00)	(836.777.747,00)



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

NO	SKPD	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi (Rp)		31 Desember 2020 (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
27	Kecamatan Kandangan	(518.813.306,00)	(143.784.601,00)	(16.634.217,00)	(645.963.690,00)
28	Kelurahan Kandangan Kota	(105.087.847,00)	(18.206.123,00)	0,00	(123.293.970,00)
29	Kelurahan Kandangan Utara	(63.589.381,00)	(34.145.307,00)	(16.634.217,00)	(81.100.471,00)
30	Kelurahan Kandangan Barat	(42.351.987,00)	(8.544.207,00)	0,00	(50.896.194,00)
31	Kelurahan Jambu Hilir	0,00	(3.265.652,00)	0,00	(3.265.652,00)
32	Kecamatan Padang Batung	(338.480.761,00)	(96.701.022,00)	0,00	(435.181.783,00)
33	Kecamatan Loksado	(272.443.169,00)	(47.331.678,00)	0,00	(319.774.847,00)
34	Kecamatan Sungai Raya	(120.761.568,00)	(36.900.534,00)	(13.739.400,00)	(143.922.702,00)
35	Kecamatan Simpur	(253.963.753,00)	(95.131.955,00)	0,00	(349.095.708,00)
36	Kecamatan Kalumpang	(367.997.158,00)	(74.425.555,00)	(8.000.584,00)	(434.422.129,00)
37	Kecamatan Angkinang	(299.682.009,00)	(105.463.078,00)	(408.333,00)	(404.736.754,00)
38	Kecamatan Telaga Langsat	(412.386.040,00)	(48.542.516,00)	(39.525.523,00)	(421.403.033,00)
39	Kecamatan Daha Utara	(786.655.740,00)	(128.081.867,00)	(111.292.687,00)	(803.444.920,00)
40	Kecamatan Daha Selatan	(2.229.237.583,00)	(486.040.971,00)	(96.605.442,00)	(2.618.673.112,00)
41	Kecamatan Daha Barat	(329.985.820,00)	(67.738.654,00)	0,00	(397.724.474,00)
42	Inspektorat Kabupaten	(342.260.698,00)	(41.757.545,00)	0,00	(384.018.243,00)
43	Badan Keuangan Daerah	(1.414.053.235,00)	(303.085.467,00)	(15.405.967,00)	(1.701.732.735,00)
44	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	(267.619.286,00)	(33.595.794,00)	0,00	(301.215.080,00)
	<b>TOTAL</b>	<b>(135.141.180.351,00)</b>	<b>(27.545.426.166,00)</b>	<b>(8.140.573.395,00)</b>	<b>(154.546.033.122,00)</b>

Mutasi akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan selama TA 2020 berasal dari:

1. Mutasi yang mempengaruhi penambahan penyusutan aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp27.545.426.166,00 terdiri dari:
  - Mutasi masuk antar SKPD yang menambah nilai penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp4.024.810.459,00.
  - Penambahan berupa beban penyusutan selama TA 2020 sebesar Rp23.473.784.050,00 (secara rinci dijelaskan pada Beban Penyusutan dan Amortisasi Bab Laporan Operasional).
  - Adanya penambahan karena reklasifikasi dari KIB B (Peralatan dan Mesin) berupa bangunan menara sebesar Rp46.831.657,00 yaitu pada Dinas Pendidikan sebesar Rp45.814.990,00; RSUD H. Hasan Basry sebesar Rp70.000,00; dan Badan Keuangan Daerah sebesar Rp946.667,00.
2. Mutasi yang mempengaruhi pengurangan penyusutan aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp8.140.573.395,00 terdiri dari:



- Mutasi keluar antar SKPD yang mengurangi nilai penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp4.024.810.459,00.
- Pengurangan karena penghapusan atas barang yang dihibahkan sebesar Rp396.286,00, yaitu hibah sumur bor ke Rumah Tahanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- Pengurangan karena penghapusan atas barang yang rusak berat sebesar Rp610.558.159,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.131 Rincian Penyusutan karena Penghapusan**

No.	SKPD	Nilai Aset (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)
1	Dinas Pendidikan	598.225.000,00	121.112.740,00
2	Dinas Kesehatan	686.618.566,00	140.298.178,00
3	RSUD H. Hasan Basry	1.076.868.000,00	21.537.360,00
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	123.970.000,00	48.836.664,00
5	Dinas Ketahanan Pangan	42.500.000,00	8.783.333,00
6	Bagian Umum	263.795.565,00	158.697.197,00
7	Kecamatan Daha Utara	126.380.000,00	111.292.687,00
<b>Total</b>		<b>2.918.357.131,00</b>	<b>610.558.159,00</b>

- Pengurangan karena adanya reklasifikasi ke KIB lain akibat perubahan regulasi (Permendagri 108) sebesar Rp322.390.308,00 pada beberapa SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.3.132 Rincian Reklasifikasi Penyusutan dari Gedung dan Bangunan**

No.	SKPD	Reklas ke	Nilai Penyusutan (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	KIB B (Peralatan dan Mesin)	834.167,00	Teralis
		KIB B (Peralatan dan Mesin)	1.054.166,00	Rambu/Papan nama
2	RSUD Hasan Basry	KIB B (Peralatan dan Mesin)	212.500,00	Rambu/Papan nama
3	Dinas Perumahan Rakyat KPLH	KIB B (Peralatan dan Mesin)	433.125,00	Rambu/Papan nama
4	Dinas Perhubungan	KIB B (Peralatan dan Mesin)	305.318.957,00	Rambu/Papan nama
5	Dinas Sosial	KIB B (Peralatan dan Mesin)	121.667,00	Teralis
6	Dinas Perpustakaan	KIB B (Peralatan dan Mesin)	340.000,00	Teralis
7	Dinas Pertanian	KIB B (Peralatan dan Mesin)	11.221.793,00	Teralis
8	Kecamatan Angkinang	KIB B (Peralatan dan Mesin)	408.333,00	Teralis
9	Kecamatan Daha Selatan	KIB B (Peralatan dan Mesin)	2.445.600,00	Teralis
<b>Total</b>			<b>322.390.308,00</b>	

- Pengurangan karena adanya kapitalisasi sebesar Rp3.182.418.183,00 pada beberapa SKPD sebagai berikut:



**Tabel 5.3.133 Daftar Penyusutan Karena Kapitalisasi**

No.	SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	1.996.867.574,00
2	Dinas Kesehatan	321.022.561,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.167.250,00
4	Dinas Perumahan Rakyat KPLH	127.591.781,00
5	RSUD H. Hasan Basry	97.776.127,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Kesbangpol	1.130.553,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	96.563.415,00
8	Dinas Pemberayaan Masyarakat dan Desa	25.375.000,00
9	Dinas Kominfo	21.114.097,00
10	Dinas Penanaman Modal PTSP	3.027.000,00
11	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	29.669.402,00
12	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	732.141,00
13	Dinas Perdagangan	15.786.721,00
14	Dinas Pertanian	20.942.088,00
15	Bagian Umum	283.135.968,00
16	Sekretariat DPRD	1.887.636,00
17	Kelurahan Kandangan Utara	16.634.217,00
18	Kecamatan Sungai Raya	13.739.400,00
19	Kecamatan Kalumpang	8.000.584,00
20	Kecamatan Telaga Langsat	39.525.523,00
21	Kecamatan Daha Selatan	45.323.178,00
22	Badan Keuangan Daerah	15.405.967,00
<b>Total</b>		<b>3.182.418.183,00</b>

### 5.3.1.3.7.3 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo akumulasi penyusutan gedung dan bangunan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp511.835.855.915,00 dan Rp426.946.280.687,00 dengan rincian mutasi dan penjelasannya sebagai berikut:

**Tabel 5.3.134 Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi**

NO	SKPD	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi (Rp)		31 Desember 2020 (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
1	Dinas Pendidikan	(104.577.933,00)	(18.631.443,00)	(77.578,00)	(123.131.798,00)
2	Dinas Kesehatan	(415.645.909,00)	(134.263.329,00)	0,00	(549.909.238,00)
3	RSUD Hasan Basry Kandangan	(3.520.025.362,00)	(1.715.602.826,00)	0,00	(5.235.628.188,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	(378.274.012.436,00)	(92.709.339.649,00)	(12.568.978.399,00)	(458.414.373.686,00)
5	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH	(34.284.816.454,00)	(6.232.580.196,00)	(3.000.158.171,00)	(37.517.238.479,00)



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

NO	SKPD	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi (Rp)		31 Desember 2020 (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
6	Badan Penanggulangan Bencana Kesbangpol	(2.013.390,00)	(11.594.920,00)	0,00	(13.608.310,00)
7	Dinas Sosial	(9.931.544,00)	(2.632.379,00)	0,00	(12.563.923,00)
8	Dinas Ketahanan Pangan	(119.123,00)	(90.416,00)	0,00	(209.539,00)
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(3.984.398,00)	(765.525,00)	0,00	(4.749.923,00)
10	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA	(5.484.712,00)	(1.239.515,00)	0,00	(6.724.227,00)
11	Dinas Perhubungan	(4.122.128.354,00)	(364.662.793,00)	(1.312.538.000,00)	(3.174.253.147,00)
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	(39.795.142,00)	(3.394.965,00)	0,00	(43.190.107,00)
13	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKP	(38.889.745,00)	(2.874.601,00)	0,00	(41.764.346,00)
14	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	(1.234.562,00)	(1.063.238,00)	0,00	(2.297.800,00)
15	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	(38.847.595,00)	(15.499.775,00)	0,00	(54.347.370,00)
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(11.840.337,00)	(2.128.986,00)	0,00	(13.969.323,00)
17	Dinas Perikanan	(776.138.366,00)	(87.172.923,00)	0,00	(863.311.289,00)
18	Dinas Pertanian	(4.587.787.340,00)	(420.652.797,00)	0,00	(5.008.440.137,00)
19	Dinas Perdagangan	(343.490.440,00)	(481.207.278,00)	(482.843.361,00)	(341.854.357,00)
20	Bagian Umum	(263.724.762,00)	(26.449.685,00)	0,00	(290.174.447,00)
21	Sekretariat DPRD	(9.089.731,00)	(2.425.282,00)	0,00	(11.515.013,00)
22	Kecamatan Kandungan	(3.610.667,00)	(1.597.352,00)	0,00	(5.208.019,00)
23	Kelurahan Kandungan Utara	(548.746,00)	(91.458,00)	0,00	(640.204,00)
24	Kelurahan Kandungan Barat	(41.242,00)	(494.900,00)	0,00	(536.142,00)
25	Kelurahan Jambu Hilir	(15.313,00)	(183.750,00)	0,00	(199.063,00)
26	Kecamatan Padang Batung	(1.499.062,00)	(695.638,00)	0,00	(2.194.700,00)
27	Kecamatan Loksado	(1.418.181,00)	(109.091,00)	0,00	(1.527.272,00)
28	Kecamatan Sungai Raya	(1.989.584,00)	(487.500,00)	0,00	(2.477.084,00)
29	Kecamatan Simpur	0,00	(288.161,00)	0,00	(288.161,00)
30	Kecamatan Kalumpang	(513.333,00)	(40.000,00)	0,00	(553.333,00)
31	Kecamatan Telaga Langsat	(57.812,00)	(231.247,00)	0,00	(289.059,00)
32	Kecamatan Daha Selatan	(1.775.600,00)	(259.800,00)	0,00	(2.035.400,00)
33	Kecamatan Daha Barat	(3.221.126,00)	(648.868,00)	0,00	(3.869.994,00)
34	Inspektorat Kabupaten	(27.397.540,00)	(4.077.250,00)	0,00	(31.474.790,00)
35	BAPPELITBANGDA	(10.652.510,00)	(1.684.517,00)	0,00	(12.337.027,00)
36	Badan Keuangan Daerah	(39.962.336,00)	(9.008.684,00)	0,00	(48.971.020,00)
	<b>TOTAL</b>	<b>(426.946.280.687,00)</b>	<b>(102.254.170.737,00)</b>	<b>(17.364.595.509,00)</b>	<b>(511.835.855.915,00)</b>



Mutasi akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan selama TA 2020 berasal dari:

1. Mutasi yang mempengaruhi penambahan penyusutan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp102.254.170.737,00 terdiri dari:
  - Penambahan yang berasal dari mutasi masuk SKPD sebesar Rp454.123.678,00.
  - Penambahan yang berasal dari beban penyusutan tahun berjalan sebesar Rp101.800.047.059,00 (lebih lanjut dijelaskan pada Bab Laporan Operasional bagian Beban Penyusutan dan Amortisasi pada laporan ini).
2. Mutasi yang mempengaruhi pengurangan penyusutan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp17.364.595.509,00 terdiri dari:
  - Pengurangan karena adanya mutasi keluar SKPD sebesar Rp454.123.678,00.
  - Pengurangan karena adanya penghapusan sebesar Rp34.925.253,00 pada Dinas Perumahan Rakyat KPLH berupa jaringan lampu Asmaul Husna.
  - Pengurangan karena adanya kapitalisasi aset tetap ke aset induk sebesar Rp12.637.157.923,00 yaitu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp12.568.978.399,00 dan pada Dinas Perumahan Rakyat KPLH sebesar Rp68.179.524,00.
  - Pengurangan karena adanya reklasifikasi ke KIB lain sebesar Rp4.238.388.655,00 pada beberapa SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.3.135 Daftar Penyusutan karena Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan**

No.	SKPD	Reklas ke	Nilai Penyusutan (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	KIB C (Gedung dan Bangunan)	77.578,00	Bangunan RTH (Perubahan regulasi)
2	Dinas Perumahan Rakyat KPLH	KIB C (Gedung dan Bangunan)	2.442.929.716,00	Bangunan taman (Perubahan regulasi)
3	Dinas Perhubungan	KIB B (Peralatan dan Mesin)	1.312.538.000,00	Pengaman jalan
4	Dinas Perdagangan	KIB C (Gedung dan Bangunan)	1.000.000,00	Lampu sorot (perubahan regulasi)
			481.843.361,00	Bangunan RTH (Perubahan regulasi)
<b>Total</b>			<b>4.238.388.655,00</b>	

#### 5.3.1.3.7.4 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp3.745.000,00 dan Rp47.548.753,00. Penyusutan aset tetap



lainnya dilakukan terhadap aset tetap lainnya selain buku, tanaman, dan hewan ternak. Oleh karena itu dilakukan koreksi terhadap saldo aset tetap lainnya pada beberapa SKPD dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.136 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya**

No.	SKPD	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi (Rp)		31 Desember 2020 (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
1	Dinas Pendidikan	(41.260.418,00)	0,00	(41.260.418,00)	0,00
2	Dinas Sosial	0,00	(2.500.000,00)	0,00	(2.500.000,00)
3	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	(793.335,00)	0,00	(793.335,00)	0,00
4	Sekretariat Daerah	(1.245.000,00)	0,00	0,00	(1.245.000,00)
5	Kecamatan Daha Selatan	(4.250.000,00)	0,00	(4.250.000,00)	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>(47.548.753,00)</b>	<b>(2.500.000,00)</b>	<b>(46.303.753,00)</b>	<b>(3.745.000,00)</b>

Mutasi akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya selama TA 2020 berasal dari:

1. Penambahan karena adanya reklasifikasi penyusutan dari KIB B (Peralatan dan Mesin) sebesar Rp2.500.000,00 pada Dinas Sosial berupa tanaman hias.
2. Pengurangan karena adanya reklasifikasi penyusutan ke KIB B (Peralatan dan Mesin) sebesar Rp46.303.753,00 pada SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.3.137 Daftar Reklasifikasi Penyusutan dari Aset Tetap Lainnya**

No.	SKPD	Reklas Ke	Nilai Penyusutan (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	KIB B (Peralatan dan Mesin)	41.260.418,00	Peralatan Olahraga (perubahan regulasi)
2	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	KIB B (Peralatan dan Mesin)	793.335,00	Peralatan Olahraga (perubahan regulasi)
3	Kecamatan Daha Selatan	KIB B (Peralatan dan Mesin)	4.250.000,00	Peralatan Olahraga (perubahan regulasi)
<b>TOTAL</b>			<b>46.303.753,00</b>	

#### 5.3.1.4 Dana Cadangan

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak mempunyai saldo atas Dana Cadangan pada Tahun Anggaran 2019 dan 2020.

#### 5.3.1.5 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp8.351.368.121,00 dan Rp8.041.216.848,00. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2020 naik sebesar Rp310.151.273,00 atau 3,86% dari total Aset Lainnya Tahun 2019. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh adanya penambahan pada aset tidak berwujud. Saldo Aset Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain serta Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:



**Tabel 5.3.138 Ringkasan Aset Lainnya**

Aset Lainnya	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Aset Tidak Berwujud	5.385.856.330,11	4.477.642.830,11
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.983.076.650,11)	(2.430.126.129,11)
<b>Aset Tak Berwujud Neto</b>	<b>2.402.779.680,00</b>	<b>2.047.516.701,00</b>
Aset Lain-lain	17.916.176.793,00	18.292.630.093,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(11.967.588.352,00)	(12.298.929.946,00)
<b>Aset Lain-lain Neto</b>	<b>5.948.588.441,00</b>	<b>5.993.700.147,00</b>
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>8.351.368.121,00</b>	<b>8.041.216.848,00</b>

#### 5.3.1.5.1 Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp5.385.856.330,11 dan Rp4.477.642.830,11 merupakan aset dalam bentuk *software* dan dokumen kajian hasil penelitian maupun pendataan. Saldo untuk Aset Tidak Berwujud bertambah sebesar Rp908.213.500,00 atau 20,28% dari saldo per 31 Desember 2019 dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.3.139 Rincian Aset Tidak Berwujud per SKPD**

NO	SKPD	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	272.681.680,11	272.681.680,11
2	Dinas Kesehatan	273.106.000,00	273.106.000,00
3	RSUD Hasan Basry Kandangan	85.309.950,00	85.309.950,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2.005.200.400,00	1.204.194.900,00
5	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH	442.539.000,00	442.539.000,00
6	Dinas Sosial	9.850.000,00	9.850.000,00
7	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	5.000.000,00	5.000.000,00
8	Dinas Perhubungan	10.000.000,00	10.000.000,00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	111.708.000,00	13.500.000,00
10	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKP	14.630.000,00	14.630.000,00
11	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	190.759.000,00	190.759.000,00
12	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	14.850.000,00	14.850.000,00
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	349.067.000,00	349.067.000,00
14	Dinas Perdagangan	28.950.000,00	28.950.000,00
15	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	57.400.000,00	48.400.000,00
16	Bagian Protokol dan Kehumasan	33.720.000,00	33.720.000,00
17	Bagian Organisasi	39.213.000,00	39.213.000,00
18	BAPPELITBANGDA	512.760.000,00	512.760.000,00
19	Badan Keuangan Daerah	744.602.300,00	744.602.300,00
20	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	184.510.000,00	184.510.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>5.385.856.330,11</b>	<b>4.477.642.830,11</b>



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Berikut disajikan rincian jenis aset tidak berwujud pada masing-masing SKPD.

**Tabel 5.3.140 Daftar Rincian Jenis Aset Tidak Berwujud**

No.	SKPD	Nama Barang	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	Software	174.865.680,11	272.681.680,11
		Microsoft Windows Server/Microsoft Office Standard	97.816.000,00	
2	Dinas Kesehatan	Masterplan Rumah Sakit Daha Sejahtera	273.106.000,00	273.106.000,00
3	RSUD Hasan Basry Kandangan	Software/Aplikasi	34.798.500,00	85.309.950,00
		Aplikasi Mobile Android ROKET	50.511.450,00	
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Masterplan RDTRK	585.946.900,00	2.005.200.400,00
		Dokumen UPL UKL Pembangunan Drainase	618.248.000,00	
		DED saluran drainase perkotaan Kandangan	267.800.000,00	
		Masterplan drainase	225.014.000,00	
		Masterplan air minum	239.699.000,00	
		RAD AMPL Kab. HSS	68.492.500,00	
5	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH	AreGIS	49.713.000,00	442.539.000,00
		Pendataan RTH	182.175.000,00	
		Pendataan PJU	210.651.000,00	
6	Dinas Sosial	Aplikasi Pengelolaan Data PMKS-PSKS	9.850.000,00	9.850.000,00
7	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Software antivirus	5.000.000,00	5.000.000,00
8	Dinas Perhubungan	Aplikasi SIM-PKB	10.000.000,00	10.000.000,00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	Software Video Editing	13.500.000,00	111.708.000,00
		Aplikasi e-commerce	98.208.000,00	
10	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKP	Software Sistem Informasi	14.630.000,00	14.630.000,00
11	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Software	39.330.500,00	190.759.000,00
		Software Perijinan	50.598.500,00	
		Software Pelayanan Perijinan	100.830.000,00	
12	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	Aplikasi Sipandu wisata	14.850.000,00	14.850.000,00
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Software	35.460.000,00	349.067.000,00
		Software Website Sistem Manajemen Lingkungan	13.770.000,00	
		E-BOOK/ DIGITAL LIBRARY	299.837.000,00	
14	Dinas Perdagangan	Designer Aplikasi	15.950.000,00	28.950.000,00
		Aplikasi Sidodol dan Sihapok	13.000.000,00	
15	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Database Hasil-hasil Pembangunan	48.400.000,00	57.400.000,00
		Software windows	9.000.000,00	
16	Bagian Protokol dan Kehumasan	Hosting (masternet.web) Sistem Informasi Protokoler	28.720.000,00	33.720.000,00
		Aplikasi Sistem Informasi	5.000.000,00	



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

No.	SKPD	Nama Barang	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
17	Bagian Organisasi	Aplikasi SAKIP	39.213.000,00	39.213.000,00
18	BAPPELITBANGD A	Database Sistem Informasi SDA dan LH	98.125.000,00	512.760.000,00
		Software	366.375.000,00	
		Database Profil Geologi Sumber Daya Mineral	48.260.000,00	
19	Badan Keuangan Daerah/BPKPD	Window, Software, Oracle Web	374.269.300,00	744.602.300,00
		Software	162.633.000,00	
		Modul	7.250.000,00	
		Aplikasi BPHTB Online	200.450.000,00	
20	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Software Kepegawaian	184.510.000,00	184.510.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>5.385.856.330,11</b>

Adapun mutasi aset tidak berwujud selama TA 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.3.141 Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud**

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal Per 1 Januari 2020	4.477.642.830,11
Penambahan Aset Lainnya - ATB Tahun 2020	908.213.500,00
Pengurangan Aset Lainnya - ATB Tahun 2020	0,00
<b>Saldo Akhir Per 31 Desember 2020</b>	<b>5.385.856.330,11</b>

**A. Penambahan Aset Tidak Berwujud**

Penambahan aset tidak berwujud selama TA 2020 sebesar Rp908.213.500,00 berasal dari:

1. Belanja modal pada LRA yang langsung menambah nilai asetnya sebesar Rp107.208.000,00 dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.3.142 Rincian Belanja Modal Aset Tidak Berwujud per SKPD**

No	Nama SKPD	Jumlah (Rp)
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	98.208.000,00
2	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	9.000.000,00
<b>Total</b>		<b>107.208.000,00</b>

2. Reklasifikasi dari aset tetap sebesar Rp801.005.500,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berupa:

- Dari aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp267.800.000,00 berupa DED (*Detail Engineering Design*) saluran drainase perkotaan Kandangan.
- Dari aset tetap KDP sebesar Rp533.205.500,00 berupa *masterplan* drainase sebesar Rp225.014.000,00; *masterplan* air minum sebesar Rp239.699.000,00;



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

dan RAD AMPL (Rencana Aksi Daerah penyediaan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan) Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar Rp68.492.500,00.

## B. Pengurangan Aset Tidak Berwujud

Tidak ada Pengurangan aset tidak berwujud selama tahun 2020.

### 5.3.1.5.1.1 Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Saldo akumulasi amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp2.983.076.650,11 dan Rp2.430.126.129,11 dengan rincian mutasi per SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.3.143 Rincian Mutasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Per SKPD**

No.	SKPD	31 Desember 2019 (Rp)	Penambahan (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	(210.188.064,11)	(32.605.336,00)	(242.793.400,11)
2	Dinas Kesehatan	(29.586.483,00)	(27.310.600,00)	(56.897.083,00)
3	RSUD Hasan Basry Kandangan	(45.212.062,00)	(27.470.025,00)	(72.682.087,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	(254.471.309,00)	(183.267.653,00)	(437.738.962,00)
5	Dinas Perumahan Rakyat KPLH	(137.534.883,00)	(39.282.600,00)	(176.817.483,00)
6	Dinas Sosial	(6.840.278,00)	(3.009.722,00)	(9.850.000,00)
7	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	(1.111.111,00)	(1.666.666,00)	(2.777.777,00)
8	Dinas Perhubungan	(555.556,00)	(3.333.334,00)	(3.888.890,00)
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	(13.500.000,00)	(2.728.000,00)	(16.228.000,00)
10	Dinas Tenaga Kerja, KUKP	(14.630.000,00)	0,00	(14.630.000,00)
11	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	(165.551.500,00)	(25.207.500,00)	(190.759.000,00)
12	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	(412.500,00)	(4.950.000,00)	(5.362.500,00)
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(207.034.500,00)	(90.199.166,00)	(297.233.666,00)
14	Dinas Perdagangan	(6.120.833,00)	(9.650.001,00)	(15.770.834,00)
15	Bagian Pengadaan Barang / Jasa	(48.400.000,00)	(2.250.000,00)	(50.650.000,00)
16	Bagian Protokol dan Kehumasan	(32.470.000,00)	(1.250.000,00)	(33.720.000,00)
17	Bagian Organisasi	(29.409.750,00)	(9.803.250,00)	(39.213.000,00)
18	BAPPELITBANGDA	(512.760.000,00)	0,00	(512.760.000,00)
19	Badan Keuangan Daerah/BPKPD	(551.893.968,00)	(66.900.000,00)	(618.793.968,00)
20	BKD dan Diklat	(162.443.332,00)	(22.066.668,00)	(184.510.000,00)
<b>TOTAL</b>		<b>(2.430.126.129,11)</b>	<b>(552.950.521,00)</b>	<b>(2.983.076.650,11)</b>

Penambahan amortisasi aset tidak berwujud selama Tahun 2020 dipengaruhi oleh beban amortisasi selama tahun 2020 sebesar Rp552.950.521,00.



### 5.3.1.5.2 Aset Lain-lain

Aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp17.916.176.793,00 dan Rp18.292.630.093,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.144 Rincian Aset Lain-lain**

Aset Lain-lain	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Aset Lain-lain yang Akan Dipindahtangankan	15.265.288.194,00	15.265.288.194,00
Aset Lain-lain Rusak Berat	2.650.888.599,00	3.027.341.899,00
<b>Jumlah</b>	<b>17.916.176.793,00</b>	<b>18.292.630.093,00</b>

#### 5.3.1.5.2.1 Aset Lain-lain yang Akan Dipindahtangankan

Aset lain-lain yang akan dipindahtangankan merupakan aset tetap yang direklasifikasi ke Aset Lain-Lain berupa aset-aset yang pengadaannya ada di beberapa SKPD namun sampai dengan tanggal neraca belum dilakukan proses hibah ke Organisasi Kemasyarakatan.

Saldo aset lain-lain yang akan dipindahtangankan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp15.265.288.194,00, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.145 Rincian Aset Lain-lain yang Akan Dipindahtangankan**

NO	SKPD	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	5.240.000,00	5.240.000,00	Tanah urugan sekolah yang bukan milik Pemda
2	Dinas Pertanian	15.145.973.194,00	15.145.973.194,00	Jalan Usaha Tani yang tanahnya bukan merupakan Tanah Milik Pemkab
3	Kecamatan Kalumpang	114.075.000,00	114.075.000,00	Pengurugan lapangan sepak bola yang bukan milik Pemda
<b>TOTAL</b>		<b>15.265.288.194,00</b>	<b>15.265.288.194,00</b>	

#### 5.3.1.5.2.2 Aset Lain-lain Rusak Berat

Aset lain-lain rusak berat yaitu aset tetap yang telah diusulkan penghapusan dan tidak digunakan lagi untuk operasional karena tergolong kondisi rusak berat. Saldo aset lain-lain rusak berat per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp2.650.888.599,00 dan Rp3.027.341.899,00. Saldo aset lain-lain rusak berat



turun sebesar Rp376.453.300,00 atau 12,44%. Aset ini dalam kondisi rusak berat dan dihentikan penggunaannya dalam menunjang tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.146 Rincian Aset Lain-lain Rusak Berat per SKPD**

NO	SKPD	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	477.945.000,00	477.945.000,00
2	Dinas Kesehatan	114.814.999,00	430.693.299,00
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	0,00	9.000.000,00
4	Dinas Pertanian	1.974.093.600,00	1.974.093.600,00
5	Bagian Umum	75.035.000,00	75.035.000,00
6	Kecamatan Loksado	9.000.000,00	9.000.000,00
7	Inspektorat Kabupaten	0,00	51.575.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.650.888.599,00</b>	<b>3.027.341.899,00</b>

Adapun mutasi Aset Lain-lain Rusak Berat selama TA 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.3.147 Rincian Mutasi Aset Lain-lain Rusak Berat**

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal Per 1 Januari 2020	3.027.341.899,00
Penambahan Aset Lain-lain Rusak Berat Tahun 2020	0,00
Pengurangan Aset Lain-lain Rusak Berat Tahun 2020	(376.453.300,00)
<b>Saldo Akhir Per 31 Desember 2020</b>	<b>2.650.888.599,00</b>

**A. Penambahan Aset Lain-lain Rusak Berat**

Tidak ada penambahan aset lain-lain rusak berat selama tahun 2020.

**B. Pengurangan Aset Lain-lain Rusak Berat**

Pengurangan Aset Lain-lain Rusak Berat selama TA 2020 sebesar Rp376.453.300,00 disebabkan karena adanya penghapusan atas barang-barang dengan kondisi rusak berat pada beberapa SKPD sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berupa mobil pusling dan ambulans sebesar Rp315.878.300,00.
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berupa meubelair sebesar Rp9.000.000,00.
3. Inspektorat Kabupaten dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah



dari Daftar Barang Pengguna Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berupa meubelair sebesar Rp51.575.000,00.

### 5.3.1.5.2.3 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

#### 1. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain yang Akan Dipindahtanggankan

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp9.454.258.786,00.

#### 2. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Masa Manfaat dan Penyusutan Barang Milik Daerah, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melakukan perhitungan penyusutan aset tetap, termasuk aset tetap yang telah diusulkan penghapusan dan dibukukan sebagai aset lain-lain rusak berat.

Saldo akumulasi penyusutan aset lain-lain rusak berat per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp2.513.329.566,00 dan Rp2.844.671.160,00. Saldo akumulasi penyusutan aset rusak berat selama Tahun 2020 turun sebesar Rp331.341.594,00 atau 11,65% dengan rincian mutasi per SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.3 .148 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat Per SKPD**

NO	SKPD	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi (Rp)		31 Desember 2020 (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
1	Dinas Pendidikan	(477.945.000,00)	0,00	0,00	(477.945.000,00)
2	Dinas Kesehatan	(407.240.918,00)	0,00	(315.878.300,00)	(91.362.618,00)
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	(5.750.002,00)	0,00	(5.750.002,00)	0,00
4	Dinas Pertanian	(1.863.701.235,00)	0,00	0,00	(1.863.701.235,00)
5	Bagian Umum	(71.320.713,00)	0,00	0,00	(71.320.713,00)
6	Kecamatan Loksado	(9.000.000,00)	0,00	0,00	(9.000.000,00)
7	Inspektorat Kabupaten	(9.713.292,00)	0,00	(9.713.292,00)	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>(2.844.671.160,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(331.341.594,00)</b>	<b>(2.513.329.566,00)</b>

Mutasi akumulasi penyusutan aset lain-lain rusak berat selama tahun 2020 dipengaruhi oleh pengurangan yang berasal dari penghapusan Aset Rusak Berat.

### 5.3.2 KEWAJIBAN

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp74.326.063.069,00 dan Rp90.951.033.325,00. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2020 turun sebesar Rp16.624.970.256,00 atau 18,28% dari saldo



Kewajiban Tahun 2019. Saldo kewajiban tersebut terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.149 Ringkasan Kewajiban Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

Kewajiban	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Kewajiban Jangka Pendek	74.326.063.069,00	90.951.033.325,00
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>74.326.063.069,00</b>	<b>90.951.033.325,00</b>

### 5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Akron ini menggambarkan jumlah kewajiban daerah yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun terhitung sejak tanggal 31 Desember 2020. Jumlah Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp74.326.063.069,00 dan sebesar Rp90.951.033.325,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.150 Rincian Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	12.427.956,00	7.103.318,00
Pendapatan Diterima Dimuka	141.730.088,00	55.081.695,00
Utang Belanja	24.402.796.367,00	20.506.605.558,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	49.769.108.658,00	70.382.242.754,00
<b>Jumlah Kewajiban</b>	<b>74.326.063.069,00</b>	<b>90.951.033.325,00</b>

#### 5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2020 merupakan bagian dari Kas yang menjadi hak (klaim) pihak ketiga. Saldo Utang PFK per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp12.427.956,00 dan Rp7.103.318,00.

Utang PFK berasal dari kewajiban pemotongan dan penyetoran pajak, penerimaan Kas Daerah yang bersifat non anggaran, serta penerimaan lain yang menjadi hak pihak lain. Utang PFK terdiri atas utang PFK pada Bendahara Umum Daerah, utang PFK pada bendahara pengeluaran SKPD, dan utang PFK pada Bendahara Dana BOS. Utang PFK pada Bendahara Dana BOS per 31 Desember 2020 sebesar Rp12.427.956,00,00. Saldo tersebut merupakan utang pajak Dana BOS yang terdapat pada 3 SDN dan 13 SMPN di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang belum disetor oleh Bendahara Dana BOS sampai Tahun Anggaran berakhir. Atas utang pajak tersebut, penyetoran dilakukan pada TA 2021 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

**Tabel 5.3.151 Rincian Utang Pajak Dana BOS SD TA 2020 dan Tanggal Penyetoran**

NO	Nama Sekolah	Kecamatan	Utang Pajak (Rp)	Tanggal Setor
1	SDN BAKARUNG TENGAH	Angkinang	1.460.264,00	16-Jan-21
2	SDN MUNING DALAM	Daha Selatan	539.087,00	15-Jan-21
3	SDN KANDANGAN KOTA 1	Kandangan	127.273,00	05-Feb-21
4	SMPN 4 KANDANGAN	Kandangan	33.000,00	14-Jan-21
5	SMPN 6 KANDANGAN	Kandangan	637.000,00	20-Jan-21
6	SMPN 1 PADANG BATUNG	Padang Batung	70.000,00	22-Jan-21
7	SMPN 2 PADANG BATUNG	Padang Batung	75.000,00	11-Jan-21
8	SMPN 2 LOKSADO	Loksado	481.982,00	20-Jan-21
9	SMPN 1 SUNGAI RAYA	Sungai Raya	2.677.723,00	22-Jan-21
10	SMPN 1 SIMPUR	Simpur	97.500,00	14-Jan-21
11	SMPN 1 DAHA SELATAN	Daha Selatan	504.600,00	19-Jan-21
12	SMPN 3 DAHA SELATAN	Daha Selatan	887.273,00	13-Jan-21
13	SMPN 4 DAHA SELATAN	Daha Selatan	200.000,00	13-Jan-21
			1.755.474,00	21-Jan-21
14	SMPN 7 DAHA SELATAN	Daha Selatan	450.000,00	13-Jan-21
15	SMPN 4 DAHA UTARA	Daha Utara	2.086.780,00	15-Jan-21
16	SMPN 1 DAHA BARAT	Daha Barat	345.000,00	11-Jan-21
<b>TOTAL</b>			<b>12.427.956,00</b>	

### 5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah selisih penerimaan pembayaran dengan hak yang telah timbul pada Pemerintah Daerah. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp141.730.088,00 dan Rp55.081.695,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

**Tabel 5.3.152 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka**

Pendapatan Diterima Dimuka	31 Desember 2019 (Rp)	Pengurangan (Rp)	Penambahan (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
Pajak Reklame	19.156.695,00	19.156.695,00	96.355.088,00	96.355.088,00
Retribusi Sewa Tanah dan Bangunan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Retribusi Sewa ATM BLUD	29.925.000,00	28.350.000,00	37.800.000,00	39.375.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>55.081.695,00</b>	<b>53.506.695,00</b>	<b>140.155.088,00</b>	<b>141.730.088,00</b>

- Pendapatan Diterima Dimuka atas Pajak Reklame yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu dan penyetorannya melalui Bendahara Penerimaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar Rp96.355.088,00.
- Pendapatan Diterima Dimuka atas retribusi pemakaian kekayaan daerah



berupa sewa tanah dan bangunan oleh PT Telkomsel dengan periode sewa 17 Juli 2020 sampai dengan 17 Juli 2024. Pembayaran pada tahun 2020 adalah pembayaran untuk periode 17 Juli 2020 s.d 17 Juli 2021, dengan nilai sewa Rp1.000.000,00 per bulan.

- Terdapat pengurangan pendapatan diterima dimuka atas sewa atm pada RSUD H. Hasan Basry sebesar Rp28.350.000,00 yaitu sudah selesainya masa sewa atm Bank Kalsel (jangka waktu 3 tahun sejak 1 Juli 2017 sampai dengan 1 Juli 2020) sebesar Rp9.450.000,00 dan masa sewa atm BRI (jangka waktu sewa 2 tahun periode 30 Januari 2019 sampai dengan 30 Januari 2021) sebesar Rp18.900.000,00. Selain itu terdapat penambahan sewa atm BNI sebesar Rp37.800.000,00 selama 3 tahun (1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2022 dengan nilai sewa sebesar Rp56.700.000,00).

### 5.3.2.13 Utang Belanja

Utang Belanja merupakan kewajiban yang telah timbul yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum diselesaikan pembayarannya. Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp24.402.796.367,00 dan Rp20.506.605.558,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.153 Rincian Mutasi Utang Belanja per SKPD**

SKPD	31 Desember 2019 (Rp)	Koreksi (Rp)	Mutasi (Rp)		31 Desember 2020 (Rp)
			Pelunasan	Penambahan	
BLUD RSUD H. Hasan Basry	18.922.789.508,00	0,00	18.922.789.508,00	11.159.854.325,00	11.159.854.325,00
BLUD Puskesmas Kandangan	0,00	0,00	0,00	93.871.500,00	93.871.500,00
BLUD Puskesmas Negara	0,00	0,00	0,00	113.676.038,00	113.676.038,00
BLUD RS Daha Sejahtera	0,00	0,00	0,00	4.949.497.370,00	4.949.497.370,00
Dinas Kesehatan	1.263.551.250,00	(28.170.000,00)	1.235.381.250,00	6.572.285.784,00	6.572.285.784,00
PPKD	320.264.800,00	0,00	0,00	0,00	320.264.800,00
DPRD	0,00	952.349.254,00	952.349.254,00	1.193.346.550,00	1.193.346.550,00
<b>Jumlah</b>	<b>20.506.605.558,00</b>	<b>924.179.254,00</b>	<b>21.110.520.012,00</b>	<b>24.082.531.567,00</b>	<b>24.402.796.367,00</b>

#### 1. Utang BLUD

Saldo Utang BLUD per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp16.316.899.233,00 dan Rp18.922.789.508,00. Utang BLUD terdiri dari beberapa BLUD sebagai berikut:

**Tabel 5.3.154 Rincian Utang BLUD**

Utang BLUD	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
RSUD H. Hasan Basry	11.159.854.325,00	18.922.789.508,00
Puskesmas Kandangan	93.871.500,00	0,00
Puskesmas Negara	113.676.038,00	0,00
RS Daha Sejahtera	4.949.497.370,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>16.316.899.233,00</b>	<b>18.922.789.508,00</b>



**a. Utang BLUD RSUD H. Hasan Basry**

Saldo utang belanja pada BLUD RSUD Hasan Basry per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp11.159.854.325,00 dan Rp18.922.789.508,00. Utang belanja Tahun 2019 sudah diselesaikan/dibayarkan seluruhnya. Sedangkan utang belanja untuk tahun 2020 meliputi utang belanja obat-obatan pada 34 distributor, utang belanja alat kesehatan, utang belanja makan dan minum pasien, dan utang belanja jasa layanan (Covid, BPJS dan Umum) dengan rincian mutasi sebagai berikut:

**Tabel 5.3.155 Rincian Utang Belanja RSUD H. Hasan Basry**

RSUD BLUD H. Hasan Basry	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi (Rp)		31 Desember 2020 (Rp)
		Pelunasan	Penambahan	
Utang Beban Obat-obatan	11.156.424.887,00	11.156.424.887,00	2.105.579.912,00	2.105.579.912,00
Utang Beban Alat Kesehatan	0,00	0,00	138.160.000,00	138.160.000,00
Utang Beban Makan dan Minum Pasien	162.995.075,00	162.995.075,00	12.157.350,00	12.157.350,00
Utang Beban Jasa Layanan	7.603.369.546,00	7.603.369.546,00	8.903.957.063,00	8.903.957.063,00
<b>Jumlah</b>	<b>18.922.789.508,00</b>	<b>18.922.789.508,00</b>	<b>11.159.854.325,00</b>	<b>11.159.854.325,00</b>

**b. Utang BLUD Puskesmas Kandangan**

Saldo utang belanja pada BLUD Puskesmas Kandangan per 31 Desember 2020 sebesar Rp93.871.500,00. Utang tersebut merupakan utang jasa pelayanan kesehatan.

**Tabel 5.3.156 Rincian Utang BLUD Puskesmas Kandangan**

BLUD Puskesmas Kandangan	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2020 (Rp)
		Pelunasan	Penambahan	
Jasa Pelayanan Umum	0,00	0,00	2.766.000,00	2.766.000,00
BPJS Rawat Inap dan Rawat Jalan	0,00	0,00	5.418.000,00	5.418.000,00
BPJS Kapitasi	0,00	0,00	85.687.500,00	85.687.500,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.871.500,00</b>	<b>93.871.500,00</b>

**c. Utang BLUD Puskesmas Negara**

Saldo utang belanja pada BLUD Puskesmas Negara per 31 Desember 2020 sebesar Rp113.676.038,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.157 Rincian Utang Belanja Puskesmas Negara**

BLUD Puskesmas Negara	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2020 (Rp)
		Pelunasan	Penambahan	
Jasa Pelayanan Umum	0,00	0,00	1.878.900,00	1.878.900,00
BPJS Rawat Inap	0,00	0,00	23.250.000,00	23.250.000,00
BPJS Rawat Jalan	0,00	0,00	3.102.000,00	3.102.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

BLUD Puskesmas Negara	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2020 (Rp)
		Pelunasan	Penambahan	
BPJS Kapitasi	0,00	0,00	85.445.138,00	85.445.138,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.676.038,00</b>	<b>113.676.038,00</b>

**d. Utang BLUD RS Daha Sejahtera**

Saldo utang belanja pada BLUD RS Daha Sejahtera per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.949.497.370,00. Utang tersebut merupakan utang jasa pelayanan kesehatan.

**Tabel 5.3.158 Rincian Utang BLUD RS Daha Sejahtera**

BLUD RS Daha Sejahtera	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi		31 Desember 2020 (Rp)
		Pelunasan	Penambahan	
Klaim Covid	0,00	0,00	4.704.133.500,00	4.704.133.500,00
Klaim BPJS	0,00	0,00	227.999.300,00	227.999.300,00
Retribusi Umum	0,00	0,00	17.364.570,00	17.364.570,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.949.497.370,00</b>	<b>4.949.497.370,00</b>

**2. Dinas Kesehatan**

Saldo Utang Belanja pada Dinas Kesehatan per 31 Desember 2020 dan 2019 sebesar Rp6.572.285.784,00 dan Rp1.263.551.250,00. Terdapat koreksi saldo awal sebesar Rp28.170.000,00 pada utang jasa medis/pelayanan karena kesalahan penjumlahan (lebih catat). Utang belanja TA 2019 sudah dibayarkan sepenuhnya oleh Dinas Kesehatan. Utang belanja per 31 Desember 2020 meliputi utang belanja sebagai berikut:

**Tabel 5.3.159 Rincian Utang Belanja pada Dinas Kesehatan**

Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi (Rp)			31 Desember 2020 (Rp)
		Koreksi	Pelunasan	Penambahan	
Utang Honorarium Non PNS	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00
Utang Jasa Medis/Pelayanan	1.233.217.650,00	(28.170.000,00)	1.205.047.650,00	71.622.000,00	71.622.000,00
Utang Makan/Minum Pasien	18.333.600,00	0,00	18.333.600,00	6.913.700,00	6.913.700,00
Utang Insentif Tenaga Kesehatan Covid	0,00	0,00	0,00	6.493.750.084,00	6.493.750.084,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.263.551.250,00</b>	<b>(28.170.000,00)</b>	<b>1.235.381.250,00</b>	<b>6.572.285.784,00</b>	<b>6.572.285.784,00</b>

**3. PPKD**

Saldo utang Belanja per 31 Desember 2020 dan 2019 pada PPKD sebesar Rp320.264.800,00.

Utang transfer bantuan keuangan kepada desa sebesar Rp320.264.800,00 merupakan dana desa tahap II (40%) tahun 2019 pada Desa Hamak Utara yang tidak disalurkan karena tidak adanya rekomendasi penyaluran dana



oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa kepada Badan Keuangan Daerah. Sampai dengan 31 Desember 2020 dana tersebut masih ada di Kas Daerah karena belum ada keputusan dari KPPN untuk mengembalikan dana tersebut atau mengurangi transfer dana desa. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai kewajiban atas transfer Dana Desa per 31 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.1.160 Rincian Utang Belanja Transfer Dana Desa**

Uraian	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi (Rp)		31 Desember 2020 (Rp)
		Pelunasan	Penambahan	
Utang Belanja Transfer	320.264.800,00	0,00	0,00	320.264.800,00
<b>Jumlah</b>	<b>320.264.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.264.800,00</b>

#### 4. DPRD

Saldo utang belanja pada DPRD per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp1.193.346.550,00 dan Rp0,00. Saldo tersebut merupakan utang belanja pegawai dan tunjangan anggota DPRD bulan Desember Tahun 2020 yang sudah dibayarkan pada bulan Januari 2021.

**Tabel 5.1.161 Rincian Mutasi Utang Belanja Pegawai pada DPRD**

Utang Belanja Pegawai	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi (Rp)			31 Desember 2020 (Rp)
		Koreksi Saldo Awal	Pelunasan	Penambahan	
Belanja Gaji dan Tunjangan	0,00	637.349.254,00	637.349.254,00	878.346.550,00	878.346.550,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	0,00	315.000.000,00	315.000.000,00	315.000.000,00	315.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>952.349.254,00</b>	<b>952.349.254,00</b>	<b>1.193.346.550,00</b>	<b>1.193.346.550,00</b>

#### 5.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp49.769.108.658,00 dan Rp70.382.242.754,00. Saldo utang jangka pendek lainnya Tahun 2020 merupakan nilai kurang bayar atas transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) dari Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2021 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3.162 Rincian Lebih Bayar Transfer Pemerintah Pusat**

Jenis Pajak Lebih Bayar sesuai PMK Nomor 25 Tahun 2021	Tahun (Rp)		Jumlah (Rp)
	2018	2019	
PPh Pasal 21, 25/29	1.022.621.333,00	0,00	1.022.621.333,00
PBB Bagian Daerah	14.575.140.370,00	0,00	14.575.140.370,00
PBB Biaya Pemungutan	1.194.978.086,00	0,00	1.194.978.086,00
SDA Minyak dan Gas Bumi	882.056.402,00	716.483.900,00	1.598.540.302,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Jenis Pajak Lebih Bayar sesuai PMK Nomor 25 Tahun 2021	Tahun (Rp)		Jumlah (Rp)
	2018	2019	
SDA Minerba Iuran Tetap	441.945.638,00	0,00	441.945.638,00
SDA Minerba Royalti	30.935.882.929,00	0,00	30.935.882.929,00
<b>Total</b>	<b>49.052.624.758,00</b>	<b>716.483.900,00</b>	<b>49.769.108.658,00</b>

**Tabel 5.3.163 Rincian Mutasi Utang Transfer pemerintah Pusat**

Utang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2019 (Rp)	Mutasi (Rp)		31 Desember 2020 (Rp)
		Pelunasan	Penambahan	
Lebih Bayar Transfer	70.382.242.754,00	21.329.617.996,00	716.483.900,00	49.769.108.658,00
<b>Jumlah</b>	<b>70.382.242.754,00</b>	<b>21.329.617.996,00</b>	<b>716.483.900,00</b>	<b>49.769.108.658,00</b>

### 5.3.3 EKUITAS

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah, meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya. Perubahan Ekuitas adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.3.164 Rincian Ekuitas Dana**

URAIAN	2020 (Rp)	2019 (Rp)
EKUITAS AWAL	3.279.100.874.054,66	2.779.727.516.432,16
SURPLUS/DEFISIT - LO	87.031.638.224,93	306.646.959.739,47
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
Koreksi Ekuitas	44.867.799.709,78	192.726.397.883,03
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>3.411.000.311.989,37</b>	<b>3.279.100.874.054,66</b>

Surplus/(Defisit) - LO berasal dari selisih Pendapatan Operasional dengan Beban ditambah dengan Defisit dari Kegiatan Non Operasional. Lebih terperinci mengenai Pendapatan dan Beban Operasional dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Operasional.

Koreksi Ekuitas merupakan koreksi atas ekuitas awal yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar. Lebih terperinci mengenai perubahan ekuitas dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Perubahan Ekuitas.



#### 5.4 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional yang penyajiannya dibandingkan dengan periode sebelumnya.

##### 5.4.1 PENDAPATAN

Pendapatan LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam TA 2020 dan 2019 sebagai berikut:

**Tabel 5.4.1 Ringkasan Pendapatan – LO**

Pendapatan - LO	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2020	Tahun 2019		
Pendapatan Asli Daerah	211.711.143.073,35	170.810.521.781,54	40.900.621.291,81	23,95
Pendapatan Transfer	1.021.090.805.779,00	1.183.165.715.347,00	(162.074.909.568,00)	(13,70)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	54.264.350.806,00	54.726.501.619,00	(462.150.813,00)	(0,84)
<b>Jumlah</b>	<b>1.287.066.299.658,35</b>	<b>1.408.702.738.747,54</b>	<b>(121.636.439.089,19)</b>	<b>(8,63)</b>

Realisasi masing-masing akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

##### 5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pos ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode TA 2020 dan TA 2019, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.4.2 Rincian Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah - LO	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2020	Tahun 2019		
Pendapatan Pajak daerah	12.018.222.450,00	14.461.412.734,00	(2.443.190.284,00)	(16,89)
Pendapatan Retribusi Daerah	6.462.892.699,00	15.685.325.272,00	(9.222.432.573,00)	(58,80)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.252.524.957,78	3.325.531.228,00	1.926.993.729,78	57,95
Lain-lain PAD yang Sah	187.977.502.966,57	137.338.252.547,54	50.639.250.419,03	36,87
<b>Jumlah</b>	<b>211.711.143.073,35</b>	<b>170.810.521.781,54</b>	<b>40.900.621.291,81</b>	<b>23,95</b>

Realisasi masing-masing jenis PAD TA 2020 dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

##### 5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pemungutan penerimaan dan pengelolaan pendapatan Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Rincian realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

**Tabel 5.4.3 Rincian Pendapatan Pajak Daerah**

Pendapatan Pajak Daerah	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2020	Tahun 2019		
Pajak Hotel	174.873.351,00	244.281.584,00	(69.408.233,00)	(28,41)
Pajak Restoran	1.865.524.883,00	2.406.680.650,00	(541.155.767,00)	(22,49)
Pajak Hiburan	17.130.000,00	60.130.000,00	(43.000.000,00)	(71,51)
Pajak Reklame	148.437.107,00	63.216.046,00	85.221.061,00	134,81
Pajak Penerangan Jalan	6.281.251.219,00	6.785.284.981,00	(504.033.762,00)	(7,43)
Pajak Parkir	11.377.100,00	11.515.000,00	(137.900,00)	(1,20)
Pajak Air Tanah	10.140.000,00	10.080.000,00	60.000,00	0,60
Pajak Sarang Burung Walet	5.471.250,00	9.014.975,00	(3.543.725,00)	(39,31)
Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.205.528.916,00	2.930.610.170,00	(1.725.081.254,00)	(58,86)
PBB Perdesaan dan Perkotaan	1.318.780.275,00	1.268.962.739,00	49.817.536,00	3,93
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	979.708.349,00	671.636.589,00	308.071.760,00	45,87
<b>Jumlah</b>	<b>12.018.222.450,00</b>	<b>14.461.412.734,00</b>	<b>(2.443.190.284,00)</b>	<b>(16,89)</b>

Pendapatan Pajak Daerah di LO sebesar Rp12.018.222.450,00 memiliki nilai yang berbeda dengan yang disajikan di LRA sebesar Rp12.046.129.929,00 yaitu lebih kecil sebesar Rp27.907.479,00. Selisih tersebut dipengaruhi oleh:

- Selisih pelunasan pendapatan diterima dimuka atas pajak reklame tahun 2019 dan tahun 2020 sebesar Rp19.156.695,00;
- Ditambah selisih pelunasan piutang PBB tahun 2019 (setelah dikurangi verifikasi atas piutang PBB) dan penambahan piutang PBB tahun 2020 sebesar Rp143.493.684,00;
- Dikurangi selisih pelunasan piutang pajak penerangan jalan tahun 2019 dan penambahan piutang pajak penerangan jalan tahun 2020 sebesar Rp94.202.770,00.

#### 5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD sebagai unit penghasil dan berhubungan dengan perijinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Realisasi Pendapatan Retribusi TA 2020 dan 2019 berdasarkan jenis retribusi adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.4.4 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah**

Pendapatan Retribusi Daerah	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2020	Tahun 2019		
Retribusi Pelayanan Kesehatan	444.891.164,00	8.443.335.782,00	(7.998.444.618,00)	(94,73)
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	411.865.000,00	487.820.000,00	(75.955.000,00)	(15,57)



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Pendapatan Retribusi Daerah	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2020	Tahun 2019		
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	225.400.000,00	348.250.900,00	(122.850.900,00)	(35,28)
Retribusi Pelayanan Pasar	730.372.000,00	778.741.000,00	(48.369.000,00)	(6,21)
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	183.560.000,00	134.835.600,00	48.724.400,00	36,14
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(100,00)
Retribusi Menara Telekomunikasi	300.431.300,00	300.737.800,00	(306.500,00)	(0,10)
Retribusi Pemberian Surat Keterangan Kaca Gelap	18.125.000,00	12.480.000,00	5.645.000,00	45,23
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	11.193.500,00	15.740.000,00	(4.546.500,00)	(28,89)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	448.343.920,00	707.026.911,00	(258.682.991,00)	(36,59)
Retribusi Pasar Grosir	1.841.434.360,00	1.818.415.370,00	23.018.990,00	1,27
Retribusi Terminal	31.090.000,00	97.650.000,00	(66.560.000,00)	(68,16)
Retribusi Tempat Khusus Parkir	973.160.400,00	1.112.044.225,00	(138.883.825,00)	(12,49)
Retribusi Tempat Penginapan/Villa	121.700.000,00	219.800.000,00	(98.100.000,00)	(44,63)
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	13.100.000,00	13.421.500,00	(321.500,00)	(2,40)
Retribusi Tempat Rekreasi	184.210.500,00	346.105.000,00	(161.894.500,00)	(46,78)
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	51.650.000,00	72.850.000,00	(21.200.000,00)	(29,10)
Retribusi Rumah Potong Hewan	16.075.000,00	25.125.000,00	(9.050.000,00)	(36,02)
Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan	1.500.000,00	700.000,00	800.000,00	114,29
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	454.490.555,00	748.946.184,00	(294.455.629,00)	(39,32)
Retribusi Izin Trayek	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>6.462.892.699,00</b>	<b>15.685.325.272,00</b>	<b>(9.222.432.573,00)</b>	<b>(58,80)</b>

Pendapatan Retribusi Daerah – LO sebesar Rp6.462.892.699,00 memiliki nilai yang berbeda dengan yang disajikan di LRA sebesar Rp8.461.009.994,00 yaitu lebih kecil Rp1.998.117.295,00. Selisih tersebut dipengaruhi oleh:

- Pelunasan piutang retribusi pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan tahun 2019 dikurangi koreksi double catat piutang tahun 2019 ditambah piutang tahun 2020 sebesar Rp2.198.488.800,00;
- Ditambah penerimaan atas kurang setor retribusi pasar los tahun 2019 (piutang retribusi pasar los) pada Dinas Perdagangan sebesar Rp938.000,00;
- Ditambah pelunasan piutang retribusi menara telekomunikasi tahun 2019 pada Dinas Kominfo sebesar Rp3.065.000,00;
- Ditambah selisih pelunasan piutang retribusi pasar grosir/pertokoan tahun 2019 dan penambahan piutang tahun 2020 pada Dinas Perdagangan sebesar Rp204.374.505,00.

Pendapatan operasional dari hasil Retribusi Daerah berdasarkan SKPD telah



dijelaskan pada bab mengenai Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran.

#### 5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dalam bentuk pendapatan dividen dan hasil investasi atas Penyertaan pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan dividen diperoleh dari penyertaan modal pada Bank Kalsel dan KPN Swarga dengan kepemilikan saham minoritas yang dicatat berdasarkan metode biaya. Pendapatan hasil pengelolaan investasi pada TA 2020 dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.4.5 Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2020	Tahun 2019		
Bank BPD Kalsel	4.796.693.114,00	3.144.852.464,00	1.651.840.650,00	52,53
KPN Swarga Kandangan	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00
Bagian Laba atas Penyertaan Modal	451.331.843,78	176.178.764,00	275.153.079,78	156,18
<b>Jumlah</b>	<b>5.252.524.957,78</b>	<b>3.325.531.228,00</b>	<b>1.926.993.729,78</b>	<b>57,95</b>

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di LO sebesar Rp5.252.524.957,78 memiliki nilai yang berbeda dengan disajikan pada LRA sebesar Rp4.801.193.114,00 yaitu lebih besar Rp451.331.843,78. Nilai tersebut merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada PDAM Thirta Dharma yang dihitung berdasarkan Laporan Keuangan PDAM *Audited* Tahun 2020.

#### 5.4.1.1.4 Pendapatan Asli Daerah Lainnya

Pendapatan asli daerah lainnya merupakan Pendapatan Asli Daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang realisasinya untuk periode TA 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.4.6 Rincian Pendapatan Asli Daerah Lainnya**

Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2020	Tahun 2019		
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	350.758.020,00	178.859.400,00	171.898.620,00	96,11
Penerimaan Jasa Giro	6.001.824.256,00	6.727.509.821,00	(725.685.565,00)	(10,79)
Pendapatan Bunga Deposito	7.483.240.655,71	5.200.747.586,73	2.282.493.068,98	43,89
Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	46.849.368,00	312.951.631,50	(266.102.263,50)	(85,03)
Pendapatan Denda Pajak	22.491.788,20	39.628.894,00	(17.137.105,80)	(43,24)
Pendapatan Denda Retribusi	16.154.272,00	11.231.666,00	4.922.606,00	43,83
Pendapatan Dari Pengembalian	1.669.977.411,66	904.135.879,31	765.841.532,35	84,70
Pendapatan BLUD	163.325.709.820,00	112.386.565.327,00	50.939.144.493,00	45,32



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Pendapatan Asli Daerah Lainnya	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2020	Tahun 2019		
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	9.084.000,00	0,00	9.084.000,00	0,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN	9.051.413.375,00	11.576.622.342,00	(2.525.208.967,00)	(21,81)
<b>Jumlah</b>	<b>187.977.502.966,57</b>	<b>137.338.252.547,54</b>	<b>50.639.250.419,03</b>	<b>36,87</b>

Pendapatan Lain-lain PAD yang sah pada LO sebesar Rp187.977.502.966,57 memiliki nilai yang berbeda dengan di LRA sebesar Rp177.117.174.476,86 yaitu lebih besar Rp10.860.328.489,71. Selisih tersebut dipengaruhi oleh:

- Penerimaan atas kurang setor pembayaran ganti rugi pembongkaran trotoar tahun 2019 pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp750.000,00;
- Ditambah penerimaan atas piutang bunga deposito tahun 2019 sebesar Rp393.069.548,00;
- Ditambah penerimaan atas piutang tagihan penjualan angsuran hand traktor sebesar Rp1.500.000,00;
- Ditambah selisih piutang BLUD RSUD Hasan Basry tahun 2019 dan tahun 2020 ditambah dengan piutang BLUD RS dan BLUD Puskesmas tahun 2020 sebesar 11.212.851.453,00 dan selisih pendapatan diterima dimuka atas sewa atm tahun 2019 dan tahun 2020 pada BLUD RSUD Hasan Basry sebesar Rp9.450.000,00;
- Dikurangi pendapatan atas kurang setor bunga deposito periode Maret sampai dengan Desember Tahun 2020 sebesar Rp52.246.584,71.

#### 5.4.1.2 Pendapatan Transfer

Jumlah di bawah ini merupakan realisasi Pendapatan Transfer untuk periode TA 2020 dan 2019 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.4.7 Rincian Pendapatan Transfer**

Pendapatan Transfer	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2020	Tahun 2019		
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	882.404.777.631,00	1.069.496.643.787,00	(187.091.866.156,00)	(17,49)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	74.722.664.000,00	30.326.045.000,00	44.396.619.000,00	146,40
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	63.963.364.148,00	83.343.026.560,00	(19.379.662.412,00)	(23,25)
<b>Jumlah</b>	<b>1.021.090.805.779,00</b>	<b>1.183.165.715.347,00</b>	<b>(162.074.909.568,00)</b>	<b>(13,70)</b>

#### 5.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan untuk periode TA 2020 dan 2019 terdiri atas penerimaan transfer sebagai berikut:



**Tabel 5.4.8 Rincian Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan**

Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2020	Tahun 2019		
Dana Bagi Hasil Pajak	24.523.800.890,00	21.048.655.712,00	3.475.145.178,00	16,51
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	215.862.508.979,00	259.067.374.884,00	(43.204.865.905,00)	(16,68)
Dana Alokasi Umum (DAU)	482.100.383.000,00	549.729.177.000,00	(67.628.794.000,00)	(12,30)
Dana Alokasi Khusus (DAK)	159.918.084.762,00	239.651.436.191,00	(79.733.351.429,00)	(33,27)
<b>Jumlah</b>	<b>882.404.777.631,00</b>	<b>1.069.496.643.787,00</b>	<b>(187.091.866.156,00)</b>	<b>(17,49)</b>

#### 5.4.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak

Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat terdiri atas Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPH), serta kurang bayar dan lebih bayar Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.4.9 Rincian Dana Bagi Hasil Pajak**

Dana Bagi Hasil Pajak	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2020	Tahun 2019		
Dana Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	14.688.342.031,00	17.597.647.712,00	(2.909.305.681,00)	(16,53)
Dana Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan	9.835.447.159,00	3.451.008.000,00	6.384.439.159,00	185,00
Dana Bagi Hasil dari Cukai Tembakau	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>24.523.800.890,00</b>	<b>21.048.655.712,00</b>	<b>3.475.145.178,00</b>	<b>16,51</b>

Pendapatan dana bagi hasil pajak pada LO sebesar Rp24.523.800.890,00 memiliki nilai yang berbeda dengan yang disajikan pada LRA sebesar Rp19.715.078.790,00 yaitu lebih besar di LO Rp4.808.722.100,00. Nilai ini merupakan piutang transfer Pemerintah Pusat Tahun 2020 berdasarkan PMK Nomor 25 Tahun 2021.

#### 5.4.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri atas Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.4.10 Rincian Dana Bagi Hasil Bukan Pajak**

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2020	Tahun 2019		
Bagi Hasil Dari Provinsi Sumber Daya Hutan	82.840.500,00	62.932.200,00	19.908.300,00	31,63
Bagi Hasil Dari Iuran Tetap ( <i>Land-Rent</i> )	513.999.975,00	328.049.110,00	185.950.865,00	56,68
Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi ( <i>Royalti</i> )	213.621.865.033,00	257.369.753.874,00	(43.747.888.841,00)	(17,00)
Bagi Hasil Dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	1.105.157.289,00	590.155.800,00	515.001.489,00	87,27



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2020	Tahun 2019		
Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	538.646.182,00	716.483.900,00	(177.837.718,00)	(24,82)
<b>Jumlah</b>	<b>215.862.508.979,00</b>	<b>259.067.374.884,00</b>	<b>(43.204.865.905,00)</b>	<b>(16,68)</b>

Pendapatan dana bagi hasil pajak pada LO sebesar Rp215.862.508.979,00 memiliki nilai yang berbeda dengan yang disajikan pada LRA sebesar Rp202.667.755.404,00 yaitu lebih besar di LO Rp13.194.753.575,00. Nilai ini merupakan piutang transfer Pemerintah Pusat Tahun 2020 berdasarkan PMK Nomor 25 Tahun 2021.

#### 5.4.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Pendapatan operasional yang berasal dari alokasi DAU TA 2020 untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah diterima seluruhnya. Kenaikan/penurunan Dana Alokasi Umum tahun 2020 dan tahun 2019 dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.4.11 Rincian Dana Alokasi Umum (DAU)**

Keterangan	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2020	Tahun 2019		
Dana Alokasi Umum	482.100.383.000,00	549.729.177.000,00	(67.628.794.000,00)	(12,30)
<b>Jumlah</b>	<b>482.100.383.000,00</b>	<b>549.729.177.000,00</b>	<b>(67.628.794.000,00)</b>	<b>(12,30)</b>

Pendapatan DAU – LO memiliki nilai yang sama dengan yang disajikan pada LRA.

#### 5.4.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pendapatan DAK terdiri atas:

**Tabel 5.4.12 Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Keterangan	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2020	Tahun 2019		
DAK Fisik	61.965.883.202,00	144.558.338.534,00	(82.592.455.332,00)	(57,13)
Dak Non Fisik	97.952.201.560,00	95.093.097.657,00	2.859.103.903,00	3,01
<b>Jumlah</b>	<b>159.918.084.762,00</b>	<b>239.651.436.191,00</b>	<b>(79.733.351.429,00)</b>	<b>(33,27)</b>

Pendapatan DAK secara akrual nilainya sama dengan pendapatan DAK



berbasis kas yang disajikan pada LRA. Tidak terdapat hak Pemerintah Daerah atas alokasi DAK yang belum dibayar oleh Pemerintah Pusat.

Penjelasan lebih rinci mengenai alokasi DAK diuraikan dalam penjelasan mengenai Pendapatan DAK pada Laporan Realisasi Anggaran.

#### 5.4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya untuk periode TA 2020 terdiri dari penerimaan Dana Penyesuaian – Dana Intensif Daerah. Penerimaan dana penyesuaian untuk periode TA 2020 dan TA 2019 dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.4.13 Rincian Dana Penyesuaian**

Keterangan	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2020	Tahun 2019		
Dana Penyesuaian - DID	74.722.664.000,00	30.326.045.000,00	44.396.619.000,00	146,40
<b>Jumlah</b>	<b>74.722.664.000,00</b>	<b>30.326.045.000,00</b>	<b>44.396.619.000,00</b>	<b>146,40</b>

Pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya berupa dana penyesuaian pada LO memiliki nilai yang berbeda dengan yang disajikan pada LRA yaitu lebih kecil di LO sebesar Rp117.434.196.000,00. Nilai tersebut merupakan pendapatan transfer dana desa tahun 2020. Sesuai SE Menteri Dalam Negeri Nomor 910/6966/SJ menyatakan bahwa pendapatan dana desa dan belanja bantuan keuangan ke desa hanya disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

#### 5.4.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi

Penerimaan Transfer Pemerintah Provinsi terdiri atas pendapatan bagi hasil pajak untuk periode TA 2020 serta perbandingannya dengan TA 2019 dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.4.14 Rincian Transfer Pemerintah Provinsi**

Transfer Pemerintah Provinsi	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2020	Tahun 2019		
Pajak Kendaraan Bermotor	6.118.400.001,00	6.998.147.456,00	(879.747.455,00)	(12,57)
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	7.174.650.379,00	9.704.467.634,00	(2.529.817.255,00)	(26,07)
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	40.658.020.060,00	57.600.868.333,00	(16.942.848.273,00)	(29,41)
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	90.140.221,00	60.363.292,00	29.776.929,00	49,33
Pajak Rokok	9.922.153.487,00	8.979.179.845,00	942.973.642,00	10,50
<b>Jumlah</b>	<b>63.963.364.148,00</b>	<b>83.343.026.560,00</b>	<b>(19.379.662.412,00)</b>	<b>(23,25)</b>

Pendapatan transfer Pemerintah Provinsi dipengaruhi oleh koreksi saldo awal sebesar Rp3.289.246.746,00 berupa kurang catat piutang bagi hasil pajak rokok bulan Desember tahun 2019 dan selisih piutang transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2020 dengan piutang Tahun 2019 yang dibayar di Tahun 2020 sebesar



Rp3.008.772.155,00. Oleh karena itu Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi di LO memiliki angka yang berbeda dengan di LRA.

#### 5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah untuk periode TA 2020 dan TA 2019 dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.4.15 Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah**

Lain-lain Pendapatan yang Sah	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2020	Tahun 2019		
Pendapatan Hibah	54.207.350.806,00	54.726.501.619,00	(519.150.813,00)	(0,95)
Pendapatan Lainnya	57.000.000,00	0,00	57.000.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>54.264.350.806,00</b>	<b>54.726.501.619,00</b>	<b>(462.150.813,00)</b>	<b>(0,84)</b>

#### 5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah untuk periode TA 2020 dan TA 2019 dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.4.16 Rincian Pendapatan Hibah – LO**

Pendapatan Hibah	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2020	Tahun 2019		
Hibah dari Pemerintah	26.262.428.655,00	23.377.133.944,00	2.885.294.711,00	12,34
Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	711.101.700,00	1.830.000.000,00	(1.118.898.300,00)	(61,14)
Hibah dari Kelompok Masyarakat	2.635.328.100,00	5.243.730.000,00	(2.608.401.900,00)	(49,74)
Hibah dari Kelompok Perorangan	85.287.750,00	0,00	85.287.750,00	0,00
Hibah Dana BOS	24.513.204.601,00	24.275.637.675,00	237.566.926,00	0,98
<b>Jumlah</b>	<b>54.207.350.806,00</b>	<b>54.726.501.619,00</b>	<b>(519.150.813,00)</b>	<b>(0,95)</b>

##### a. Pendapatan Hibah dari Pemerintah

Pendapatan hibah dari pemerintah – LO Tahun 2020 sebesar Rp26.262.428.655,00 terdiri atas penerimaan hibah pada beberapa SKPD sebagai berikut:

- Dinas Pendidikan sebesar Rp2.590.610.000,00 berupa pendapatan hibah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupa peralatan komputer dan personal komputer untuk 15 SDN dan 10 SMPN sebesar Rp2.400.610.000,00 dan sebesar Rp190.000.000,00 berupa uang untuk pembelian mesin obras dan lemari serta untuk belanja operasional pada 3 SMP Terbuka di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Dinas Kesehatan sebesar Rp2.073.323.198,00 berupa pendapatan hibah aset tetap peralatan kesehatan sebesar Rp4.610.500,00; dan pendapatan hibah persediaan obat sebesar Rp2.068.712.698,00.



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

- c) RSUD Hasan Basry sebesar Rp11.231.677.157,00 berupa pendapatan hibah aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp1.052.926.000,00; aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp7.746.466.577,00; dan hibah persediaan sebesar Rp2.432.284.580,00.
- d) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebesar Rp360.038.200,00 berupa pendapatan hibah aset tetap peralatan dan mesin.
- e) Dinas Pengendalian Penduduk KBPPPA berupa pendapatan hibah sepeda motor sebesar Rp22.330.100,00.
- f) Dinas Pertanian sebesar Rp35.112.000,00 berupa pendapatan hibah persediaan.
- g) Dinas Perdagangan sebesar Rp9.949.338.000,00 berupa pendapatan hibah aset tetap gedung dan bangunan.

Lebih rinci mengenai pendapatan hibah dari Pemerintah disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 5.4.17 Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah**

Pendapatan Hibah SKPD	Jenis	Jumlah (Rp)	Keterangan	BAST
Dinas Pendidikan	Laptop	2.256.300.000,00		
	Proyektor	115.700.000,00		
	Wireless router	25.610.000,00		
	Konektor USB	3.000.000,00		
	Lemari	950.000,00		
	Mesin obras + meja	2.000.000,00		
	Belanja operasional	187.050.000,00		
Dinas Kesehatan	Aset tetap - alat kesehatan	4.610.500,00	Dari Kemenkes RI berupa KIT kebugaran	No. 024/1307-Set.2/Dinkes
	Obat-obatan	2.068.712.698,00	Dari Dinas Kesehatann Prov. Kalsel	
RSUD	Aset tetap bangunan mess/wisma (KIB C)	1.052.926.000,00	Dari Pengadilan Agama	No. W15 - A4/395/PL.01/3/2019
	Aset tetap alat kedokteran umum (KIB B)	5.155.516.577,00	Dari BPBD Prov. Kalsel	No. 360/BA/KL-BPBD/VI/2020
	Aset tetap alat kedokteran umum (KIB B)	2.575.000.000,00	Dari Dinas Kesehatann Prov. Kalsel	No. 442.1/1420/IF/VI/2020
				No. 442.1/2204/IF/X/2020
	Aset tetap alat kedokteran umum (KIB B)	15.950.000,00	Dari Kemenkes RI	KS.02.01/V.2/3766/2020
	Barang habis pakai	2.431.335.500,00	Kemenkes RI	KS.02.01/V.2/3766/2020
	Obat-obatan	949.080,00	BPBD Prov. Kalsel	No. 360/BA/KL-BPBD/VI/2020
			Dinkes Prov. Kalsel	No. 442.1/581/IF/III/2020
				No. 442.1/581/IGPK/III/2020



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Pendapatan Hibah SKPD	Jenis	Jumlah (Rp)	Keterangan	BAST
				No. 442.1/578/IF/III/2020
				No. 442.1/658/IF/IV/2020
				No. 442.1/702/IF/IV/2020
				No. 442.1/753/IF/IV/2020
				No. 442.1/878/IF/IV/2020
				No. 442.1/977/IF/VI/2020
				No. 442.1/1423/IF/VI/2020
				No. 800/6/BASTH/RSUD-BHHD
			TNI AU II Syamsudin Noor	
Dinas Perumahan Rakyat KPLH	Aset tetap kendaraan dup truck (KIB B)	360.038.200,00	Dari Dinas LH Prop.Kalsel berupa dump truck (Hibah Adipura)	BAST Dump Trusk Merk HINO Hadiah Anugeah Adipura Tingkat Prov. Kalimantan Selatan Tahun 2018
Dinas Pengendalian Penduduk KBPPPA	Aset tetap sepeda motor Perlindungan Anak/Torlin (KIB B)	22.330.100,00	Dari Provinsi berupa Sepeda motor perlindungan perempuan dan anak	No. 47/set.KPP-PA/D.III.5/PL.06/NH-TORLIN/08/2019
Dinas Pertanian	Persediaan obat kimia	35.112.000,00	Dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi berupa nitrogen cair	No. 524/NAKKES-I/BAST
Dinas Perdagangan	Aset tetap bangunan pasar	9.949.338.000,00	Kementerian Perdagangan berupa bangunan pasar terpadu	BAST No. 209/M-DAG/BAST/11/2020
<b>Total</b>		<b>26.262.428.655,00</b>		

**b. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri – LO**

Pendapatan hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam negeri sebesar Rp711.101.700,00 terdiri atas pendapatan hibah pada beberapa SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.4.18 Rincian Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta**

No.	Pendapatan Hibah SKPD	Jenis	Jumlah (Rp)	Keterangan	BAST
1	BLUD RSUD H. Hasan Basry	Aset tetap alat kedokteran umum (KIB B)	25.000.000,00	Dari Universitas Indonesia	KEMENKES RI AKD 20403021003
		Aset tetap alat kedokteran umum (KIB B)	50.000.000,00	Dari Rumah Aman Salman	-
		Aset tetap alat kedokteran umum (KIB B)	220.163.800,00	PT Madesa Sejahtera Utama	-
		Barang habis pakai	277.795.400,00	Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19	NO. 064/B.MDS/RLWN-GUGAS/VI/2020
		Obat-obatan	1.542.500,00	Hasnur Center	No. 075/HC/PB-BAST/IV/2020
				PT Pratapa Nirmala	No. 800/1354/RSUD-BHHD
				BNI Syariah, Borneo, Borneo Perkasa, DPW	



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Pendapatan Hibah SKPD	Jenis	Jumlah (Rp)	Keterangan	BAST
				PKS Kalsel, Gegana, GKI Jatim, Kalbe, Lazio Indonesia, MCI Kalsel, MCI Peduli, MS Glow, Mukisi, P3, PLN Kandangan, PT Panasea	
2	Dinas Perdagangan	Tempat cuci tangan	38.000.000,00	PT AGM	
		Tempat cuci tangan	32.250.000,00	BRI Cabang Kandangan	
3	Bagian Perekonomian	Wastafel dan Sprayer Desinfektan (KIB B)	66.350.000,00	PT AGM dan BRI Cabang Kandangan	No.B./KC-X/LOG/07/2020
<b>Total</b>			<b>711.101.700,00</b>		

**c. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat**

Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat sebesar Rp2.635.328.100,00 merupakan pendapatan hibah yang terdiri dari:

- Penerimaan hibah berupa uang dari Kelompok Masyarakat/perorangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang langsung diterima Badan Keuangan Daerah sebesar Rp61.628.100,00.
- Penerimaan hibah berupa hibah tanah komplek perumahan dari kelompok masyarakat yang terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebesar Rp2.573.700.000,00.

**d. Pendapatan Hibah dari Kelompok Perorangan**

Penerimaan hibah berupa bantuan untuk penanganan Covid-19 pada BLUD RSUD H. Hasan Basry sebesar Rp85.287.750,00 dalam bentuk barang habis pakai.

**e. Pendapatan Hibah Dana BOS – LO**

Penerimaan hibah berupa Dana Bantuan Operasional Sekolah yang terdiri dari Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Berdasarkan Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 971 – 7791 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang Diselenggarakan Oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, alokasi Dana BOS dianggarkan pada Akun Pendapatan, Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis Pendapatan Hibah, Obyek Pendapatan Hibah Dana BOS, Rincian Obyek Pendapatan Hibah Dana BOS.

Pendapatan Hibah Dana BOS tahun 2020 sebesar Rp24.513.204.601,00 yang terdiri atas pendapatan hibah Dana BOS SDN sebesar Rp18.738.874.601,00 dan pendapatan hibah Dana BOS SMPN sebesar Rp5.774.330.000,00.



#### 5.4.1.3.2 Pendapatan Lainnya

Pendapatan lainnya sebesar Rp57.000.000,00 pada Dinas Pertanian merupakan nilai penambahan persediaan ternak sapi untuk ternak yang baru lahir.

#### 5.4.2 BEBAN

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Realisasi beban TA 2020 dan TA 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.4.19 Rincian Beban**

Beban	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2020	Tahun 2019		
Beban Pegawai	468.467.674.563,00	475.340.937.446,75	(6.873.262.883,75)	(1,45)
Beban Persediaan	27.957.862.563,30	53.081.892.647,35	(25.124.030.084,05)	(47,33)
Beban Jasa	317.577.863.257,14	220.424.168.258,25	97.153.694.998,89	44,08
Beban Pemeliharaan	15.320.291.297,00	16.500.827.258,00	(1.180.535.961,00)	(7,15)
Beban Perjalanan Dinas	34.594.824.958,00	56.297.665.445,00	(21.702.840.487,00)	(38,55)
Beban Hibah	38.939.997.523,00	35.942.831.348,00	2.997.166.175,00	8,34
Beban Bantuan Sosial	24.407.210.756,00	27.951.393.677,00	(3.544.182.921,00)	(12,68)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	180.147.249.503,89	130.476.903.243,00	49.670.346.260,89	38,07
Beban Penyisihan Piutang	439.324.289,50	1.870.970.703,72	(1.431.646.414,22)	(76,52)
Beban Transfer	78.237.950.320,00	81.773.470.898,00	(3.535.520.578,00)	(4,32)
Beban Lain-lain	4.729.540.375,59	22.529.061,00	4.707.011.314,59	20893,06
<b>Jumlah Beban</b>	<b>1.190.819.789.406,42</b>	<b>1.099.683.589.986,07</b>	<b>91.136.199.420,35</b>	<b>8,29</b>

Rincian lebih lanjut mengenai pos-pos beban atau kegiatan operasi adalah sebagai berikut:

##### 5.4.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai terdiri atas beban sebagai berikut:

**Tabel 5.4.20 Rincian Beban Pegawai**

Beban Pegawai	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2020	Tahun 2019		
Beban Gaji dan Tunjangan	352.864.739.776,00	366.913.283.219,00	(14.048.543.443,00)	(3,83)
Beban Tambahan Penghasilan PNS	101.663.789.473,00	96.830.029.557,75	4.833.759.915,25	4,99
Beban Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPR, KDH/WKDH	4.692.465.432,00	4.608.647.710,00	83.817.722,00	1,82
Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	575.069.855,00	512.052.068,00	63.017.787,00	12,31
Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	317.530.777,00	661.574.052,00	(344.043.275,00)	(52,00)



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Beban Pegawai	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2020	Tahun 2019		
Beban Pegawai Operasional BLUD	4.826.685.000,00	4.261.244.640,00	565.440.360,00	13,27
Beban Pegawai Dana BOS	3.527.394.250,00	1.554.106.200,00	1.973.288.050,00	126,97
<b>Jumlah</b>	<b>468.467.674.563,00</b>	<b>475.340.937.446,75</b>	<b>(6.873.262.883,75)</b>	<b>(1,45)</b>

Beban pegawai pada LO sebesar Rp468.467.674.563,00 memiliki nilai yang berbeda dengan yang disajikan pada LRA sebesar Rp468.226.677.267,00 karena dipengaruhi oleh selisih utang belanja pegawai bulan Desember tahun 2019 dengan utang belanja pegawai bulan Desember tahun 2020 sebesar Rp240.997.296,00.

#### 5.4.2.2 **Beban Persediaan**

Beban Persediaan Tahun 2020 dan 2019 beserta kenaikan/penurunannya dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.4.21 Rincian Beban Persediaan**

Beban Persediaan	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2020	Tahun 2019		
Beban Bahan Pakai Habis	18.528.183.161,77	23.514.730.113,00	(4.986.546.951,23)	(21,21)
Beban Persediaan Bahan/Material	9.429.679.401,53	29.567.162.534,35	(20.137.483.132,82)	(68,11)
<b>Jumlah</b>	<b>27.957.862.563,30</b>	<b>53.081.892.647,35</b>	<b>(25.124.030.084,05)</b>	<b>(47,33)</b>

Beban persediaan secara akrual sebagaimana disajikan dalam LO sebesar Rp27.957.862.563,30 memiliki jumlah yang berbeda dengan belanja barang persediaan TA 2020 sebagaimana yang disajikan dalam LRA sebesar Rp16.858.769.790,00 yaitu selisih lebih sebesar Rp11.099.092.773,30 karena dipengaruhi oleh:

- Bertambahnya beban persediaan karena adanya belanja persediaan yang berasal dari Dana BTT Covid sebesar Rp11.479.234.788,00 dan dari dana hibah Kemendikbud sebesar Rp846.000,00;
- Bertambahnya beban persediaan karena adanya penggunaan persediaan hibah covid sebesar Rp2.779.077.800,00 dan penggunaan persediaan yang berasal dari hibah obat sebesar Rp1.314.621.958,00;
- Bertambahnya beban persediaan karena adanya persediaan yang dihapuskan sebesar Rp3.000.000,00;
- Berkurangnya beban persediaan karena adanya selisih persediaan tahun 2019 dan tahun 2020 sebesar Rp4.052.291.604,45;
- Berkurangnya beban persediaan karena adanya persediaan yang kedaluwarsa sebesar Rp425.396.168,25.



### 5.4.2.3 Beban Jasa

Beban Jasa tahun 2020 dan 2019 beserta kenaikan/penurunannya dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.4.22 Rincian Beban Jasa**

Beban Jasa	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2020	Tahun 2019		
Beban Jasa Kantor	51.492.315.770,50	71.711.801.174,25	(20.219.485.403,75)	(28,20)
Beban Premi Asuransi	47.321.728.277,00	31.724.751.123,00	15.596.977.154,00	49,16
Beban Cetak dan Penggandaan	4.362.040.075,50	6.900.457.865,00	(2.538.417.789,50)	(36,79)
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	231.898.000,00	835.898.163,00	(604.000.163,00)	(72,26)
Beban Sewa Sarana Mobilitas	548.900.000,00	2.400.000,00	546.500.000,00	22770,83
Beban Sewa Alat Berat	0,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)	(100,00)
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	655.791.150,00	1.155.127.800,00	(499.336.650,00)	(43,23)
Beban Makanan dan Minuman	10.437.933.647,00	15.893.209.917,00	(5.455.276.270,00)	(34,32)
Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	386.855.000,00	618.094.000,00	(231.239.000,00)	(37,41)
Beban Pakaian Kerja	2.286.710.100,00	917.163.450,00	1.369.546.650,00	149,32
Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	651.547.200,00	1.225.633.300,00	(574.086.100,00)	(46,84)
Beban Jasa Konsultasi	283.289.859,00	2.389.916.660,00	(2.106.626.801,00)	(88,15)
Beban Barang Untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	702.258.680,00	3.403.917.000,00	(2.701.658.320,00)	(79,37)
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	24.217.813,00	109.031.000,00	(84.813.187,00)	(77,79)
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	930.987.500,00	1.028.024.371,00	(97.036.871,00)	(9,44)
Beban Honorarium PNS - LO	410.366.613,00	28.069.100,00	382.297.513,00	1361,99
Beban Honorarium Non PNS - LO	17.406.183.149,00	14.646.563.083,00	2.759.620.066,00	18,84
Beban Barang Dana BOS	15.433.889.497,00	12.139.363.184,00	3.294.526.313,00	27,14
Beban Barang dan Jasa Operasional BLUD	147.776.609.728,89	54.318.826.727,00	93.457.783.001,89	172,05
Beban Barang Perlengkapan	789.575.156,25	1.350.920.341,00	(561.345.184,75)	(41,55)
Beban Insentif Tenaga Medis Penanganan Covid-19	15.444.766.041,00	0,00	15.444.766.041,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>317.577.863.257,14</b>	<b>220.424.168.258,25</b>	<b>97.153.694.998,89</b>	<b>44,08</b>

Beban jasa secara akrual sebagaimana disajikan dalam LO sebesar Rp317.577.863.257,14 memiliki jumlah yang berbeda dengan belanja barang dan jasa TA 2020 sebagaimana yang disajikan dalam LRA sebesar Rp318.482.367.916,75 yaitu lebih kecil sebesar Rp904.504.659,61 karena dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

- Adanya belanja barang/jasa yang berasal dari dana BTT Covid sebesar Rp4.876.404.296,00;
- Adanya belanja barang/jasa yang berasal dari dana hibah Kemendikbud



- sebesar Rp106.514.000,00;
- Adanya reklasifikasi dari aset tetap sebesar Rp43.618.761,00;
  - Selisih utang jasa pelayanan kesehatan tahun 2019 dan tahun 2020 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp5.336.904.534,00;
  - Dikurangi selisih beban barang jasa yang menjadi persediaan tahun 2019 dan tahun 2020 sebesar Rp1.107.890.183,11;
  - Dikurangi selisih utang BLUD tahun 2019 dan tahun 2020 sebesar Rp2.605.890.275,00;
  - Dikurangi adanya beban barang yang diserahkan untuk masyarakat yang direklasifikasi ke beban hibah sebesar Rp6.507.357.900,00 dan dikurangi yang belum diserahkan direklasifikasi menjadi persediaan sebesar Rp687.391.000,00;
  - Dikurangi adanya persediaan usang dari beban cetak dan beban operasional BLUD yang menjadi beban lain-lain sebesar Rp116.650.832,50;
  - Dikurangi adanya reklasifikasi dari barang dan jasa yang menjadi aset tetap pada beberapa SKPD sebesar Rp217.806.060,00.

#### 5.4.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan tahun 2020 dan 2019 beserta kenaikan/penurunannya dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.4.23 Rincian Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2020	Tahun 2019		
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	4.205.303.051,00	5.278.787.536,00	(1.073.484.485,00)	(20,34)
Beban Pemeliharaan	11.114.988.246,00	11.222.039.722,00	(107.051.476,00)	(0,95)
<b>Jumlah</b>	<b>15.320.291.297,00</b>	<b>16.500.827.258,00</b>	<b>(1.180.535.961,00)</b>	<b>(7,15)</b>

Beban pemeliharaan pada LO sebesar Rp15.320.291.297,00 memiliki nilai yang lebih kecil dari belanja pemeliharaan yang disajikan pada LRA sebesar Rp17.298.968.798,00 yaitu Rp1.978.677.501,00 karena dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

- Adanya reklasifikasi ke aset tetap peralatan dan mesin pada Dinas Perumahan Rakyat KPLH sebesar Rp68.266.000,00;
- Adanya reklasifikasi ke aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp1.726.946.111,00 pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perikaaan, dan Dinas Sosial;
- Adanya reklasifikasi ke aset tetap konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp13.490.000,00 pada Dinas Sosial;
- Adanya reklasifikasi ke beban hibah berupa pekerjaan fisik maupun barang



yang diserahkan kepada masyarakat pada Kelurahan Kandangan Kota sebesar Rp268.055.000,00 berupa belanja pemeliharaan jalan sebesar Rp203.790.000,00, berupa pemeliharaan drainase sebesar Rp32.265.000,00 dan berupa sarana persampahan (pembelian bak sampah) sebesar Rp32.000.000,00.

- Adanya belanja dari dana BTT Covid sebesar Rp97.879.610,00.
- Adanya belanja dari dana hibah Kemendikbud sebesar Rp200.000,00.

#### 5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas tahun 2020 dan 2019 beserta kenaikan/penurunannya dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.4.24 Rincian Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2020	Tahun 2019		
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	13.377.700.451,00	17.980.243.132,00	(4.602.542.681,00)	(25,60)
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	21.217.124.507,00	38.317.422.313,00	(17.100.297.806,00)	(44,63)
<b>Jumlah</b>	<b>34.594.824.958,00</b>	<b>56.297.665.445,00</b>	<b>(21.702.840.487,00)</b>	<b>(38,55)</b>

Beban perjalanan dinas pada LO sebesar Rp34.594.824.958,00 memiliki nilai yang lebih besar dari belanja perjalanan dinas yang disajikan pada LRA sebesar Rp33.305.554.958,00 yaitu Rp1.289.270.000,00 yang disebabkan oleh adanya belanja dari dana BTT Covid sebesar Rp1.209.780.000,00, dan belanja dari dana hibah Kemendikbud sebesar Rp79.490.000,00.

#### 5.4.2.6 Beban Hibah

Beban hibah merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan atas pemberian hibah pada TA 2020. Berikut disajikan rincian beban hibah beserta kenaikan/penurunannya:

**Tabel 5.4.25 Rincian Beban Hibah**

Beban Hibah	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2020	Tahun 2019		
Beban Hibah kepada Pemerintah	4.926.458.485,00	321.719.485,00	4.604.739.000,00	1431,29
Beban Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	33.986.739.038,00	34.971.036.943,00	(984.297.905,00)	(2,81)
Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	26.800.000,00	650.074.920,00	(623.274.920,00)	(95,88)
<b>Jumlah Beban</b>	<b>38.939.997.523,00</b>	<b>35.942.831.348,00</b>	<b>2.997.166.175,00</b>	<b>8,34</b>

Sebagaimana disajikan pada Neraca per 31 Desember 2020 dan 2019, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak mempunyai beban dibayar di muka ataupun utang atas beban hibah. Ini berarti kewajiban atas beban hibah TA 2020 telah diselesaikan seluruhnya melalui belanja hibah TA 2020.



Beban hibah yang disajikan dalam LO sebesar Rp38.939.997.523,00 memiliki jumlah yang berbeda dengan belanja hibah sebagaimana yang disajikan dalam LRA sebesar Rp27.917.073.003,00 yaitu lebih besar Rp11.022.924.520,00, perbedaan tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Beban Hibah Kepada Pemerintah sebesar Rp4.926.458.485,00 merupakan penghapusan aset tetap yang dihibahkan kepada pemerintah setempat (instansi vertikal), meliputi:
  - Hibah aset tetap Tanah dari Dinas Perumahan Rakyat KPLH ke Polres HSS sebesar Rp920.863.000,00 berdasarkan Berita Acara Nomor 032/1648-BAST-HBH/BAKEUDA/2020 dan ke Pengadilan Negeri HSS sebesar Rp3.536.606.300,00 berdasarkan Berita Acara Nomor 032/1725-BAST-HBH/BAKEUDA/2020.
  - Hibah aset tetap Tanah dari Badan Keuangan Daerah/BPKPD ke Polsek Loksado dan Kalumpang sebesar Rp189.067.685,00 berdasarkan Berita Acara No. 032/534-BAST-HBH/BAKEUDA/2020.
  - Hibah aset tetap Tanah dari Sekretariat Daerah ke Pemerintahan Desa Simpur sebesar Rp42.150.000,00 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 9 Tahun 2020.
  - Hibah aset tetap Gedung dan Bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ke Rutan Kandangan berupa bangunan sumur bor rutan sebesar Rp237.771.500,00 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 14 Tahun 2020.
- b. Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp6.069.666.035,00 terdiri atas:
  - Penambahan karena reklasifikasi dari beban pemeliharaan berupa pekerjaan fisik/barang untuk diserahkan kepada kelompok masyarakat sebesar Rp268.055.000,00;
  - Penambahan karena reklasifikasi dari beban barang yang akan diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp6.507.357.900,00;
  - Pengurangan karena reklasifikasi ke Persediaan sebesar Rp705.746.865,00 berupa rehab rumah dinas Kapolres yang belum selesai pengerjaannya.

**Tabel 5.4.26 Daftar Penambahan/Pengurangan Beban Hibah per SKPD**

No.	Beban Hibah SKPD	Reklasifikasi	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	Dari Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	1.502.025.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum	Ke Persediaan	(705.746.865,00)
3	Dinas Perumahan Rakyat KPLH	Dari Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	3.200.750.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Beban Hibah SKPD	Reklasifikasi	Jumlah (Rp)
4	Dinas Sosial	Dari Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	230.032.000,00
4	Dinas Tenaga Kerja	Dari Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	48.525.000,00
5	Dinas Perikanan	Dari Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	612.755.000,00
6	Dinas Pertanian	Dari Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	394.614.050,00
7	Kelurahan Kandangan Kota	Dari Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	18.877.150,00
		Dari Beban Pemeliharaan	268.055.000,00
8	Kelurahan Kandangan Utara	Dari Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	382.541.800,00
9	Kelurahan Jambu Hilir	Dari Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	117.237.900,00
<b>Total</b>			<b>6.069.666.035,00</b>

- Beban Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp26.800.000,00 merupakan penghapusan aset tetap Peralatan dan Mesin berupa lemari alokon dari Dinas Pengendalian Penduduk KBPPPA yang dihibahkan ke RS Ceria dan ke Poliklinik Perkebunan di Kecamatan Daha Barat masing-masing sebesar Rp13.400.000,00.

#### 5.4.2.7 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial terdiri atas bantuan sosial kepada masyarakat dan kelompok masyarakat. Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Pengelolaan bantuan sosial diatur melalui Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 09 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

**Tabel 5.4. 27 Rincian Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2020	Tahun 2019		
Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	14.761.810.000,00	13.803.755.000,00	958.055.000,00	6,94
Beban Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat	9.645.400.756,00	14.147.638.677,00	(4.502.237.921,00)	(31,82)
<b>Jumlah Beban</b>	<b>24.407.210.756,00</b>	<b>27.951.393.677,00</b>	<b>(3.544.182.921,00)</b>	<b>(12,68)</b>

Beban bantuan sosial secara akrual sebagaimana disajikan dalam LO sebesar Rp24.407.210.756,00 memiliki jumlah yang berbeda dengan belanja bantuan



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

sosial TA 2020 sebagaimana yang disajikan dalam LRA sebesar Rp24.221.010.756,00 yaitu lebih besar Rp186.200.000,00. Selisih tersebut merupakan penambahan beban bantuan sosial pada Dinas Sosial yang berasal dari dana BTT Covid yaitu bantuan sosial berupa uang untuk individu/keluarga.

#### 5.4.2.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2020 merupakan beban penyusutan tahun berjalan aset tetap dan beban amortisasi aset tak berwujud yang terdiri atas:

**Tabel 5.4.28 Rincian Beban Penyusutan/Amortisasi**

Beban Penyusutan dan Amortisasi	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2020	Tahun 2019		
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	54.320.467.873,89	45.502.625.333,00	8.817.842.540,89	19,38
Beban Penyusutan Bangunan dan Gedung	23.473.784.050,00	20.819.573.153,00	2.654.210.897,00	12,75
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	101.800.047.059,00	63.636.540.395,00	38.163.506.664,00	59,97
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	9.856.335,00	(9.856.335,00)	(100,00)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	552.950.521,00	508.308.027,00	44.642.494,00	8,78
<b>Jumlah Beban</b>	<b>180.147.249.503,89</b>	<b>130.476.903.243,00</b>	<b>49.670.346.260,89</b>	<b>38,07</b>

Perhitungan beban penyusutan diberlakukan mulai TA 2015 berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Masa Manfaat dan Penyusutan Barang Milik Daerah. Dalam Peraturan Bupati tentang Penyusutan Aset Tetap tersebut diatur mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Metode penyusutan yang diterapkan adalah garis lurus untuk semua jenis aset tetap.
2. Nilai aset tetap yang dapat disusutkan diperhitungkan berdasarkan nilai perolehan aset tetap pada akhir tahun tanpa nilai residu.
3. Untuk perhitungan penyusutan, dihitung secara bulanan yaitu pada periode bulan saat perolehan aset tetap.

Adapun rincian beban penyusutan per SKPD untuk masing-masing KIB adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.4.29 Rincian Beban Penyusutan Aset Tetap per SKPD**

No.	SKPD	Beban Penyusutan (Rp)			Jumlah (Rp)
		Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan Irigasi dan Jaringan	
1	Dinas Pendidikan	6.812.154.794,89	5.765.998.983,00	18.631.443,00	12.596.785.220,89
2	Dinas Kesehatan	5.097.039.482,00	2.610.866.226,00	134.263.329,00	7.842.169.037,00
3	RSUD Hasan Basry Kandangan	22.291.499.107,00	3.682.193.952,00	1.715.602.826,00	27.689.295.885,00
4	Dinas Pekerjaan Umum TR	1.004.471.841,00	559.574.767,00	92.709.339.649,00	94.273.386.257,00
5	Dinas Perumahan Rakyat KPLH	3.122.516.291,00	1.397.026.801,00	6.232.580.196,00	10.752.123.288,00
6	BPB Kesbangpol	279.333.076,00	18.860.662,00	11.594.920,00	309.788.658,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

No.	SKPD	Beban Penyusutan (Rp)			Jumlah (Rp)
		Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan Irigasi dan Jaringan	
7	Satuan Polisi Pamong Praja	484.552.511,00	22.858.932,00	0,00	507.411.443,00
8	Dinas Sosial	158.671.102,00	197.369.433,00	2.632.379,00	358.672.914,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	96.222.505,00	36.074.376,00	90.416,00	132.387.297,00
10	Dinas Kependudukan dan Catpil	231.847.714,00	10.733.054,00	765.525,00	243.346.293,00
11	Dinas Pemberdayaan Masy. Desa	102.574.950,00	9.179.675,00	0,00	111.754.625,00
12	Dinas Pengendalian Penduduk KBPPPA	376.417.920,00	113.168.365,00	1.239.515,00	490.825.800,00
13	Dinas Perhubungan	3.701.641.446,00	175.679.031,00	364.662.793,00	4.241.983.270,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	910.316.350,00	25.277.369,00	3.394.965,00	938.988.684,00
15	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKP	213.572.901,00	105.061.275,00	2.874.601,00	321.508.777,00
16	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	197.493.725,00	30.074.238,00	1.063.238,00	228.631.201,00
17	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	353.502.095,00	2.158.985.857,00	15.499.775,00	2.527.987.727,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	242.506.213,00	61.453.734,00	2.128.986,00	306.088.933,00
19	Dinas Perikanan	232.607.124,00	94.500.255,00	87.172.923,00	414.280.302,00
20	Dinas Pertanian	767.542.107,00	611.850.985,00	420.652.797,00	1.800.045.889,00
21	Dinas Perdagangan	424.305.841,00	3.140.987.311,00	27.083.600,00	3.592.376.752,00
22	Sekretariat Daerah	0,00	76.072.545,00	0,00	76.072.545,00
23	Bagian Pemerintahan	104.149.068,00	12.789.328,00	0,00	116.938.396,00
24	Bagian Hukum	52.150.971,00	0,00	0,00	52.150.971,00
25	Bagian Kesejahteraan Rakyat	42.926.158,00	0,00	0,00	42.926.158,00
26	Bagian Pengadaan Barang / Jasa	123.743.335,00	0,00	0,00	123.743.335,00
27	Bagian Protokol dan Kehumasan	196.417.784,00	752.000,00	0,00	197.169.784,00
28	Bagian Umum	2.674.634.315,00	741.269.690,00	26.449.685,00	3.442.353.690,00
29	Bagian Organisasi	61.618.570,00	0,00	0,00	61.618.570,00
30	Bagian Perekonomian	56.480.685,00	0,00	0,00	56.480.685,00
31	Sekretariat DPRD	551.752.330,00	84.389.891,00	2.425.282,00	638.567.503,00
32	Kecamatan Kandangan	203.849.342,00	143.784.601,00	1.597.352,00	349.231.295,00
33	Kelurahan Kandangan Kota	51.724.210,00	18.206.123,00	0,00	69.930.333,00
34	Kelurahan Kandangan Utara	36.688.993,00	17.511.090,00	91.458,00	54.291.541,00
35	Kelurahan Kandangan Barat	52.917.659,00	8.544.207,00	494.900,00	61.956.766,00
36	Kelurahan Jambu Hilir	76.307.553,00	3.265.652,00	183.750,00	79.756.955,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

No.	SKPD	Beban Penyusutan (Rp)			Jumlah (Rp)
		Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan Irigasi dan Jaringan	
37	Kecamatan Padang Batung	139.870.919,00	96.701.022,00	695.638,00	237.267.579,00
38	Kecamatan Loksado	114.216.325,00	47.331.678,00	109.091,00	161.657.094,00
39	Kecamatan Sungai Raya	117.739.783,00	36.900.534,00	487.500,00	155.127.817,00
40	Kecamatan Simpur	135.696.806,00	94.246.565,00	288.161,00	230.231.532,00
41	Kecamatan Kalumpang	148.772.402,00	74.425.555,00	40.000,00	223.237.957,00
42	Kecamatan Angkinang	103.161.450,00	105.463.078,00	0,00	208.624.528,00
43	Kecamatan Telaga Langsat	111.589.673,00	48.542.516,00	231.247,00	160.363.436,00
44	Kecamatan Daha Utara	159.984.249,00	106.914.830,00	0,00	266.899.079,00
45	Kecamatan Daha Selatan	173.309.752,00	484.551.179,00	259.800,00	658.120.731,00
46	Kecamatan Daha Barat	117.244.008,00	66.854.546,00	648.868,00	184.747.422,00
47	Inspektorat Kabupaten	207.550.666,00	41.757.545,00	4.077.250,00	253.385.461,00
48	BAPPELITBANGDA	147.604.814,00	0,00	1.684.517,00	149.289.331,00
49	Badan Keuangan Daerah	968.299.858,00	302.138.800,00	9.008.684,00	1.279.447.342,00
50	Badan Kepegawaian Diklat	289.277.100,00	33.595.794,00	0,00	322.872.894,00
<b>Jumlah Beban</b>		<b>54.320.467.873,89</b>	<b>23.473.784.050,00</b>	<b>101.800.047.059,00</b>	<b>179.594.298.982,89</b>

Beban penyusutan aset tetap seluruhnya dipengaruhi oleh beban penyusutan aset tetap tahun berjalan.

**Tabel 5.4.30 Rincian Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud per SKPD**

No.	SKPD	Beban Amortisasi (Rp)
1	Dinas Pendidikan	32.605.336,00
2	Dinas Kesehatan	27.310.600,00
2	RSUD Hasan Basry	27.470.025,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	183.267.653,00
4	Dinas Perumahan Rakyat KP dan LH	39.282.600,00
5	Dinas Sosial	3.009.722,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.666.666,00
7	Dinas Perhubungan	3.333.334,00
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.728.000,00
9	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	25.207.500,00
10	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	4.950.000,00
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	90.199.166,00
12	Dinas Perdagangan	9.650.001,00
13	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	2.250.000,00
14	Bagian Protokol dan Kehumasan	1.250.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

No.	SKPD	Beban Amortisasi (Rp)
15	Bagian Organisasi dan PAD	9.803.250,00
16	Badan Keuangan Daerah	66.900.000,00
17	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	22.066.668,00
<b>Jumlah</b>		<b>552.950.521,00</b>

Beban amortisasi aset tak berwujud seluruhnya dipengaruhi oleh beban amortisasi tahun 2020.

#### 5.4.2.9 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan penyisihan piutang tidak tertagih. Pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih diatur dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Beban Penyisihan Piutang TA 2020 terdiri atas:

**Tabel 5.4.31 Rincian Beban Penyisihan Piutang**

Beban Penyisihan Piutang	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2020	Tahun 2019		
Beban Penyisihan Piutang Pajak	44.346.548,91	74.104.925,39	(29.758.376,48)	(40,16)
Beban Penyisihan Piutang Retribusi	256.505.637,50	220.421.440,00	36.084.197,50	16,37
Beban Penyisihan Piutang BLUD	138.472.103,09	1.576.444.338,33	(1.437.972.235,24)	(91,22)
<b>Jumlah Beban</b>	<b>439.324.289,50</b>	<b>1.870.970.703,72</b>	<b>(1.431.646.414,22)</b>	<b>(76,52)</b>

1. Beban penyisihan piutang pajak merupakan beban penyisihan untuk piutang PBB sebesar Rp44.346.548,891.
2. Beban penyisihan piutang retribusi sebesar Rp256.505.637,50 terdiri atas beban penyisihan untuk:
  - Piutang retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp331.760,00 yang terdapat pada Dinas Kesehatan.
  - Piutang retribusi pelayanan pasar grosir sebesar Rp256.173.877,50 yang terdapat pada Dinas Perdagangan.
3. Beban penyisihan piutang BLUD sebesar Rp138.472.103,09 terdiri atas beban penyisihan untuk:
  - Piutang BLUD pada RSUD H. Hasan Basry sebesar Rp118.041.777,59;
  - Piutang BLUD pada RS Daha Sejahtera sebesar Rp20.241.325,50;
  - Piutang BLUD pada Puskesmas Kandungan sebesar Rp45.150,00;
  - Piutang BLUD pada Puskesmas Negara sebesar Rp804.891,75.

#### 5.4.2.10 Beban Transfer

Beban transfer terdiri atas beban transfer bagi hasil pendapatan dan bantuan



keuangan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.4.32 Rincian Beban Transfer**

Beban Transfer	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2020	Tahun 2019		
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	1.274.000.000,00	1.290.000.000,00	(16.000.000,00)	(1,24)
Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	1.014.000.000,00	1.550.000.000,00	(536.000.000,00)	(34,58)
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	75.266.000.000,00	78.266.000.000,00	(3.000.000.000,00)	(3,83)
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	683.950.320,00	667.470.898,00	16.479.422,00	2,47
<b>Jumlah Beban</b>	<b>78.237.950.320,00</b>	<b>81.773.470.898,00</b>	<b>(3.535.520.578,00)</b>	<b>(4,32)</b>

Beban transfer bantuan keuangan ke desa secara aktual sebagaimana disajikan dalam LO memiliki jumlah yang berbeda dengan belanja transfer TA 2020 sebagaimana yang disajikan dalam LRA sebesar jumlah dana desa yang telah disalurkan tahun 2020.

Beban bantuan keuangan lainnya merupakan penyelesaian kewajiban Pemerintah Daerah berkaitan dengan pemberian bantuan kepada partai politik yang memiliki wakil di DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yakni kepada Partai NASDEM, Partai GERINDRA, PKS, PKB, Partai GOLKAR, PPP, PBB, PDIP, Partai DEMOKRAT dan Partai Amanat Nasional.

#### 5.4.2.11 Beban Lain-lain

Beban lain-lain selama tahun 2020 terdiri atas beban sebagai berikut:

**Tabel 5.4.33 Rincian Beban Lain-lain**

Beban Lain-lain	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2020	Tahun 2019		
Beban Penurunan Nilai Investasi	64.805.787,84	9.875.000,00	54.930.787,84	556,26
Beban Lain-lain	4.664.734.587,75	12.654.061,00	4.652.080.526,75	36.763,54
<b>Jumlah Beban</b>	<b>4.729.540.375,59</b>	<b>22.529.061,00</b>	<b>4.707.011.314,59</b>	<b>20.893,06</b>

1. Terdapat beban penurunan nilai investasi sebesar Rp64.805.787,87 yang merupakan pencatatan bagian rugi penyertaan modal berdasarkan laporan keuangan *Audited* tahun 2020 pada BPR HSS.
2. Terdapat beban lain-lain sebesar Rp4.664.734.587,75 yang terdiri dari:
  - Setoran pengembalian sisa kas dari Sekolah Dasar penerima Dana BOS yang sudah tidak beroperasi lagi dan sudah melakukan penutupan rekening Bank ke Kas Provinsi sebesar Rp24.960.000,00 berupa setoran pengembalian Dana BOS SDN Kandangan Kota 6 sebesar Rp24.320.000,00 pada tanggal 16 November 2020 dan setoran



pengembalian Dana BOS SDN Sungai Kacil sebesar Rp640.000,00 pada tanggal 16 November 2020;

- Beban lain-lain dari dana BTT Covid pada Dinas Kesehatan sebesar Rp386.720.552,00;
- Belanja dari dana BTT Covid pada 2 instansi vertikal sebesar Rp584.446.550,00 yaitu pada Polres HSS sebesar Rp459.556.550 dan pada Kodim 1003 Kandungan sebesar Rp124.890.000,00;
- Barang-barang ekstrakompatibel yang berasal dari reklas aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp3.126.560.485,00 (lihat juga penjelasannya pada Bab Neraca dalam laporan ini);
- Persediaan yang menjadi usang/*expired*/kedaluwarsa sebesar Rp542.047.000,75 yang terdapat pada 3 SKPD berupa persediaan obat-obatan kedaluwarsa pada Dinas Kesehatan sebesar Rp425.396.168,25 dan pada BLUD RSUD H. Hasan Basry sebesar Rp72.158.147,00; serta persediaan cetak blanko/karcis untuk tahun 2020 pada Badan Keuangan Daerah/BPKPD sebesar Rp44.492.685,00.

#### 5.4.3 KEGIATAN NON OPERASIONAL

Defisit dari kegiatan non operasional untuk Tahun 2020 dan 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.4.34 Kegiatan Non Operasional – LO**

Kegiatan Non Operasional	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2020	Tahun 2019		
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	249.808.452,00	(249.808.452,00)	(100,00)
Defisit Penghapusan Aset Non Lancar	9.214.872.027,00	1.775.922.372,00	7.438.949.655,00	418,88
<b>Surplus/Defisit dari Keg. Non Operasional</b>	<b>(9.214.872.027,00)</b>	<b>(2.025.730.824,00)</b>	<b>(7.189.141.203,00)</b>	<b>354,89</b>

##### 5.4.3.1 Defisit Penghapusan Aset Non Lancar

Defisit penghapusan aset non lancar TA 2020 sebesar Rp9.214.872.027,00 merupakan jumlah nilai buku atas penghapusan aset tetap berdasarkan Keputusan sekretaris Daerah tentang penghapusan aset tetap SKPD dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.4.35 Rincian Defisit Penghapusan Aset Non Lancar**

Defisit Penghapusan Aset Non Lancar	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2020	Tahun 2019		
Defisit Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin	193.936.547,00	127.514.471,00	66.422.076,00	52,09



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Defisit Penghapusan Aset Non Lancar	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2020	Tahun 2019		
Defisit Penghapusan Aset Gedung dan Bangunan	2.307.798.972,00	1.608.329.651,00	699.469.321,00	43,49
Defisit Penghapusan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	120.393.147,00	28.305.000,00	92.088.147,00	325,34
Defisit Penghapusan Aset Tetap Lainnya	6.547.631.655,00	10.915.250,00	6.536.716.405,00	59.886,09
Defisit Penghapusan Aset Lain-lain	45.111.706,00	858.000,00	44.253.706,00	5.157,77
<b>Jumlah</b>	<b>9.214.872.027,00</b>	<b>1.775.922.372,00</b>	<b>7.438.949.655,00</b>	<b>418,88</b>

- a. Defisit penghapusan aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp193.936.547,00 merupakan nilai buku atas penghapusan aset pada beberapa SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.4.36 Daftar Nilai Buku Penghapusan Peralatan dan Mesin per SKPD**

No.	SKPD	Nama Barang	Nilai Aset Tetap (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Dinas Kesehatan	Alat kedokteran umum, alat kantor, peralatan personal komputer, personal komputer, alat kesehatan kebidanan, peralatan studio dan film, alat kesehatan, alat komunikasi, meubelair, kendaraan roda 4.	1.216.585.517,00	1.058.615.366,00	157.970.151,00
2	RSUD Hasan Basry	Ambulan, meubelair, alat rumah tangga, alat kedokteran umum, alat kedokteran lainnya, peralatan personal komputer	559.579.138,00	553.267.439,00	6.311.699,00
3	Dinas Perumahan Rakyat KPLH	GPS, laptop, notebook	30.382.500,00	30.382.500,00	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum TR	AC, personal komputer, peralatan personal komputer, alat kantor lainnya, meubelair	162.141.000,00	162.141.000,00	0,00
5	BPB Kesbangpol	Meja, kursi, kamera digital, handy talky, PC unit, LCD	77.360.300,00	77.268.633,00	91.667,00
6	Satuan Pol PP	Senjata	28.375.000,00	23.645.833,00	4.729.167,00
7	Dinas Sosial	Personal komputer	22.018.240,00	22.018.240,00	0,00
8	Dinas PPKBPPPA	Kendaraan roda 2, meubelair, personal komputer	48.058.000,00	48.058.000,00	0,00
9	Dinas Kependudukan dan Catpil	Meubelair, alat pendingin, alat rumah tangga lainnya, personal komputer, peralatan personal komputer	68.765.590,00	68.765.590,00	0,00
10	Dinas Perhubungan	Meubelair, AC, alat rumah tangga, personal komputer	79.075.000,00	79.075.000,00	0,00
11	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	Alat rumah tangga, peralatan studio visual, meubelair	105.219.500,00	102.007.956,00	3.211.544,00
12	Dinas Tenaga Kerja KUKP	Alat pendingin dan personal komputer	11.580.000,00	11.580.000,00	0,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	Meubelair, alat pendingin, peralatan personal komputer	35.539.400,00	32.763.247,00	2.776.153,00
14	Dinas Penanaman Modal PTSP	Alat pendingin, telepon, personal komputer	60.400.000,00	59.900.000,00	500.000,00
15	Dinas Ketahanan Pangan	Alat ukur, alat peternakan, mesin ketik, alat kantor lainnya, meubelair, kursi rapat, peralatan studio, komputer jaringan, personal komputer, peralatan personal komputer	185.830.000,00	185.830.000,00	0,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Alat pendingin, alat rumah tangga lainnya, personal komputer	13.440.000,00	13.440.000,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

No.	SKPD	Nama Barang	Nilai Aset Tetap (Rp)	Nilai Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
17	Dinas Pertanian	Hand traktor	204.184.800,00	204.184.800,00	0,00
18	Dinas Perdagangan	Tenda	191.350.000,00	182.956.668,00	8.393.332,00
19	Bagian Hukum	Personal komputer	36.380.900,00	36.380.900,00	0,00
20	Kelurahan Kandangan Utara	Personal komputer	5.588.000,00	4.249.208,00	1.338.792,00
21	Kecamatan Simpur	Meubelair dan kipas angin	2.237.500,00	2.222.917,00	14.583,00
22	Kecamatan Angkinang	Alat kantor lainnya, meubelair, meja kursi rapat, telepon	14.614.000,00	14.180.667,00	433.333,00
23	Kecamatan Telaga Langsat	Mesin ketik, alat rumah tangga, peralatan studio, peralatan personal komputer	41.994.000,00	41.994.000,00	0,00
24	Bappelitbangda	Personal komputer, peralatan personal komputer	7.419.000,00	6.731.625,00	687.375,00
25	BKD dan Diklat	Personal komputer, alat pendingin	107.233.190,00	104.694.127,00	2.539.063,00
26	Badan Keuangan Daerah	Alat kantor, meubelair, alat rumah tangga, studio visual, telepon, peralatan mini komputer, peralatan personal komputer	61.305.500,00	56.365.812,00	4.939.688,00
<b>Jumlah</b>			<b>3.376.656.075,00</b>	<b>3.182.719.528,00</b>	<b>193.936.547,00</b>

- b. Defisit penghapusan aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.307.798.972,00 berupa nilai buku atas penghapusan aset pada beberapa SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.4.37 Daftar Nilai Buku Penghapusan Gedung dan Bangunan per SKPD**

No.	SKPD	Nama Barang	Nilai Aset Tetap (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Dinas Pendidikan	Bangunan sekolah SDN Habirau Tengah 2 dan rumah dinas guru	598.225.000,00	121.112.740,00	477.112.260,00
2	Dinas Kesehatan	Bangunan Kesehatan, gedung kantor, rumah dinas, gedung aula	686.618.566,00	140.298.178,00	546.320.388,00
3	RSUD H. Hasan Basry	Bangunan RSUD	1.076.868.000,00	21.537.360,00	1.055.330.640,00
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	gedung serbagunan daha selatan	123.970.000,00	48.836.664,00	75.133.336,00
5	Dinas Ketahanan Pangan	bangunan gudang lumbung pangan dan lantai jemur	42.500.000,00	8.783.333,00	33.716.667,00
6	Bagian Umum	Asrama santri Buchari 2	263.795.565,00	158.697.197,00	105.098.368,00
7	Kecamatan Daha Utara	Bangunan gedung dan pagar kantor	126.380.000,00	111.292.687,00	15.087.313,00
<b>Jumlah</b>			<b>2.918.357.131,00</b>	<b>610.558.159,00</b>	<b>2.307.798.972,00</b>

- c. Defisit penghapusan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp120.393.147,00 terdiri dari nilai buku atas penghapusan saluran drainase (trotoar) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp51.210.000,00 dan nilai buku atas penghapusan jaringan lampu Asmaul Husna pada Dinas Perumahan Rakyat KPLH sebesar Rp69.183.147,00.
- d. Defisit penghapusan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp6.547.631.655,00 berupa penghapusan buku-buku pada Dinas Pendidikan.
- e. Defisit penghapusan Aset Lain-lain sebesar Rp45.111.706,00 berupa nilai



buku atas penghapusan aset lain-lain rusak berat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp3.249.998,00 berupa meubelair dan pada Inspektorat Kabupaten sebesar Rp41.861.708,00.

#### 5.4.4 POS LUAR BIASA

Saldo pos luar biasa terdiri atas pendapatan luar biasa dikurangi beban luar biasa. Tidak ada saldo yang menjadi pendapatan luar biasa maupun beban luar biasa selama tahun 2020. Berikut disajikan kenaikan/penurunan dibanding tahun 2019.

**Tabel 5.4.38 Rincian Pos Luar Biasa**

Pos Luar Biasa	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2020	Tahun 2019		
Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Luar Biasa	0,00	346.458.198,00	(346.458.198,00)	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>(346.458.198,00)</b>	<b>346.458.198,00</b>	<b>(100,00)</b>

#### 5.4.5 SURPLUS/DEFISIT

Surplus – LO TA 2020 berasal dari pos-pos pendapatan dikurangi pos-pos beban ditambah pos-pos dari kegiatan non operasional dan pos-pos luar biasa.

**Tabel 5.4.39 Rincian Surplus/Defisit – LO**

Surplus/(Defisit) - LO	Realisasi (Rp)		Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
	Tahun 2020	Tahun 2019		
Pendapatan - LO	1.287.066.299.658,35	1.408.702.738.747,54	(121.636.439.089,19)	(8,63)
Beban - LO	1.190.819.789.406,42	1.099.683.589.986,07	91.136.199.420,35	8,29
Surplus dari Kegiatan Operasi	96.246.510.251,93	309.019.148.761,47	(212.772.638.509,54)	(68,85)
Surplus/(Defisit) dari Keg. Non Operasional	(9.214.872.027,00)	(2.025.730.824,00)	(7.189.141.203,00)	354,89
Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	0,00	(346.458.198,00)	346.458.198,00	(100,00)
<b>Surplus - LO</b>	<b>87.031.638.224,93</b>	<b>306.646.959.739,47</b>	<b>(219.615.321.514,54)</b>	<b>(71,62)</b>



## 5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi aliran penerimaan dan pengeluaran kas yang meliputi Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris.

Penyajian Laporan Arus Kas didasarkan pada transaksi Kas Daerah yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah, serta kas yang dikelola oleh BLUD dan JKN.

**Tabel 5.5.1 Ringkasan Laporan Arus Kas**

Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Arus Kas Bersih dari aktivitas Operasi	229.320.335.838,11	428.748.984.367,81
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(202.248.028.805,27)	(340.809.800.055,75)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	19.454.000,00	72.750.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	5.324.638,00	7.103.318,00
<b>Kenaikan/ (Penurunan) Kas</b>	<b>27.097.085.670,84</b>	<b>88.019.037.630,06</b>
Saldo Awal Kas Daerah, BLUD, JKN, dan BOS	275.268.016.563,44	187.248.978.933,38
<b>Saldo Akhir Kas Daerah, BLUD, JKN, dan BOS</b>	<b>302.365.102.234,28</b>	<b>275.268.016.563,44</b>
<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>302.365.102.234,28</b>	<b>275.268.016.563,44</b>

### 5.5.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus kas bersih dari aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan TA 2020 sebesar Rp229.320.335.838,11 dan TA 2019 sebesar Rp428.748.984.367,81. Arus kas bersih aktivitas operasi tersebut merupakan selisih antara arus kas masuk dengan arus kas keluar, yang terdiri dari:

**Tabel 5.5.2 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi**

Arus Kas dari Aktivitas Operasi	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Arus Masuk Kas	1.353.468.377.199,86	1.494.039.313.638,81
Arus Keluar Kas	1.124.148.041.361,75	1.065.290.329.271,00
<b>Jumlah Arus Kas Bersih</b>	<b>229.320.335.838,11</b>	<b>428.748.984.367,81</b>

#### 5.5.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus masuk kas dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah dengan rincian sebagai berikut:



**Tabel 5.5.3 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi**

Arus Masuk Kas	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Penerimaan Pajak Daerah	12.046.129.929,00	14.412.031.504,00
Penerimaan Retribusi Daerah	8.461.009.994,00	15.116.946.827,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.801.193.114,00	3.149.352.464,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	176.765.666.456,86	135.134.211.299,81
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	19.777.001.790,00	21.048.655.712,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	202.605.832.404,00	259.067.374.884,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU)	482.100.383.000,00	538.186.183.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK)	159.918.084.762,00	239.651.436.191,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	192.156.860.000,00	148.706.398.200,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	70.261.383.049,00	88.414.416.882,00
Penerimaan Hibah	24.574.832.701,00	31.152.306.675,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>1.353.468.377.199,86</b>	<b>1.494.039.313.638,81</b>

Pos-pos arus masuk kas dari aktivitas operasi merupakan penerimaan Kas Daerah, BLUD, JKN, dan BOS sehingga mempunyai basis pengakuan yang sama dengan pengakuan pendapatan pada LRA. Namun, jika dibandingkan dengan LRA TA 2020, terdapat perbedaan antara jumlah arus masuk kas dari aktivitas operasi sebesar Rp1.353.468.377.199,86 dengan jumlah pendapatan pada LRA sebesar Rp1.353.819.885.219,86 atau terdapat selisih sebesar Rp351.508.020,00. Selisih tersebut disebabkan terdapat perbedaan penyajian hasil penjualan atas aset yang tidak dipisahkan yaitu pendapatan dari penjualan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp35.752.455,00; penjualan gedung dan bangunan sebesar Rp263.795.565,00; dan penjualan jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp51.960.000,00, yakni pada LRA disajikan sebagai pendapatan sedangkan pada LAK disajikan sebagai arus masuk kas dari aktivitas investasi.

#### 5.5.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus keluar kas dari aktivitas operasi dipergunakan untuk pengeluaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan bantuan keuangan, serta belanja tidak terduga, juga termasuk pengeluaran untuk pembayaran transfer bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.4 Rincian Arus Keluar Kas**

Arus Keluar Kas	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Pembayaran Pegawai	468.226.677.267,00	475.340.937.446,75
Pembayaran Barang	385.945.661.462,75	326.935.755.106,25
Pembayaran Hibah	27.917.073.003,00	34.971.036.943,00
Pembayaran Bantuan Sosial	24.221.010.756,00	27.951.393.677,00
Pembayaran Tak Terduga	22.165.472.553,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Arus Keluar Kas	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	1.274.000.000,00	1.290.000.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	1.014.000.000,00	1.550.000.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	193.384.146.320,00	197.251.206.098,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>1.124.148.041.361,75</b>	<b>1.065.290.329.271,00</b>

Pos-pos arus keluar kas dari aktivitas operasi merupakan pengeluaran Kas Daerah, BLUD, JKN, dan BOS sehingga mempunyai basis pengakuan yang sama dengan pengakuan belanja operasi pada LRA. Namun, jika dibandingkan dengan LRA TA 2020, terdapat perbedaan antara jumlah arus keluar kas dari aktivitas operasi sebesar Rp1.124.148.041.361,75 dengan jumlah belanja operasi pada LRA sebesar Rp906.310.422.488,75 atau terdapat selisih Rp217.837.618.873,00. Selisih tersebut adalah belanja tak terduga sebesar Rp22.165.472.553,00 dan belanja transfer sebesar Rp195.672.146.320,00 pada LRA yang bukan merupakan belanja operasi namun dalam LAK disajikan sebagai arus keluar kas dari aktivitas operasi.

#### 5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Saldo arus kas dari aktivitas investasi TA 2020 sebesar Rp202.248.028.805,27 dan TA 2019 sebesar Rp340.809.800.055,75. Arus kas bersih dari aktivitas investasi terdiri atas selisih arus masuk dan arus kas keluar, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.5 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi**

Arus Kas dari Aktivitas Investasi	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Arus Masuk Kas	351.508.020,00	178.109.400,00
Arus Keluar Kas	202.599.536.825,27	340.987.909.455,75
<b>Jumlah Arus Kas Bersih</b>	<b>(202.248.028.805,27)</b>	<b>(340.809.800.055,75)</b>

#### 5.5.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus masuk kas dari aktivitas investasi berasal dari penerimaan yang bersumber dari aset tetap. Arus masuk kas dari aktivitas investasi berasal dari penjualan peralatan mesin, jalan, irigasi dan jaringan. Pada LRA pendapatan tersebut disajikan pada pos Lain-lain PAD yang Sah.

**Tabel 5.5.6 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi**

Arus Masuk Kas	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Penjualan Peralatan dan Mesin	35.752.455,00	1.699.400,00
Penjualan Bangunan dan Gedung	263.795.565,00	148.855.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Arus Masuk Kas	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan	51.960.000,00	27.555.000,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>351.508.020,00</b>	<b>178.109.400,00</b>

Pos-pos arus masuk kas dari aktivitas investasi TA 2020 terdiri dari:

1. Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp35.752.455,00 memiliki nilai yang sama dengan di LRA yang merupakan hasil penjualan lelang Peralatan dan Mesin berupa penjualan kendaraan dinas dengan SK Bupati Nomor 188.45/386/KUM/2020 tentang Penetapan Pemenang Lelang Peralatan, Perlengkapan dan Mesin Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Melalui Lelang Umum Tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.7 Rincian Penjualan Hasil Lelang Peralatan dan Mesin TA 2020**

No.	Nama Barang	Jumlah (Unit)	Harga Lelang (Rp)
1	Air conditioner	13	3.210.000,00
2	Laptop dan Notebook	42	21.125.000,00
3	Personal komputer	41	5.222.222,00
4	Bangku tunggu	8	1.256.789,00
5	Tenda	14	3.578.999,00
6	UPS dan lainnya	7	567.890,00
7	TV dan elektronik lainnya	5	238.955,00
8	Genset Yamaha	1	555.500,00
<b>Jumlah</b>			<b>35.755.355,00</b>

Terdapat perbedaan jumlah harga lelang pada SK Penetapan Pemenang Lelang dengan yang diterima di Kasda sebesar Rp2.900,00 yang merupakan biaya setor/transfer dari KPKNL.

2. Penjualan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp263.795.565,00 berupa ganti rugi pembongkaran asrama putra Buchari di Kabupaten Banjar.
3. Penjualan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp51.960.000,00 berupa biaya kompensasi pembongkaran trotoar dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.8 Rincian Pembongkaran Trotoar**

No.	Surat Keputusan Sekretaris Daerah	Jenis Barang	Lokasi/Alamat	Panjang	Biaya Ganti Rugi (Rp)
1	No 5 Tahun 2020	Saluran Drainase	Jl. A. Yani	6,8 meter	6.120.000,00
2	Nomor 5 Tahun 2020	Saluran Drainase	Jl. Jend Sudirman	1,50 meter	1.350.000,00
3	Nomor 5 Tahun 2020	Saluran Drainase	Jl. Musyawarah - Jl. Panglima Batur	4,9 meter	4.410.000,00
4	Nomor 5 Tahun 2020	Saluran Drainase	Jl. A.Yani	1 meter	900.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

No.	Surat Keputusan Sekretaris Daerah	Jenis Barang	Lokasi/Alamat	Panjang	Biaya Ganti Rugi (Rp)
5	Nomor 6 Tahun 2020	Saluran Drainase	Jl. S Parman	3,3 meter	2.970.000,00
6	Nomor 8 Tahun 2020	Saluran Drainase	Jl. A. Yani	10,05 meter	9.045.000,00
7	Nomor 10 Tahun 2020	Saluran Drainase	Jl. A. Yani	7 meter	6.300.000,00
8	Nomor 10 Tahun 2020	Saluran Drainase	Jl. A. Yani	5,2 meter	4.680.000,00
9	Nomor 12 Tahun 2020	Saluran Drainase	Jl. A. Yani	1,85 meter	1.665.000,00
10	Nomor 12 Tahun 2020	Saluran Drainase	Jl. A. Yani	12,3 meter	11.070.000,00
11	Nomor 14 Tahun 2021	Saluran Drainase	Kec.Kandangan	3 meter	2.700.000,00
12	Kekurangan setor tahun 2019	Saluran Drainase			750.000,00
<b>Total</b>					<b>51.960.000,00</b>

### 5.5.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus keluar kas dari aktivitas investasi merupakan pengeluaran kas untuk perolehan aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.9 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi**

Arus Keluar Kas	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Perolehan Tanah	5.665.753.150,00	19.667.528.871,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	46.653.731.769,00	49.819.929.451,00
Perolehan Bangunan dan Gedung	57.811.004.588,92	117.039.470.166,00
Perolehan Jalan Irigasi dan Jaringan	90.023.175.380,35	149.267.120.517,75
Perolehan Aset Tetap Lainnya	2.338.663.937,00	4.844.160.450,00
Perolehan Aset Lainnya	107.208.000,00	349.700.000,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>202.599.536.825,27</b>	<b>340.987.909.455,75</b>

Arus keluar kas dari aktivitas investasi memiliki nilai yang sama dengan realisasi belanja modal pada LRA yaitu sebesar Rp202.599.536.825,27.

### 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan/pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka pembiayaan atau pemberian pinjaman. Arus kas bersih dari aktivitas investasi terdiri atas selisih arus masuk dan arus kas keluar, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.11 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan**

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Arus Masuk Kas	19.454.000,00	72.750.000,00
Arus Keluar Kas	0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Bersih</b>	<b>19.454.000,00</b>	<b>72.750.000,00</b>



### 5.5.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan/pembiayaan berasal dari penerimaan kembali investasi permanen dan pinjaman daerah. Pada LRA pendapatan tersebut disajikan pada pos penerimaan pembiayaan.

**Tabel 5.5.12 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan**

Arus Masuk Kas	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Penerimaan Kembali Piutang	5.504.000,00	30.750.000,00
Penerimaan Hasil Investasi Non Permanen	13.950.000,00	42.000.000,00
<b>Jumlah Arus Kas Bersih</b>	<b>19.454.000,00</b>	<b>72.750.000,00</b>

Rincian arus masuk kas dari aktivitas pendanaan/pembiayaan terdiri dari:

1. Penerimaan kembali piutang daerah sebesar Rp5.504.000,00 berupa:
  - Penerimaan atas pengembalian BUMDes pada Kecamatan Kandangan yaitu Bumdes Bumi Antaludin sebesar Rp4.504.000,00.
  - Penerimaan atas pengembalian piutang pinjaman DPM LUEP atas nama Hamdi (LUEP Karya Bersama) Desa Paharangan Kecamatan Daha Utara sebesar Rp1.000.000,00 pada Dinas Ketahanan Pangan.
2. Penerimaan Hasil Investasi Non Permanen sebesar Rp13.950.000,00 berupa angsuran hasil investasi non permanen pengembangan sapi pada Dinas Pertanian.

### 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris merupakan aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Arus kas dari aktivitas transitoris yang disajikan dalam laporan arus kas merupakan arus kas pada kas daerah yang dikelola oleh BAKEUDA selaku PPKD dan bagian kas daerah yang dikelola oleh BLUD dan JKN.

**Tabel 5.5.14 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris**

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Arus Masuk Kas	109.920.783.970,10	85.974.853.578,50
Arus Keluar Kas	109.915.459.332,10	85.967.750.260,50
<b>Jumlah Arus Kas Bersih</b>	<b>5.324.638,00</b>	<b>7.103.318,00</b>

#### 5.5.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris terdiri dari rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.15 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris**

Arus Masuk Kas	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	59.602.495.610,10	76.744.443.778,50



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Arus Masuk Kas	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
- IWP	19.388.671.167,00	
- Taperum	253.028.000,00	
- Pajak Penghasilan	19.918.377.348,10	
- PPN	20.029.991.139,00	
- Utang Pajak Dana BOS TA 2020	12.427.956,00	
Pertanggungjawaban Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan:	28.229.114.583,00	8.435.548.595,00
- UP	5.060.198.022,00	
- TU	23.168.916.561,00	
Pengembalian Sisa Kas di Bend. Pengeluaran TA 2019	22.089.173.777,00	794.861.205,00
- setoran sisa UP	353.801.978,00	
- setoran sisa TU	21.735.371.799,00	
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>109.920.783.970,10</b>	<b>85.974.853.578,50</b>

#### 5.5.4.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris terdiri dari rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.16 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris**

Arus Keluar Kas	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	59.597.170.972,10	76.737.340.460,50
- IWP	19.388.671.167,00	
- Taperum	253.028.000,00	
- Pajak Penghasilan	19.918.377.348,10	
- PPN	20.029.991.139,00	
- Utang Pajak Dana BOS TA 2019	7.103.318,00	
Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan	0,00	0,00
Penempatan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan:	50.318.288.360,00	9.230.409.800,00
- UP	5.414.000.000,00	
- TU	44.904.288.360,00	
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>109.915.459.332,10</b>	<b>85.967.750.260,50</b>

#### 5.5.5 Kenaikan/(Penurunan Kas)

Kenaikan atau penurunan kas adalah jumlah semua arus kas bersih dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5.17 Rincian Kenaikan/(Penurunan) Kas**

Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Arus Kas Bersih dari aktivitas Operasi	229.320.335.838,11	428.748.984.367,81
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Invesatsi	(202.248.028.805,27)	(340.809.800.055,75)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	19.454.000,00	72.750.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	5.324.638,00	7.103.318,00
<b>Jumlah Kenaikan/(Penurunan) Kas</b>	<b>27.097.085.670,84</b>	<b>88.019.037.630,06</b>

### 5.5.6 Saldo Akhir Kas

Saldo akhir kas adalah saldo akhir pada Kas Daerah, Kas BLUD, Kas Dana JKN, dan Kas Dana BOS yang memiliki nilai yang sama dengan SiLPA pada LRA. Perhitungan saldo akhir kas adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.5.18 Rincian Saldo Akhir Kas**

Uraian	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
Saldo Awal Kas Daerah, BLUD, JKN, dan BOS	275.268.016.563,44	187.248.978.933,38
Kenaikan/(Penurunan) Kas	27.097.085.670,84	88.019.037.630,06
Saldo Akhir Kas Daerah, BLUD, JKN, dan BOS	302.365.102.234,28	275.268.016.563,44
<b>Jumlah Saldo Akhir Kas</b>	<b>302.365.102.234,28</b>	<b>275.268.016.563,44</b>

Terdapat perbedaan saldo akhir kas tahun 2020 sebesar Rp302.365.102.234,28 dengan SiLPA pada LRA sebesar Rp302.352.674.278,28 yaitu sebesar Rp12.427.956,00. Nilai tersebut merupakan Kas Lainnya utang pajak Dana Bos tahun 2020.



## 5.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas TA 2020 dibandingkan dengan TA 2019. Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.411.000.311.989,37 berasal dari saldo awal Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.279.100.874.054,66 ditambah surplus TA 2020 sebesar Rp87.031.638.224,93 ditambah koreksi ekuitas TA 2020 sebesar Rp44.867.799.709,78.

**Tabel 5.6.1 Laporan Perubahan Ekuitas**

URAIAN	2020 (Rp)	2019 (Rp)
EKUITAS AWAL	3.279.100.874.054,66	2.779.727.516.432,16
SURPLUS/DEFISIT - LO	87.031.638.224,93	306.646.959.739,47
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	(22.017,02)	(1.144.373.220,06)
Koreksi Ekuitas - Penyusutan dan Amortisasi	15.819.972.392,00	248.918.695.491,00
Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang	1.782.141.496,80	1.185.744.507,00
Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	1.013.430.550,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Mutasi Aset Tetap antar SKPD	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Kewajiban Jangka Pendek	19.688.954.842,00	24.179.409.916,00
Koreksi Ekuitas - Piutang	1.956.239.730,00	(80.413.078.810,91)
Koreksi Ekuitas - BTT Covid-19	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas - Perubahan Regulasi	4.607.082.716,00	0,00
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>3.411.000.311.989,37</b>	<b>3.279.100.874.054,66</b>

### 5.6.1 EKUITAS AWAL

Ekuitas awal tahun 2020 sebesar Rp3.279.100.874.054,66 berasal dari saldo ekuitas per 31 Desember 2019. Saldo ekuitas per 31 Desember 2019 berasal dari ekuitas awal sebesar Rp2.779.727.516.432,16 ditambah surplus – LO tahun 2019 sebesar Rp306.646.959.739,47 ditambah koreksi ekuitas tahun 2019 sebesar Rp192.726.397.883,03.

1. Ekuitas awal TA 2019 berasal dari saldo ekuitas akhir per 31 Desember 2018.
2. Surplus/(Defisit) – LO TA 2019 berasal dari pendapatan – LO dikurangi Beban TA 2019 (lihat juga Laporan Operasional untuk tahun 2019).
3. Koreksi ekuitas tahun 2019 sebesar Rp192.726.397.883,03 berasal dari koreksi penambahan dan pengurangan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

**Tabel 5.6.2 Rincian Koreksi Ekuitas TA 2019**

<b>Koreksi yang menambah Ekuitas TA 2020</b>	<b>(Rp)</b>
Penyesuaian atas mutasi tambah (masuk) aset tetap antar SKPD	94.189.064.812,00
Penyesuaian atas mutasi tambah (masuk) akumulasi penyusutan aset tetap antar SKPD	3.730.486.904,00
Penyesuaian atas koreksi piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	0,48
Penyesuaian atas koreksi piutang Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan)	1.460.005.175,00
Penyesuaian atas koreksi saldo awal utang dana desa karena lebih catat	307.157.200,00
Penyesuaian atas koreksi saldo awal utang jasa pelayanan kesehatan karena kurang catat	113.900,00
Penyesuaian atas koreksi saldo awal piutang bunga deposito	1.414.033,61
Penyesuaian atas koreksi saldo awal penyusutan Gedung dan Bangunan karena kapitalisasi aset	1.923.154.626,00
Penyesuaian atas koreksi saldo awal penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan karena kapitalisasi aset	246.995.540.865,00
Penyesuaian atas pelunasan utang dana bagi hasil Pemerintah Pusat	94.262.349.570,00
Penyesuaian atas pencatatan penyisihan INP yang sudah habis disisihkan tahun 2019	42.000.000,00
Penyesuaian atas pencatatan penyisihan Piutang PBB yang sudah habis disisihkan tahun 2019	1.096.979.607,00
Penyesuaian atas pencatatan penyisihan piutang retribusi toko (pasar) yang sudah habis disisihkan tahun 2019	85.564.900,00
Penyesuaian atas pencatatan penyisihan piutang bagian lancar TPA (hand traktor) yang sudah habis disisihkan tahun 2019	200.000,00
Penyesuaian atas pencatatan penyisihan piutang pinjaman LUEP yang sudah habis disisihkan tahun 2019	3.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>444.097.031.593,09</b>
<b>Koreksi yang mengurangi Ekuitas TA 2020</b>	<b>(Rp)</b>
Penyesuaian atas mutasi kurang (keluar) aset tetap antar SKPD	94.189.064.812,00
Penyesuaian atas mutasi kurang (keluar) akumulasi penyusutan aset tetap antar SKPD	3.730.486.904,00
Penyesuaian nilai penyertaan modal dengan metode ekuitas serta bagian laba audited pada PDAM Tirta Mandiri	1.186.373.220,06
Penyesuaian atas pelunasan piutang Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan)	80.779.991.190,00
Penyesuaian atas koreksi piutang PBB	1.094.506.830,00
Penyesuaian atas koreksi saldo awal utang jasa pelayanan kesehatan karena lebih catat	7.968.000,00
Penyesuaian atas koreksi utang dana bagi hasil Pemerintah Pusat	70.382.242.754,00
<b>Jumlah</b>	<b>251.370.633.710,06</b>
<b>Jumlah Koreksi Ekuitas TA 2020</b>	<b>192.726.397.883,03</b>

### 5.6.2 SURPLUS/(DEFISIT) – LO TA 2020

Surplus – LO TA 2020 sebesar Rp87.031.638.224,93 berasal dari pendapatan dikurangi beban TA 2020. Mengenai hal tersebut, lihat juga penjelasan atas Laporan Operasional.

### 5.6.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN MENDASAR

Koreksi ekuitas berupa koreksi yang menambah maupun mengurangi selama TA 2020. Koreksi ekuitas tersebut terdiri atas:



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020 dan 2019

**Tabel 5.6.3 Rincian Koreksi Ekuitas TA 2020**

<b>Koreksi yang menambah Ekuitas TA 2020</b>	<b>(Rp)</b>
Penyesuaian atas koreksi saldo awal kurang catat bagian laba penyertaan modal pada PDAM (pembulatan desimal tahun 2019)	0,25
Penyesuaian atas pelunasan penyisihan piutang retribusi menara	15.325,00
Penyesuaian atas penyisihan piutang DPM LUEP	1.000.000,00
Penyesuaian atas penyisihan piutang retribusi pasar grosir	63.720.050,00
Penyesuaian atas penyisihan investasi non permanen	13.950.000,00
Penyesuaian atas penyisihan piutang retribusi pelayanan kesehatan	11.558.954,00
Penyesuaian atas penyisihan piutang PBB	997.617,80
Penyesuaian atas penyisihan piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Hand Traktor	1.500.000,00
Penyesuaian atas penyisihan piutang BLUD	1.689.399.550,00
Penyesuaian atas mutasi kurang (keluar) akumulasi penyusutan aset tetap antar SKPD	7.064.960.322,00
Penyesuaian atas pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap karena kapitalisasi	15.819.576.106,00
Penyesuaian atas pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap karena dihibahkan	396.286,00
Penyesuaian atas penilaian aset tetap Tanah yang bernilai nol	1.002.130.550,00
Penyesuaian atas pengakuan aset tetap Peralatan dan Mesin	11.300.000,00
Penyesuaian atas mutasi tambah (masuk) aset tetap antar SKPD	52.240.771.549,00
Penyesuaian atas koreksi saldo awal lebih catat utang jasa pelayanan kesehatan	28.170.000,00
Penyesuaian atas pelunasan utang dana bagi hasil Pemerintah Pusat (lebih bayar PMK No.113 Tahun 2020)	70.382.242.754,00
Penyesuaian atas koreksi piutang Transfer Pemerintah Pusat (kurang bayar PMK No.25 Tahun 2021)	173.948.159,00
Penyesuaian atas koreksi saldo awal kurang catat piutang transfer Pemerintah Provinsi (Pajak Rokok tahun 2019)	3.289.246.746,00
Penyesuaian atas pengurangan reklasifikasi antar KIB akumulasi penyusutan aset tetap karena perubahan regulasi	4.607.082.716,00
<b>Jumlah</b>	<b>156.401.966.685,00</b>
<b>Koreksi yang mengurangi Ekuitas TA 2020</b>	<b>(Rp)</b>
Penyesuaian atas koreksi saldo awal lebih catat bagian laba penyertaan modal pada BPR (LK audited 2019)	22.016,85
Penyesuaian atas koreksi saldo awal lebih catat penyertaan modal pada BPR (pembulatan desimal tahun 2019)	0,42
Penyesuaian atas mutasi tambah (masuk) akumulasi penyusutan aset tetap antar SKPD	7.064.960.322,00
Penyesuaian atas mutasi kurang (keluar) aset tetap antar SKPD	52.240.771.549,00
Penyesuaian atas koreksi saldo awal lebih catat piutang retribusi pelayanan kesehatan tahun 2019	46.950.000,00
Penyesuaian atas koreksi utang dana bagi hasil Pemerintah Pusat (lebih bayar PMK No. 113 Tahun 2020)	49.769.108.658,00
Penyesuaian atas pelunasan piutang Transfer Pemerintah Pusat (kurang bayar PMK No. 113 Tahun 2020)	1.460.005.175,00
Penyesuaian atas koreksi saldo awal utang belanja pegawai anggota DPRD	952.349.254,00
<b>Jumlah</b>	<b>111.534.166.975,27</b>
<b>Jumlah Koreksi Ekuitas TA 2020</b>	<b>44.867.799.709,78</b>

Penjelasan mengenai masing-masing komponen Koreksi Ekuitas dapat diuraikan sebagai berikut:



#### **5.6.3.1 Koreksi Ekuitas Lainnya**

Koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp22.017,02 terdiri atas transaksi sebagai berikut:

- Penyesuaian atas koreksi saldo awal kelebihan catat bagian laba penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT BPR HSS berdasarkan Laporan Keuangan 2019 *Audited* berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh KAP Drs. Basri Hardjosumarto, M.Si.,Ak. & Rekan Nomor: ML-49/BHS.VI/P/2020 tanggal 11 Juni 2020 Rp22.016,85.
- Penyesuaian atas koreksi lebih catat penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT BPR HSS karena pembulatan decimal sebesar Rp0,42.
- Penyesuaian atas koreksi kurang catat hitungan bagian laba penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Dharma HSS karena pembulatan desimal sebesar Rp0,25.

#### **5.6.3.2 Koreksi Ekuitas – Penyusutan dan Amortisasi**

Akun ini merupakan pos untuk menampung amortisasi dan penyusutan atas mutasi aset tetap antar SKPD dan koreksi saldo awal. Koreksi atas penyusutan dan amortisasi sebesar Rp15.819.972.392,00 terdiri pengurangan akumulasi penyusutan aset tetap karena hal-hal sebagai berikut:

- Kapitalisasi penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.182.418.183,00; dan
- Kapitalisasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp12.637.157.923,00.
- Penghapusan penyusutan karena dihibahkan sebesar Rp396.286,00.

Selain itu terdapat *nett-off* koreksi atas penyusutan mutasi masuk aset tetap dari SKPD lain sebesar dan penyusutan mutasi keluar aset tetap dari SKPD lain dengan nilai yang sama sebesar Rp7.064.960.322,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.586.026.185,00 ; dan
- Aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.024.810.459,00;
- Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp454.123.678,00.

#### **5.6.3.3 Koreksi Ekuitas – Penyisihan Piutang**

Koreksi ekuitas penyisihan piutang sebesar Rp1.782.141.496,80 merupakan koreksi atas penyisihan piutang yang sudah habis disisihkan tahun sebelumnya ataupun atas piutang yang sudah diterimas pembayarannya dengan rincian sebagai berikut:

- Koreksi penyisihan piutang PBB sebesar Rp997.617,80;
- Koreksi penyisihan piutang retribusi pasar grosir sebesar Rp63.720.050,00;
- Koreksi penyisihan piutang retribusi menara telekomunikasi sebesar Rp15.325,00;



- Koreksi penyisihan piutang BLUD sebesar Rp1.689.399.550,00;
- Koreksi penyisihan piutang pelayanan kesehatan sebesar Rp11.558.954,00;
- Koreksi penyisihan piutang pinjaman LUEP sebesar Rp1.000.000,00;
- Koreksi penyisihan piutang bagian lancar tagihan penjualan angsuran (hand traktor) sebesar Rp1.500.000,00; dan
- Koreksi penyisihan investasi non permanen sebesar Rp13.950.000,00.

#### **5.6.3.4 Koreksi Ekuitas – Aset Tetap**

Koreksi ekuitas – aset tetap sebesar Rp1.013.430.550,00 merupakan rekening untuk mengakomodir pengakuan aset tetap yang bernilai nol ataupun yang belum diakui keberadaannya meliputi:

- Pengakuan aset tetap Tanah yang bernilai nol sebesar Rp1.002.130.550,00; dan
- Pengakuan aset tetap Peralatan dan Mesin berupa kendaraan roda 2 yang belum diakui keberadaannya sebesar Rp11.300.000,00.

#### **5.6.3.5 Koreksi Ekuitas – Mutasi Aset Tetap antar SKPD**

Koreksi Ekuitas – mutasi aset tetap antar SKPD sebesar Rp0,00 merupakan *nett-off* koreksi atas mutasi masuk aset tetap dari SKPD lain sebesar dan mutasi keluar aset tetap dari SKPD lain dengan nilai yang sama sebesar Rp52.240.771.549,00 dengan rincian mutasi per KIB sebagai berikut:

- Aset Tetap Tanah sebesar Rp494.450.000,00;
- Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.785.732.813,00;
- Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp46.236.342.736,00; dan
- Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp724.246.000,00.

#### **5.6.3.6 Koreksi Ekuitas – Kewajiban Jangka Pendek**

Koreksi ekuitas – kewajiban jangka pendek sebesar Rp19.688.954.842,00 merupakan penyesuaian atas koreksi saldo awal karena lebih catat utang jasa pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp28.170.000,00; selisih pencatatan utang dana perimbangan (lebih bayar dana transfer Pemerintah Pusat) tahun 2019 dan tahun 2020 sebesar Rp20.613.134.096,00; serta kurang catat utang belanja pegawai anggota DPRD bulan Desember Tahun 2019 sebesar Rp952.349.254,00.

#### **5.6.3.7 Koreksi Ekuitas – Piutang**

Koreksi ekuitas piutang sebesar Rp1.956.239.730,00 terdiri dari koreksi saldo awal piutang dan koreksi penyesuaian karena verifikasi, meliputi:

- Koreksi saldo awal atas lebih catat piutang retribusi pelayanan kesehatan tahun 2019 sebesar Rp46.950.000,00;



- Koreksi saldo awal atas kurang catat piutang transfer Pemerintah Daerah Lainnya (dana bagi hasil pajak Provinsi) berupa bagi hasil pajak rokok bulan Desember tahun 2019 sesuai Peraturan Gubernur Nomor 054 Tahun 2020 sebesar Rp3.289.246.746,00; dan
- Pengurangan selisih piutang dana perimbangan (kurang bayar dana transfer Pemerintah Pusat) tahun 2019 dan 2020 sebesar Rp1.286.057.016,00.

### 5.6.3.8 Koreksi Ekuitas - Perubahan Regulasi

Koreksi ekuitas – perubahan regulasi sebesar Rp4.607.082.716,00 merupakan koreksi ekuitas atas reklasifikasi akumulasi penyusutan aset tetap antar KIB karena Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah. Koreksi ekuitas ini muncul karena terdapat masa manfaat yang berbeda atas barang yang direklasifikasi sesuai perubahan regulasi tersebut pada beberapa SKPD sebagai berikut:

**Tabel 5.6.4 Rincian Reklasifikasi Penyusutan Aset Tetap akibat Perubahan Regulasi**

No.	SKPD	Jumlah (Rp)	Dari KIB	Ke KIB	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	41.260.418,00	KIB E (Aset Tetap Lainnya)	KIB B (Peralatan dan Mesin)	Peralatan Olahraga
		1.054.166,00	KIB C (Gedung dan Bangunan)	KIB B (Peralatan dan Mesin)	Rambu/papan nama
		77.578,00	KIB D (Jalan, Irigasi, Jaringan)	KIB C (Gedung dan Bangunan)	Bangunan RTH
		834.167,00	KIB C (Gedung dan Bangunan)	KIB B (Peralatan dan Mesin)	Teralis
2	RSUD H. Hasan Basry	212.500,00	KIB C (Gedung dan Bangunan)	KIB B (Peralatan dan Mesin)	Rambu/papan nama
3	Dinas Perumahan Rakyat KPLH	433.125,00	KIB C (Gedung dan Bangunan)	KIB B (Peralatan dan Mesin)	Rambu/papan nama
		2.442.929.716,00	KIB D (Jalan, Irigasi, Jaringan)	KIB C (Gedung dan Bangunan)	Bangunan Taman
4	Dinas Sosial	121.667,00	KIB C (Gedung dan Bangunan)	KIB B (Peralatan dan Mesin)	Teralis
5	Dinas Perhubungan	305.318.957,00	KIB C (Gedung dan Bangunan)	KIB B (Peralatan dan Mesin)	Rambu/papan nama
		1.312.538.000,00	KIB D (Jalan, Irigasi, Jaringan)	KIB B (Peralatan dan Mesin)	Pengaman Jalan
6	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	793.335,00	KIB E (Aset Tetap Lainnya)	KIB B (Peralatan dan Mesin)	Peralatan Olahraga
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	340.000,00	KIB C (Gedung dan Bangunan)	KIB B (Peralatan dan Mesin)	Teralis
8	Dinas Pertanian	11.221.793,00	KIB C (Gedung dan Bangunan)	KIB B (Peralatan dan Mesin)	Teralis
9	Dinas Perdagangan	482.843.361,00	KIB D (Jalan, Irigasi, Jaringan)	KIB C (Gedung dan Bangunan)	Bangunan Taman dan lampu sorot
10	Kecamatan Angkinang	408.333,00	KIB C (Gedung dan Bangunan)	KIB B (Peralatan dan Mesin)	Teralis
11	Kecamatan Daha Selatan	2.445.600,00	KIB C (Gedung dan Bangunan)	KIB B (Peralatan dan Mesin)	Teralis
		4.250.000,00	KIB E (Aset Tetap Lainnya)	KIB B (Peralatan dan Mesin)	Peralatan Olahraga
<b>Total</b>		<b>4.607.082.716,00</b>			



#### **5.6.4 EKUITAS AKHIR**

Jumlah Ekuitas Akhir per 31 Desember 2020 merupakan Ekuitas Awal sebesar Rp3.279.100.874.054,66 ditambah surplus sebesar Rp87.031.638.224,93 ditambah koreksi ekuitas sebesar Rp44.867.799.709,78 sama dengan ekuitas akhir sebesar Rp3.411.000.311.989,37.



## **BAB VI**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI –INFORMASI NON KEUANGAN DAN KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA**

#### **6.1 PERATURAN TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Dengan telah diterbitkannya beberapa peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, maka Pemerintah Daerah harus menyusun Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah termasuk di dalamnya Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun 2010. Seiring dengan berjalannya waktu maka Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi, yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menyusun draf dimaksud dan pada akhir tahun 2011 lalu ditetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 0177 Tahun 2011 tentang Sistem Prosedur Kebijakan Akuntansi dan juga Peraturan Bupati tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Nomor 0176 Tahun 2011 pada Tanggal 26 Desember 2011.

Pada Tahun 2016 Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah direvisi kembali sebagai tindak lanjut atas temuan BPK dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan No. 91 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selain itu pada tahun 2016 diterbitkan juga Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan No. 50 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pada Tahun 2020 Kebijakan Akuntansi direvisi kembali sebagai tindak lanjut atas temuan BPK dan penyesuaian atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Masa Manfaat dan Penyusutan Barang Milik Daerah.

Pada tanggal 16 Desember 2019 ditetapkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/394/KUM/2019 tentang Penghapusan Penyertaan Modal Lembaga Pembiayaan Usaha Kecil pada Neraca Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan



Nomor 188.44/097/KUM/2017 tentang Pembubaran Lembaga Pembiayaan Usaha Kecil dan Badan Kredit Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

## **6.2 PERATURAN TERKAIT PERUBAHAN SOTK (STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA)**

Perubahan SOTK di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilakukan untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menyebutkan bahwa “Pelaksanaan pemetaan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah diselesaikan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan” (Ketentuan Penutup Pasal 124).

Perubahan SOTK ini tidak bisa lepas dari perkembangan organisasi yang memang menuntut untuk adanya perubahan menyangkut berubahnya struktur organisasi, nomenklatur, dan tupoksi. Latar belakang perubahan SOTK di Kabupaten Hulu Sungai Selatan didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12).

Susunan Organisasi SKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri atas: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 14 Dinas, 10 Lembaga Teknis, 11 Kecamatan, dan 4 Kelurahan. Terkait dengan adanya perubahan SOTK di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bahwa adanya pemisahan, penggabungan, peleburan, dan pemekaran dari beberapa dinas, kantor dan badan, diantaranya:

1. Dinas Pertambangan dan Energi serta Dinas Kehutanan diambil alih Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Muncul 2 dinas baru yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang merupakan pecahan dari Badan KB serta Dinas Komunikasi dan Informatika yang dipecah dari Dinas Perhubungan.
3. Dinas Lingkungan Hidup Tata Kota dan Perdesaan menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (bergabung dengan DPU) serta menjadi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup.
4. Beberapa dinas yang berubah nama diantaranya:
  - a. BAPPEDA menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
  - b. Badan KB dan PMP menjadi Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
  - c. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Dinas Sosial.
  - d. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM menjadi Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian.
  - e. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata.



- f. Kantor Pengelola Pasar menjadi Dinas Perdagangan.
- g. DPPKAD menjadi Badan Keuangan Daerah
- h. Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- i. Badan Penyuluh dan Ketahanan Pangan menjadi Dinas Ketahanan Pangan
- j. Dinas Perikanan dan Peternakan menjadi Dinas Perikanan
- k. Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Daerah menjadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

### 6.3 KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

#### 6.3.1 Peraturan Gubernur tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Provinsi Triwulan IV Tahun 2020

Alokasi dana bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Pajak Air Permukaan (PAP), serta Pajak Rokok ditetapkan untuk periode tiga bulan (Triwulan) melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan, Alokasi dana bagi hasil pajak-pajak tersebut untuk Triwulan IV (periode Oktober sampai dengan Desember 2020) ditetapkan setelah tanggal neraca dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 6.3.1 Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Triwulan IV Tahun 2020**

Uraian	Bagi Hasil Pajak	Alokasi (Rp)	Peraturan Gubernur Kalsel (Pergub)
Alokasi Triwulan IV TA 2020	PKB	2.144.673.614,00	Nomor 015 Tahun 2021
Alokasi Triwulan IV TA 2020	BBNKB	1.547.157.763,00	Nomor 015 Tahun 2021
Alokasi Triwulan IV TA 2020	PBBKB	9.012.714.533,00	Nomor 017 Tahun 2021
Alokasi Triwulan IV TA 2020	PAP	25.683.753,00	Nomor 018 Tahun 2021
Alokasi Oktober - November 2020	Pajak Rokok	2.356.496.733,00	Nomor 016 Tahun 2021
<b>J U M L A H</b>		<b>15.086.726.396,00</b>	



## BAB VII PENUTUP

Berdasarkan penjelasan pada Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara teknis telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Pelaporan Pelaksanaan Anggaran pada Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui Badan Keuangan Daerah berusaha melaksanakan secara konsisten peraturan perundang-undangan dalam bidang keuangan untuk memenuhi amanat pengelolaan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Namun tidak dapat dihindari terdapat permasalahan-permasalahan yang mengikutinya, diantaranya yaitu kesiapan sumber daya manusia yang mampu melaksanakan proses penyesuaian dan stabilisasi sistem keuangan yang berbeda-beda terutama dengan diberlakukannya Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual mulai tahun 2015.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2020 ini disusun untuk memberikan informasi lebih komprehensif dan informatif untuk menerjemahkan poin-poin dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Neraca pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, semoga dapat bermanfaat untuk pengguna Laporan Keuangan sebagai salah satu bahan pertimbangan pengambilan keputusan/kebijakan dan sebagai alat ukur kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara keseluruhan serta sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun-tahun berikutnya.

Semoga Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang selalu meridhoi setiap langkah kita bersama dan senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya demi kepentingan Bangsa, Negara serta Daerah.

Kandangan, Mei 2021  
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,  
  
ACHMAD FIKRY